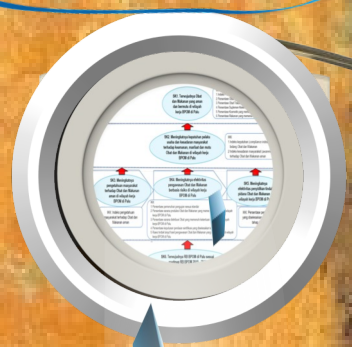
BADAN POM RI

# Laporan Kinerja

## Balai POM di Palu

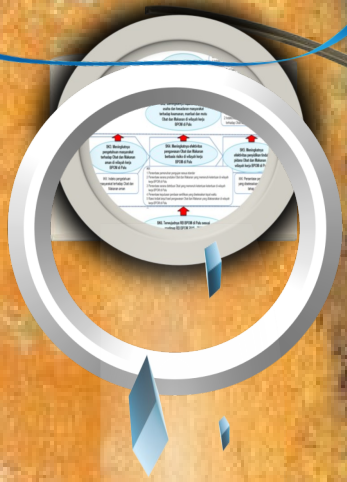
## 2019



# Laporan Kinerja

## Balai POM di Palu

## 2019



# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2019 dapat diselesaikan, sesuai Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan dikeluarkannya Inpres ini pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tupoksi serta misi organisasi.

Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 merupakan kegiatan tahun terakhir dikaitkan dengan implementasi Rencana Strategis Balai POM di Palu periode 2015-2019 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Balai POM di Palu dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Pada triwulan I tahun 2019 telah dilakukan revisi dokumen Renstra Balai POM di Palu tahun 2015-2019. Penyusunan Dokumen Revisi Renstra ini mengacu pada Rencana Strategis BPOM Tahun 2015-2019 dan pedoman penyusunan dan *review* rencana strategis tahun 2015-2019 di lingkungan BPOM serta dengan memperhatikan adanya perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pencapaian sasaran kegiatan di tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2015-2019 ini menjadi sangat penting untuk melihat gambaran sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dengan membandingkan capaian kinerja selama periode Renstra 2015-2019 dapat dilihat pola data / tren capaian yang semakin meningkat, tetap, atau menurun.

Selama tahun 2019, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam dokumen revisi rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Balai POM di Palu untuk tahun ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2019. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* terkait. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Balai POM di Palu.

Rabu, 19 Februari 2020
Kepala Balai POM di Palu,

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.
NIP 19800114 200501 1 001


BADAN POM RI

**BALAI POM DI PALU**

CONTACT

PHONE:
0451-428738;
0451-423088
WA 08114538855

EMAIL
ulpk_palu@yahoo.com

# DAFTAR ISI




- Kata Pengantar i
- Daftar Isi ii
- Daftar Tabel iii
- Daftar Gambar vi
- Daftar Lampiran ix
- Ringkasan Eksekutif x
- *Highlight / Milestone* xii

**I. PENDAHULUAN**

1.1 Gambaran Umum Balai POM di Palu 1
1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Palu 19

**II. PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Rencana Strategis 2015-2019 21
2.2 Perencanaan Kinerja 2019 34
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator 36

**III. AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Capaian Kinerja Balai POM di Palu 39
A.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 41
A.2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2 70
A.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3 81
A.4 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4 87
A.5 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5 110
A.6 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6 116
3.2 Realisasi Anggaran 129
3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan 135

**IV. PENUTUP**

4.1 Simpulan 139
4.2 Saran 144

Lampiran 147

# daftar TABEL


1. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2019 3
2. Tanah dan gedung / bangunan Balai Pom DI Palu 6
3. Cakupan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan Obat dan Makanan Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai 10
4. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu 23
5. Definisi operasional indikator kinerja utama Balai POM di Palu tahun 2019 28
6. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2019 35
7. Pagu anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu tahun 2019 36
8. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu tahun 2019 39
9. Capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu tahun 2019 41
10. Capaian indikator kinerja 'Indeks POM' tahun 2019 terhadap target 2019 43
11. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks POM' tahun 2018-2019 46
12. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks POM' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis dan nasional tahun 2019 47
13. Capaian indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019 48
14. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019 51
15. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 51
16. Capaian indikator kinerja 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019 53
17. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019 55
18. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 55
19. Capaian indikator kinerja 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019 57
20. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019 59
21. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 60
22. Capaian indikator kinerja 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019 61
23. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2015-2019 63
24. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Kosmetik yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 64
25. Capaian indikator kinerja 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019 66
26. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019 68

27. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Makanan yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 68
28. Capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Balai POM di Palu tahun 2019 70
29. Capaian indikator kinerja 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' tahun 2019 terhadap target 2019 71
30. Kategori Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (*Compliance Index*) 71
31. Indeks kepatuhan pelaku usaha skala nasional tahun 2019 72
32. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' tahun 2018-2019 73
33. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara/sejenis dan nasional tahun 2019 74
34. Capaian indikator kinerja 'Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu' tahun 2019 terhadap target 2019 75
35. Kategori Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) 76
36. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara/ sejenis tahun 2019 78
37. Capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Balai POM di Palu Tahun 2019 81
38. Capaian indikator kinerja 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2019 terhadap target 2019 82
39. Kategori ukuran Indeks pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan 83
40. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2018-2019 84
41. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 85
42. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu tahun 2019 87
43. Capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' tahun 2019 terhadap target 2019 88
44. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' tahun 2018-2019 90
45. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 91
46. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2019 terhadap target 2019 93
47. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2018-2019 95
48. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 96
49. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2019 terhadap target 2019 97

50. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2018-2019 99
51. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 100
52. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tahun 2019 terhadap target 2019 101
53. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tahun 2018-2019 103
54. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 104
55. Capaian indikator kinerja 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan' tahun 2019 terhadap target 2019 105
56. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan' tahun 2018-2019 107
57. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 108
58. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu Tahun 2019 110
59. Capaian indikator kinerja 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' tahun 2019 terhadap target 2019 111
60. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2018-2019 113
61. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 114
62. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu tahun 2019 116
63. Capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2019 terhadap target 2019 117
64. Kategori penilaian SAKIP 118
65. Hasil Evaluasi Komponen SAKIP Balai POM di Palu tahun 2019 119
66. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2015-2019 124
67. Hasil Evaluasi Komponen SAKIP per komponen Balai POM di Palu tahun 2018-2019 124
68. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dan nasional tahun 2019 125
69. Rincian anggaran dan realisasi belanja Balai POM di Palu tahun anggaran 2019 129
70. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2019 133
71. Efisiensi kegiatan per sasaran kegiatan Balai POM di Palu tahun 2019 136

# daftar GAMBAR


1. Grafik Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2019 4
2. Sarana komunikasi Balai POM di Palu 6
3. Peta administrasi Provinsi Sulawesi Tengah 9
4. Struktur organisasi Balai POM di Palu 19
5. Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Banggai 20
6. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi BPOM 21
7. Peta strategi BSC Level II Balai POM di Palu 22
8. Kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran 38
9. Grafik nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu tahun 2019 40
10. Grafik capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu tahun 2019 41
11. Grafik capaian indikator kinerja 'Indeks POM' tahun 2019 terhadap target 2019 43
12. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks POM tahun 2018-2019 46
13. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Indeks POM' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis dan nasional tahun 2019 47
14. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019 48
15. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019 51
16. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat'Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 52
17. Grafik Capaian indikator kinerja 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019 53
18. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019 55
19. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 56
20. Grafik capaian indikator kinerja 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019 57
21. Grafik Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019 59
22. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 60
23. Grafik Capaian indikator kinerja 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019 61
24. Grafik Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2015-2019 64
25. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Kosmetik yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 65

26. Grafik Capaian indikator kinerja 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019 66
27. Grafik Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019 68
28. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Makanan yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 69
29. Grafik capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Balai POM di Palu tahun 2019 70
30. Grafik Capaian indikator kinerja 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' tahun 2019 terhadap target 2019 71
31. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' tahun 2018-2019 73
32. Grafik perbandingan capaian indikator 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis dan nasional tahun 2019 74
33. Grafik Capaian indikator kinerja 'Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2019 terhadap target 2019 76
34. Grafik perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks Kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 79
35. Grafik Indeks Kesadaran masyarakat (*awareness index*) skala nasional tahun 2019 80
36. Capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Balai POM di Palu tahun 2019 81
37. Grafik capaian indicator kinerja 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2019 terhadap target 2019 82
38. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2018-2019 84
39. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 85
40. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' skala nasional tahun 2019 86
41. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu tahun 2019 88
42. Grafik capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' tahun 2019 terhadap target 2019 89
43. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' tahun 2018-2019 91
44. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 92
45. Grafik capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2019 terhadap target 2019 93
46. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2018-2019 95
47. Grafik perbandingan capaian indikator 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' Balai POM di Palu thd Balai POM yang setara/sejenis tahun 2019 96

48. Grafik capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2019 terhadap target 2019 97
49. Grafik Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2018-2019 99
50. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 100
51. Grafik capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tahun 2019 terhadap target 2019 102
52. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tahun 2018-2019 103
53. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 104
54. Grafik capaian indikator kinerja 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan' tahun 2019 terhadap target 2019 106
55. Grafik Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan' tahun 2018-2019 108
56. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 109
57. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu tahun 2019 110
58. Grafik capaian indikator kinerja 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' tahun 2019 terhadap target 2019 111
59. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' tahun 2018-2019 114
60. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019 115
61. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu tahun 2019 117
62. Grafik capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2019 terhadap target 2019 118
63. Grafik Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2015-2019 124
64. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis dan nasional tahun 2019 126
65. Grafik persentase serapan anggaran Balai POM di Palu tahun 2015-2019 129
66. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai POM di Palu tahun 2019 131
67. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Balai POM di Palu tahun 2019 132
68. Grafik realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2019 133
69. Grafik efisiensi kegiatan per sasaran kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2019 136

# daftar LAMPIRAN


1. Ikhtisar Rencana Strategis (Revisi) Balai POM di Palu tahun 2015-2019 147
2. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu tahun 2015-2019 149
3. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2019 150
4. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2019 151
5. Pengukuran Kinerja Balai POM di Palu tahun 2019 152
6. Pengukuran Kinerja Balai POM di Palu tahun 2018-2019 154
7. Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai POM di Palu tahun 2019 156
8. Pengukuran Kinerja Kegiatan per Indikator Kinerja Balai POM di Palu tahun 2019 157
9. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Palu tahun 2019 158
10. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara atau sejenis tahun 2019 159
11. Perbandingan Pengukuran Kinerja (Nilai Pencapaian Sasaran) Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara atau sejenis tahun 2019 161
12. Perbandingan Nilai AKIP Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara atau sejenis tahun 2019 162
13. Keputusan Kepala Balai POM di Palu tentang Revisi Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2015-2019 163
14. Matriks kinerja dan pendanaan revisi Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2015-2019
15. Keputusan Kepala Balai POM di Palu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 2015-2019
16. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2019
17. Perjanjian Kinerja dan RAPK Balai POM di Palu tahun 2019 - Jan
18. Perjanjian Kinerja dan RAPK Balai POM di Palu tahun 2019 - Mar
19. Contoh Perjanjian Kinerja Eselon IV Balai POM di Palu tahun 2019
20. Matriks capaian RAPK Balai POM di Palu tahun 2019
21. Data dukung capaian RAPK Balai POM di Palu tahun 2019
22. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan BPOM tahun 2019
23. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan tahun 2019
24. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman tahun 2019
25. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman tahun 2019

# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2019 memuat informasi tentang Ikhtisar Revisi Rencana Strategis 2015-2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Pengukuran Kinerja selama tahun 2019, Pengukuran Kinerja Kegiatan selama tahun 2019, Pengukuran efisiensi kegiatan tahun 2019 serta Perbandingan capaian kinerja dengan Balai POM yang setara / sejenis dan nasional . Terdapat enam sasaran kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Palu selama tahun 2019. Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui enam belas indikator kinerja kegiatan yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu. Capaian kinerja pada laporan ini merupakan gabungan dari capaian kinerja Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai.

Pada Laporan Kinerja Balai POM di Palu tahun 2019 terdapat perubahan kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran, yang semula 5 kategori menjadi 6 kategori yaitu tidak dapat disimpulkan, sangat baik, baik, kurang, dan sangat kurang. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, terdapat 3 sasaran kegiatan yang mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Sangat Baik' yaitu sasaran kegiatan 2 (Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM), sasaran kegiatan 3 (Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM) dan sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM). Selebihnya 3 sasaran kegiatan yang lain mencapai NPS 'Baik' yaitu sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM), sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM) dan sasaran kegiatan 6 (Terwujudnya RB Balai POM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019).

Pada sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM), terdapat 2 dari 6 indikator kinerja kegiatan (IKK) yang memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik', yaitu Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat dan Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat. Selebihnya mencapai nilai capaian kinerja 'Baik'. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Palu telah berhasil dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu. Pada sasaran kegiatan 2 (Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM), 1 indikator kinerja kegiatan bernilai 'Sangat Baik' dan 1 IKK lagi bernilai 'Baik'.

Indikator satu-satunya pada sasaran kegiatan 3 (Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu) yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman memperoleh capaian kinerja pada kategori 'Sangat Baik'. Sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu) terdiri dari 5 IKK dimana nilai capaian kinerjanya bervariasi yaitu 2 IKK bernilai sangat baik (Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat

waktu dan Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu); 2 IKK bernilai 'Baik'(Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dan Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu); dan 1 IKK bernilai 'Cukup' (Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu).

Nilai 'IKK Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' pada sasaran kegiatan 5 bernilai 'Sangat Baik', sehingga NPS sasaran kegiatan 5 juga bernilai 'Sangat Baik'. Sasaran kegiatan 6 (Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019) mencapai NPS 'Baik'. Indikator satu-satunya pada sasaran kegiatan 6 yaitu Nilai AKIP Balai POM di Palu juga bernilai 'Baik'.

Pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan. Anggaran Balai POM di Palu pada tahun 2019 sebesar Rp28.845.331.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Kemudian mengalami revisi anggaran sebanyak tujuh kali sehingga anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp31.790.591.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Dari total anggaran, terealisasikan sebesar Rp31.204.680.418,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah) atau 98,16%.

Palu, 13 Februari 2020
Kepala Balai POM di Palu,

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
PALU

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.
NIP 19850114 200501 1 001

# Highlight / Milestones

## Sertifikat ISO 9001:2015

Balai POM di Palu berhasil mempertahankan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan diperolehnya Resertifikasi ISO 9001:2015




## 2. Sertifikat ISO/IEC 17025 : 2017

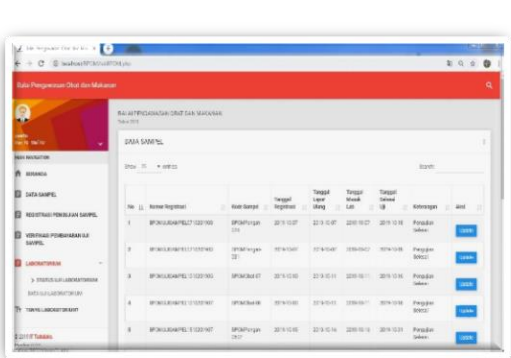
Balai POM di Palu berhasil menunjukkan kompetensinya sebagai Laboratorium Penguji dengan menerapkan secara konsisten SNI IS/IEC 17025:2017.




## 3. Aplikasi Sipace Lagi Sendiri

**Sistem Pelayanan Cepat Layanan Digital Secara Mandiri (SIPACE LAGI SENDIRI)**

Aplikasi yang bisa memberi kemudahan kepada *cu*stomer/*stakeholder* untuk memperoleh informasi terkait pengujian sampel eksternal dengan cara mengakses sendiri, melalui penggunaan aplikasi layanan digital yang tersedia pada ruang layanan publik Balai POM di Palu. Selain itu juga memudahkan penerima sampel melakukan pengelolaan administrasi sampel secara mandiri tanpa melibatkan seksi lain sehingga *customer* dapat memperoleh layanan informasi atau registrasi pengujian sampel secara cepat.



# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 GAMBARAN UMUM BALAI POM DI PALU

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah. Balai POM di Palu diklasifikasikan sebagai Balai POM Tipe A. Balai POM di Palu dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugasnya, secara teknis Balai POM di Palu dibina oleh Deputi dan secara administrasif dibina oleh Sekretaris Utama.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam menjalankan tugasnya, Balai POM di Palu menyelenggarakan fungsi :

*Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah*

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu;
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja Balai POM di Palu;
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu;

9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, telah dibentuk 40 Loka POM yang tersebar di kabupaten / kota di seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Loka POM di Kabupaten Banggai dengan wilayah kerjanya yaitu Kabupaten Banggai, Tojo Una-Una, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian kimia dan mikrobiologi, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja Loka POM, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar-UPT BPOM, Kepala Badan menunjuk Balai POM di Palu sebagai koordinator Loka POM di Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018.

## ASPEK STRATEGIS BALAI POM DI PALU

Era globalisasi yang diikuti berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membawa perubahan besar pada industri farmasi dan makanan. Dengan adanya temuan baru maka skala produksi berkembang cepat, baik dari segi jumlah dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat / kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, pengawasan oleh Balai POM di Palu sebagai lini kedua harus dilakukan, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu / keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan tetap dilakukan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan dan kosmetik.

Peran Balai POM di Palu sebagai bagian integral dari Badan POM RI dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat / konsumen dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

## ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

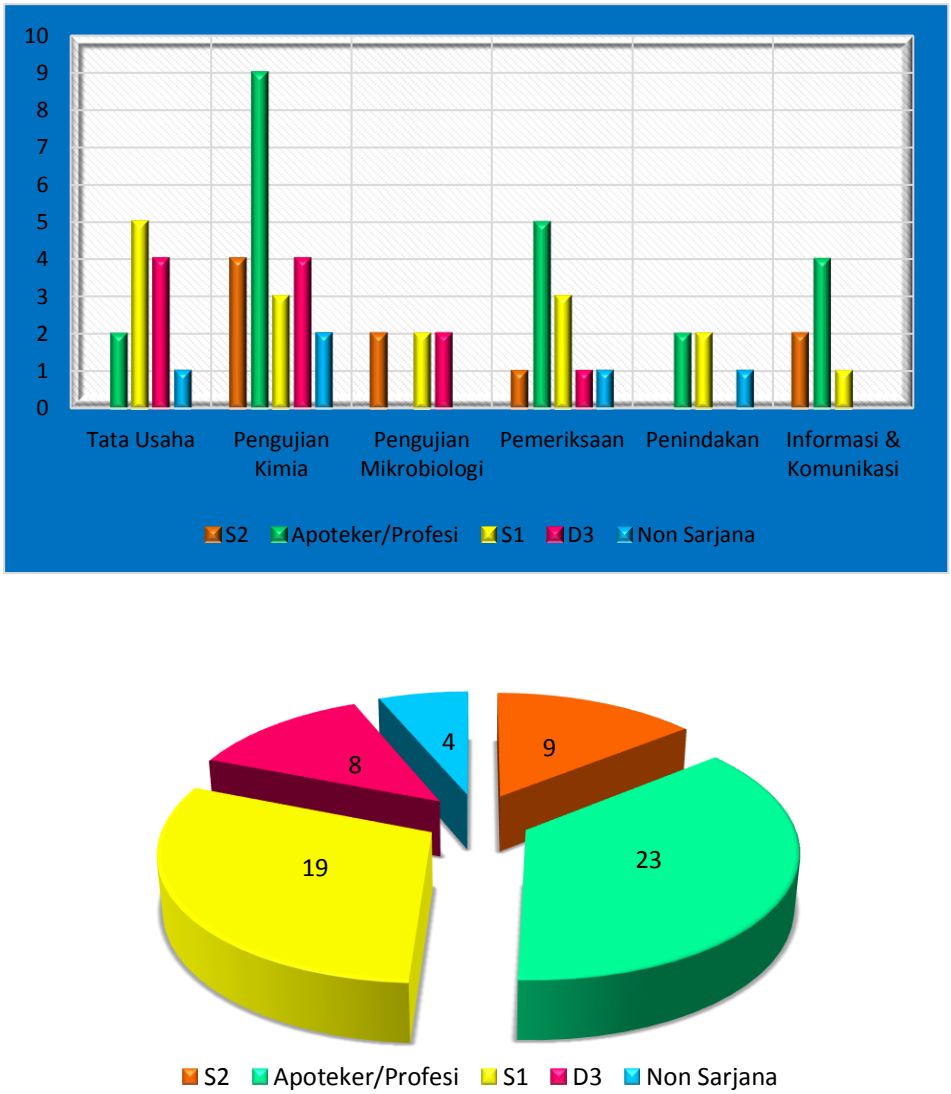
### *Internal*

#### Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2019, Jumlah pegawai di Balai POM di Palu sebanyak 63 orang (43 Perempuan dan 20 Laki-laki) terdiri dari 9 orang berpendidikan S2, 23 orang Apoteker, 19 orang Sarjana, 8 orang D3, 4 orang SMF. Balai POM di Palu juga memiliki Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 28 orang terdiri dari 4 orang Satpam, 4 orang tenaga *cleaning service*, 4 orang pramulab, 5 orang analis Laboratorium, 2 orang supir, 8 orang tenaga administrasi, 1 orang tenaga teknisi. Pegawai Loka POM di Kabupaten Banggai berjumlah 17 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Loka (Pendidikan S2) dan 16 orang menduduki jabatan fungsional (4 Apoteker, 9 orang Sarjana, 2 orang D3, 1 orang SMF). Loka POM di Kab. Banggai juga memiliki Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 4 orang terdiri dari 3 orang tenaga administrasi/teknis dan 1 orang satpam. Adapun profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel berikut :

**Tabel 1. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2019**

| No | Seksi / Subbagian | S2 | Apoteker/ Profesi | S1 | D3 | NON sarjana | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbagian Tata Usaha | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | **12** |
| 2 | Seksi Pengujian Kimia | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | **22** |
| 3 | Seksi Pengujian Mikrobiologi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | **6** |
| 4 | Seksi Pemeriksaan | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | **11** |
| 5 | Seksi Penindakan | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | **5** |
| 6 | Seksi Informasi dan Komunikasi | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | **7** |
| **TOTAL** | | **9** | **23** | **19** | **8** | **4** | **63** |
| **Persentase (%)** | | **14,28** | **36,51** | **30,16** | **12,70** | **6,35** | **100,00** |




Gambar 1. Grafik profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2019

Pada tahun 2019, Balai POM di Palu belum didukung dengan SDM yang memadai dimana masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 32 orang, dihitung berdasarkan analisis beban kerja dari target yang ditetapkan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Palu harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

BPOM harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah,

adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

## Sarana dan Prasarana

### Alat Laboratorium

Laboratorium Balai POM di Palu adalah laboratorium terakreditasi yang telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2017 dan mendapat sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor LP-580-IDN. Kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berkembang menuntut laboratorium dapat menjamin hasil pengujian yang valid dan dapat dipercaya. Untuk itu, maka perlu penguatan kapasitas laboratorium, salah satunya melalui pengadaan alat laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium.

Sampai tahun 2019, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 tentang standar minimum peralatan laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, persentase pemenuhan alat laboratorium Balai POM di Palu sebesar 55% dari standar minimum peralatan laboratorium yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya 51%, persentase pemenuhan alat laboratorium hanya mengalami peningkatan sebesar 4% Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa alat dalam standar minimal peralatan laboratorium, belum menjadi prioritas pengadaan alat boratorium tahun 2019 berkaitan dengan optimalisasi pengunaan alat yang sudah ada dan prioritas penggunaan anggaran untuk pengadaan penunjang laboratorium.

### Tanah dan Bangunan Kantor

Balai POM di Palu menempati tanah eks Ditjen POM Depkes berlokasi di Jalan Undata Nomor 3 Palu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Pada tahun 2017 tanah tersebut sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q Badan POM dengan luas tanah 4361m$^2$ dan luas bangunan 2483m$^2$. dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Disamping itu, terdapat pula rumah dinas 1 unit dengan luas

tanah 283m$^2$ dan luas bangunan 70m$^2$ beralamat di Jl. Angkasa I No. 2 Palu dengan status rumah hak pakai.

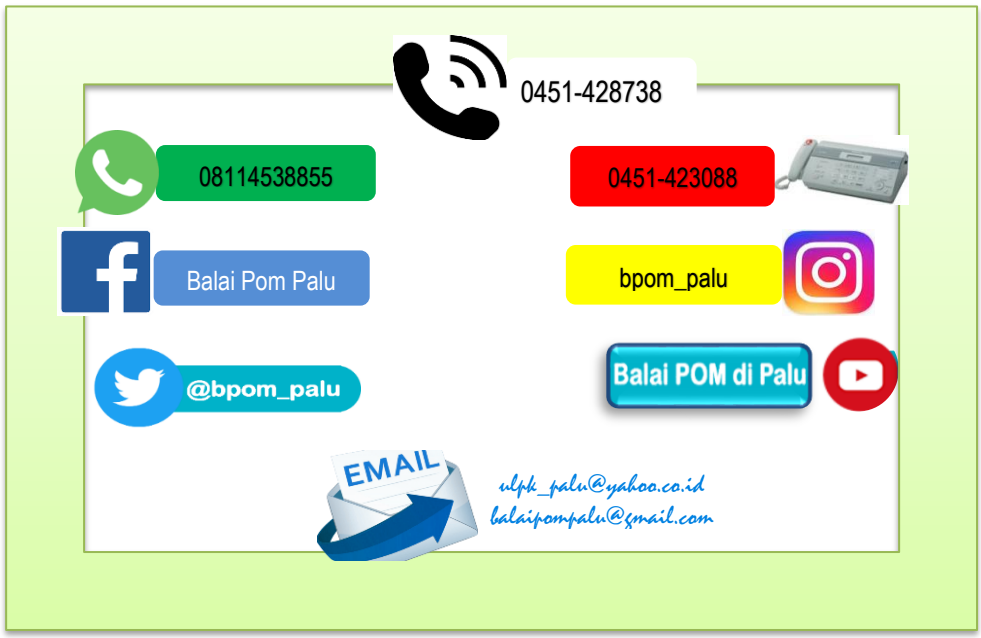
**Tabel 2. Tanah dan gedung / bangunan Balai POM di Palu**

| Sub-Sub Kelompok | Lokasi Tanah | Luas Tanah (m2) | Luas Bangunan (m2) |
|---|---|---|---|
| Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II | Jl. Angkasa I No. 2 Palu | 283 | 70 |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Undata No. 3 Palu | 4361 | 2483 |
| **Jumlah** | | **4.644** | **2.553** |

## Sarana penerangan, sarana komunikasi dan sumber air

**Sarana penerangan** : Listrik dari PLN daya 209,5 KVA
Generator daya 100 KVA / 80 KW

**Sarana Komunikasi** :




Gambar 2. Sarana komunikasi Balai POM di Palu

Lokal komunikasi : PABX dengan 22 saluran

Alat Video Conference : 1 set yang terhubung dengan Badan POM dan 32 Balai/Balai Besar POM di seluruh Indonesia

Tersedia *Local Area Network* (LAN) yang dihubungkan dengan *Virtual Private Network* (VPN) yang berbasis satelit di Badan POM dan WiFi yang digunakan untuk pengiriman data SIPT serta layanan internet

**Sumber air :**

Sumber air yang digunakan adalah air PDAM dan Air sumur dalam dengan pengolahan sederhana. Air untuk keperluan laboratorium menggunakan alat *Purified Water* yang berada di masing-masing laboratorium.

### Sarana Transportasi

Pada tahun 2019 Balai POM di Palu memiliki 8 unit kendaraan roda 4, yang terdiri dari 4 unit mobil laboratorium keliling yang digunakan untuk mendukung tupoksi (kegiatan Germas, *Food Security* dan pengujian setempat), 1 kendaraan dinas jabatan, dan 3 lainnya untuk operasional kantor serta memiliki 2 unit kendaraan roda 2.

### Anggaran

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan Balai POM di Palu keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

| | |
|---|---|
| Total pagu awal anggaran tahun 2019 | : Rp28.845.331.000,00 |
| Total pagu revisi anggaran tahun 2019 | : Rp31.790.591.000,00 |
| Realisasi anggaran neto | : Rp31.204.680.418,00 |

Berdasarkan jenis belanja, anggaran 2019 terdiri dari anggaran Rupiah Murni Rp30.940.591.000,00 dan anggaran PNBP Rp850.000.000,00.

Persentase realisasi anggaran neto tahun 2019 sebesar 98,16% meningkat bila dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar 91,71%.

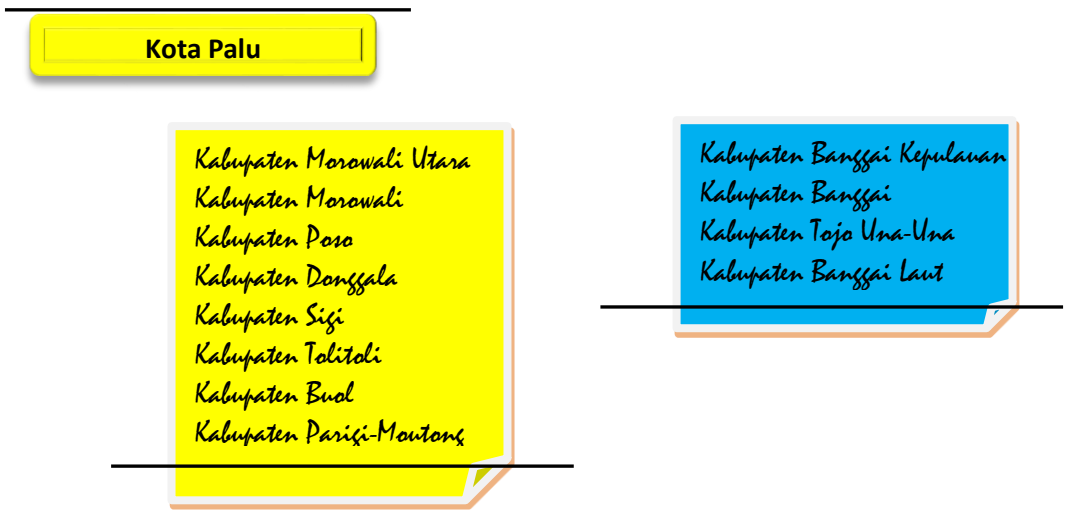
## Eksternal

### Kondisi Geografis

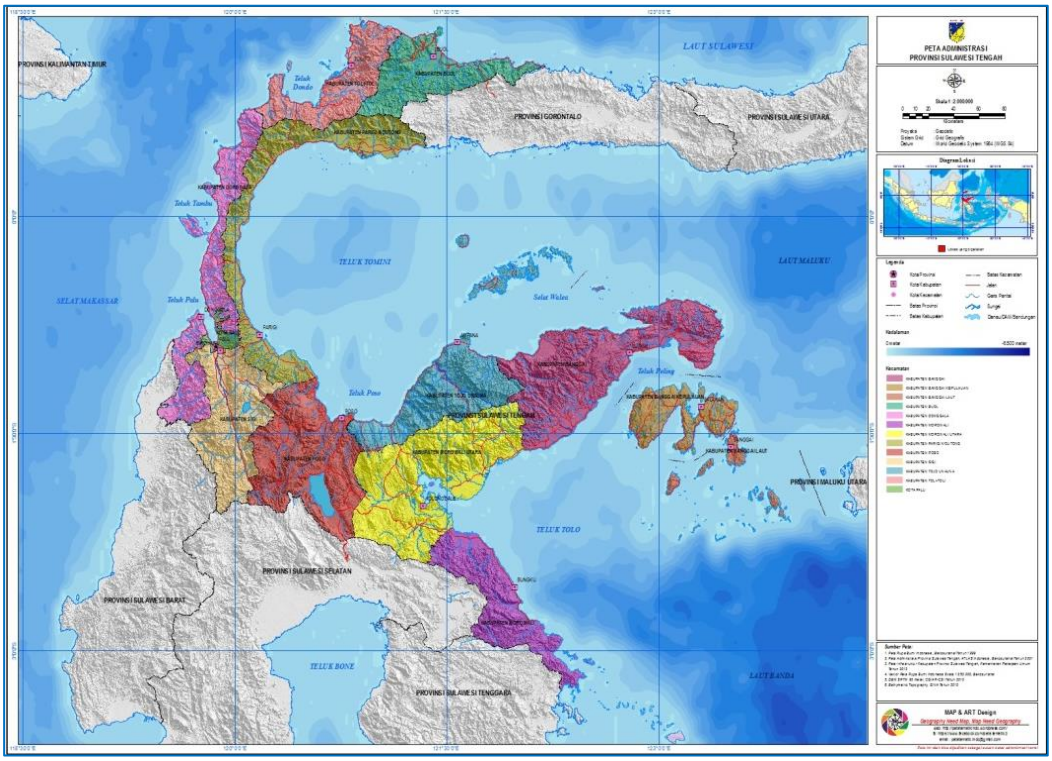
Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah kerja 61.841,29 km$^2$ yang terdiri dari 12 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota dengan 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa. Pola transportasi yang digunakan untuk menjangkau wilayah kerja dapat melalui darat 60%, melalui udara 30% dan melalui laut 10% dengan lama perjalanan ke wilayah kerja antara 1 jam sampai dengan 2 hari dan waktu yang dibutuhkan untuk berada di satu wilayah antara 1 sampai dengan 5 hari. Kabupaten terdekat dari kota Palu yang dapat ditempuh melalui jalur darat dalam waktu 1 jam

yaitu kabupaten Sigi dengan jarak 30 km dari kota Palu sedangkan kabupaten terjauh dari kota Palu yang dapat ditempuh melalui jalur darat, udara dan laut dalam waktu 2 hari yaitu kabupaten Banggai Laut dengan jarak 607 km +94 mil dari kota Palu. Hingga saat ini sudah terdapat 7 kota/kabupaten di Sulawesi Tengah yang dapat ditempuh melalui jalur udara yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan Balai POM di Palu yaitu Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Ampana, Kabupaten Buol dan Kabupaten Morowali.

Sejak terbentuknya Loka POM di Kabupaten Banggai yang berada di bagian timur Provinsi Sulawesi Tengah yang mulai beroperasi bulan September 2018 dimana wilayah kerjanya mencakup 4 kabupaten yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Tojo Una-Una, maka wilayah kerja Balai POM di Palu menjadi 8 kabupaten (Morowali Utara, Morowali, Poso, Donggala, Sigi, Tolitoli, Buol, Parigi-Moutong) dan 1 kota (Palu). Luas wilayah pengawasan Loka POM Kabupaten Banggai dari 4 kabupaten adalah 31.951,31km$^2$



Berikut merupakan peta administrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang juga merupakan wilayah pengawasan Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai




Sumber :https://petatematikindo.wordpress.com

Gambar 3. Peta administrasi Provinsi Sulawesi Tengah

## Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan Balai POM di Palu meliputi sarana produksi, distribusi dan pelayanan Obat dan Makanan serta pasar-pasar tradisional. Sarana produksi di Sulawesi Tengah terdiri dari industri Pangan MD (termasuk industri minuman beralkohol) dan industri rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah (UTD), Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, maka untuk pengawasan produksi obat dilakukan juga terhadap produk darah. Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 4 UTD dan 7 bank darah Rumah Sakit.

Sarana distribusi Obat dan Makanan di *catchment area* Balai POM di Palu terdiri dari sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Pangan (sarana distribusi Pangan dan sarana pemeriksaan intensifikasi pangan (penjual parcel), serta sarana distribusi Bahan Berbahaya. Sarana pelayanan terdiri dari Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), Rumah Sakit (Rumah Sakit

Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta), Puskesmas, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Apotek, dan Toko Obat Berijin.

**Tabel 3. Cakupan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dan Makanan Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai**

| No. | Jenis Sarana | Balai POM di Palu | Loka POM di Kabupaten Banggai | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Sarana Produksi** | | | | |
| 1 | Pangan - MD | 28 | 4 | 32 |
| 2 | Pangan - IRTP | 743 | 73 | 816 |
| 3 | Unit Transfusi Darah | 3 | 1 | 4 |
| Jumlah | | 774 | 78 | **852** |
| **Sarana Distribusi** | | | | |
| 1 | Obat | 21 | 1 | 22 |
| 2 | Obat Tradisional | 111 | 60 | 171 |
| 3 | Suplemen Kesehatan | 100 | 0 | 100 |
| 4 | Kosmetik | 286 | 75 | 361 |
| 5 | Pangan | 735 | 159 | 894 |
| 6 | Bahan Berbahaya | 3 | 0 | 3 |
| Jumlah | | 1256 | 295 | **1551** |
| **Sarana Pelayanan** | | | | |
| 1 | Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) | 10 | 4 | 14 |
| 2 | Rumah Sakit | 28 | 7 | 35 |
| 3 | Puskesmas | 137 | 58 | 195 |
| 4 | Balai Pengobatan | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Rumah Bersalin / Klinik | 9 | 14 | 23 |
| 6 | Apotek | 471 | 81 | 552 |
| 7 | Toko Obat Berijin | 122 | 55 | 177 |
| Total | | 779 | 219 | **998** |

## ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Palu perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan

kewenangan BPOM. Namun demikian, Balai POM di Palu masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan / fragmentasi kebijakan.

## 2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas Balai POM di Palu sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Palu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan adalah 63 orang pegawai (43 Perempuan dan 20 Laki-laki). Sedangkan jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Banggai adalah 17 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Loka dan 16 orang menduduki jabatan fungsional. Pada tahun 2019, Balai POM di Palu belum didukung dengan SDM yang memadai dimana masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 32 orang, dihitung berdasarkan analisis beban kerja dari target yang ditetapkan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Palu harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

BPOM harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development palnning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

## 3. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Sulawesi Tengah. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah produk obat yang akan beredar di Provinsi Sulawesi Tengah baik jumlah maupun jenisnya. Hal ini akan berimplikasi kepada pengawasan obat yang beredar baik di distributor maupun di sarana-sarana pelayanan pemerintah maupun swasta. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan komposisi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya *demand* Obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan banyak obat yang terdistribusi ke daerah yang menjadi objek pengawasan Balai POM di Palu termasuk Monitoring Eek Samping Obat (MESO). Dari sisi penyediaan (*supply side*) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai POM di Palu harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji, evaluator, maupun inspektur), serta kuantitas SDM yang harus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

### 3. Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait :

a. *Goal* 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan Balai POM di Palu ke depan adalah bagaimana dapat menjamin produk yang beredar di pasaran memenuhi standar gizi, mutu, keamanan, serta KIE kepada masyarakat.

b. *Goal* 3. *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Asumsinya, jaminan kesehatan memastikan masyarakat mendapatkan dan menggunakan hanya obat atau vaksin yang aman, efektif, dan bermutu untuk upaya kesehatan *preventif*, promotif, maupun kuratif, sehinggak kualitas hidup masyarakat meningkat. Kontribusi untuk mencapai kondisi ini adalah ketersediaan Obat yang

aman, berkhasiat dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut, Balai POM di Palu melakukan intensifikasi pengawasan baik pemeriksaan sarana pelayanan di kabupaten maupun pengujian laboratorium.

### 4. Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut berdampak ke daerah termasuk Sulawesi Tengah khususnya di bidang ekonomi, yang menghendaki adanya area perdagangan bebas / *Free Trade Area (*FTA). Masuknya produk akibat perdagangan bebas tersebut merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Tengah telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Perdagangan bebas membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) dan makanan mengandung bahan berbahaya dimana hal ini sangat merugikan masyarakat.

### 5. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Secara teori semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Balai POM di Palu adalah melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.

Data sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 yaitu sarana produksi Obat dan Makanan 852 (32 sarana MD, 816 sarana PIRT,

4 sarana UTD); sarana distribusi Obat dan Makanan 1551; Sarana pelayanan 998, menggambarkan bahwa perlu pengawasan secara serius dan berkesinambungan dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut. Untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat. Mengingat jumlah sarana yang relatif besar dibanding tenaga pengawas Balai POM yang ada, Balai POM di Palu harus mampu melakukan pengawasan dengan strategi khusus agar dapat menjangkau sarana yang kurang berimbang tersebut.

## 6. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Data BPS tahun 2018 menyebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah 61.841,29 $km^2$ dengan jumlah penduduk sebanyak 3.010.440 jiwa. Hal ini berarti, kepadatan rata-rata penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah secara umum pada tahun 2018 adalah 48,68 jiwa/$km^2$.

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami penurunan dimana periode 2000-2010 laju pertumbuhan mencapai 1,95% dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 2,64 juta jiwa, kemudian periode 2010-2015 laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,69% dengan jumlah penduduk mencapai 2,87 jiwa dan untuk periode 2010-2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,67 % dengan jumlah penduduk yang mencapai 2,92 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi periode 2010-2016 terjadi di Kabupaten Morowali Utara sebesar 2,36% sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang terendah terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 0,93%. Laju pertumbuhan penduduk di tiap Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 2.

Kemampuan baca tulis tercermin dari persentase angka melek huruf penduduk. Dari hasil data tahun 2016 tentang persentase melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Buol memiliki persentase melek huruf tertinggi dengan total 100%. Sedangkan persentase melek huruf terendah terdapat di Kabupaten Poso yakni 73,15% (69,75% untuk perempuan dan 76,55% untuk laki-laki).

Rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013-2016 adalah sebesar 15,05%. Rata-rata laju pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Morowali 31,19% dan terendah di Kabupaten Buol sebesar 9,92%.

## 7. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah *(borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terhadap suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti. Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerja sama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Balai POM di Palu dalam pengawasan diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari pemangku kepentingan antara pemerintah daerah (OPD) terkait, masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Palu untuk melaksanakan Norma, Standar, Pedoman / Prosedur Kriteria dengan Pemerintah Daerah terkait Obat dan Makanan. Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2017 memberikan peluang kepada Balai POM di Palu dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan demi perlindungan kepada masyarakat.

## 8. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution* 4.0. Dalam salah satu studinya, *the World Economic Forum* (EF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi. Dengan kata lain, bisa dikatakan pembauran teknologi mampu mengintegrasikan faktor sumber daya manusia, instrumen produksi, serta metode operasional dalam mencapai tujuan. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality,*

*additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan dan kosmetik semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada trend produk dunia kedepan, diantaranya: 1) meningkatnya produk bioteknologi (*monoclonal* antibodi) atau protein terapetik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); 2) pengembangan probiotik sebagai obat penyakit *lifestyle*, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine; blood product* dan sel punca; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut. Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen. Selain membawa dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang mesti dijawab.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif sosial media pada bermacam platform. Dengan tingkat pertumbuhan pengguna sosial media mencapai 23% pada tahun 2018, sebanyak 79% pengguna aktif internet di Indonesia menghabiskan waktu menggunakan internet selama 8-9 jam sehari. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Pengguna intenet yang melakukan pembelian dan jasa layanan sebanyak 40%.

Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2015 menunjukkan kategori Belanja *Online* sudah masuk dalam urutan 10 besar dan berada di posisi ke-4. Pengaduan konsumen terkait Belanja *Online* meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang bahkan tidak masuk 10 besar. Ini dapat dimaknai dengan 2 (dua) hal, yakni tingginya minat masyarakat pada transaksi *online* dan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* sehingga konsumen berada pada posisi lemah.

Dampak *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang dijajakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu

mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan *online* Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut pandang industri manufaktur, kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan efisiensi, produktifitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang akan dihadapi secara realtime. Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi dan mampu memberikan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, organisasi harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan, termasuk Balai POM di Palu dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai unit pengawas, utamanya pengetahuan teknologi laboratorium pengujian Balai POM di Palu selaku “diagnosis pasti” adanya risiko yang beredar di masyarakat.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri Obat dan Makanan untuk berproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas sampai ke daerah terpencil sekalipun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok-pelosoknya. Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu *potential problem,* karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, antisipasi pengawasan Obat dan Makanan juga harus sama cepatnya.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Palu untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan

masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat.

### 9. Jejaring Kerja

Balai POM di Palu menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player.* Untuk itu, Balai POM di Palu membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (OPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Palu maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring yang kerja sudah dimiliki Balai POM di Palu yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional / Daerah, Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah.

### 10. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai POM di Palu melaksanakan agenda reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010 s.d 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM di Palu merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Enam area perubahan reformasi birokrasi terdiri dari Manajemen perubahan, Penguatan sistem pengawasan, Penguatan akuntabilitas kinerja, Penguatan tata laksana, Penguatan sistem manajemen SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik

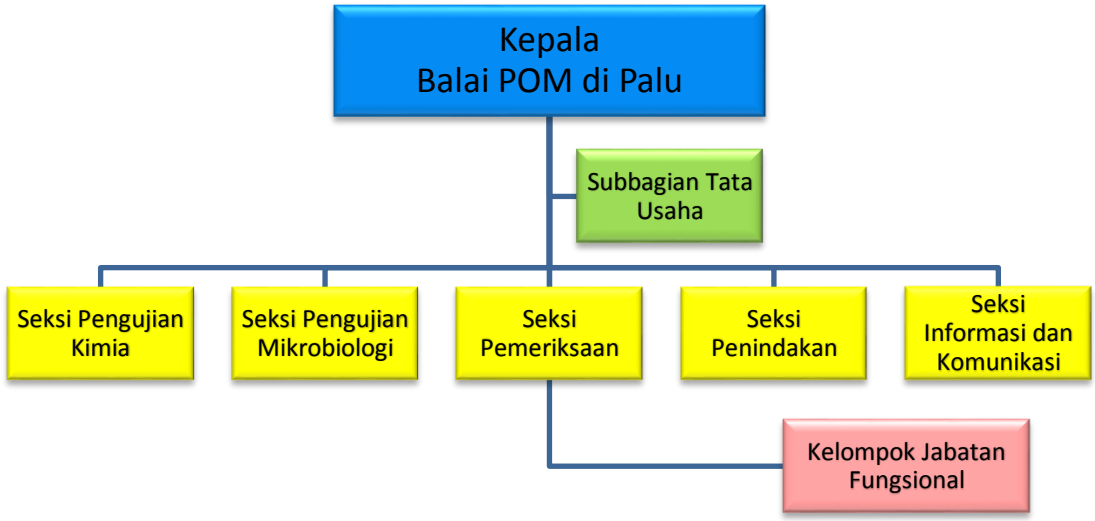
11. Berlakunya **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

12. **Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016** tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.

13. **Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017** tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

## 1.2 STRUKTUR ORGANISASI BALAI POM DI PALU

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar / Balai POM / Loka POM disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.




Gambar 4. Struktur organisasi Balai POM di Palu

Susunan Organisasi Balai POM di Palu, terdiri dari 5 Seksi dan 1 Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Seksi dan Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### *Seksi Pengujian Kimia*

Melakukan pengujian kimia rutin dan pengujian kimia dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

### *Seksi Pengujian Mikrobiologi*

Melakukan pengujian mikrobiologi rutin dan pengujian mikrobiologi dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

### Seksi Pemeriksaan

Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

### Seksi Penindakan

Melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

### Seksi Informasi dan Komunikasi

Melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

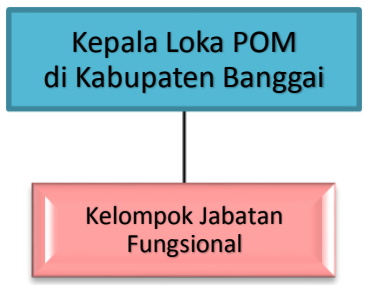
### Subbagian Tata Usaha

Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

### Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Banggai terdiri atas kepala loka dan jabatan fungsional.

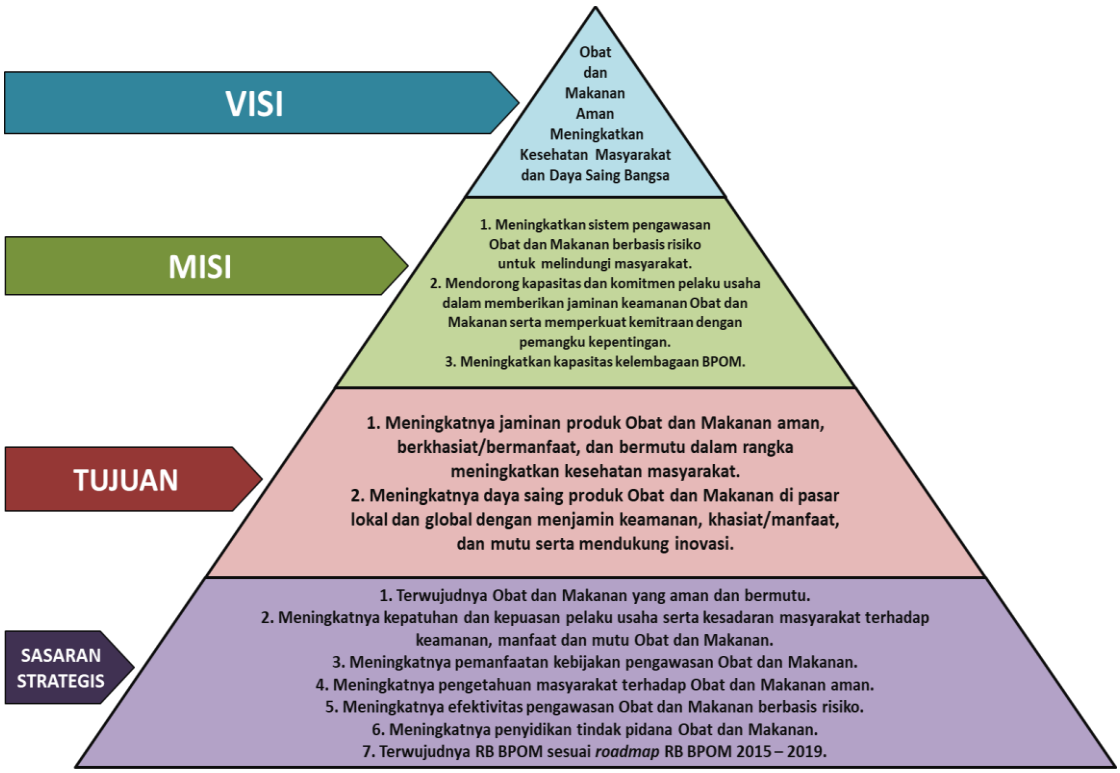



Gambar 5. Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Banggai

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

## 2.1 RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI PALU 2015-2019

Rencana strategis Balai POM di Palu disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang mengacu pada Renstra Badan POM Tahun 2015-2019 dengan mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan strategis ke depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015 s.d 2019 adalah sebagai berikut :

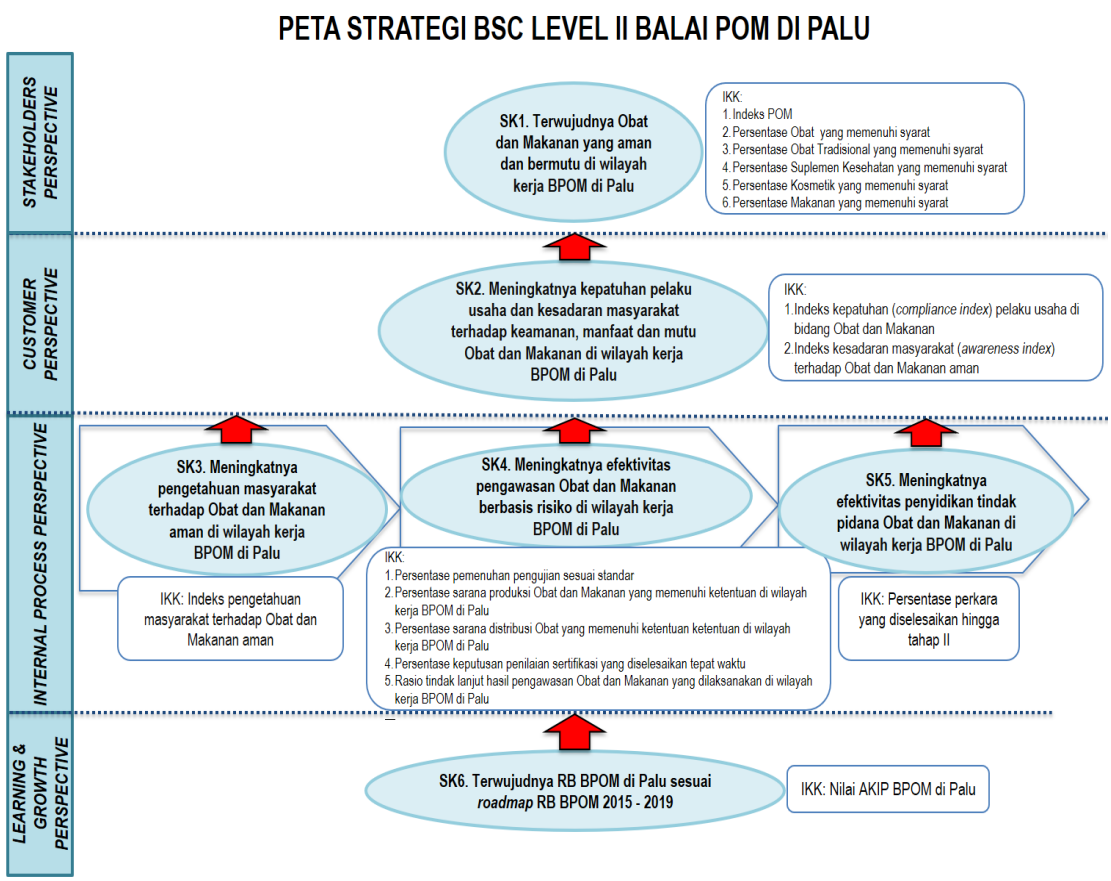



Gambar 6. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPOM

Pada tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Strategis Balai POM di Palu periode 2015-2019 dilakukan revisi dokumen Renstra. Penyusunan Dokumen Revisi Renstra Balai POM di Palu mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 serta pedoman penyusunan dan *reviu* rencana strategis tahun 2015-2019 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dengan memperhatikan adanya perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran strategis pada dokumen Renstra Balai POM di Palu 2015-2019 disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Palu dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Balai POM di Palu dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level 2 Balai POM berikut :




Gambar 7. Peta strategi BSC Level II Balai POM di Palu

Semua Indikator Kinerja Kegiatan pada Peta Strategi tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

**Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu**

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA |
|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks POM |
| | | Persentase Obat yang memenuhi syarat |
| | | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan |
| | | Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu |
| | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II |
| 6 | Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai *roadmap* RB BPOM 2015 - 2019 | Nilai AKIP Balai POM di Palu |

**1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu**

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Palu tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk substandar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Palu merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari :

1. Penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
2. Pengawasan setelah beredar (*post-market control)* untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan *sampling* produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
3. Pengujian laboratorium. Produk yang di*sampling* berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
4. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

a. Indeks POM hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 71%.
b. Persentase Obat yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 94%.

c. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 80%.
d. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 87%.
e. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 80%.
f. Persentase Makanan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 71%.

**2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 61;
b. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 66.

**3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu.**

Sesuai dengan 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BPOM perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BPOM perlu secara aktif meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan memanfaatkan berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) : Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 61.

**4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Menghadapi tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan belum didukung oleh sumber daya yang memadai, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat

lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 100%;
b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 42%;
c. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 78%;
d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 90%;
e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 53,75%.

**5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu.**

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Palu melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 50%.

**6. Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK,

dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Nilai AKIP Balai POM di Palu tahun 2019 ditargetkan 81.

**Tabel 5. Definisi operasional indikator kinerja utama Balai POM di Palu tahun 2019**

| Indikator Kinerja Kegiatan | Definisi Operasional |
|---|---|
| Indeks POM | a. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.<br>b. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analitycal hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1. |
| Persentase Obat yang memenuhi syarat | a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) termasuk rokok |

| Indikator Kinerja Kegiatan | Definisi Operasional |
|---|---|
| | b. *Sampling* (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.<br>c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:<br>1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu<br>2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak<br>3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau<br>4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan<br>d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.<br>e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS |
| Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.<br>b. *Sampling* (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.<br>c. Kriteria Obat Tradisioanal Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:<br>1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu<br>2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak<br>3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau<br>4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan<br>d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.<br>e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. |
| Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | a. *Sampling* (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.<br>b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:<br>1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu<br>2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak<br>3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau<br>4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan<br>c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.<br>d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. |
| Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | a. *Sampling* (kriteria dan target) dilakukan terhadap Kosmetik beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.<br>b. Kriteria Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:<br>1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu<br>2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak<br>3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau<br>4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan<br>c. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.<br>d. Jika ditemukan sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. |

| Indikator Kinerja Kegiatan | Definisi Operasional |
|---|---|
| Persentase Makanan yang memenuhi syarat | a. *Sampling* (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.<br>b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:<br>1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu<br>2) Produk kedaluwarsa<br>3) Produk rusak<br>4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian<br>c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.<br>d. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS. |
| Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan.<br>b. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan Obat dan Makanan<br>c. Variabel penyusun indeks antara lain:<br>1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)<br>2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)<br>3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekusor yang memenuhi ketentuan<br>d. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analitycal hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1 |
| Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:<br>1) Pengetahuan (*knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.<br>2) Sikap (*attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap BPOM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.<br>3) Perilaku (*practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM. |
| Indeks pengetahuan masyarakat terhadap | a. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil surveit erhadadp pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM. |

| Indikator Kinerja Kegiatan | Definisi Operasional |
|---|---|
| Obat dan Makanan aman | b. Pengetahuan (Knowledege) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.<br>c. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n |
| Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | a. Standar adalah Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan<br>b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kriitis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji |
| Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | a. Sarana Produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit).<br>1) Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan<br>2) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal<br><br>b. Sarana Produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT<br>1) Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.<br>2) Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major<br><br>c. Sarana Produksi Kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B<br>1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major<br><br>d. Sarana Produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan<br>1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.<br><br>e. Sarana Produksi Pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM<br>1) Tidak Memenuhi Ketentuan untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D<br>2) Tidak Memenuhi Ketentuan untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4 |
| Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin)<br>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat |

| Indikator Kinerja Kegiatan | Definisi Operasional |
|---|---|
| | c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus<br>d. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku |
| Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Palu | a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:<br>1) Surat hasil pemeriksaan atau<br>2) Surat rekomendasi atau<br>3) Surat pemberhentian proses penilaian<br>sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan<br>c. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian |
| Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | a. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat.<br>b. Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan ( kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.<br>c. Tindak lanjut terdiri dari:<br>1) Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/BPOM<br>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai<br>- Penyebut: Jumah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha<br>2) Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/BPOM<br>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari instansi terkait terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai<br>- Penyebut: Jumah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada instansi terkait<br>Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan Ilegal secara *online* oleh Dit. Pengamanan |
| Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus<br>b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti |
| Nilai AKIP Balai POM di Palu | Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM. |

## Sasaran Kegiatan Loka POM di Kabupaten Banggai

Loka POM di Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian kimia dan mikrobiologi, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja Loka POM, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, dan Banggai Laut.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai POM di Palu merupakan kooordinator atas Loka POM di Kabupaten Banggai.

## 2.2 PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN BALAI POM DI PALU TAHUN 2019

### 2.2.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pada awal tahun 2018, Balai POM di Palu telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2019 yang memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Balai POM di Palu T.A 2019. Namun dengan adanya perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dilakukan Revisi Dokumen Renstra Balai POM di Palu 2015-2019 dengan tetap mengacu pada Revisi Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 dan pedoman penyusunan dan reviu rencana strategis tahun 2015-2019 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Setelah dilakukan Revisi Renstra Balai POM di Palu 2015-2019, maka dilakukan lagi penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2019.

Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 6 sasaran kegiatan dengan 16 indikator kinerja kegiatan seperti yang tercantum pada Peta Strategi BSC Level II Balai POM di Palu. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2019 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 16 pada Laporan Kinerja ini.

### 2.2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Palu. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Pada awal tahun 2019 telah disusun Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2019. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2019 memuat 6 sasaran kegiatan dengan 16 indikator kinerja kegiatan seperti yang tercantum pada Peta Strategi BSC Level II Balai POM di Palu. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2019 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 17 dan 18 pada Laporan Kinerja ini.

### Tabel 6. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2019

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks POM | 71,00 |
| | | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 94,00 |
| | | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | 80,00 |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 87,00 |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 80,00 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 71,00 |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 61,00 |
| | | Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | 66,00 |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 61,00 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Tengah | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 100,00 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 42,00 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 78,00 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 90,00 |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 53,75 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | 50,00 |
| 6 | Terwujudnya RB BPOM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Palu | Nilai AKIP Balai POM di Palu | 81,00 |

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp31.790.591.000,00

Dalam menerima amanah dari pimpinan untuk melaksanakan program / kegiatan yang telah diperjanjikan, Balai POM di Palu menerima anggaran sebesar Rp28.845.331.000,00 kemudian mengalami revisi POK/DIPA sebanyak tujuh kali. Pada revisi DIPA terakhir, anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp31.790.591.000,00. Berikut rincian pagu anggaran Balai POM di Palu per sasaran kegiatan :

**Tabel 7. Pagu anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2019**

| NO | SASARAN KEGIATAN | ALOKASI ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Rp2.544.694.000 |
| 2. | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Rp104.506.000 |
| 3. | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Rp2.748.324.000 |
| 4. | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Rp1.033.889.000 |
| 5. | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Rp489.849.000 |
| 6. | Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | Rp24.869.329.000 |
| **TOTAL** | | Rp31.790.591.000 |

## 2.3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Dalam rangka mengetahui capaian kinerja, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja *outcome* dengan target kinerja *outcome* yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja kegiatan adalah dengan membandingkan capaian kinerja kegiatan yang berupa komponen dengan targetnya yang sesuai dalam rencana kinerja kegiatan pada tahun yang berjalan. Pengukuran Kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achieveable, Reasonable dan Timebond*). Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

*Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achieveable, Reasonable, Timebond)*

Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus No. 1

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus No. 2

$$\% \text{ capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Sedangkan rumus untuk sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :

- ✓ Sasaran Kegiatan 1 : " Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu".

$$NPS1 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5 + 2NPI6}{12}$$

- ✓ Sasaran Strategi 2 : "Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu"

$$NPS2 = \frac{2NPI1 + 2NPI2}{4}$$

- ✓ Sasaran Strategi 3 : "Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu"

$$NPS3 = \frac{2NPI1}{2}$$

- ✓ Sasaran Kegiatan 4 : "Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu"

$$NPS4 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5}{10}$$

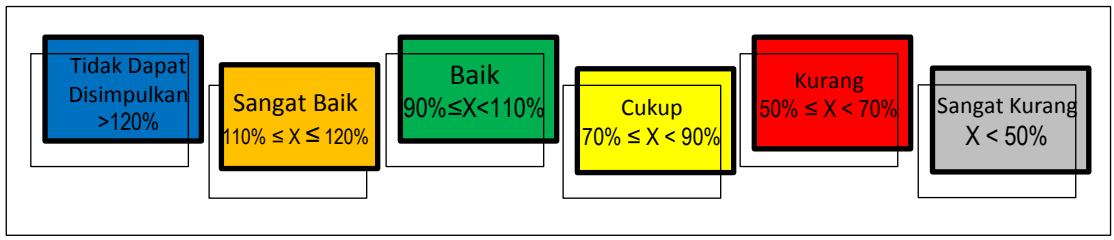
- ✓ Sasaran Strategi 5 : "Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu "

$$NPS5 = \frac{2NPI1}{2}$$

- ✓ Sasaran Strategi 6 : " Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019"

$$NPS6 = \frac{2NPI1}{2}$$

Berikut kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran :




Gbr 8. Kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

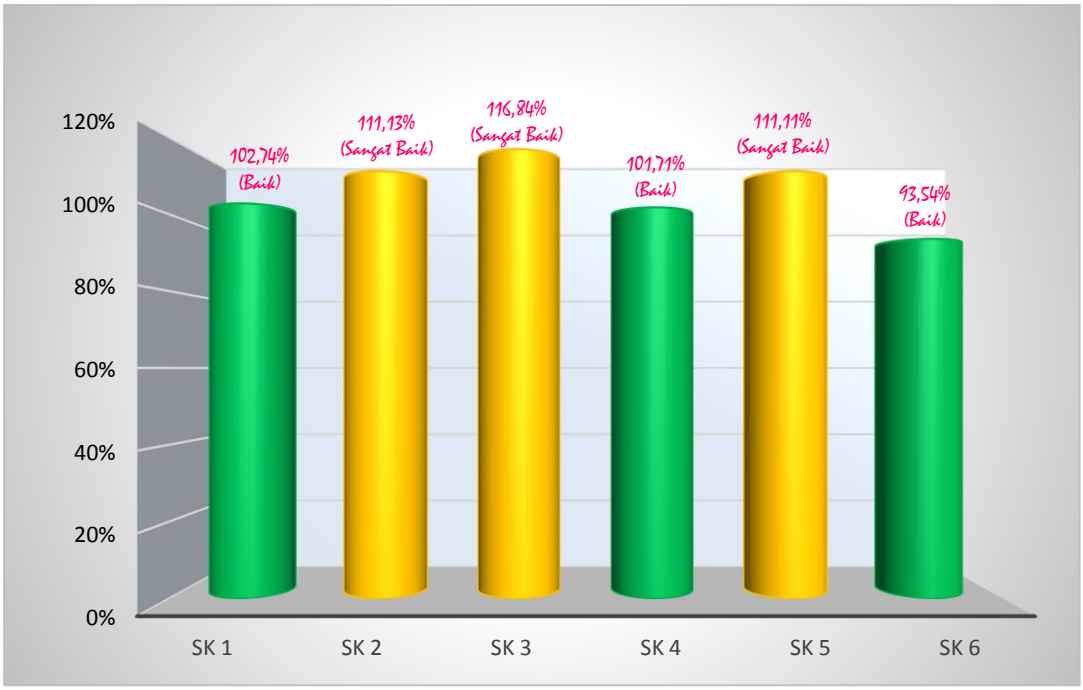
## 3.1 CAPAIAN KINERJA BALAI POM DI PALU

Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian sasaran kegiatan yang dijelaskan pada Bab II, secara ringkas capaian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 8. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu tahun 2019**

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Nilai Capaian Sasaran Kegiatan (%) | Krietria |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks POM | 102,38 | Baik |
| | | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 90,71 | Baik |
| | | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | 110,86 | Sangat Baik |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 111,90 | Sangat Baik |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 97,80 | Baik |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 102,76 | Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SK 1** | **102,74** | **Baik** |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan *(compliance index)* pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 119,69 | Sangat Baik |
| | | Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | 102,58 | Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SK 2** | **111,13** | **Sangat Baik** |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 116,84 | Sangat Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SK 3** | **116,84** | **Sangat Baik** |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 98,79 | Baik |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 80,71 | Cukup |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Nilai Capaian Sasaran Kegiatan (%) | Krietria |
|---|---|---|---|---|
| | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 104,86 | Baik |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 111,11 | Sangat Baik |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 113,10 | Sangat Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SK 4** | **101,71** | **Baik** |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | 111,11 | Sangat Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SK 5** | **111,11** | **Sangat Baik** |
| 6 | Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | Nilai AKIP Balai POM di Palu | 93,54 | Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SK 6** | **93,54** | **Baik** |




Gambar 9 Grafik nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu tahun 2019

# ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

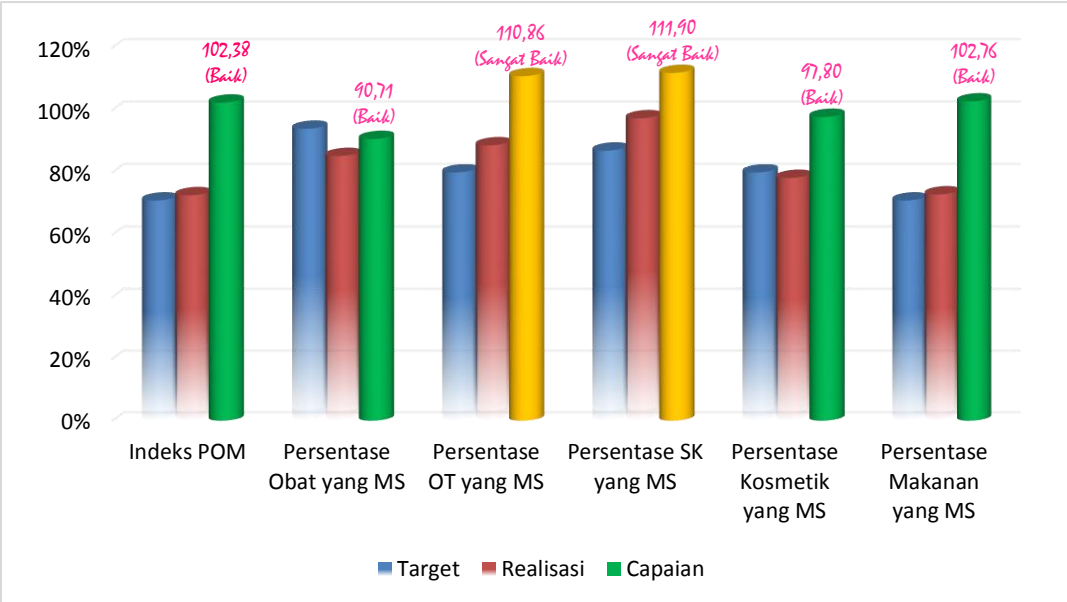
## A.1 Sasaran Kegiatan 1

**Sasaran Kegiatan 1 :**
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu

### Indikator Kinerja Sasaran

**Tabel 9. Capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu tahun 2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | 1 Indeks POM | 71 | 72,69 | 102,38 | Baik |
| | 2 Persentase Obat yang memenuhi syarat | 94,00 | 85,27 | 90,71 | Baik |
| | 3 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | 80,00 | 88,69 | 110,86 | Sangat Baik |
| | 4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 87,00 | 97,35 | 111,90 | Sangat Baik |
| | 5 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 80,00 | 78,24 | 97,80 | Baik |
| | 6 Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 71,00 | 72,96 | 102,76 | Baik |




Gambar 10. Grafik capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu tahun 2019

## 1. Indeks POM

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Palu merupakan suatu proses yang komprehensif. Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Palu tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk substandar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sasaran Kegiatan 1 adalah Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM). Nilai IPOM adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Indeks POM sementara ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, serta laporan kinerja hasil pengawasan lain yang relevan. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1.

Penghitungan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan UPT 2018 didasarkan oleh beberapa indikator berikut :

1. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (Provinsi);
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Provinsi);
3. Indikator Kinerja Masing-Masing Komoditi.

Komponen-komponen yang berkontribusi pada pengukuran Indeks POM adalah:

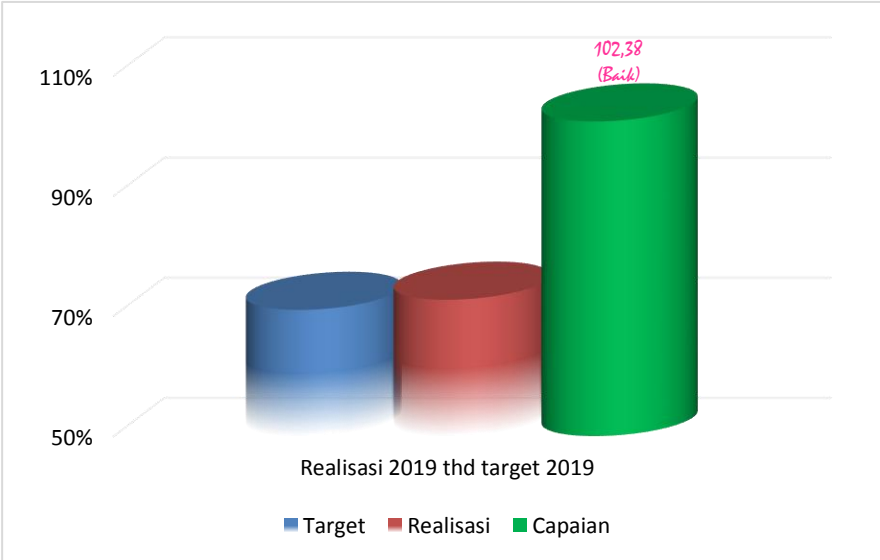
1. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (Provinsi);
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Provinsi);
3. Jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang diuji menggunakan parameter kritis;
4. Persentase obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang memenuhi syarat;
5. Persentase sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang diawasi (cakupan);

6. Persentase sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang memenuhi ketentuan;
7. Persentase sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang diawasi (cakupan);
8. Persentase rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda (komoditi obat, obat tradisional, kosmetik, dan makanan);
9. Persentase perkara yang selesai sampai tahap 2 sesuai *timeline* (komoditi obat);
10. Persentase Iklan dan Label yang memenuhi ketentuan (komoditi obat, obat tradisional, kosmetik, dan makanan).

*Indeks POM pada tahun 2019 berdasarkan capaian kinerja Balai POM di Palu tahun 2018 adalah 72,69. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :*

**Tabel 10. Capaian indikator kinerja 'Indeks POM' tahun 2019 terhadap target 2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2019 | REALISASI 2019 | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks POM | 71,00 | 72,69 | 102,38 |




Gbr 11. Grafik capaian indikator kinerja 'Indeks POM' tahun 2019 terhadap target 2019

Capaian indikator kinerja Indeks POM tahun 2019 tahun 2019 telah mencapai target 2019 dengan capaian 102,38%, berada pada kategori 'Baik'.

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator kinerja 'Indeks POM' adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kompetensi petugas dalam menyampaikan materi KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
2. Mudahnya akses informasi kepada masyarakat sehingga memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang Obat dan Makanan baik dari media cetak maupun elektronik;
3. Tersedianya media sosial Balai POM di Palu yang menyediakan informasi terkait obat dan makanan yang mudah diakses oleh masyarakat, diantaranya *Youtube, Facebook, Instagram* dan *Twitter*;
4. Layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui *whatsapp*, *sms*, maupun telepon 24 jam setiap hari;
5. Pelayanan publik di Balai POM di Palu dilaksanakan setiap hari kerja oleh masyarakat untuk meminta informasi maupun menyampaikan pengaduan;
6. Adanya komunitas yang diintervensi tentang pentingnya keamanan Obat dan Makanan. Pada tahun 2018, jumlah komunitas yang diberdayakan sebanyak 45 komunitas sesuai dengan sasaran jumlah komunitas yang diberdayakan (100%). Komunitas yang diberdayakan diantaranya komunitas desa di Kabupaten Poso dan komunitas pasar di Kabupaten Poso, Donggala dan Kota Palu;
7. Tersedianya kader-kader di komunitas desa yang menjadi pelopor informasi keamanan Obat dan Makanan di desanya;
8. Tersedianya media audio visual di Balai POM di Palu yang sangat efektif dalam membantu masyarakat untuk memahami materi tentang Obat dan Makanan;
9. Adanya berbagai jenis kegiatan Balai POM di Palu dalam usaha peningkatan pengetahuan masyarakat seperti tersedianya mobil KIE keliling, kehadiran Balai POM di Palu dalam pameran dan Expo Sulteng dan penyebaran informasi ke seluruh kabupaten / kota di Sulawesi Tengah;
10. Balai POM di Palu dapat mempertahankan status akreditasi ISO 17025:2017 melalui komitmen dalam penerapan sistem mutu secara konsisten dalam pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen dan audit internal secara berkala;
11. Setiap tahun, Balai POM di Palu melakukan peningkatan ruang lingkup akreditasi minimal 3 parameter uji;
12. Peningkatan kompetensi teknis maupun manajerial personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal;
13. Melakukan pengujian sesuai pedoman *sampling*;
14. Pemenuhan standar ruang lingkup, peralatan dan kompetensi personel;

15. Pelaksanaaan bimbingan teknis untuk pelaku usaha tentang Cara Distribusi Obat yang Baik kepada distributor obat dan sarana pelayanan kefarmasian;
16. Pengawasan label dilakukan 100% terhadap komoditi yang di*sampling* dan pengawasan iklan pada media cetak dan elektronik telah dilaporkan ke pusat untuk ditindaklanjuti;
17. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang produksi Obat dan Makanan kepada pelaku usaha;
18. Dukungan lintas sektor dari pemerintah daerah dan organisasi profesi;
19. Perencanaan pengawasan terhadap sarana produksi Obat dan Makanan telah dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek baik dari segi analisis risiko, jumlah SDM serta anggaran pelaksanaan kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pada saat perencanaan tahunan;
20. Kegiatan penindakan terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dilaksanakan sesuai dengan tahapan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan yang dimulai dari investigasi, Operasi Penindakan sampai dengan proses penyidikan;
21. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan *Criminal Justice System* (Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri) di daerah, sehingga pelaksanaan Operasi Penindakan secara teknis dan taktis dapat berjalan dengan efektif dan memperkecil peluang pengembalian berkas oleh Jaksa Penuntut Umum kepada PPNS Balai POM di Palu untuk memenuhi petunjuk.

## Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

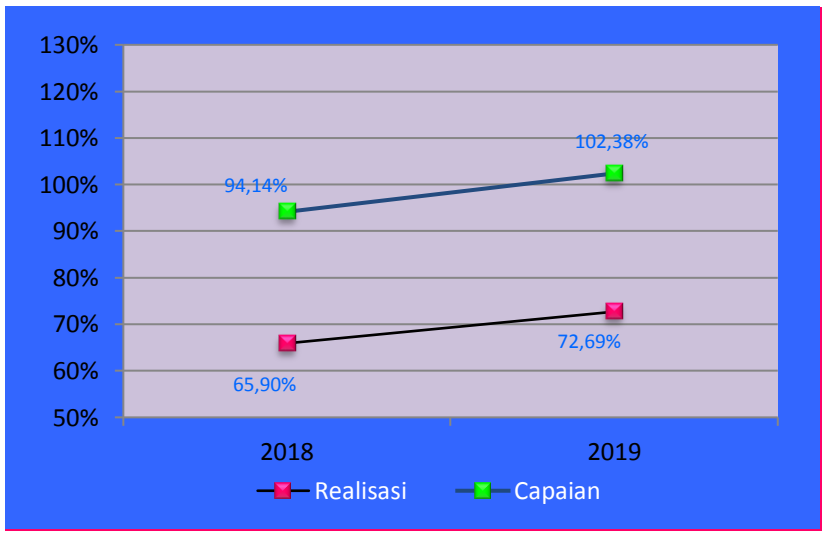
1. Meningkatkan kompetensi pegawai khususnya dalam pelayanan prima dan *public speaking;*
2. Membentuk kader penyebaran informasi hingga ke tingkat kelurahan;
3. Menginisiasi program-program pemberdayaan di 9 kabupaten / kota di Sulawesi Tengah;
4. Melakukan advokasi secara periodik ke kabupaten / kota untuk mereplikasi program-program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Badan POM seperti Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman;
5. Meningkatkan eksistensi di media sosial karena saat ini telah terjadi pergeseran penyebaran informasi ke arah digitalisasi;
6. Membuat media informasi yang lebih inovatif dan kreatif sehingga lebih menarik minat baca masyarakat;

7. Balai POM di Palu masih harus berupaya lebih keras terutama seksi Informasi dan Komunikasi (Infokom) untuk lebih mendorong kesadaran masyarakat terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang Obat dan Makanan;
8. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau lintas sektor terkait lainnya dalam upaya tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
9. Mendorong lintas sektor untuk mengimplementasikan Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah;
10. Melakukan identifikasi dan *update* pemetaan terhadap potensi tindak pidana di bidang Obat dan Makanan di daerah Sulawesi Tengah;
11. Meningkatkan kemampuan petugas di Seksi Penindakan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen dan/atau investigasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan telah dibenarkan tentang target kegiatan operasi penindakan.

*Realisasi dan capaian indikator 'Indeks POM' tahun 2018- 2019.*

**Tabel 11. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks POM' tahun 2018-2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | 2018 | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks POM | 70,00 | 65,90 | 94,14 | 71,00 | 72,69 | 102,38 |



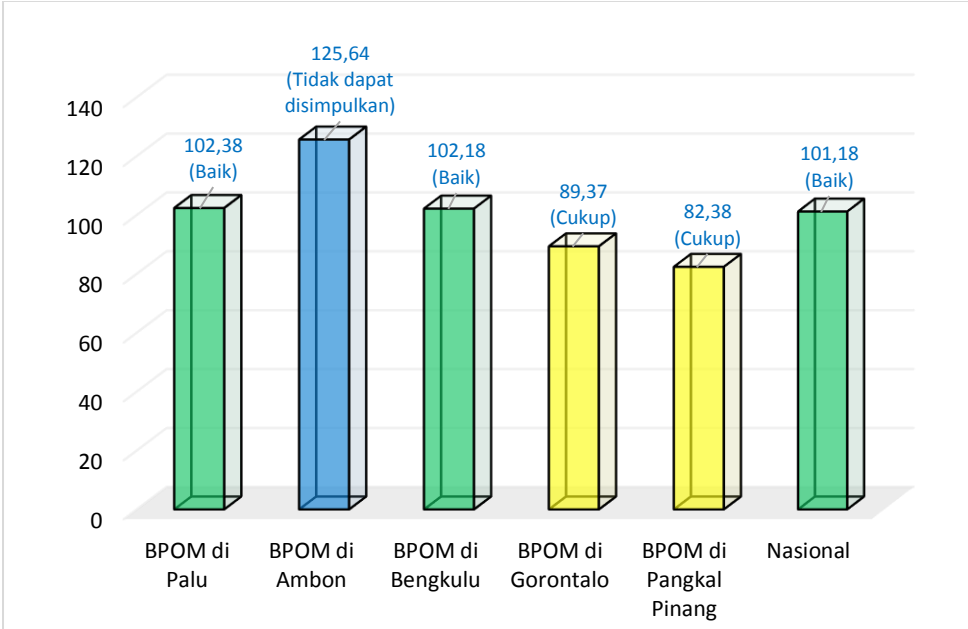

Gbr 12. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks POM tahun 2018-2019

Nilai realisasi Indeks POM Balai POM di Palu pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 yaitu dari 65,90 menjadi 72,69. Nilai capaian juga meningkat tapi masih berada di kategori 'Baik'. Peningkatan nilai Indeks POM pada tahun 2019 disebabkan oleh semakin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha, mudahnya akses informasi sehingga memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang Obat dan Makanan baik dari media sosial, media cetak maupun elektronik; peningkatan kompetensi teknis maupun manajerial pegawai melalui pelatihan internal dan eksternal.

*Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Indeks POM' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dan nasional tahun 2019*

**Tabel 12. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks POM' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dan nasional tahun 2019**

| INDIKATOR KINERJA | NILAI | BALAI POM | | | | | NASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PALU | AMBON | BENGKULU | GORONTALO | PANGKAL PINANG | |
| Indeks POM | Realisasi | 72,69 | 76,64 | 72,55 | 63,45 | 58,49 | 71,84 |
| | Persentase Capaian | 102,38 | 125,64 | 102,18 | 89,37 | 82,38 | 101,18 |




Gbr 13. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Indeks POM' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis dan nasional tahun 2019

Dari data realisasi Indeks POM tahun 2019, Balai POM di Ambon mencapai realisasi tertinggi tetapi dengan capaian indikator kinerja 'Tidak dapat disimpulkan'. Target nilai Indeks POM yang ditetapkan oleh Balai POM di Ambon hanya 61,00, berbeda dengan target balai lain dan target nasional yaitu 71,00.

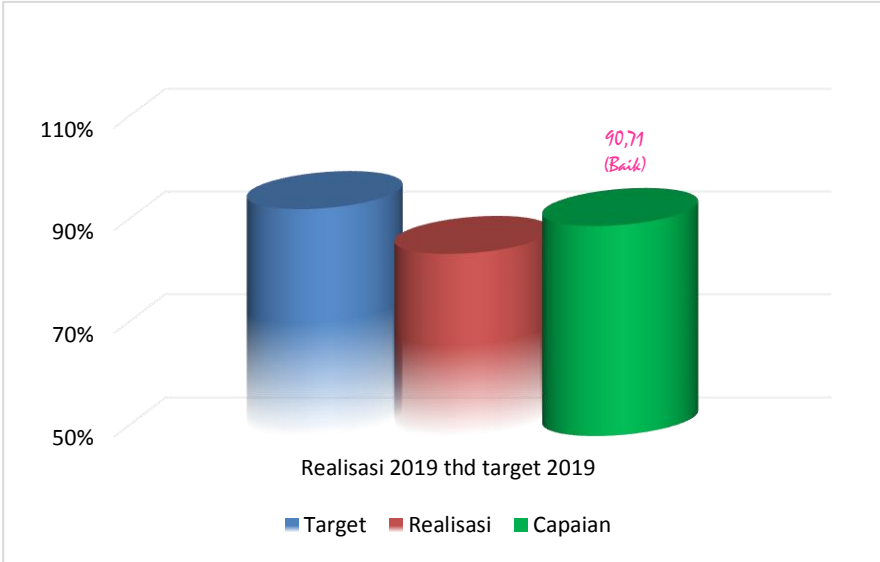
Nilai indeks POM Balai POM di Palu menempati urutan kedua dan masih di atas nilai IPOM nasional. Capaian indikator kinerja Balai POM di Palu berada dalam kategori 'Baik' sama dengan Balai POM di Bengkulu dan nasional. Balai POM di Gorontalo dan Balai POM di Pangkal Pinang hanya memperoleh capaian kinerja 'Cukup'. Nilai indeks POM Balai POM di Palu tersebut dapat dicapai karena adanya pencapaian kinerja indikator lain Balai POM di Palu tahun 2018 yang bernilai 'Baik'.

## 2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2019, jumlah Obat yang tidak memenuhi syarat sebanyak 66 sampel dari 448 total *sampling* Obat. Jumlah tersebut termasuk produk yang *disampling* oleh Loka POM di Kabupaten Banggai dan diuji oleh Balai POM di Palu. Rincian capaian indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 13. Capaian indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019**

| INDIKATOR KINERJA | PEMBILANG | | PENYEBUT | | TARGET 2019 | CAPAIAN OBAT MS 2019 | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEFINISI | REALISASI | DEFINISI | REALISASI | | | |
| Persentase Obat yang memenuhi syarat | Sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan | 66 | Total *sampling* | 448 | 94,00 | 85,27 | 90,71 |




Gbr 14. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019

Dari data realisasi kinerja terhadap 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2019 sebesar 85,27% terlihat bahwa target kinerja 2019 belum tercapai dengan persentase capaian 90,71% (Baik). Obat yang tidak memenuhi syarat tahun 2019 disebabkan tidak memenuhi syarat mutu pengujian laboratorium dan/atau tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Pemeriksaan label atau penandaan dilakukan sesuai dengan kriteria yang terdapat di SIPT dan penarikan kesimpulan penilaian dilakukan secara otomatis oleh sistem. Kendala dalam menyimpulkan penilaian label atau penandaan adalah terjadinya perbedaan penilaian oleh sistem SIPT balai dan evaluator pusat sehingga mempengaruhi kesimpulan akhir. Hal lain yang menyebabkan Obat tidak memenuhi syarat adalah tidak memenuhi syarat mutu pengujian laboratorium (produk obat substandar) antara lain pemerian, disolusi dan kadar Obat.

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator kinerja 'persentase Obat yang memenuhi syarat' adalah sebagai berikut :

1. Sistem manejemen mutu ISO 9001:2015, ISO 17025: 2017 sudah diterapkan secara konsisten;
2. Pemenuhan parameter kritis pengujian sudah mencapai 98%;
3. Peningkatan pemenuhan standar alat laboratorium;
4. Peningkatan Standar Ruang Lingkup Pengujian Obat tahun 2018 sebesar 63,8% menjadi 66,3% tahun 2019; Peningkatan Standar Ruang Lingkup Pengujian NAPZA tahun 2018 sebesar 55,6% menjadi 58,1% tahun 2019;
5. Peningkatan kompetensi teknis personal laboratorium melalui bimbingan teknis Penetapan Kadar Quinin tablet secara KCKT; Penetapan Kadar Mineral (Na, Ca, Cl) dalam infus NaCl secara AAS, Disolusi Omeprazole Tablet lepas lambat secara KCKT;
6. Metode Analisa dari parameter kritis dalam pedoman *sampling* 2019 sudah masuk dalam Ruang Lingkup Akreditasi KAN;
7. Penarikan produk Obat yang tidak memenuhi syarat mutu pengujian laboratorium dari pasaran;
8. Di Sulawesi Tengah sampai saat ini belum terdapat industri Obat, sehingga pengawasan difokuskan pada jalur distribusi;
9. Pembinaan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan distribusi produk Obat;
10. Advokasi dan koordinasi lintas sektor terus dilakukan dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran dengan memperbanyak kegiatan inspeksi bersama, pembentukan tim koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Mkanan di kabupaten Poso, Bimtek Saryanfar kepada Dinas kesehatan semua kabupaten dan propinsi, Sosialisasi Inpres nomor 3 tahun 2017

tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Perkuatan koordinasi dengan Pemda Kab. Poso dalam bentuk *follow up MOU,* perkuatan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah;

11. KIE kepada GP Farmasi, Saryanfar,Bimtek Pengelolaan Obat, Bimtek Sertifikasi CDOB, dan Komunitas Ritel sudah dilakukan.

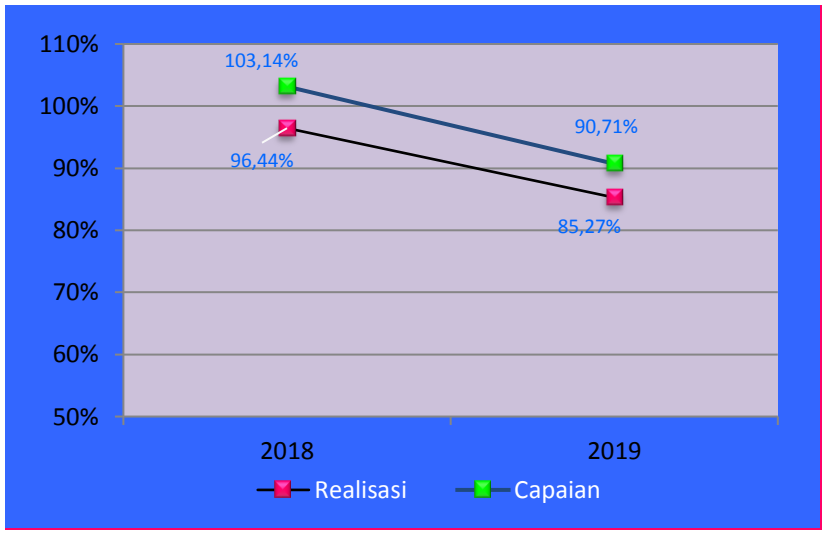
Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Meningkatkan dan menindaklanjuti perkuatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat;
2. Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian agar menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik);
3. Mengoptimalkan penyebaran informasi obat ke sarana distribusi melalui surat dan media sosial serta melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan Mobile BPOM;
4 Berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;
5 Meningkatkan ruang lingkup akreditasi minimal 3 parameter uji per tahun;
6 Memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana distribusi maupun pelayanan kefarmasian yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CDOB;
7 Melakukan koordinasi dengan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif agar database registrasi awal Produk Obat terkait kemasan Obat dapat diakses di SIPT.

*Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2018- 2019.*

**Tabel 14. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | 2018 | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 93,50 | 96,44 | 103,14 | 94,00 | 85,27 | 90,71 |



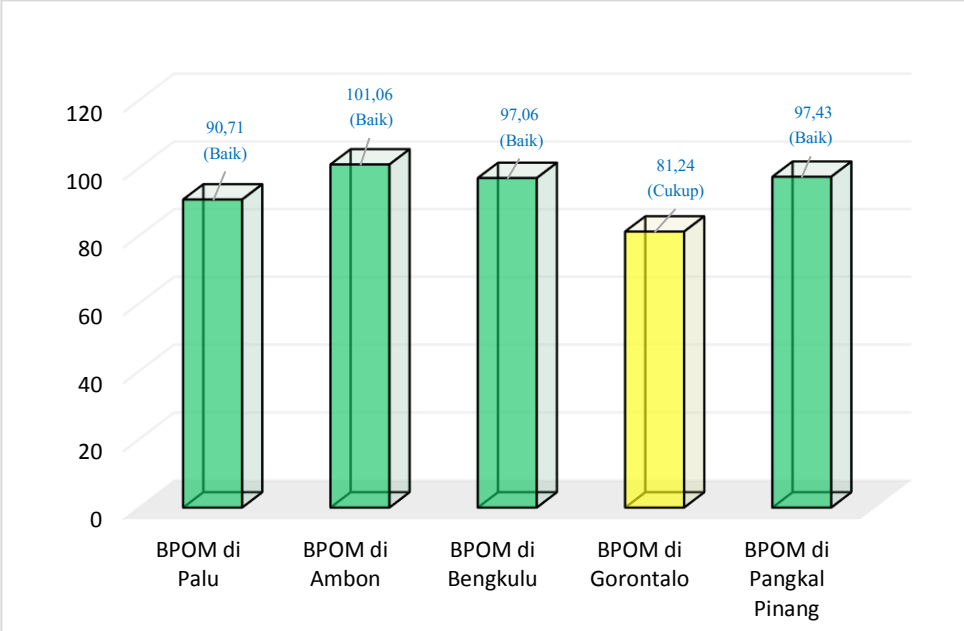

Gbr 15. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019

Dari data capaian kinerja terhadap Obat yang memenuhi syarat selama tahun 2018-2019 terlihat mengalami penurunan. Capain realisasi Obat yang memenuhi syarat 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018, karena perubahan proporsi sampel *targeted*.

*Perbandingan realisasi dan persentase capaian 'Obat yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019*

**Tabel 15. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019**

| INDIKATOR KINERJA | NILAI | BALAI POM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PALU | AMBON | BENGKULU | GORONTALO | PANGKAL PINANG |
| Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM | Realisasi | 85,27 | 95,00 | 91,24 | 76,37 | 91,59 |
| | Capaian | 90,71 | 101,06 | 97,06 | 81,24 | 97,43 |




Gbr 16. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019

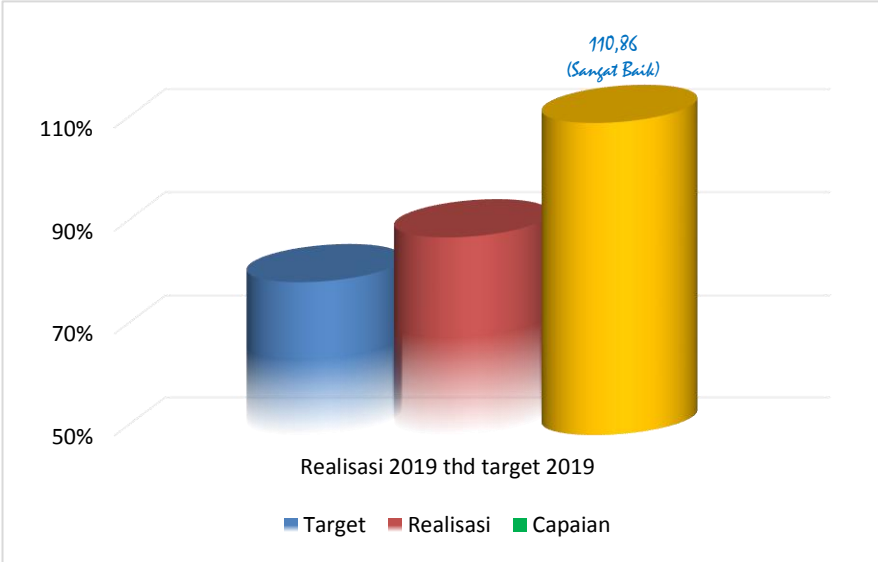
Target indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' kelima balai di atas adalah sama yaitu 94,00%. Balai POM di Palu mempunyai nilai capaian indikator relatif sama dengan ketiga balai pembanding (kategori 'Baik') kecuali Balai POM di Gorontalo, yang hanya berada pada kategori 'Cukup'. Balai POM di Ambon memiliki nilai realisasi dan capaian kinerja tertinggi di antara balai lainnya, yaitu 101,06%. Masih perlu dilakukan pengawasan terus menerus terhadap Obat yang beredar di masyarakat. Peningkatan KIE dan edukasi kepada masyarakat mengenai obat yang aman dan bermutu serta kepada pelaku usaha mengenai Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) juga masih perlu dilakukan.

## 3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2019, jumlah Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat sebanyak 38 sampel dari 336 total *sampling* Obat Tradisional yang di*sampling*. Jumlah tersebut termasuk produk yang *disampling* oleh Loka POM di Kabupaten Banggai dan diuji oleh Balai POM di Palu. Rincian capaian Obat Tradisional yang memenuhi syarat dapat dilihat pada tabel 16.

**Tabel 16. Capaian indikator kinerja 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019**

| INDIKATOR KINERJA | PEMBILANG | | PENYEBUT | | TARGET 2019 | CAPAIAN OT MS 2019 | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEFINISI | REALISASI | DEFINISI | REALISASI | | | |
| Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | Sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan | 38 | Total *sampling* | 336 | 80,00 | 88,69 | 110,86 |




Gbr 17. Grafik Capaian indikator kinerja 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019

Dari data realisasi kinerja terhadap Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2019 sebesar 88,69% terlihat bahwa target kinerja 2019 telah terlampaui dengan persentase capaian sebesar 110,86% (Sangat Baik).

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator 'persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat' adalah sebagai berikut :

1. Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, ISO 17025: 2017 sudah diterapkan secara konsisten;
2. Peningkatan Standar Ruang Lingkup Pengujian tahun 2018 sebesar 82.7% menjadi 85.5% tahun 2019;
3. Peningkatan kompetensi teknis personal laboratorium melalui bimbingan teknis Analisis BKO Menggunakan GCMS;

4. Metode Analisa dari parameter kritis dalam pedoman *sampling* 2019 sudah masuk dalam Ruang Lingkup Akreditasi KAN;
5. Di Sulawesi Tengah sampai saat ini belum terdapat industri obat tradisional, sehingga pengawasan difokuskan pada jalur distribusi secara konsisten;
6. Pembinaan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan distribusi produk obat tradisional;
7. Advokasi dan koordinasi lintas sektor terus dilakukan dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran dengan memperbanyak kegiatan inspeksi bersama, pembentukan tim koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di kabupaten Poso, Bimtek Saryanfar kepada Dinas kesehatan semua kabupaten dan propinsi, Sosialisasi Inpres nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Perkuatan koordinasi dengan Pemda Kab. Poso dalam bentuk *follow up MOU,* perkuatan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah;
8. KIE kepada GP Farmasi, Saryanfar, Bimtek Pengelolaan Obat, Bimtek Sertifikasi CDOB, dan Komunitas Ritel sudah dilakukan.

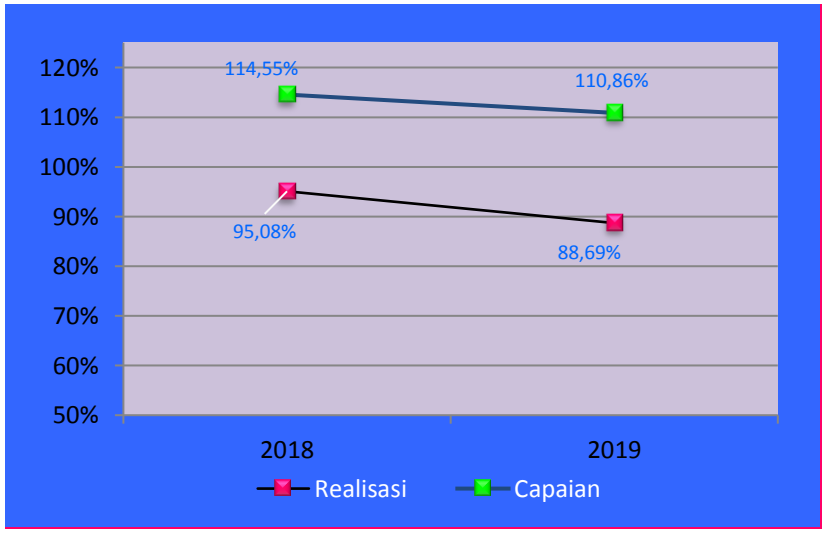
Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan menindaklanjuti perkuatan koordinasi dengan pemkab dan organisasi profesi dalam bentuk MOU dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat tradisional;
2. Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap sarana distribusi obat tradisional yang memiliki rekam jejak pelanggran dalam distribusi obat tradisional;
3. Mengoptimalkan penyebaran informasi obat tradisional ke sarana distribusi melalui surat dan media sosial serta melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke *website* Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan Mobile BPOM;
4. Berkomitmen mempertahankan status akreditasi ISO/IEC 17025:2017, ISO 9001:2015 melalui penerapan sistem mutu secara konsisten;
5. Meningkatkan ruang lingkup akreditasi minimal 3 parameter uji.

*Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2018- 2019.*

**Tabel 17. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | 2018 | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | 83,00 | **95,08** | 114,55 | 80,00 | **88,69** | 110,86 |



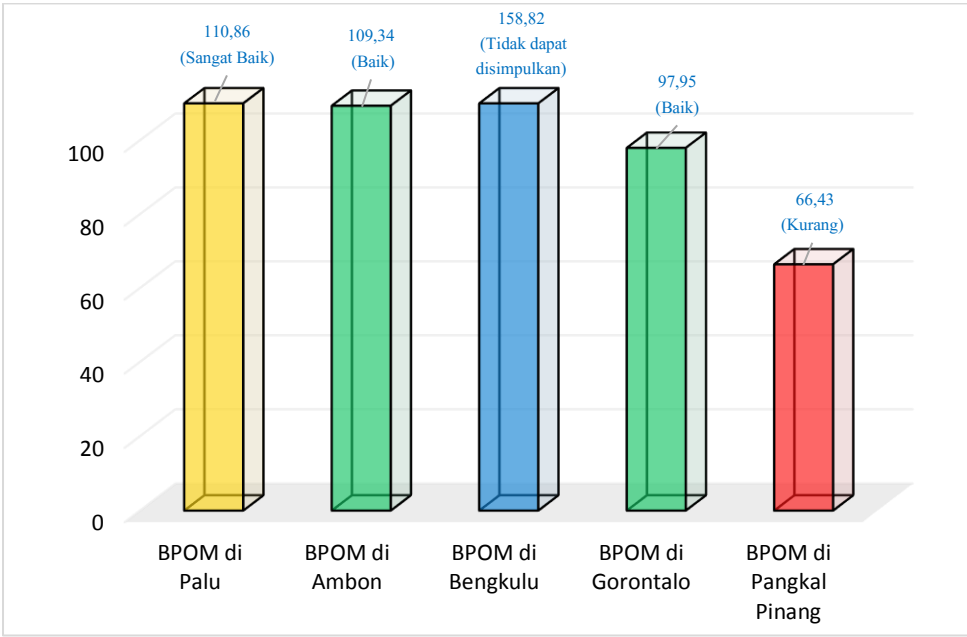

Gbr 18. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019

Dari data capaian kinerja terhadap Obat Tradisional yang memenuhi syarat selama tahun 2018-2019 terlihat mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan persentase *sampling compliance* dan spesifik balai yang ditetapkan di dalam pedoman *sampling*, tahun 2018 (60%) 2019 (65%) sehingga peluang keterwakilan sampel dengan variasi kategori/indikasi menjadi lebih besar.

*Perbandingan realisasi dan persentase capaian 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019*

**Tabel 18. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019**

| INDIKATOR KINERJA | NILAI | BALAI POM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PALU | AMBON | BENGKULU | GORONTALO | PANGKAL PINANG |
| Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM | Realisasi | 88,69 | 92,94 | 95,29 | 78,36 | 39,86 |
| | Capaian | 110,86 | 109,35 | 158,82 | 97,95 | 66,43 |




Gbr 19. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019

Balai POM di Bengkulu mencapai realisasi paling tinggi diantara balai pembanding lainnya (95,29%), yaitu 324 sampel MS dari 340 sampel yang diuji. Namun target yang ditetapkan sangat rendah dibandingkan balai lain yaitu hanya 60%, sehingga kinerja yang dicapai berada pada kategori 'Tidak dapat disimpulkan'. Target yang ditetapkan kelima balai POM tersebut sangat bervariasi berada pada kisaran 60-85%. Balai POM di Palu mempunyai nilai 'Persentase capaian obat yang memenuhi syarat' yang berada di kategori 'Sangat Baik', paling baik bila dibandingkan balai pembanding lainnya.

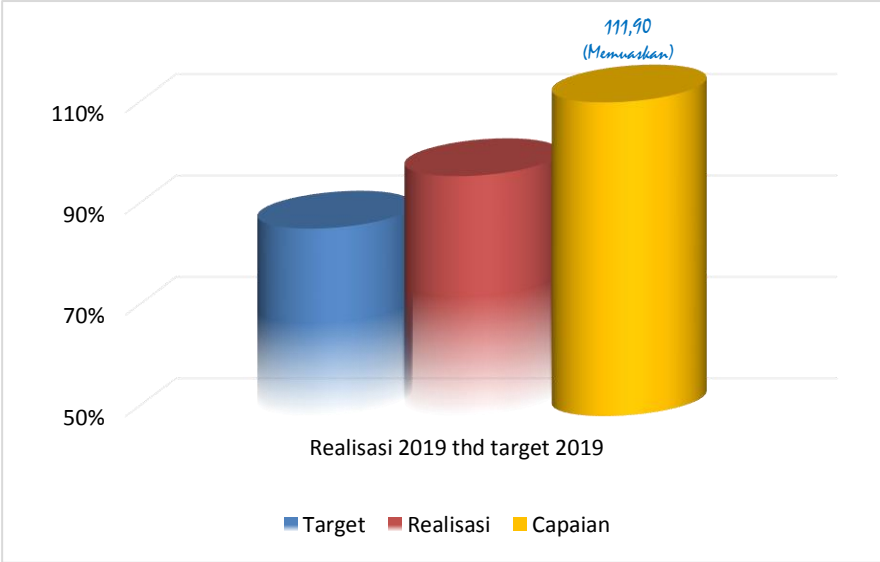
Pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap sarana distribusi Obat Tadisional telah dilakukan secara konsisten sehingga para pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan yang berhubungan pendistribusian produk obat tradisional baik dari segi pengadaan, dari sumber yang resmi maupun penyaluran. KIE kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai media, KIE langsung, talkshow, pameran, dan sosialisasi aplikasi Cek BPOM sehingga masyarakat mampu melindungi diri dari produk Obat Tradisional ilegal dan membahayakan kesehatan.

## 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2019, jumlah Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3 sampel dari 113 total *sampling* Suplemen Kesehatan. Jumlah tersebut termasuk produk yang *disampling* oleh Loka POM di Kabupaten Banggai dan diuji oleh Balai POM di Palu. Rincian capaian Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 19. Capaian indikator kinerja 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019**

| INDIKATOR KINERJA | PEMBILANG | | PENYEBUT | | TARGET 2019 | CAPAIAN SK MS 2019 | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEFINISI | REALISASI | DEFINISI | REALISASI | | | |
| Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | Sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan | 3 | Total *sampling* | 113 | 87,00 | 97,35 | 111,90 |




Gbr 20. Grafik capaian indikator kinerja 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019

Dari data realisasi kinerja terhadap Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2019 sebesar 97,35% terlihat bahwa target kinerja 2019 telah terlampaui dengan persentase capaian sebesar 111,90% (Sangat Baik).

Keberhasilan pencapaian kinerja 'persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' disebabkan oleh :

1. Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, ISO 17025: 2017 sudah diterapkan secara konsisten;
2. Peningkatan Standar Ruang Lingkup Pengujian tahun 2018 sebasar 82.7% menjadi 85.5% tahun 2019;
3. Peningkatan kompetensi teknis personal laboratorium melalui Pelatihan Internal Penetapan Analisis Vitamin Larut Lemak secara KCKT PDA;
4. Metode Analisa dari parameter kritis dalam pedoman *sampling* 2019 sudah masuk dalam Ruang Lingkup Akreditasi KAN;
5. Di Sulawesi Tengah sampai saat ini belum terdapat industri Suplemen Kesehatan, sehingga pengawasan difokuskan pada jalur distribusi secara konsisten;
6. Pembinaan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan distribusi produk Suplemen Kesehatan;
7. Advokasi dan koordinasi lintas sektor terus dilakukan dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran dengan memperbanyak kegiatan inspeksi bersama, pembentukan tim koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di kabupaten Poso, Bimtek Saryanfar kepada Dinas kesehatan semua kabupaten dan propinsi, Sosialisasi Inpres nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Perkuatan koordinasi dengan Pemda Kabupaten. Poso dalam bentuk *follow up MoU,* perkuatan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah;
8. KIE langsung kepada GP Farmasi, Komunitas Ritel dan pedagang sudah dilakukan sebanyak 9 kali.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan menindaklanjuti perkuatan koordinasi dengan pemkab dan organisasi profesi dalam bentuk MOU dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi Suplemen Kesehatan;
2. Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap sarana distribusi Suplemen Kesehatan yang memiliki rekam jejak pelanggaran dalam distribusi Suplemen Kesehatan;
3. Meningkatkan penyebaran informasi *public warning* Suplemen Kesehatan ke sarana distribusi melalui selebaran dan media sosial serta melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan

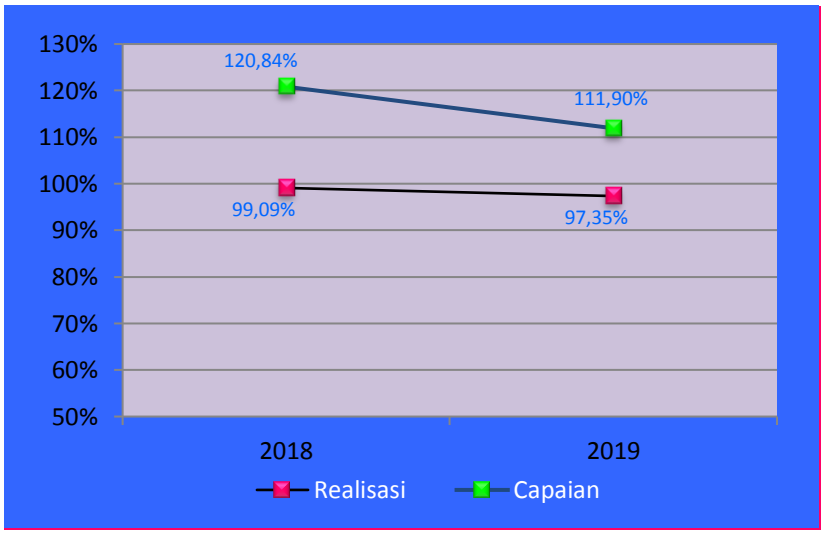
cara selalu mengecek ijin edar ke *website* Badan POM atau mengunduh aplikasi Cek BPOM dan Mobile BPOM;

4. Berkomitmen mempertahankan status akreditasi ISO/IEC 17025:2017, ISO 9001:2015 melalui penerapan sistem mutu secara konsisten.

*Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2018- 2019.*

**Tabel 20. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | 2018 | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 82,00 | **99,09** | 120,84 | 87,00 | **97,35** | 111,90 |



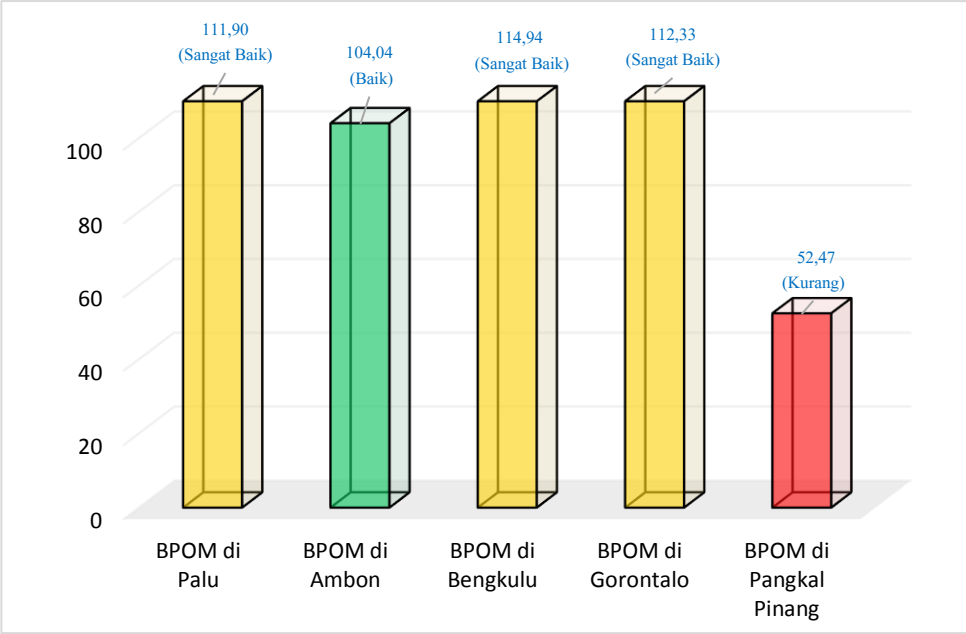

Gbr 21. Grafik Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019

Dari data capaian kinerja terhadap Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat selama tahun 2018-2019 terlihat mengalami penurunan, tapi berada pada kategori 'Sangat Baik'. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan persentase *sampling compliance* dan spesifik balai yang ditetapkan di dalam pedoman *sampling*, sehingga peluang keterwakilan sampel dengan variasi kategori / indikasi menjadi lebih besar.

*Perbandingan realisasi dan persentase capaian 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis*

**Tabel 21. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019**

| INDIKATOR KINERJA | NILAI | BALAI POM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PALU | AMBON | BENGKULU | GORONTALO | PANGKAL PINANG |
| Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM | Realisasi | 97,35 | 92,59 | 100,00 | 97,73 | 45,65 |
| | Persentase Capaian | 111,90 | 104,04 | 114,94 | 112,33 | 52,47 |




Gbr 22. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019

Target indikator kinerja yang ditetapkan oleh kelima balai POM di atas hampir sama yaitu 87%, kecuali Balai POM di Ambon menetapkan target 89%.. Balai POM di Bengkulu mempunyai nilai capaian indikator kinerja 'persentase capaian Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' yang berada pada kategori 'Sangat Baik', paling tinggi di antara balai lainnya, disusul oleh Balai POM di Palu dan Balai POM di Bengkulu dimana nilai capaiannya juga 'Sangat Baik'. Balai POM di Ambon berada di kategori 'Baik', sedangkan Balai POM di Pangkal Pinang memiliki nilai yang paling rendah dan berada pada kategori 'Kurang'.

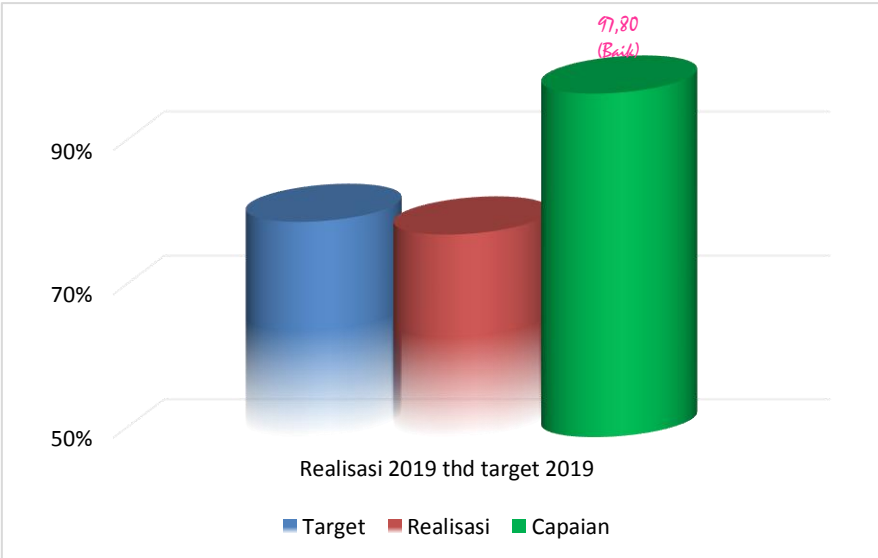
Pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan telah dilakukan secara konsisten sehingga para pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan yang berhubungan pendistribusian produk Suplemen Kesehatan baik dari segi pengadaan, dari sumber yang resmi maupun penyaluran. KIE kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai media, KIE langsung, talkshow, pameran, dan sosialisasi aplikasi Cek BPOM sehingga masyarakat mampu melindungi diri dari produk Suplemen Kesehatan ilegal dan membahayakan kesehatan.

## 5. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2019, jumlah Kosmetik yang tidak memenuhi syarat sebanyak 146 sampel dari 671 total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis. Jumlah tersebut termasuk produk yang *disampling* oleh Loka POM di Kabupaten Banggai dan diuji oleh Balai POM di Palu. Rincian capaian Kosmetik yang memenuhi syarat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 22. Capaian indikator kinerja 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019**

| INDIKATOR KINERJA | PEMBILANG | | PENYEBUT | | TARGET 2019 | CAPAIAN KOSMETIK MS 2018 | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEFINISI | REALISASI | DEFINISI | REALISASI | | | |
| Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | Sampel kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan | 146 | Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan | 671 | 80,00 | 78,24 | 97,80 |




Gbr 23. Grafik Capaian indikator kinerja 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019

Dari data realisasi kinerja terhadap Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2019 sebesar 78,24% terlihat bahwa target kinerja 2019 belum tercapai dengan persentase capaian hanya 97,80% (Baik). Kosmetik tidak memenuhi syarat pada tahun 2019 berupa sampel Tanpa Ijin Edar (TIE), ilegal, kadaluarsa/rusak dan label/penandaan tidak memenuhi ketentuan serta hasil uji laboratorium. Adapun penyebab terbesar persentase Kosmetik yang tidak memenuhi syarat adalah label/penandaan yang tidak memenuhi ketentuan.

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator kinerja 'Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat' adalah sebagai berikut :

1. Di Sulawesi Tengah sampai saat ini belum terdapat industri Kosmetik, sehingga pengawasan difokuskan pada jalur distribusi secara konsisten;
2. Penegakan hukum di bidang Kosmetik telah dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2019 terdapat 1 kasus pelanggaran produksi kosmetik TIE di Kabupaten Sigi dan 1 kasus pelanggaran distribusi kosmetik TIE di Kabupaten Banggai;
3. Pembinaan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan distribusi produk Kosmetik;
4. Advokasi dan koordinasi lintas sektor terus dilakukan dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran dengan memperbanyak kegiatan inspeksi bersama, pembentukan tim koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Poso, Bimtek Saryanfar kepada Dinas kesehatan semua kabupaten dan propinsi, Sosialisasi Inpres nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Perkuatan koordinasi dengan Pemda Kab. Poso dalam bentuk *follow up MOU,* perkuatan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah;
5. KIE langsung kepada GP Farmasi, Komunitas Ritel dan pedagang sudah dilakukan sebanyak 9 kali;
6. Metode Analisa dari parameter kritis dalam pedoman *sampling* 2019 sudah masuk dalam Ruang Lingkup Akreditasi KAN;
7. Secara konsisten menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, ISO 17025: 2017;
8. Peningkatan kompetensi teknis personal laboratorium melalui bimbingan teknis Analisis Ketokonazole Secara KCKT PDA;
9. Peningkatan Standar Ruang Lingkup Pengujian tahun 2018 sebesar 82.6% menjadi 85.9% tahun 2019;

10. Pemberlakukan ketentuan pada Harmonisasi ASEAN mendorong pelaku usaha terutama produsen untuk mematuhi ketentuan pelabelan yang benar.

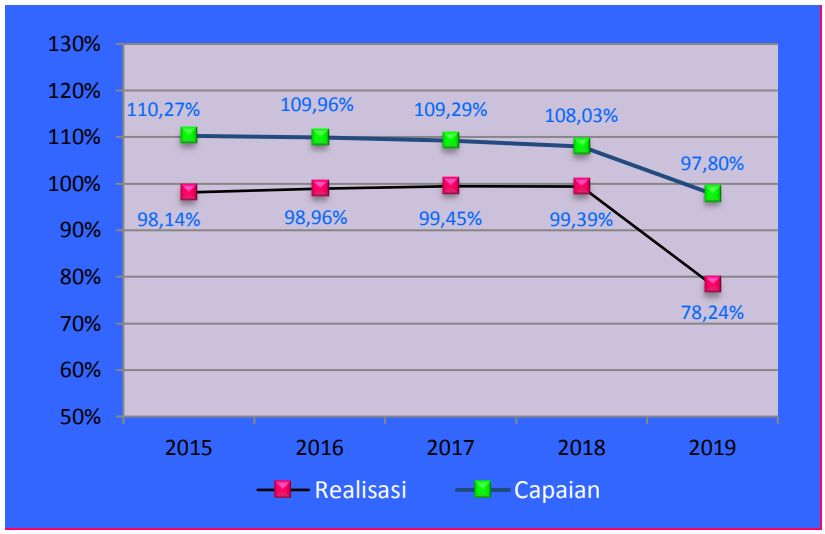
Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi Kosmetik;
2. Penyebaran informasi mengenai produk kosmetik kepada pelaku usaha.
3. KIE langsung kepada GP Farmasi dan Komunitas Ritel sudah dilakukan
4. Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap sarana distribusi Kosmetik yang berbasis risiko;
5. Meningkatkan penyebaran informasi *public warning* Kosmetik ke sarana distribusi melalui media sosial serta melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu mengecek ijin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan Mobile BPOM.
6. Berkomitmen mempertahankan status akreditasi ISO/IEC 17025:2017, ISO 9001:2015 melalui penerapan sistem mutu secara konsisten;
7. Meningkatkan ruang lingkup akreditasi minimal 3 parameter uji.

*Perbandingan realisasi dan persentase capaian 'Kosmetik yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu tahun anggaran 2015-2019*

**Tabel 23. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2015-2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | Realisasi | 98,14 | 98,96 | 99,45 | 99,39 | 78,24 |
| | | Capaian | 110,27 | 109,96 | 109,29 | 108,03 | 97,80 |



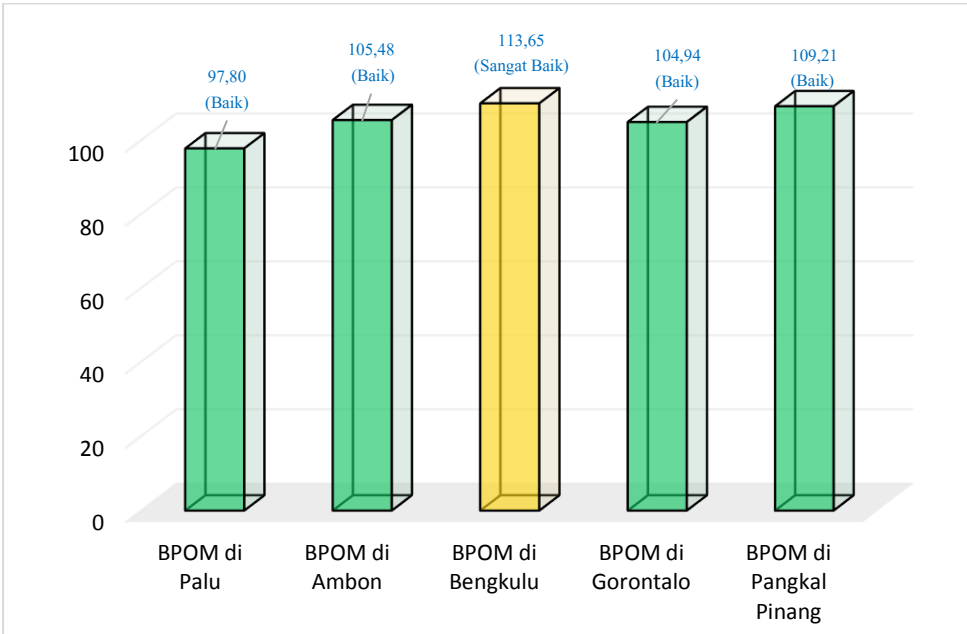

Gbr 24. Grafik Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2015-2019

Realisasi kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2019 adalah 78,24%, mengalami penurunan siginifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2015-2018). Hal ini karena adanya perubahan definisi operasional Kosmetik yang tidak memenuhi syarat di tahun 2019. Produk Tanpa Ijin Edar (TIE), ilegal, kadaluarsa/rusak dan label/penandaan tidak memenuhi ketentuan (TMK) ikut berkontribusi dalam perhitungan sampel Kosmetik tidak memenuhi syarat. Sebanyak 143 sampel tidak memenuhi ketentuan label/penandaan mempunyai kontribusi sangat besar terhadap realisasi dan capaian Kosmetik memenuhi syarat tahun 2019. Sementara Definisi operasional indikator 'Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat' yang digunakan pada tahun 2015 – 2018 ditetapkan hanya melalui uji laboratorium.

*Perbandingan realisasi dan persentase capaian 'Kosmetik yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019*

**Tabel 24. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Kosmetik yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019**

| INDIKATOR KINERJA | NILAI | BALAI POM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PALU | AMBON | BENGKULU | GORONTALO | PANGKAL PINANG |
| Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM | Realisasi | 78,24 | 94,93 | 90,92 | 83,96 | 87,36 |
| | Persentase Capaian | 97,80 | 105,48 | 113,65 | 104,94 | 109,21 |




Gbr 25. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Kosmetik yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019

Target indikator kinerja yang ditetapkan oleh kelima balai POM di atas hampir sama yaitu 80%, kecuali Balai POM di Ambon menetapkan target 90%.. Balai POM di Bengkulu mempunyai nilai capaian indikator kinerja 'persentase capaian Kosmetik yang memenuhi syarat' yang berada pada kategori 'Sangat Baik', paling tinggi di antara balai lainnya. Nilai capaian kinerja 4 balai lainnya berada pada kategori 'Baik'. Walaupun berada pada kategori 'Baik', nilai capaian kinerja Balai POM di Palu paling rendah di antara balai pembanding lainnya.

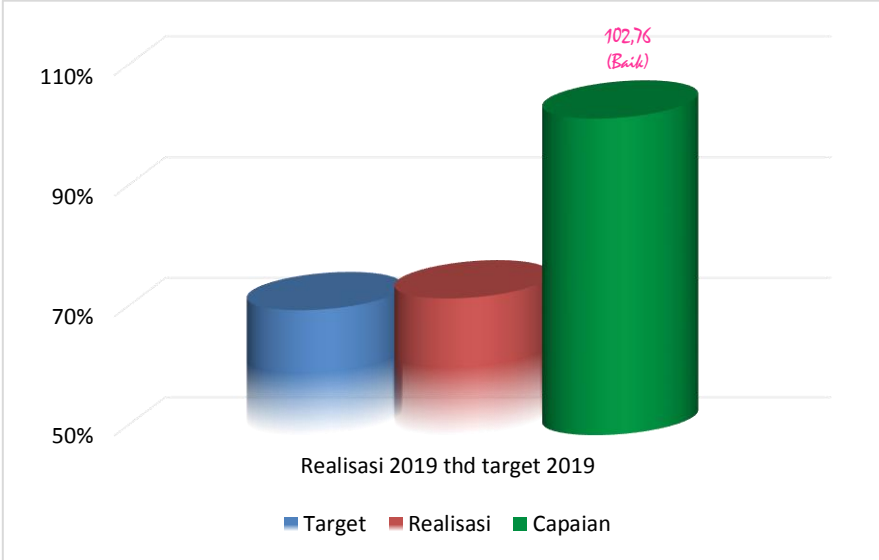
Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Balai POM di Palu, diantaranya Penyebaran informasi mengenai produk Kosmetik kepada pelaku usaha; KIE langsung kepada GP Farmasi dan Komunitas Ritel; Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap sarana distribusi Kosmetik yang berbasis risiko; Meningkatkan penyebaran informasi *public warning* Kosmetik ke sarana distribusi melalui media sosial serta melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu mengecek ijin edar ke *website* Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan Mobile BPOM.

## 6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2019, jumlah Makanan yang memenuhi syarat sebanyak 483 sampel dari 662 total Makanan yang diuji dengan parameter kritis. Jumlah tersebut termasuk produk yang *disampling* oleh Loka POM di Kabupaten Banggai dan diuji oleh Balai POM di Palu. Rincian capaian Makanan yang memenuhi syarat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 25. Capaian indikator kinerja 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019**

| INDIKATOR KINERJA | PEMBILANG | | PENYEBUT | | TARGET 2019 | CAPAIAN MAKANAN MS 2019 | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEFINISI | REALISASI | DEFINISI | REALISASI | | | |
| Persentase Makanan yang memenuhi syarat | Makanan yang MS pada tahun berjalan | 483 | Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan | 662 | 71,00 | 72,96 | 102,76 |




Gbr 26. Grafik Capaian indikator kinerja 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2019 terhadap target 2019

Dari data realisasi kinerja terhadap Makanan yang memenuhi syarat tahun 2019 sebesar 72,96% terlihat bahwa target kinerja 2019 telah tercapai dengan persentase capaian 102,76% (Baik).

Keberhasilan pencapaian kinerja 'persentase Makanan yang memenuhi syarat' disebabkan oleh :

1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, ISO 17025: 2017 sudah diterapkan secara konsisten;

2. Peningkatan Standar Ruang Lingkup Pengujian tahun 2018 sebesar 77.6% menjadi 79.4% tahun 2019;
3. Pembinaan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan produksi dan distribusi produk Makanan;
4. Metode Analisa dari parameter kritis dalam pedoman *sampling* 2019 sudah masuk dalam Ruang Lingkup Akreditasi KAN;
5. Advokasi dan koordinasi lintas sektor terus dilakukan dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran dengan memperbanyak kegiatan inspeksi bersama, pembentukan tim koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Poso, Bimtek Saryanfar kepada Dinas kesehatan semua kabupaten dan provinsi, Sosialisasi Inpres nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Perkuatan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Poso dalam bentuk *follow up MOU,* perkuatan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah
6. KIE langsung kepada UMKM, Komunitas Sekolah, dan Ritel sudah dilakukan;
7. Adanya penerbitan PerBPOM No. 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan meningkatkan jumlah TMS pengujian contohnya Siklamat.

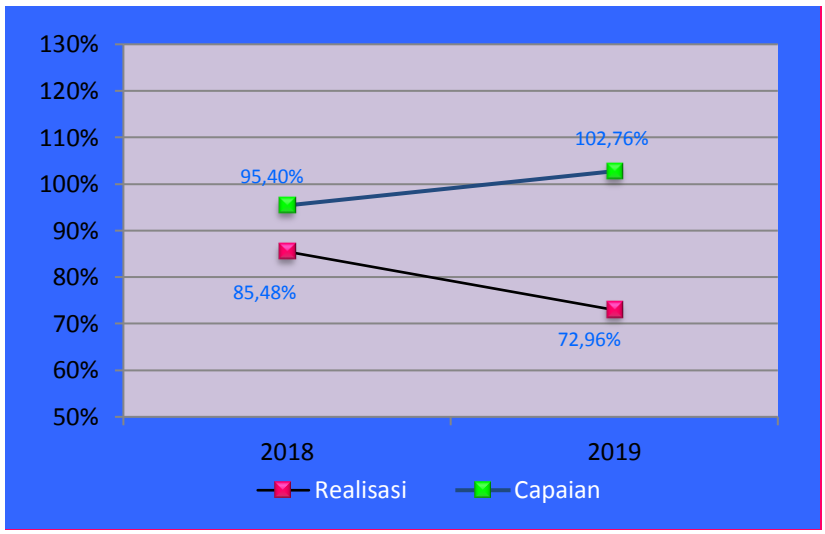
Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan menindaklanjuti perkuatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam bentuk MOU dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
2. Meningkatkan koordinasi dan menindaklanjuti perkuatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengawalan GKPD
3. Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap sarana produksi dan distribusi Makanan berbasis risiko dalam penerapan CPPOB;
4. Meningkatkan penyebaran informasi melalui berbagai media serta melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu mengecek ijin edar ke *website* Badan POM atau mengunduh aplikasi Cek BPOM dan Mobile BPOM;
7. Berkomitmen mempertahankan status akreditasi ISO/IEC 17025:2017, ISO 9001:2015 melalui penerapan sistem mutu secara konsisten;
8. Meningkatkan ruang lingkup akreditasi minimal 3 parameter uji.

*Realisasi dan Capaian indikator kinerja 'Makanan yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu tahun 2018-2019*

**Tabel 26. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | 2018 | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 89,60 | **85,48** | 95,40 | 71,00 | **72,96** | 102,76 |



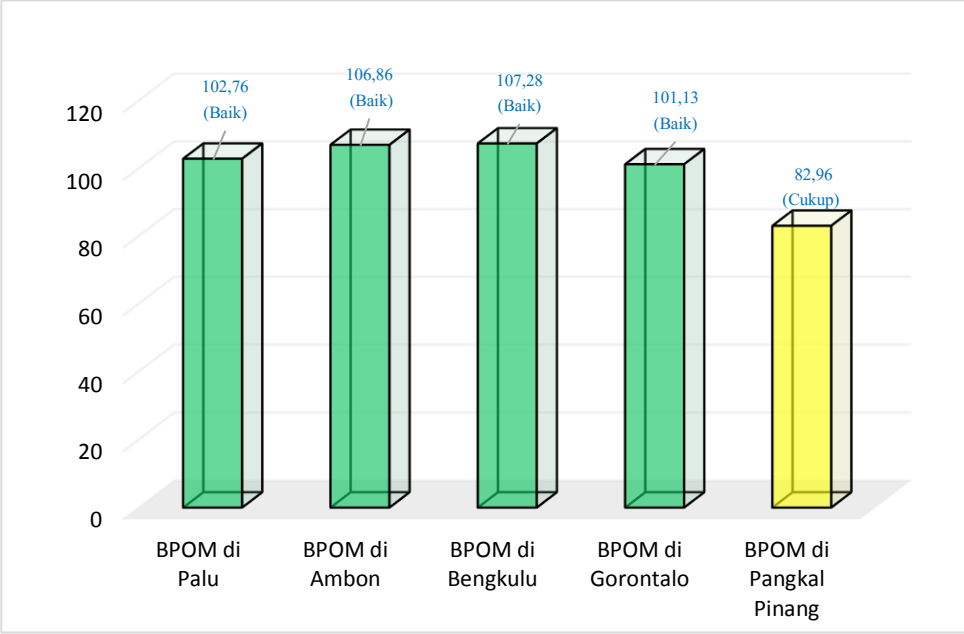

Gbr 27. Grafik Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019

Walaupun realisasi kinerja Makanan memenuhi syarat mengalami penurunan pada tahun 2019. Tetapi capaian kinerja mengalami peningkatan dengan kriteria Baik.

*Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Makanan yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019*

**Tabel 27. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Makanan yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019**

| INDIKATOR KINERJA | NILAI | BALAI POM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PALU | AMBON | BENGKULU | GORONTALO | PANGKAL PINANG |
| Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM | Realisasi | 72,96 | 80,15 | 76,17 | 71,80 | 58,90 |
| | Persentase Capaian | 102,76 | 106,86 | 107,28 | 101,13 | 82,96 |




Gbr 28. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Makanan yang memenuhi syarat' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019

Target indikator kinerja yang ditetapkan oleh kelima balai POM di atas hampir sama yaitu 71%, kecuali Balai POM di Ambon menetapkan target 75%.. Balai POM di Bengkulu mempunyai nilai capaian indikator kinerja 'persentase capaian Makanan yang memenuhi syarat' yang berada pada kategori 'Baik', paling tinggi di antara balai lainnya. Nilai capaian balai lainnya juga berada pada kategori 'Baik', kecuali Balai POM di Pangkal Pinang yang hanya berada pada kategori 'Cukup'.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Balai POM di Palu, diantaranya Meningkatkan koordinasi dan menindaklanjuti perkuatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam bentuk MOU dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Makanan; Meningkatkan koordinasi dan menindaklanjuti perkuatan koordinasi dengan pemkab dalam pengawalan GKPD, dan Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap sarana produksi dan distribusi Makanan berbasis risiko dalam penerapan CPPOB;

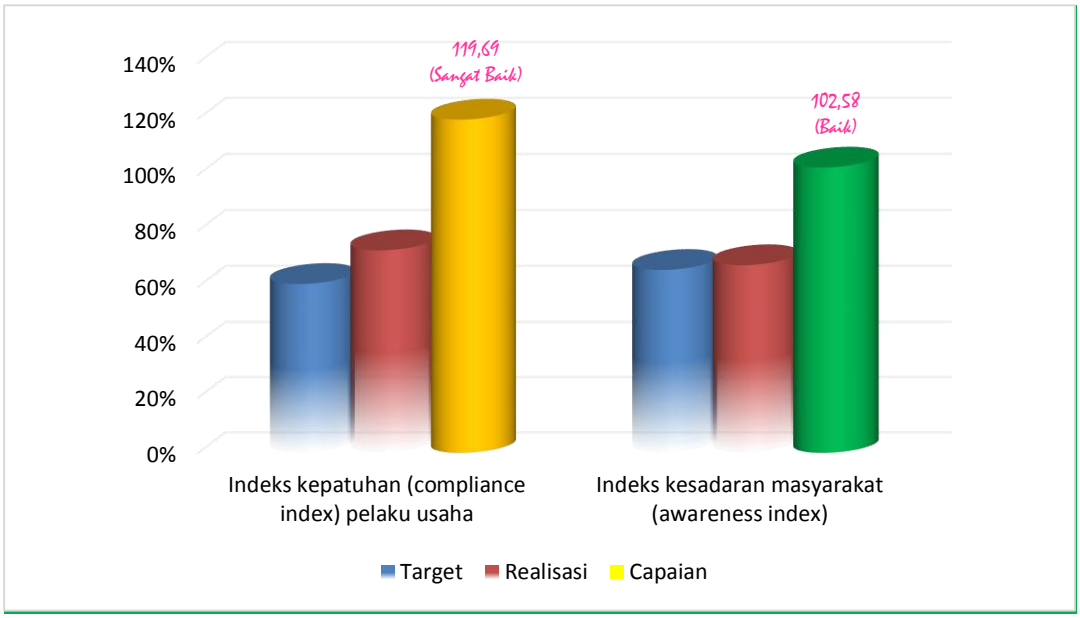
## A.2 Sasaran Kegiatan 2

**Sasaran Kegiatan 2**
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu

### Indikator Kinerja Sasaran

**Tabel 28. Capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Balai POM di Palu tahun 2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 1 Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 61,00 | 73,01 | 119,69 | Sangat Baik |
| | 2 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | 66,00 | 67,70 | 102,58 | Baik |



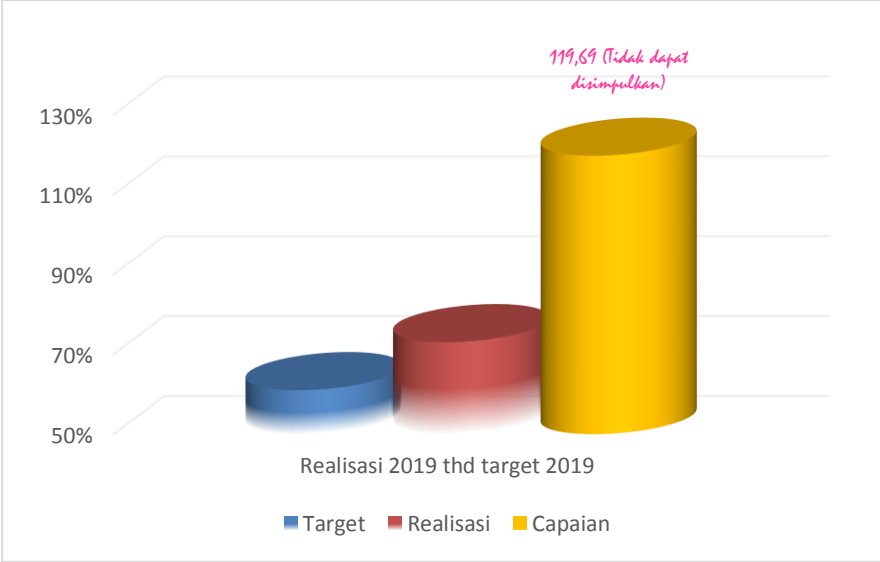

Gambar 29. Grafik capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Balai POM di Palu tahun 2019

1. **Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan**

Pada tahun 2019, Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 73,01. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 29. Capaian indikator kinerja 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' tahun 2019 terhadap target 2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2019 | REALISASI 2019 | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan (*compliance index* ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 61 | 73,01 | 119,69 |




Gbr 30. Grafik Capaian indikator kinerja 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' tahun 2019 terhadap target 2019

**Tabel 30. Kategori Indeks kepatuhan pelaku usaha (*compliance index*)**

| Kategori | Interval Indeks |
|---|---|
| Kurang Baik | 0 - 33,33 |
| Cukup Baik | >33,33 – 66,67 |
| Baik | >66,67 – 90,00 |
| Sangat Baik | > 90,00 – 100,00 |

Dari data realisasi kinerja, I di bidang Obat dan Makanan tahun 2019 sebesar 73,01, terlihat bahwa target kinerja 2019 telah tercapai dengan persentase capaian 119,69% (Sangat Baik). Nilai Indeks kepatuhan pelaku usaha berada pada kategori 'Baik'.

**Tabel 31. Indeks kepatuhan pelaku usaha skala nasional tahun 2019**

| IKPU Berdasarkan Produk | 2019 |
|---|---|
| Obat | 84,43 |
| Obat Tradisional | 75,31 |
| Suplemen Kesehatan | 88,77 |
| Kosmetik | 80,31 |
| Pangan Olahan | 77,10 |
| **IKPU Nasional** | **81,18** |

Variabel indikator pembentuk Indeks kepatuhan pelaku usaha adalah :

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP);
2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP);
3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekusor yang memenuhi ketentuan;
4. Hasil pengawasan iklan dan penandaan Obat dan Makanan;
5. Industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR).

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' adalah sebagai berikut :

1. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan Balai POM di Palu dan Loka POM di Banggai sebesar 100% dari seluruh jumlah sarana produksi (MD dan UTD);
2. Pelaksanaaan bimbingan teknis untuk pelaku usaha tentang Cara Distribusi Obat yang Baik kepada distributor obat dan sarana pelayanan kefarmasian;
3. Pengawasan label dilakukan 100% terhadap komoditi yang di*sampling* dan pengawasan iklan pada media cetak dan elektronik telah dilaporkan ke pusat untuk ditindaklanjuti;
4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang produksi Obat dan Makanan kepada pelaku usaha;
5. Dukungan lintas sektor dari pemerintah daerah dan organisasi profesi;

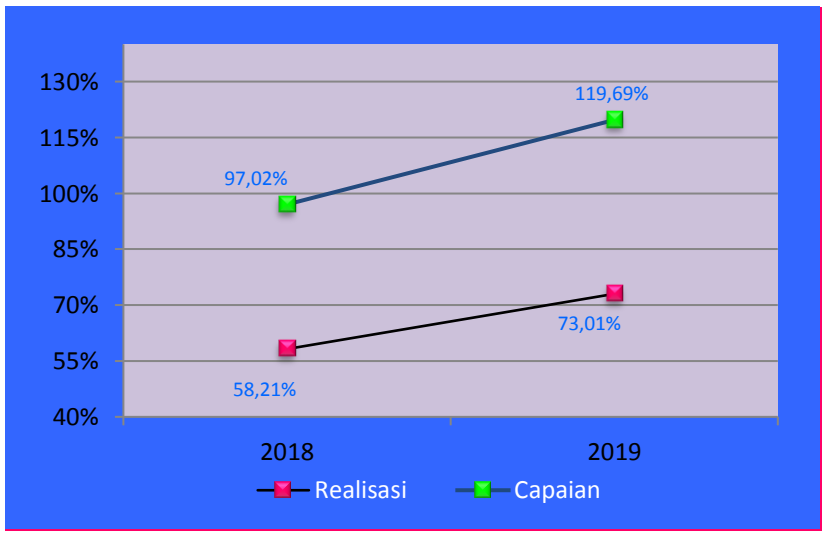
Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah agar menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang dikeluarkan oleh Balai POM di Palu secara konsisten;
3. Meningkatkan monitoring terhadap perbaikan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Balai POM di Palu;
4. Senantiasa mendorong komitmen pelaku usaha dalam menerapkan cara produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang baik;

*Realisasi dan capaian indikator 'Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' Balai POM di Palu tahun 2018-2019*

**Tabel 32. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' tahun 2018-2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | 2018 | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan (*compliance index* ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 60,00 | 58,21 | 97,02 | 61,00 | 73,01 | 119,69 |



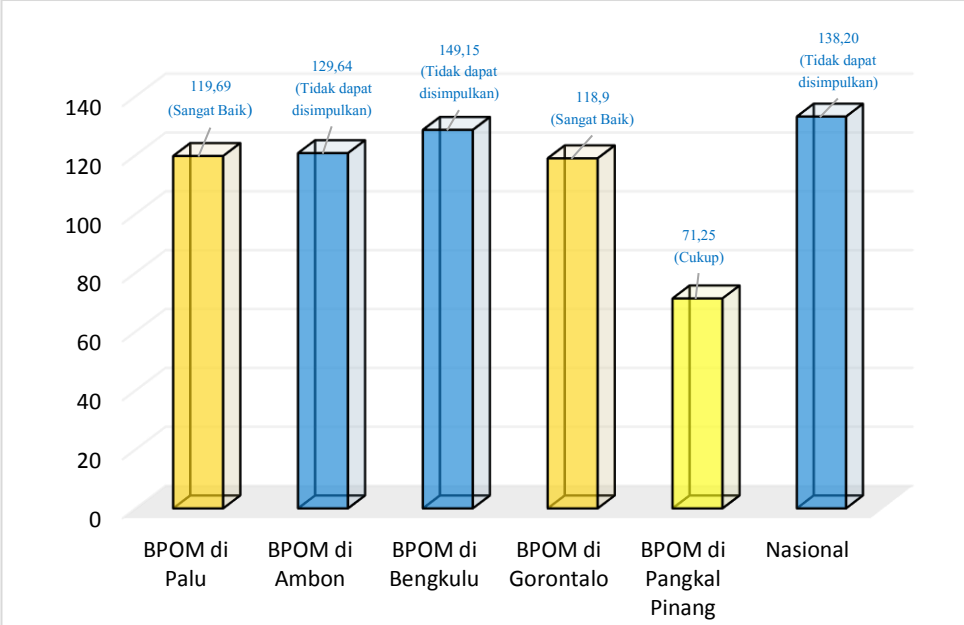

Gbr 31. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' tahun 2018-2019

Pada tahun 2019, Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan meningkat dibandingkan tahun 2018, dengan capaian berada pada kategori 'Sangat Baik'.

*Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dan nasional*

**Tabel 33 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara/sejenis dan nasional tahun 2019**

| INDIKATOR KINERJA | NILAI | BALAI POM | | | | | NASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PALU | AMBON | BENGKULU | GORONTALO | PANGKAL PINANG | |
| Indeks kepatuhan (*compliance index* ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | Realisasi | 73,01 | 73,61 | 78,43 | 72,53 | 43,46 | 84,30 |
| | Capaian (%) | 119,69 | 120,67 | 128,57 | 118,90 | 71,25 | 138,20 |




Gbr 32. Grafik perbandingan capaian indikator 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis dan nasional tahun 2019

Berdasarkan grafik di atas, Indeks kepatuhan pelaku usaha Balai POM di Palu dan Balai POM di Gorontalo termasuk kategori 'Sangat Baik'. Target indeks kepatuhan pelaku usaha yang ditetapkan kelima balai POM tersebut adalah sama yaitu 61%. Iindeks kepatuhan pelaku usaha Balai POM di Ambon dan Bengkulu termasuk dalam kategori 'Tidak dapat disimpulkan' dan Balai POM di Pangkal Pinang termasuk dalam kategori 'Cukup'.

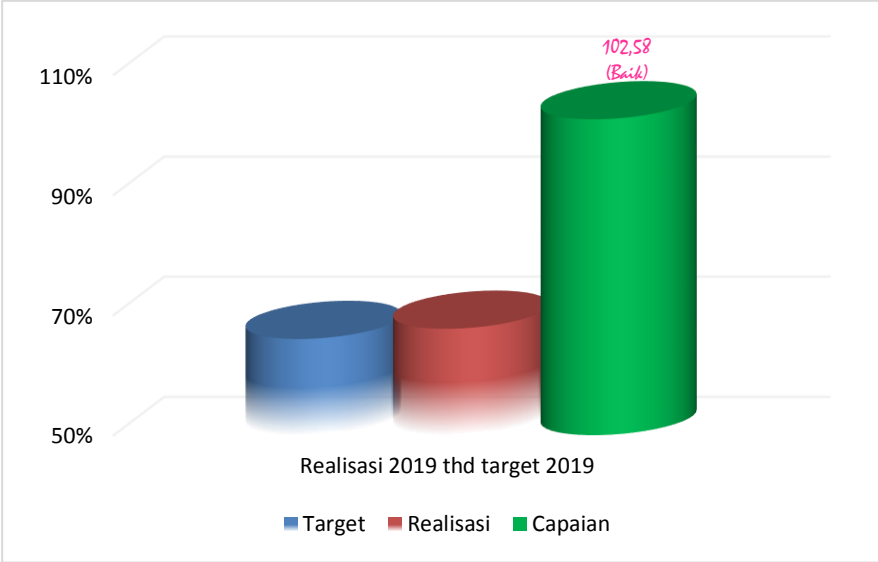
Realisasi indikator 'IKPU Balai POM di Palu' masih berada di bawah nilai IKPU nasional (81,18). Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Balai POM di Palu, diantaranya Meningkatkan *monitoring* terhadap perbaikan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Balai POM di Palu; Senantiasa mendorong komitmen pelaku usaha dalam menerapkan cara produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang baik;

### 2. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu

Pada tahun 2019, Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu 67,70. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 34. Capaian indikator kinerja 'Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu' tahun 2019 terhadap target 2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2019 | REALISASI 2019 | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index* ) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | 66,00 | 67,70 | 102,58 |




Gbr 33. Grafik Capaian indikator kinerja 'Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2019 terhadap target 2019

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat Sulawesi Tengah berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, Sikap dan Perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat.

**Tabel 35. Kategori Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*)**

| Kategori | Interval Indeks | Lebar Interval | % |
|---|---|---|---|
| Tidak Baik | <45 | 45 | 0,30 |
| Kurang Baik | 45 – 60 | 15 | 12,82 |
| Cukup Baik | 60 – 75 | 15 | 64,40 |
| Baik | 75 – 90 | 15 | 21,69 |
| Sangat Baik | ≥ 90 | 10 | 0,79 |

Dari data realisasi kinerja, Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman tahun 2019 sebesar 67,70, terlihat bahwa target kinerja 2019 telah tercapai dengan persentase capaian 102,58% (Baik). Jika dilihat dari pengkategorian nilai indeks, Balai POM di Palu memiliki nilai indeks kesadaran masyarakat yang 'Cukup Baik'

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator kinerja 'Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat di era revolusi industri 4.0 yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang Obat dan Makanan aman baik dari media cetak, elektronik, maupun perangkat digital;
2. Adanya interaksi Balai POM di Palu dengan masyarakat melalui media sosial yang menyediakan informasi terkait Obat dan Makanan yang mudah diakses oleh masyarakat, diantaranya *Youtube, Facebook, Instagram dan Twitter;*
3. Pelayanan publik terpadu di Balai POM di Palu dilaksanakan setiap hari kerja sehingga masyarakat dapat meminta informasi, menyampaikan pengaduan, permintaan uji sampel dan pendaftaran produk;
4. Adanya pemberdayaan komunitas dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keamanan Obat dan Makanan di kota Palu dan beberapa kabupaten diantaranya komunitas desa, pasar, sekolah, pramuka, UMKM, PKK, dan ritel;
5. Tersedianya media informasi (audio visual) di Balai POM di Palu dalam bentuk iklan layanan masyarakat dan anjungan informasi yang dapat dioperasikan secara mandiri oleh masyarakat;
6. Adanya berbagai jenis kegiatan Balai POM di Palu dalam usaha peningkatan pengetahuan masyarakat seperti tersedianya mobil KIE keliling, promosi melalui media, pameran dan penyebaran informasi ke seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

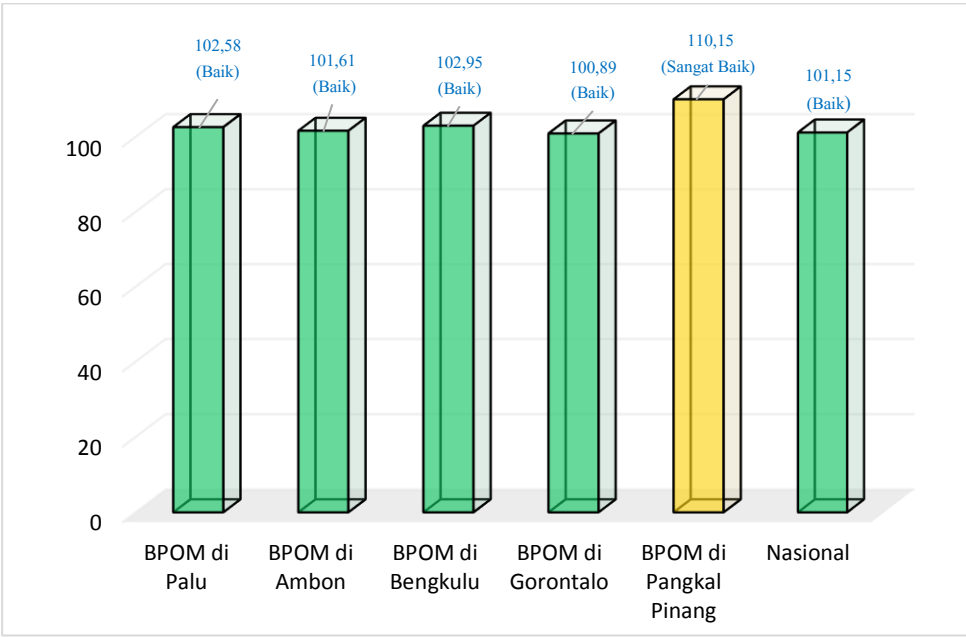
1. Meningkatkan kompetensi pegawai khususnya dalam pelayanan prima dan *public speaking;*
2. Membentuk kader penyebaran informasi hingga ke tingkat kelurahan;
3. Menginisiasi program-program pemberdayaan masyarakat di 9 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah;
4. Melakukan advokasi secara periodik ke kabupaten/kota untuk mereplikasi program-program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Badan POM seperti Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman;

5. Meningkatkan eksistensi di media sosial karena saat ini telah terjadi pergeseran penyebaran informasi ke arah digitalisasi;
6. Membuat infografis atau bentuk media informasi lain yang lebih inovatif, kreatif dan tersebar secara masif (*viral*);
7. Perkuatan koordinasi dengan media/pers untuk meningkatkan publikasi hasil kegiatan kinerja ke masyarakat.
8. Dari hasil survei dapat diketahui bahwa pengetahuan dan perilaku masyarakat terhadap Nomor Ijin Edar masuk dalam kategori "tidak baik", sehingga dalam melakukan KIE perlu penekanan pada komponen perilaku dalam mencermati Nomor Ijin Edar yang merupakan bagian dari KLIK.
9. Perlu ditinjau ulang terhadap cara penulisan informasi dalam label terutama Nomor Ijin Edar agar terlihat lebih jelas pada kemasan sehingga mudah untuk dibaca masyarakat.
10. Televisi merupakan media yang paling efektif dalam melakukan KIE sekaligus memperkenalkan BPOM kepada masyarakat.
11. Perlu peningkatan sosialisasi website BPOM, HALOBPOM dan media sosial lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

*Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan' Balai POM di dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019*

**Tabel 36. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara/ sejenis tahun 2019**

| INDIKATOR KINERJA | NILAI | BALAI POM | | | | | NASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PALU | AMBON | BENGKULU | GORONTALO | PANGKAL PINANG | |
| 'Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index* ) terhadap Obat dan Makanan aman' | Realisasi | 67,70 | 67,06 | 67,95 | 66,59 | 72,70 | 68,78 |
| | Capaian (%) | 102,58 | 101,61 | 102,95 | 100,89 | 110,15 | 101,15 |

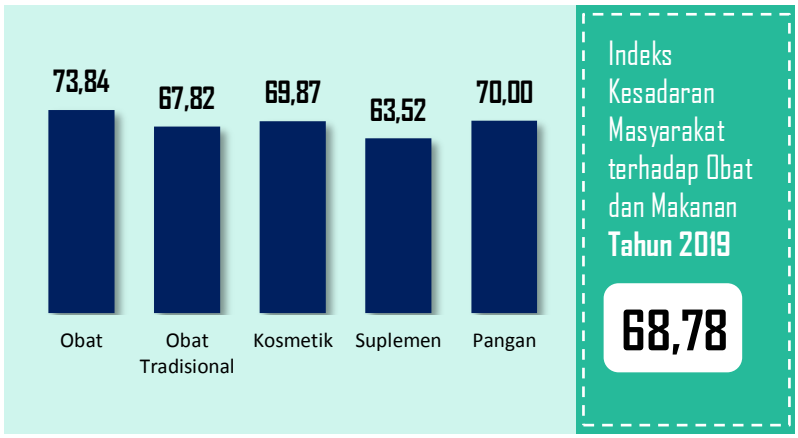



Gbr 34. Grafik perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks Kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019

Balai POM di Pangkal Pinang memiliki nilai Indeks kesadaran masyarakat paling tinggi di antara balai lainnya dan juga berada di atas nilai nasional. Capaian kinerjanya berada pada kategori 'Sangat Baik', berbeda dengan 4 balai lainnya yang berada pada kategori 'Baik'. Balai POM di Palu memiliki nilai indeks kesadaran masyarakat lebih rendah dibandingkan Balai POM di Pangkal Pinang dan Balai POM di Bengkulu dan juga berada di bawah nilai nasional

Balai POM di Palu masih harus berupaya khususnya seksi Informasi dan Komunikasi (Infokom) untuk lebih mendorong kesadaran masyarakat tentang Obat dan Makanan terutama pada indikator sikap dan perilaku masyarakat. Untuk indikator pengetahuan masyarakat telah memperoleh nilai baik. Pengemasan informasi, berita, maupun iklan di media sosial perlu perbaikan agar senantiasa *up to date*. Penggunaan infografis dapat menjadi salah satu cara untuk menarik masyarakat untuk melihat, membaca, atau mempelajari lebih lanjut tentang Obat dan Makanan.

Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan tahun 2019 skala nasional adalah 68,78, dengan rincian sebagai berikut :




Gbr 35. Grafik Indeks Kesadaran masyarakat (*awareness index*) skala nasional tahun 2019

Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat secara nasional berdasarkan 3 (tiga) Indikator (Pengetahuan, Sikap dan Perilaku) terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat 68,78. Dengan rincian : Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat 75,06 (baik), Nilai Indeks Sikap Masyarakat 75,08 (baik) dan Nilai Indeks Perilaku Masyarakat 56,20 (kurang baik). Secara umum Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat dan Sikap Masyarakat sudah cukup baik namun tidak diikuti oleh Perilaku Masyarakat terutama dalam mencermati Nomor Ijin Edar (tidak baik). Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan tahun 2019 Balai POM di Palu adalah 67,70 dan berada di bawah skala nasional yaitu 68,78, dengan rincian sebagai berikut :

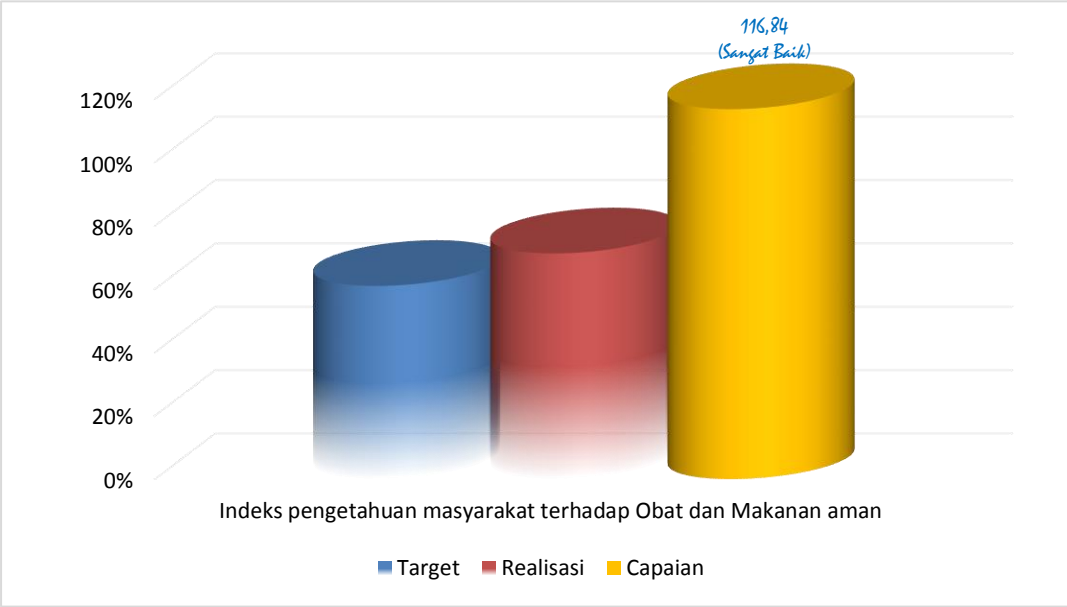
## A.3 Sasaran Kegiatan 3

**Sasaran Kegiatan 3**
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu

### Indikator Kinerja Sasaran

**Tabel 37. Capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Balai POM di Palu Tahun 2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | 1 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 61,00 | 71,27 | 116,84 | Sangat Baik |



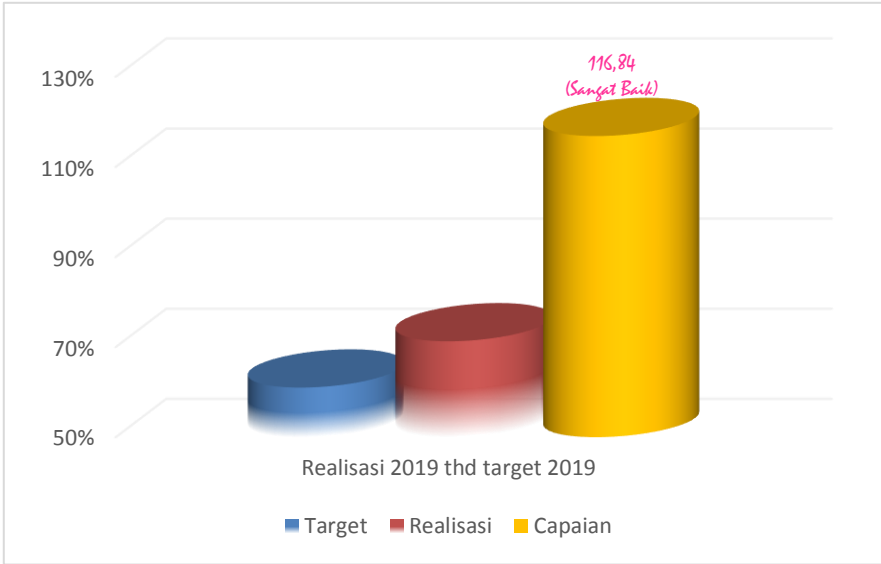

Gambar 36. Capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Balai POM di Palu tahun 2019

## 1. Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman

Pada tahun 2019, Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman sebesar 71,27. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 38. Capaian indikator kinerja 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2019 terhadap target 2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2019 | REALISASI 2019 | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 61,00 | 71,27 | 116,84 |




Gbr 37. Grafik capaian indicator kinerja 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2019 terhadap target 2019

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan oleh BPOM. Survei dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan. Komoditas yang disurvei antara lain Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Pangan.

Dari data realisasi kinerja, Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman Balai POM di Palu tahun 2019 sebesar 71,27, terlihat bahwa target kinerja 2019 telah tercapai dengan persentase capaian 116,84% (Sangat Baik). Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2019 sebesar 72,84. Hal ini mengindikasikan

bahwa pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan sudah 'Cukup Baik' karena berada pada rentang 50,01 – 75,00. Kategori ukuran Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

**Tabel 39. Kategori ukuran Indeks pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan**

| Skala Indeks | Keterangan Kategori |
|---|---|
| 0 – 25,00 | Pengetahuan Buruk |
| 25,01 – 50,00 | Pengetahuan Rendah |
| 50,01 – 75,00 | Pengetahuan Cukup Baik |
| 75,01– 100 | Pengetahuan Sangat Baik |

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator kinerja 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' adalah sebagai berikut :

1. Adanya program pengembangan kompetensi petugas dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
2. Adanya layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui *whatsapp, sms*, maupun telepon 24 jam setiap hari. Pada tahun 2019, jumlah permintaan informasi dan pengaduan sebanyak 416 layanan, jumlah layanan ini telah mencapai target layanan yaitu 350 layanan (118,86 %);
3. Adanya kegiatan terpadu KIE dan pengujian setempat dengan mobil laboratorium keliling;
4. Adanya kegiatan promosi Balai POM di Palu yang menyentuh semua lapisan masyarakat yaitu KIE keliling, pameran, *Car Free Day*, *talkshow* serta pemasangan iklan di ruang publik.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

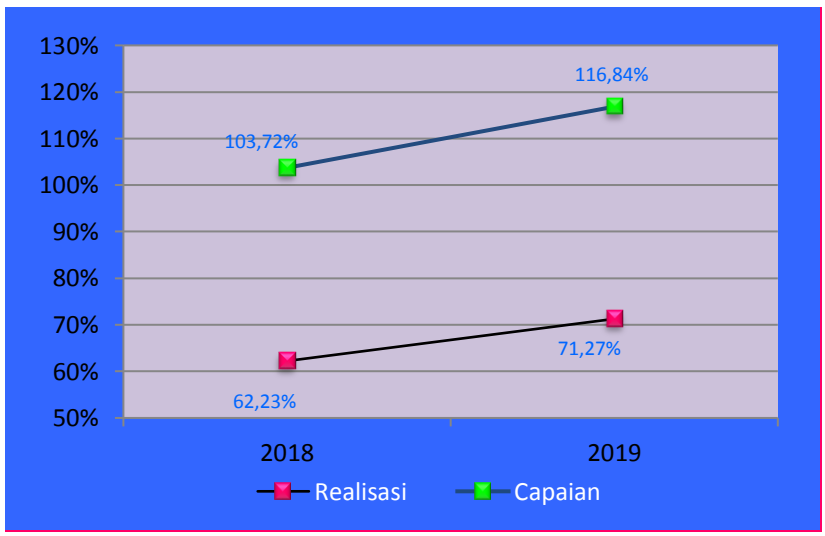
1. Meningkatkan kompetensi pegawai khususnya dalam pelayanan prima dan *public speaking*;
2. Mengoptimalkan fungsi dan memutakhirkan pengetahuan/ kompetensi kader yang telah terbentuk;
3. Membuat media promosi dan alat peraga yang lebih inovatif, kreatif, dan menarik;
4. Meningkatkan eksistensi Balai POM di Palu di media sosial agar menyentuh generasi milenial;
5. Perkuatan koordinasi dengan media/pers untuk meningkatkan publikasi hasil kegiatan kinerja ke masyarakat;
6. Dari hasil survei dapat diketahui bahwa pengetahuan dan perilaku masyarakat terhadap Nomor Ijin Edar masuk dalam kategori "Tidak baik", sehingga dalam melakukan KIE perlu penekanan pada komponen perilaku dalam mencermati Nomor Ijin Edar yang merupakan bagian dari KLIK;

7. Perlu ditinjau ulang terhadap cara penulisan informasi dalam label terutama Nomor Ijin Edar agar terlihat lebih jelas pada kemasan sehingga mudah untuk dibaca masyarakat;
8. Televisi merupakan media yang paling efektif dalam melakukan KIE sekaligus memperkenalkan BPOM kepada masyarakat;
9. Perlu peningkatan sosialisasi website BPOM, HALOBPOM dan media sosial lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

*Realisasi dan capaian indikator 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' Balai POM di Palu tahun 2018-2019*

**Tabel 40. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2018-2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | 2018 | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 60,00 | 62,23 | 103,72 | 61,00 | 71,27 | 116,84 |



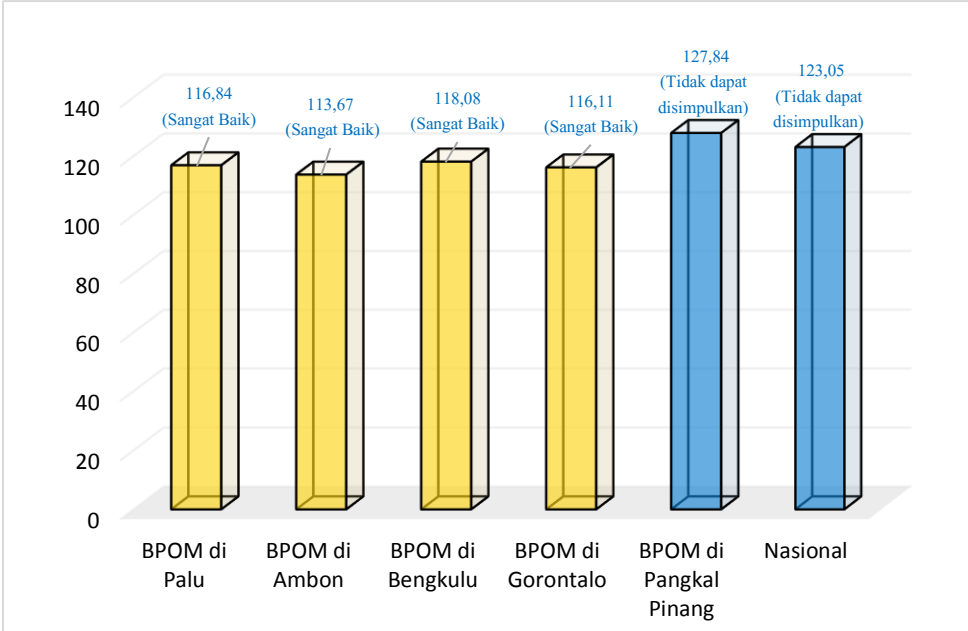

Gbr 38 Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2018-2019

Realisasi dan persentase capaian 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan KIE yang dilakukan oleh Balai POM di Palu cukup efektif meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan.

*Perbandingan realisasi dan persentase capaian 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019*

**Tabel 41. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019**

| INDIKATOR KINERJA | NILAI | BALAI POM | | | | | NASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PALU | AMBON | BENGKULU | GORONTALO | PANGKAL PINANG | |
| Indeks pengetauhan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' | Realisasi | 71,27 | 69,34 | 72,03 | 70,83 | 77,98 | 75,06 |
| | Persentase Capaian | 116,84 | 113,67 | 118,08 | 116,11 | 127,84 | 123,05 |

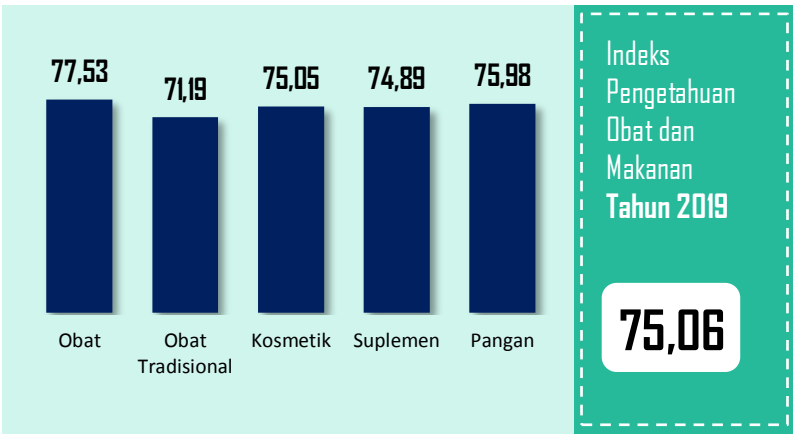



Gbr 39. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019

Balai POM di Pangkal Pinang memiliki nilai Indeks pengetahuan yang berada di atas nilai indeks nasional. Persentase capaian terhadap target tahun 2019, Balai POM di Palu berada pada kategori 'Sangat Baik' sedangkan Balai POM di Pangkal Pinang berada pada kategori 'Tidak dapat disimpulkan' karena berada di atas 120. Diantara kelima Balai POM tersebut, nilai Indeks pengetahuan Balai POM di Bengkulu adalah 'Sangat Baik disusul oleh Balai POM di Palu pada urutan kedua, Balai POM di Gorontalo dan yang terakhir Balai POM di Ambon. Hal ini dapat disebabkan kegiatan KIE Balai POM di bengkulu berjalan cukup efektif, dengan konten selalu mengenalkan aplikasi yang dimiliki Badan POM untuk mengenali keamanan Obat dan Makanan serta informasi yang tepat dan aplikatif. Selain itu, dengan dukungan teknologi smartphone dan berbagai aplikasi seperti cekbpom dan *public warning*, masyarakat dapat dengan mudah mengenali produk yang tidak memenuhi syarat seperti produk tanpa izin edar, produk yang pernah ditarik dari peredaran, dan lain-lain.

Balai POM di Palu masih harus berupaya terutama seksi Informasi dan Komunikasi (Infokom) untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan. Pengemasan informasi, berita, maupun iklan di media sosial perlu perbaikan agar senantiasa *up to date*. Penggunaan infografis dapat menjadi salah satu cara untuk menarik masyarakat untuk melihat, membaca, atau mempelajari lebih lanjut tentang Obat dan Makanan.

Nilai Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman Balai POM di Palu masih berada di bawah nilai Indeks pengetahuan Obat dan Makanan nasional (75,06). Dari hasil analisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap KLIK diketahui bahwa pengetahuan tentang kadaluwarsa menunjukkan prosentase tertinggi, diikuti oleh pengetahuan tentang label dan kemasan, yang terendah adalah pengetahuan nomor ijin edar.




Gbr 40. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' skala nasional tahun 2019

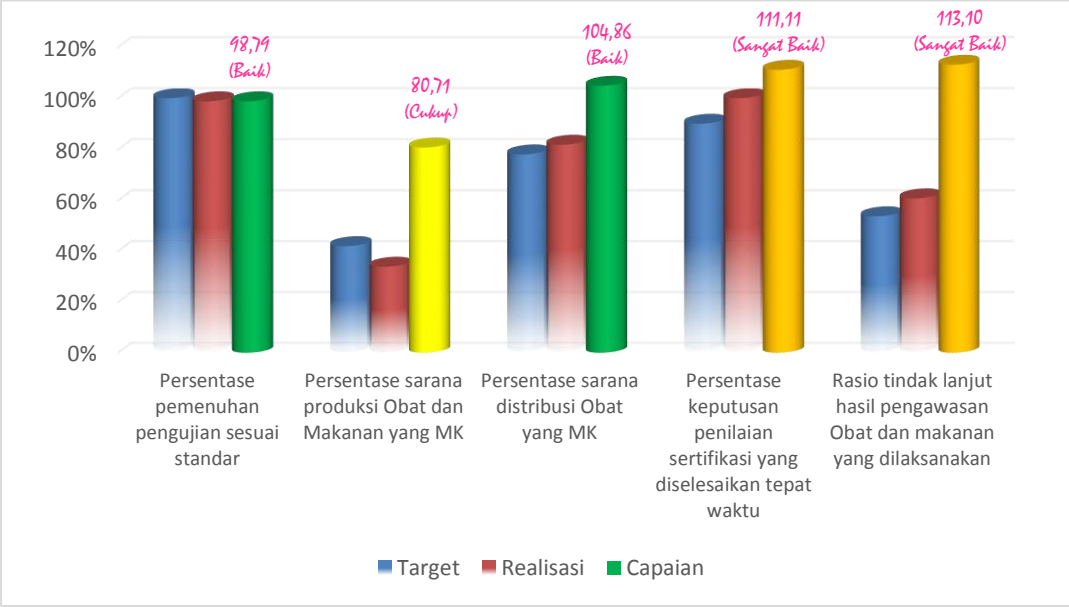
## A.4 Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu

### Indikator Kinerja Sasaran

**Tabel 42. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu tahun 2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | 1 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 100% | 98,79% | 98,79% | Baik |
| | 2 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 42,00% | 33,90% | 80,71% | Cukup |
| | 3 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 78,00% | 81,79% | 104,86% | Baik |
| | 4 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 90,00% | 100,00% | 111,11% | Sangat Baik |
| | 5 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 53,75% | 60,79% | 113,10% | Sangat Baik |



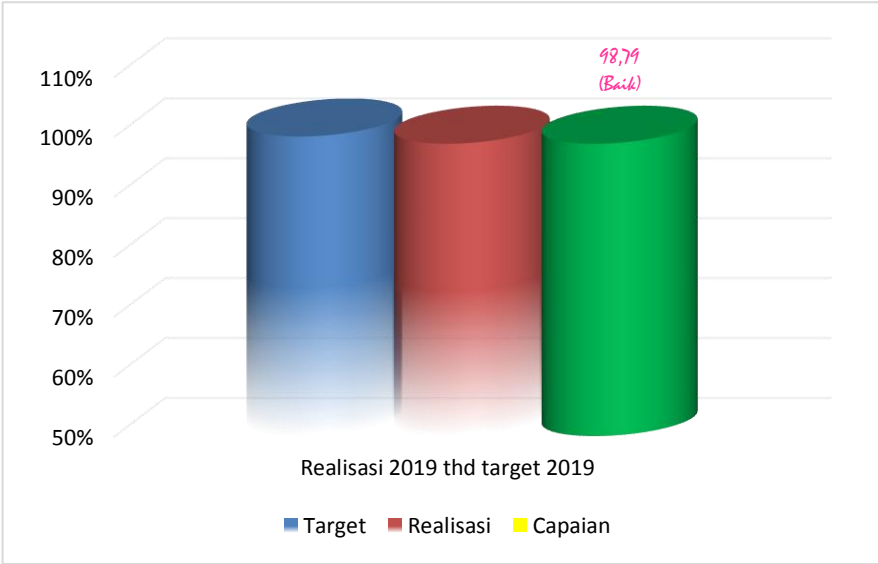

Gambar 41. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu tahun 2019

## 1. Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar

Pada tahun 2019, jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar sebanyak 2202 sampel dari 2229 sampel yang harus diuji. Jumlah tersebut termasuk produk yang *disampling* oleh Loka POM di Kabupaten Banggai dan diuji oleh Balai POM di Palu. Sebanyak 27 sampel (Obat 3 sampel, Obat Tradisional 16 sampel, Suplemen 8 sampel) tidak memenuhi parameter uji kritis (wajib). Rincian capaian persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 43. Capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' tahun 2019 terhadap target 2019**

| INDIKATOR KINERJA | PEMBILANG | | PENYEBUT | | TARGET 2019 | CAPAIAN 2018 | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEFINISI | REALISASI | DEFINISI | REALISASI | | | |
| Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar | 2202 | Sampel yang harus diuji | 2229 | 100,00 | 98,79 | 98,79 |




Gbr 42. Grafik capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' tahun 2019 terhadap target 2019

Persentase pemenuhan pengujian Obat dan Makanan sesuai standar terhadap target sebesar 98,79% dengan kategori "Baik". Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor, antara lain :

1. Beberapa baku pembanding *indent*, sehingga beberapa parameter uji tidak bisa dikerjakan;
2. Alat untuk menguji beberapa parameter tidak dimiliki, misalnya polarimeter untuk uji sediaan infus Glukosa dan disolusi tipe 7 untuk uji disolusi Nifedipin.

Keberhasilan pencapaian indicator kinerja 'persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' disebabkan oleh :

1. Kepatuhan terhadap pedoman *sampling* dan pengujian

   *Sampling* dan pengujian telah dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa parameter uji yang belum dilakukan karena keterbatasan alat dan baku pembanding.

2. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan petugas *sampling* dan pengujian melalui pelatihan internal, eksternal dan kegiatan magang di PPPOMN.

   *Sampling* dan pengujian dapat dilaksanakan terhadap sampel yang menjadi target sesuai standar yang telah ditetapkan. Sampel yang belum mampu uji karena keterbatasan alat dan kompetensi, dikirim ke balai rujukan. Misalnya uji porcein DNA dirujuk ke BBPOM di Mataram, Makassar dan Pontianak.

3. Sarana dan prasarana pengujian yang memadai

   Laboratorium mampu mengoptimalkan sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia sehingga mampu memastikan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
4. Konsisten mengimplementasikan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015.

   Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian eksternal dan internal melalui uji profisiensi, uji kolaborasi, uji banding antar laboratorium dan uji banding antar personel. Melaksanakan kalibrasi alat secara berkala setiap tahun, untuk menjamin hasil pengukuran akurat dan mampu telusur ke standar yang lebih tinggi.
5. Melaksanakan verifikasi metode analisis untuk menjamin bahwa metode yang digunakan sudah sesuai untuk penggunaannya
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi *sampling* dan pengujian setiap tiga bulan

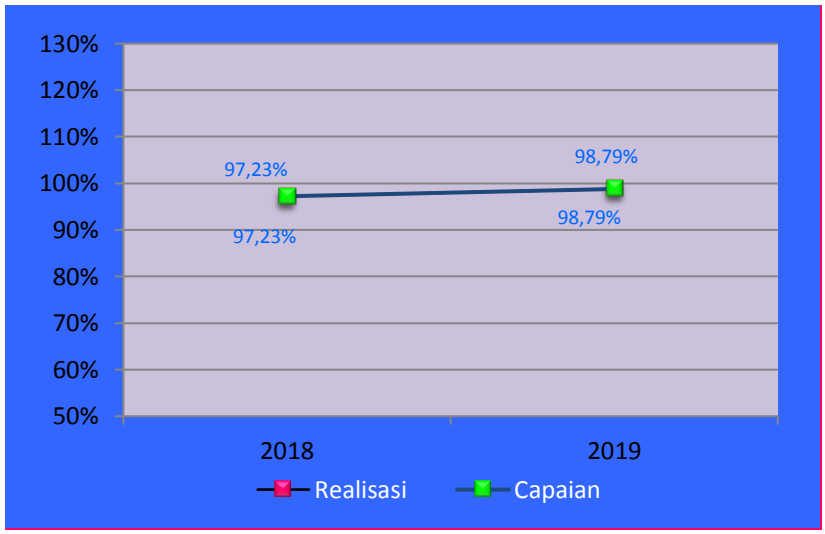
Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Mengoptimalkan perencanaan dan proses pengadaan alat, reagen dan baku pembanding yang belum tersedia di Laboratorium Baku Pembanding Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN);
2. Meningkatkan koordinasi antara seksi pemeriksaan dan pengujian dalam perencanaan *sampling*;
3. Pengadaan alat utama dan sarana prasarana laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium;
4. Meningkatkan kompetensi petugas *sampling* dan pengujian melalui pelatihan teknis internal maupun eksternal

*Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar tahun 2018-2019.*

**Tabel 44. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' tahun 2018-2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | 2018 | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 100,00 | 97,23 | 97,23 | 100,00 | 98,79 | 98,79 |



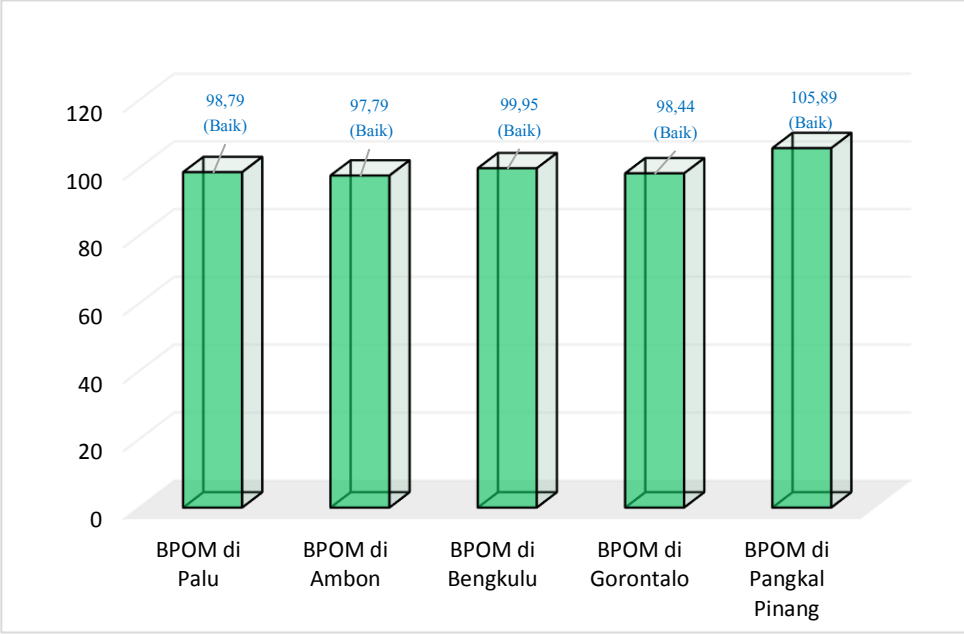

Gbr 43. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' tahun 2018-2019

Dari grafik realisasi pemenuhan pengujian sesuai standar tahun 2018 dan 2019, terlihat adanya kenaikan 1,56% karena peningkatan kompetensi personel pengujian, Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian, Standar Minimal Peralatan Laboratorium.

*Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019*

**Tabel 45. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019**

| INDIKATOR KINERJA | NILAI | BALAI POM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PALU | AMBON | BENGKULU | GORONTALO | PANGKAL PINANG |
| Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | Realisasi | 98,79 | 97,79 | 99,95 | 98,44 | 100,59 |
| | Capaian (%) | 98,79 | 97,79 | 99,95 | 98,44 | 105,89 |




Gbr 44. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019

Target indikator kinerja yang ditetapkan oleh kelima balai POM di atas hampir sama yaitu 100%, kecuali Balai POM di Pangkal Pinang menetapkan target lebih rendah yaitu 95%. Capaian kelima balai semuanya berada pada kategori 'Baik', Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Balai POM di Palu, diantaranya Mengoptimalkan perencanaan dan proses pengadaan alat, reagen dan baku pembanding yang belum tersedia di Laboratorium Baku Pembanding Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN); Pengadaan alat utama dan sarana prasarana laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium;

## 2. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Pada tahun 2019, jumlah Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 20 sarana dari 59 target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa. Jumlah tersebut termasuk sarana produksi yang diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Banggai. Rincian capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 46. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2019 terhadap target 2019**

| INDIKATOR KINERJA | PEMBILANG | | PENYEBUT | | TARGET 2019 | CAPAIAN 2019 | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEFINISI | REALISASI | DEFINISI | REALISASI | | | |
| Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 20 | Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa | 59 | 42,00 | 33,90 | 80,71 |




Gbr 45. Grafik capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2019 terhadap target 2019

Dari data realisasi kinerja terhadap Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2019 sebesar 33,90% terlihat bahwa target kinerja 2019 belum tercapai dengan persentase capaian hanya 80,71% (cukup). Hal ini disebabkan masih terdapat pelaku usaha yang tidak konsisten dalam penerapan terkait CPPOB. Penyebab lain bertambahnya sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan karena sarana tersebut mengalami kerusakan pada saat bencana alam tahun 2018 dan belum dilakukan perbaikan sehingga terjadinya penurunan penilaian saat inspeksi.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' disebabkan oleh:

1. Sebagian besar sarana produksi di wilayah pengawasan Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai mudah dijangkau baik melalui jalur darat, laut maupun udara;

2. Perencanaan pengawasan terhadap sarana produksi Obat dan Makanan telah dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek baik dari segi analisis risiko, jumlah SDM serta anggaran pelaksanaan kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pada saat perencanaan tahunan;
3. Kualitas dan kuantitas SDM yang melakukan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan telah memadai dan kompeten dalam melakukan kegiatan pengawasan. Balai POM di Palu khususnya Seksi Pemeriksaan telah memiliki petugas dengan kualifikasi *Food Inspectur* Dasar 1 orang, *Food Inspector* Muda 2 orang dan *Food Inspector* Madya 2 orang. Sedangkan Loka POM di Banggai telah memiliki petugas dengan kualifikasi *Food Inspector* dasar 1 orang dan *Food Inspector* muda 1 orang. Selain itu Balai POM di Palu juga sudah memiliki petugas dengan kualifikasi inspektur CPOB sebanyak 2 orang;
4. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah selama ini telah terjalin dengan baik dengan adanya MoU antara Balai POM di Palu dengan beberapa Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Tengah serta telah dilakukan pengawasan terpadu dengan dinas terkait di kabupaten/kota pada sarana produksi;

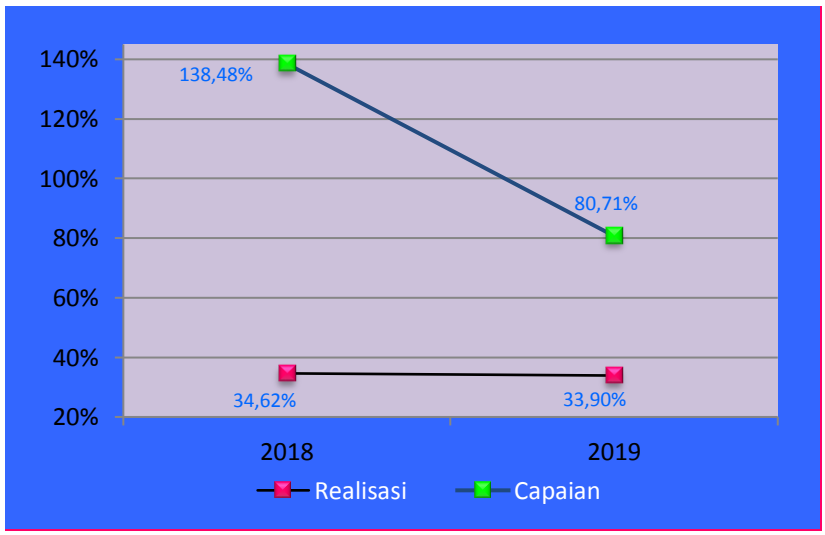
## Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau lintas sektor terkait lainnya dalam upaya tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
2. Senantiasa mendorong pelaku usaha produksi Obat dan Makanan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan kemanan Obat dan Makanan dengan melaksanakan cara produksi Obat dan Makanan yang baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan dari aspek mutu / label, administrasi, higiene / sanitasi akan dilakukan pembinaan atau sanksi administratif sesuai pola tindak lanjut bagi industri pangan (MD) dan memberikan rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dilakukan pembinaan dan sanksi administratif untuk sarana IRTP.

*Realisasi dan capaian indikator 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' Balai POM di Palu tahun 2018-2019*

**Tabel 47. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2018-2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | 2018 | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi | 25,00 | 34,62 | 138,48 | 42,00 | 33,90 | 80,71 |



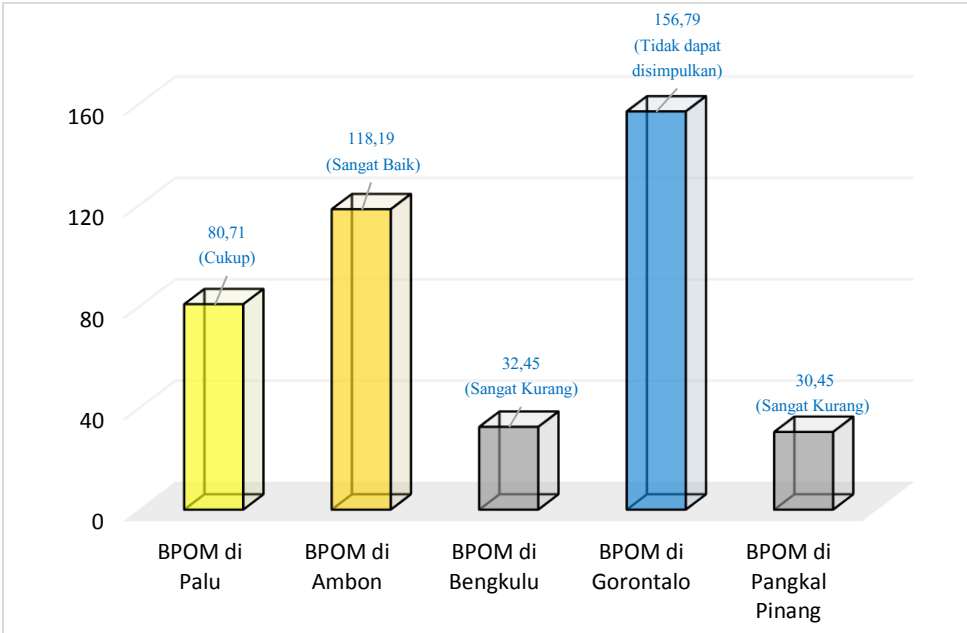

Gbr 46. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2018-2019

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian persentase pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Realisasi sarana produksi yang memenuhi ketentuan pada tahun 2019 (33,90%) tidak jauh berbeda dengan realisasi tahun 2018 (34,60%), namun terjadi kenaikan target sarana produksi yang memenuhi ketentuan secara signifikan dari tahun 2018 (25%) ke tahun 2019 (42%), tetapi tidak diiringi dengan perkembangan jumlah sarana produksi yang memenuhi ketentuan mengingat kondisi sosial ekonomi yang belum stabil pasca bencana.

*Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019*

**Tabel 48. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019**

| INDIKATOR KINERJA | NILAI | BALAI POM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PALU | AMBON | BENGKULU | GORONTALO | PANGKAL PINANG |
| Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | Realisasi | 33,90 | 49,64 | 12,98 | 65,85 | 12,73 |
| | Capaian (%) | 80,71 | 118,18 | 32,44 | 156,79 | 30,45 |




Gbr 47. Grafik perbandingan capaian indikator 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019

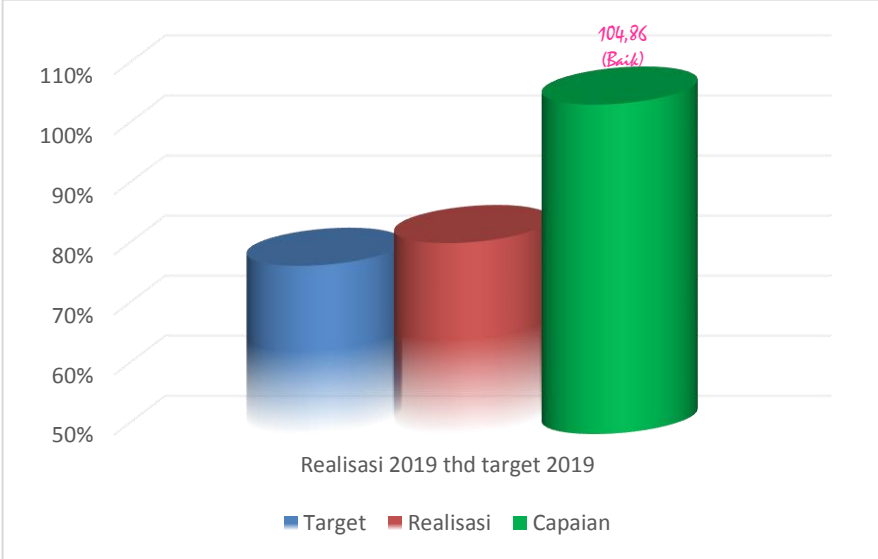
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tertinggi adalah Balai POM di Ambon dengan kategori sangat baik, disusul oleh Balai POM di Palu dengan kategori 'Cukup', sedangkan Balai POM di Gorontalo termasuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Target yang ditetapkan oleh Balai POM di Palu, Balai POM di Ambon dan Balai POM di Gorontalo adalah sama yaitu 42%, Sedangkan Balai POM di Pangkal Pinang dan Balai POM di Bengkulu menargetkan masing-masing 41,80% dan 40%. Balai POM di Pangkal Pinang dan Balai POM di Bengkulu memiliki capaian kinerja terendah dan berada pada kategori 'Sangat Kurang'.

## 3. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan

Pada tahun 2019, jumlah Jumlah sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan 292 sarana dari 357 target Jumlah sarana distribusi yang diperiksa. Jumlah tersebut termasuk sarana distribusi yang diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Banggai. Rincian capaian persentase Jumlah sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 49. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2019 terhadap target 2019**

| INDIKATOR KINERJA | PEMBILANG | | PENYEBUT | | TARGET 2019 | CAPAIAN 2019 | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEFINISI | REALISASI | DEFINISI | REALISASI | | | |
| Jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan | Jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan | 292 | Jumlah sarana distribusi yang diperiksa | 357 | 78,00 | 81,79 | 104,86 |




Gbr 48. Grafik capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2019 terhadap target 2019

Dari data realisasi kinerja terhadap Sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan tahun 2019 sebesar 81,79% terlihat bahwa target kinerja 2019 telah tercapai dengan persentase capaian 104,86% (Baik).

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' disebabkan oleh:

1. Wilayah penyebaran sarana distribusi Obat yang menjadi lingkup pengawasan Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai sangat luas namun masih dapat diakses karena ketersediaan sarana transportasi baik darat, laut, maupun udara setiap harinya;
2. Perencanaan pengawasan sarana distribusi Obat dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan pada rencana tahunan yang telah dibagi secara proporsional setiap bulannya dengan mempertimbangkan segala aspek, baik dari segi jumlah pegawai, analisis risiko maupun anggaran pelaksanaan kegiatan;
3. Secara kuantitas SDM terkait pengawasan sarana distribusi obat belum memadai namun kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sudah cukup baik. Sampai tahun 2019, petugas Balai POM di Palu khususnya Seksi Pemeriksan yang sudah memiliki kompetensi sebagai inspektur CDOB junior 1 orang, Inspekstur CDOB senior 2 orang, Inspektur CDOB Kepala 2 orang;
4. Koordinasi Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai dengan Pemerintah Daerah cukup baik dengan berjalannya kegiatan terpadu dalam bidang pengawasan dan kesediaan untuk saling bertukar informasi untuk mempermudah pencapaian target pengawasan;

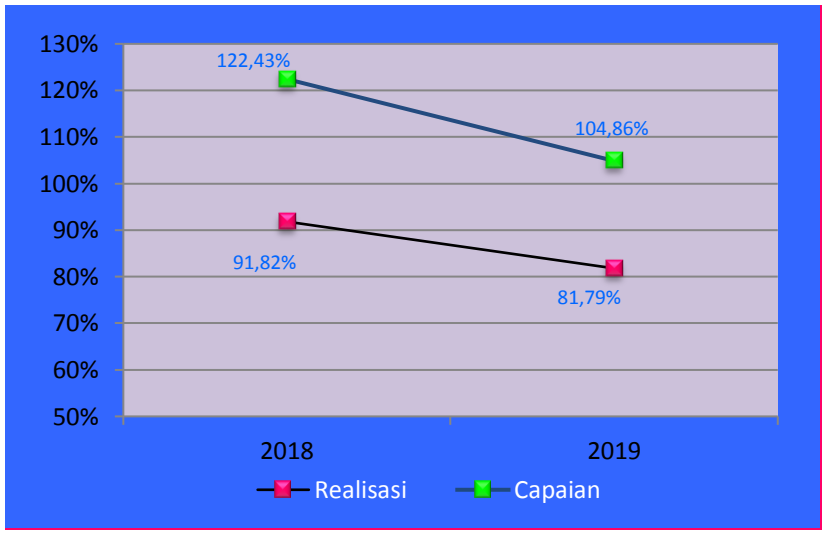
Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Meningkatkan kerja sama dengan Dinas terkait dalam mengimplementasikan peraturan di bidang pengawasan dan pengelolaan obat baik yang dilakukan secara mandiri maupun terpadu;
2. Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis tentang regulasi pengelolaan Obat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha dan penanggungjawab sarana.
3. Mendorong peran serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dari Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai ke sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian

*Realisasi dan capaian indikator 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' Balai POM di Palu tahun 2018-2019*

**Tabel 50. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2018-2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | 2018 | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di | 75,00 | 91,82 | 122,43 | 78,00 | 81,79 | 104,86 |



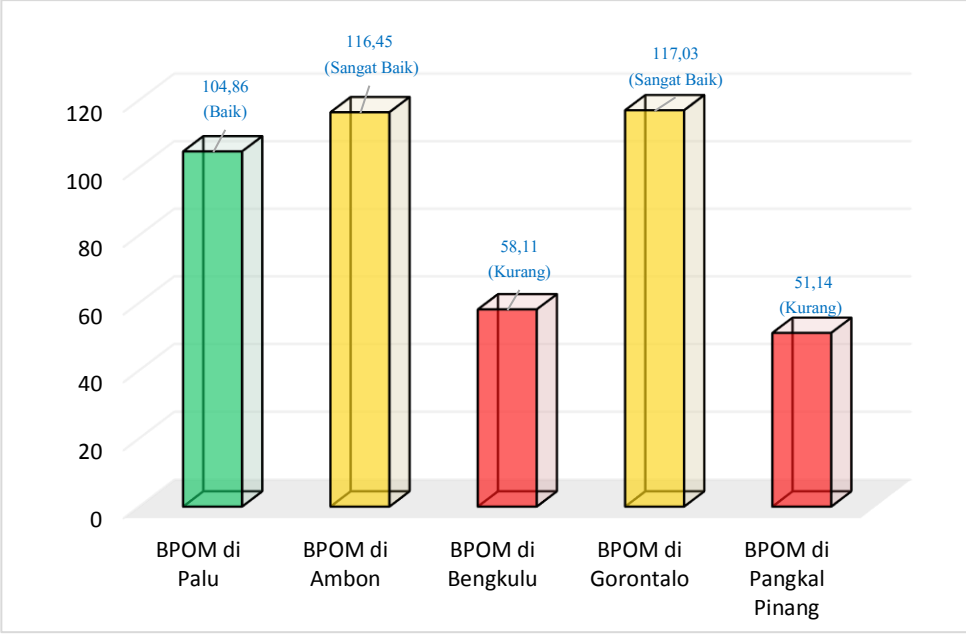

Gbr 49. Grafik Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2018-2019

Realisasi persentase pengawasan sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan pada tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018, disebabkan pelaku usaha di bidang distribusi / pelayanan obat tidak konsisten menerapkan cara distribusi Obat yang baik.

*Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019*

**Tabel 51. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019**

| INDIKATOR KINERJA | NILAI | BALAI POM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PALU | AMBON | BENGKULU | GORONTALO | PANGKAL PINANG |
| Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan | Realisasi | 81,79 | 58,22 | 29,05 | 66,32 | 25,47 |
| | Capaian (%) | 104,86 | 116,45 | 58,11 | 117,03 | 51,14 |




Gbr 50. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019

Target indikator kinerja yang ditetapkan oleh Balai POM di Palu dan 4 balai pembanding lainnya bervariasi pada kisaran 49,80% sampai dengan 78%. Balai POM di Palu menetapkan target 78%, paling tinggi di antara balai lainnya. Realisasi yang dicapai Balai POM di Palu 81,79%, tertinggi dibandingkan balai POM lainnya. Namun capaian kinerjanya (kategori 'Baik'), berada pada urutan ketiga setelah Balai POM di Ambon dan Balai POM di Gorontalo yang memiliki capaian 'Sangat Baik', karena memang target yang ditetapkan Balai POM di Palu jauh di atas balai pembanding lainnya. Balai POM di Bengkulu dan Balai POM di Pangkal Pinang memiliki realisasi dan capaian yang paling rendah dan termasuk dalam kategori 'Kurang'.

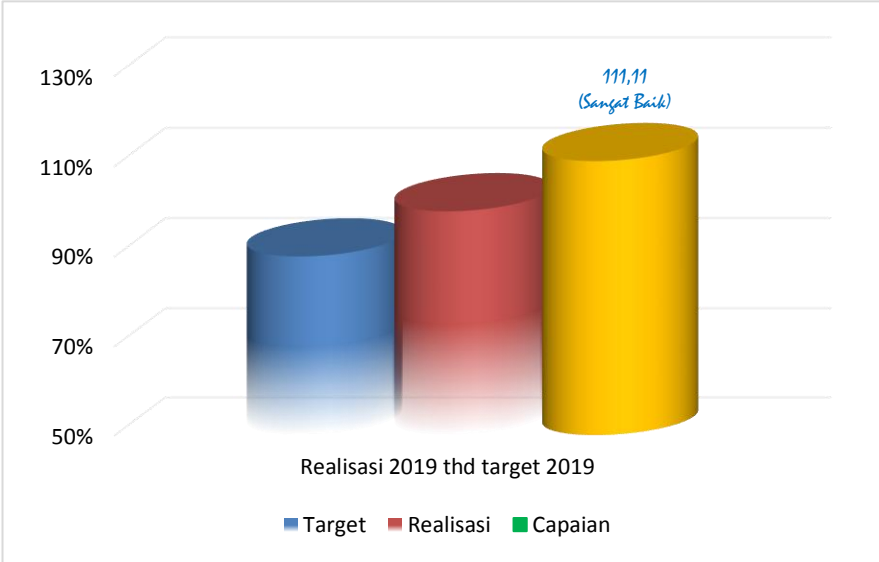
Hasil capaian Balai POM di Palu terhadap indikator kinerja 'Sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan' dalam kategori 'Baik' ini menunjukkan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang beredar di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki kualitas yang bagus. Namun berbagai upaya tetap dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja, diantaranya Meningkatkan kerja sama dengan Dinas terkait dalam mengimplementasikan peraturan di bidang pengawasan dan pengelolaan Obat baik yang dilakukan secara mandiri maupun terpadu; Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis tentang regulasi pengelolaan Obat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana.

## 4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Pada tahun 2019, jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 26 dari 26. Jumlah permohonan penilaian sertifikasi. Rincian capaian persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 52. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tahun 2019 terhadap target 2019**

| INDIKATOR KINERJA | PEMBILANG | | PENYEBUT | | TARGET 2019 | CAPAIAN 2019 | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEFINISI | REALISASI | DEFINISI | REALISASI | | | |
| Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu | 26 | Jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan | 26 | 90,00 | 100,00 | 111,11 |




Gbr 51. Grafik capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tahun 2019 terhadap target 2019

Dari data realisasi kinerja terhadap persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 sebesar 100,00% terlihat bahwa target kinerja 2019 telah tercapai dengan persentase capaian 111,11% (Sangat Baik).

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 100%. Hal ini disebabkan petugas telah mengimplementasikan prosedur baku khususnya terkait waktu penyelesaian sertifikasi, komunikasi yang intensif antara petugas dengan pelaku usaha, dan pendampingan oleh petugas dalam proses sertifikasi. Selain itu petugas lebih proaktif mendorong pelaku usaha dalam penyelesaian sertifikasi yang diajukan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' disebabkan oleh:

1. Kompetensi sumber daya manusia yang cukup memadai dalam melakukan penilaian sertifikasi;
2. Tersedianya tenaga fasilitator yang memberikan bimbingan langsung kepada pemilik usaha dalam pemenuhan persyaratan penilaian sertifikasi;
3. Sarana dan prasarana yang tersedia di Balai POM di Palu mendukung proses penilaian sertifikasi;
4. Penggunaan aplikasi sertifikasi secara elektronik seperti e-reg.pom.go.id dan sertifikasicdob.pom.go.id memudahkan proses penilaian sertifikasi karena tindak lanjut CAPA dapat segera dikirimkan oleh pemilik sarana ke akun petugas dalam aplikasi.

5. Penerapan sistem aplikasi pelayanan sertifikasi dalam pelayanan SKE memudahkan pelaku usaha dalam proses penerbitan SKE.

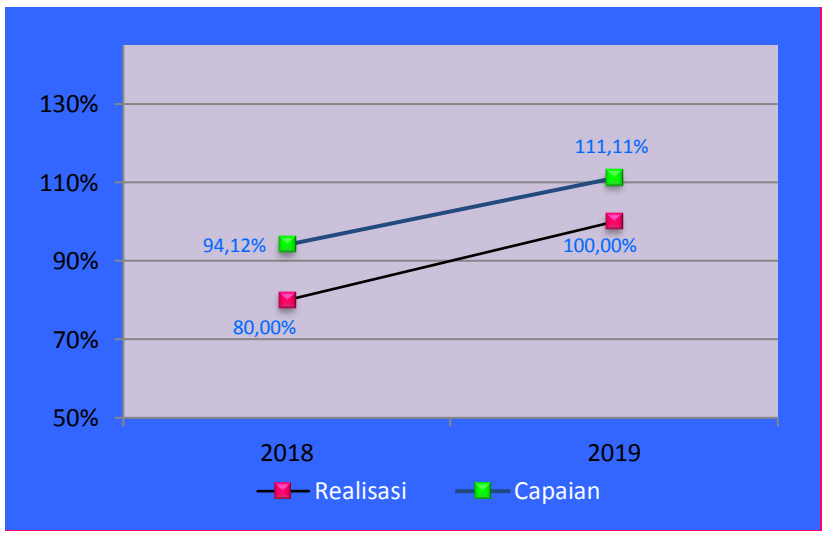
Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Penambahan dan peningkatan kompetensi SDM dalam hal penilaian sertifikasi;
2. Penguatan pembinaan UMKM dalam pemenuhan persyaratan dalam rangka penilaian sertifikasi;
3. Mendorong pelaku usaha secara terus menerus untuk segera melakukan perbaikan terhadap hasil audit oleh Balai POM di Palu sehingga keputusan penilaian sertifikasi dapat segera diterbitkan tepat waktu.

*Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' Balai POM di Palu tahun 2018-2019*

**Tabel 53. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tahun 2018-2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | 2018 | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan | 85,00 | **80,00** | 94,12 | 90,00 | **100,00** | 111,11 |



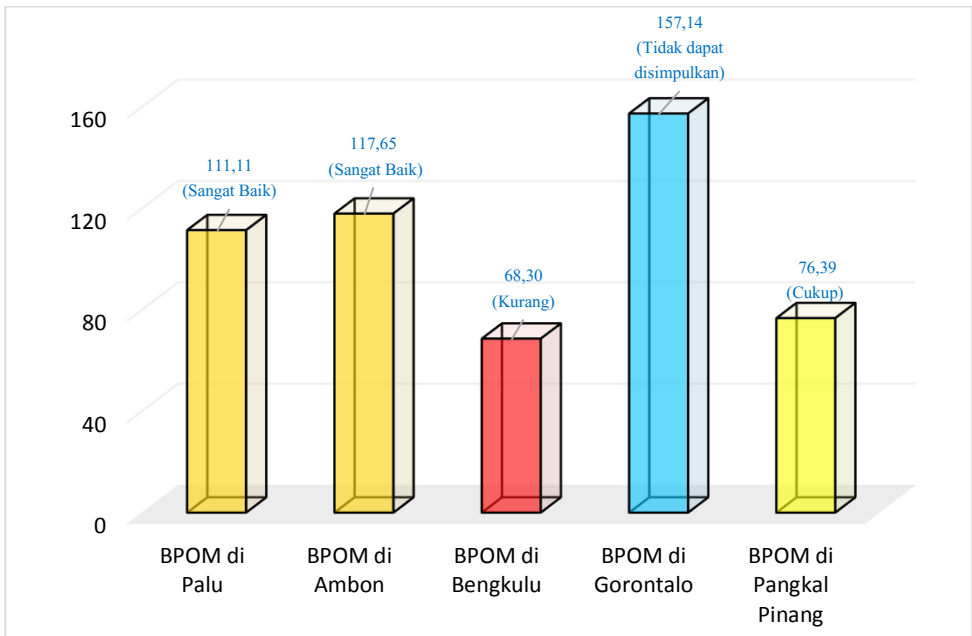

Gbr 52. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tahun 2018-2019

Perbandingan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara tahun 2018 dengan 2019 terjadi kenaikan dari 80% (capaian realisasi 94,12% dengan kategori 'Baik') menjadi 100% (capaian realisasi 111,11% dengan kategori 'Sangat baik'). Peningkatan ini terjadi karena Balai POM di Palu lebih proaktif dalam memberikan informasi kepada pelaku usaha serta adanya dukungan pelaku usaha untuk melengkapi dokumen/permintaan perbaikan dari Balai POM di Palu sehingga penyelesaian sertifikasi dapat terlaksana tepat waktu.

*Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019*

**Tabel 54. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019**

| INDIKATOR KINERJA | NILAI | BALAI POM | | | | | NASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PALU | AMBON | BENGKULU | GORONTALO | PANGKAL PINANG | |
| Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | Realisasi | 100,00 | 100,00 | 55,32 | 157,14 | 68,75 | |
| | Capaian (%) | 111,11 | 117,65 | 68,30 | 157,14 | 76,39 | |




Gbr 53. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019

Balai POM di Palu dan Balai POM di Ambon memiliki nilai capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu termasuk dalam kategori 'Sangat baik', tetapi capaian Balai POM di Ambon lebih tinggi dibandingkan dengan Balai POM di Palu karena target Balai POM di Ambon lebih rendah dibandingkan dengan Balai POM di Palu, padahal realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sama yaitu 100%. Balai POM di Gorontalo termasuk dalam kategori 'Tidak dapat disimpulkan', Balai POM di Pangkal Pinang termasuk dalam kategori 'Cukup', dan Balai POM di Bengkulu berada pada kategori 'Kurang'.

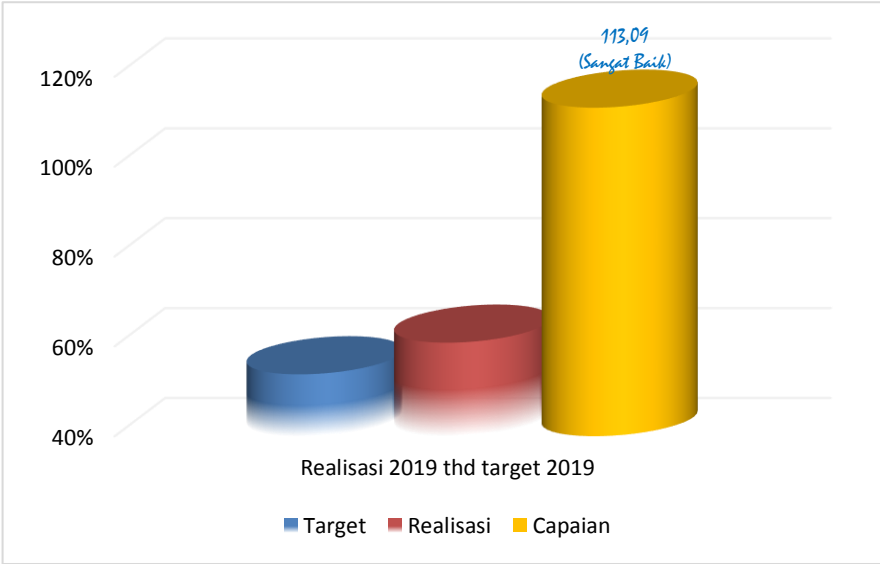
Balai POM di Palu akan terus berupaya lebih keras lagi agar meningkatkan nilai indikator kinerja tersebut, diantaranya dengan melakukan *follow up* terus menerus ke pelaku usaha untuk segera melakukan perbaikan terhadap hasil audit oleh Balai POM sehingga Balai POM dapat segera mengeluarkan keputusan penilaian sertifikasi dengan tepat waktu.

## 5. Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan makanan yang Dilaksanakan

Pada tahun 2019, jumlah tindak lanjut / *feedback* dari pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 355 dari 584 rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai kepada pelaku usaha dan instansi terkait. Rincian capaian persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 55. Capaian indikator kinerja 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan' tahun 2019 terhadap target 2019**

| INDIKATOR KINERJA | PEMBILANG | | PENYEBUT | | TARGET 2019 | CAPAIAN 2019 | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEFINISI | REALISASI | DEFINISI | REALISASI | | | |
| Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Jumlah tindak lanjut/ feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait | 355 | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait | 584 | 53,75 | 60,79 | 113,09 |




Gbr 54. Grafik capaian indikator kinerja 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan' tahun 2019 terhadap target 2019

Dari data realisasi kinerja terhadap Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan tahun 2019 sebesar 60,79% terlihat bahwa target kinerja 2019 telah tercapai dengan persentase capaian 113,09% (Sangat Baik). Hal ini karena pelaksanaan *monitoring* tindak lanjut hasil pengawasan sudah dilaksanakan lebih efektif dengan memonitoring secara aktif dan langsung ke sarana yang tidak memenuhi ketentuan, mendorong pelaku usaha untuk melakukan perbaikan terhadap hasil ketidaksesuaian hasil inspeksi dan berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan' disebabkan oleh :

1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah telah terjalin dengan baik dengan adanya MoU antara Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai dengan beberapa Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Tengah serta telah dilakukan pengawasan terpadu dengan dinas terkait di kabupaten / kota;
2. Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai senantiasa mendorong pelaku usaha untuk melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian hasil inspeksi pada sarana distribusi dan sarana produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk memperbaiki tindak lanjut hasil pengawasan dari Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai.

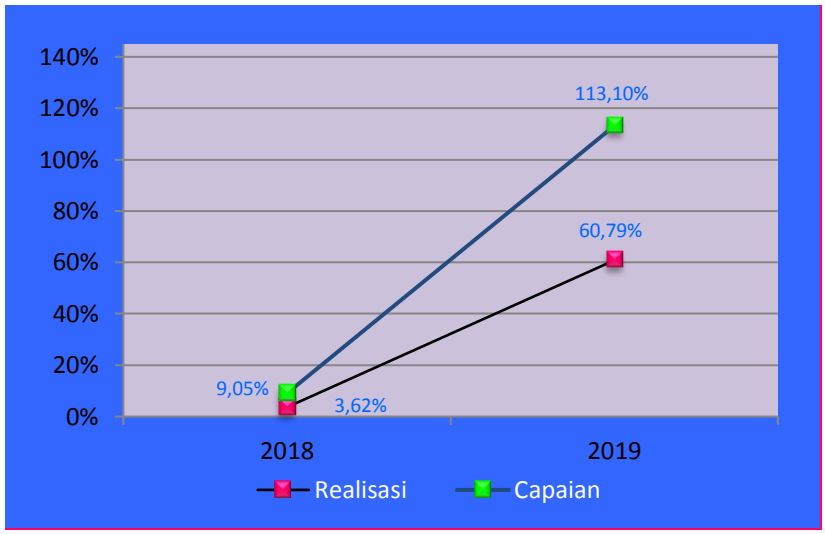
Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau lintas sektor terkait dalam upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan, dengan cara berkomunikasi langsung ke Dinas terkait agar dapat segera menindaklanjuti surat rekomendasi yang telah diberikan;
2. Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai;
3. Mendorong lintas sektor untuk mengimplementasikan Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
4. Mendorong komitmen pelaku usaha secara optimal untuk meningkatkan mutu produk Obat dan Makanan dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

*Realisasi dan capaian indikator 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan' Balai POM di Palu tahun 2018-2019*

**Tabel 56. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan' tahun 2018-2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | 2018 | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 40,00 | 3,62 | 9,05 | 53,75 | 60,79 | 113,10 |



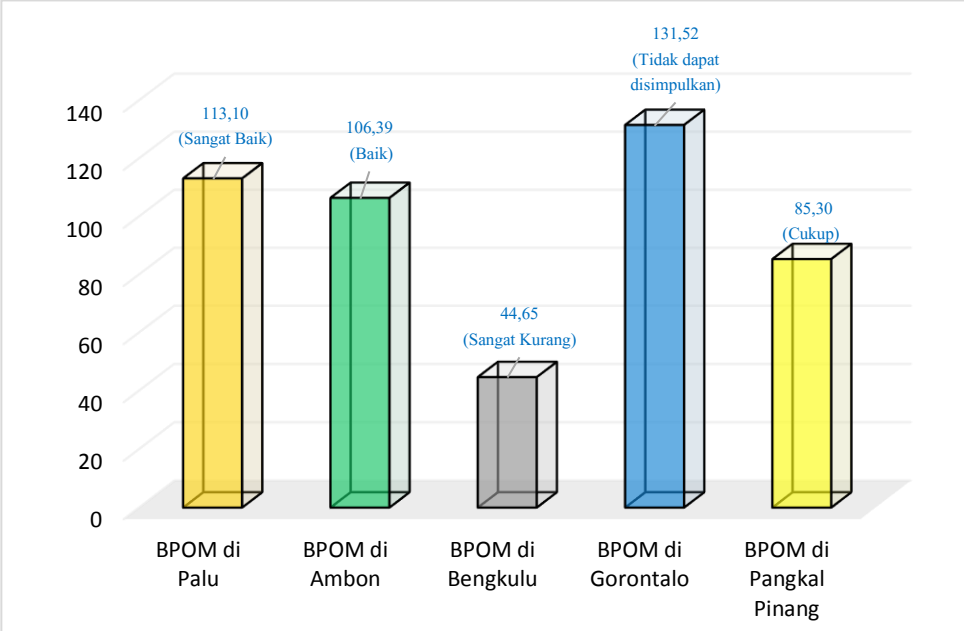

Gbr 55. Grafik Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan' tahun 2018-2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti instansi terkait maupun oleh pelaku usaha pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini karena pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil pengawasan sudah dilaksanakan lebih efektif dengan memonitoring secara aktif dan langsung ke sarana yang tidak memenuhi ketentuan, mendorong pelaku usaha untuk melakukan perbaikan terhadap hasil ketidaksesuaian hasil inspeksi.

*Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019*

**Tabel 57. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019**

| INDIKATOR KINERJA | NILAI | BALAI POM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PALU | AMBON | BENGKULU | GORONTALO | PANGKAL PINANG |
| Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan | Realisasi | 60,79 | 63,83 | 20,09 | 83,29 | 40,05 |
| | Capaian (%) | 113,10 | 106,39 | 44,65 | 131,52 | 85,30 |




Gbr 56. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan tahun 2018 Balai POM di Palu satu satunya yang termasuk dalam kategori 'Sangat Baik', akan tetapi realisasi Balai POM di Ambon lebih tinggi dibandingkan Balai POM di Palu, tetapi target Balai POM di Ambon lebih tinggi, sehingga Balai POM di Ambon termasuk kategori baik. Balai POM di Gorontalo termasuk dalam kategori 'Tidak dapat disimpulkan', Balai POM di Pangkal Pinang termasuk dalam kategori 'Cukup' dan Balai POM di Bengkulu termasuk dalam kategori 'Sangat Kurang'.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja yaitu Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Palu dan Mendorong lintas sektor untuk mengimplementasikan Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

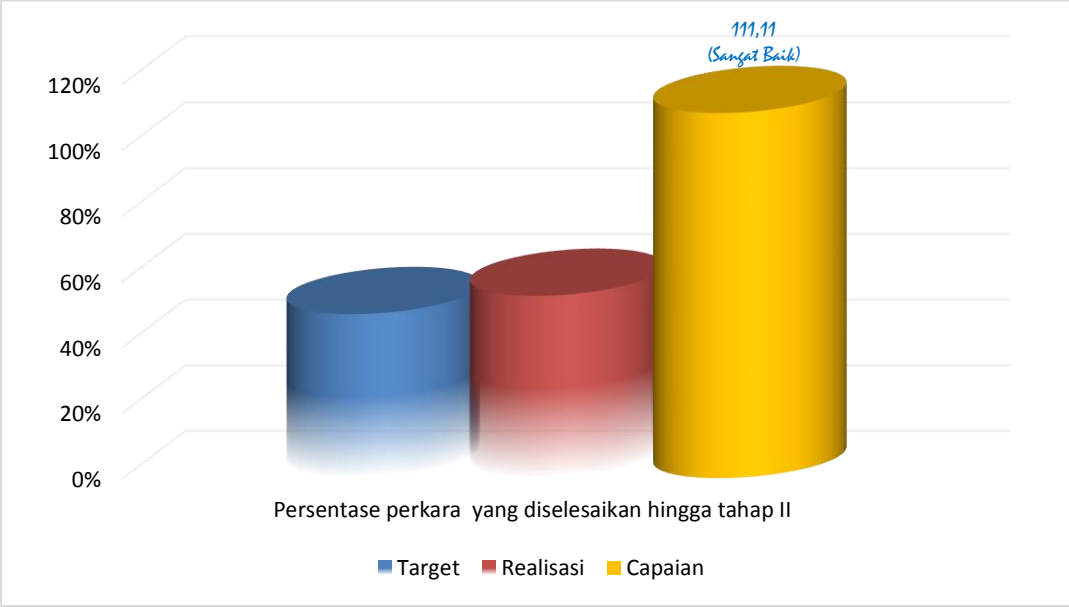
## A.5 Sasaran Kegiatan 5

**Sasaran Kegiatan 5**
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu

### Indikator Kinerja Sasaran

**Tabel 58. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu Tahun 2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 1 Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | 50,00% | 55,56% | 111,11 | Sangat Baik |



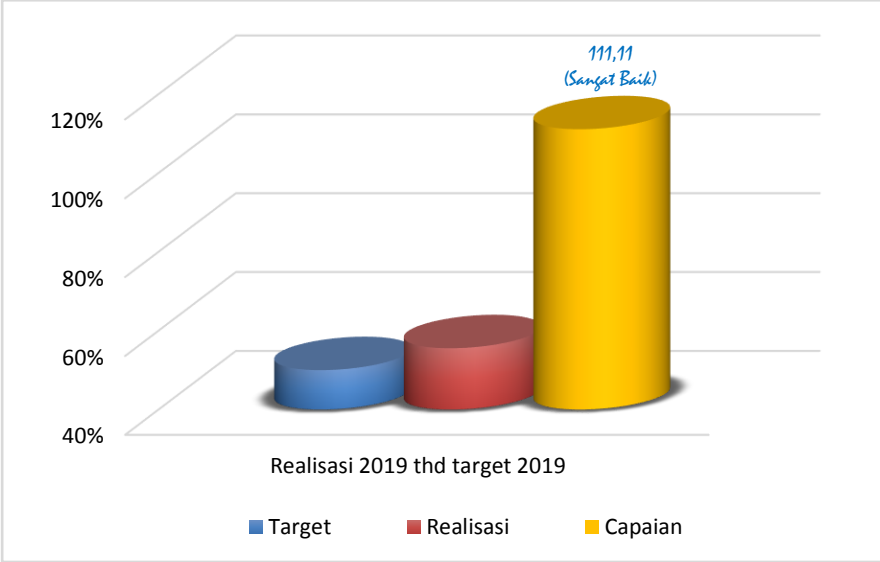

Gambar 57. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu tahun 2019

## 1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap II

Pada tahun 2019, capaian persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II oleh Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai sebesar 111,11%. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 59. Capaian indikator kinerja 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' tahun 2019 terhadap target 2019**

| INDIKATOR KINERJA | PEMBILANG | | PENYEBUT | | TARGET 2019 | CAPAIAN 2019 | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEFINISI | REALISASI | DEFINISI | REALISASI | | | |
| Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | Jumlah perkara tahap II tahun n dan tahun sebelumnya | 5 | Total perkara di tahun n dan tahun sebelumnya | 9 | 50,00 | 55,56 | 111,11 |




Gbr 58. Grafik capaian indikator kinerja 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' tahun 2019 terhadap target 2019

Jumlah perkara yang diselesaikan hingga tahap II pada tahun 2019 sebanyak 5 perkara yaitu 1 (satu) perkara dari tahun 2017, 2 (dua) perkara lagi di tahun 2018 dan 2 (dua) perkara pada tahun 2019. Perkara Tahun 2017 yang melewati penyelesaiannya pada tahun 2019 adalah Perkara Pangan yang Tidak Memiliki Izin Edar yang merupakan hasil dari kegiatan Operasi Pangea, hal ini dikarenakan pada proses terhadap Barang bukti berupa alat produksi yang sebelumnya disarankan untuk dilakukan proses lelang namun menghadapi kendala karena proses lelang yang dapat dilakukan adalah ketika perkara sudah inkrah dari pengadilan, untuk itu diambil keputusan bahwa barang bukti dititipkan ke Rumah

Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Palu. Perkara tahun 2018, terdapat 2 perkara yang dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti pada tahun 2019 karena perkara tersebut dimulai pada bulan November 2018 dan 1 perkara dengan tersangka yang sempat menghilang pasca kejadian Gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi Donggala pada September 2018 sehingga penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah baru dapat dilaksanakan pada tahun 2019.

Di tahun 2019 dari 6 perkara yang ditangani, 2 perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap II di tahun 2018, yaitu perkara Produksi Kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan distribusi kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Pada tahun 2019, satu perkara masih dalam tahap P19 dan sedang proses pemenuhan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. Perkara lainnya sebanyak 3 perkara sedang dalam proses pemberkasan.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator kinerja 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' disebabkan oleh :

1. Kegiatan penindakan terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dilaksanakan sesuai dengan tahapan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan yang dimulai dari investigasi, Operasi Penindakan sampai dengan proses penyidikan;
2. Telah dipetakan unsur pidana dan kelengkapan alat bukti pada target perkara sebelum kegiatan Operasi Penindakan sehingga memudahkan dalam proses pemberkasaan;
3. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk Balai POM tipe A, Seksi Penindakan telah menjadi bagian tersendiri secara struktur dan personel yang memiliki tupoksi melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dengan demikian PPNS di Seksi Penindakan dapat lebih fokus terhadap proses penyidikan dan penyelesaian berkas perkara sampai dengan tahap II;
4. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan *Criminal Justice System* (Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri) di daerah, sehingga pelaksanaan Operasi Penindakan secara teknis dan taktis dapat berjalan dengan efektif dan memperkecil peluang pengembalian berkas oleh Jaksa Penuntut Umum kepada PPNS Balai POM di Palu untuk memenuhi petunjuk;
5. Berkas perkara yang belum selesai pada tahun 2018 dan 2017 menjadi prioritas dalam penyelesaian berkas yang dilakukan oleh PPNS Balai POM di Palu pada tahun 2019;

6. Telah dilakukan pemisahan dan spesialisasi personel dalam pelaksanaan kegiatan investigasi oleh petugas Seksi Penindakan dan penyidikan oleh PPNS sehingga lebih fokus dalam penyelesaian tugas.

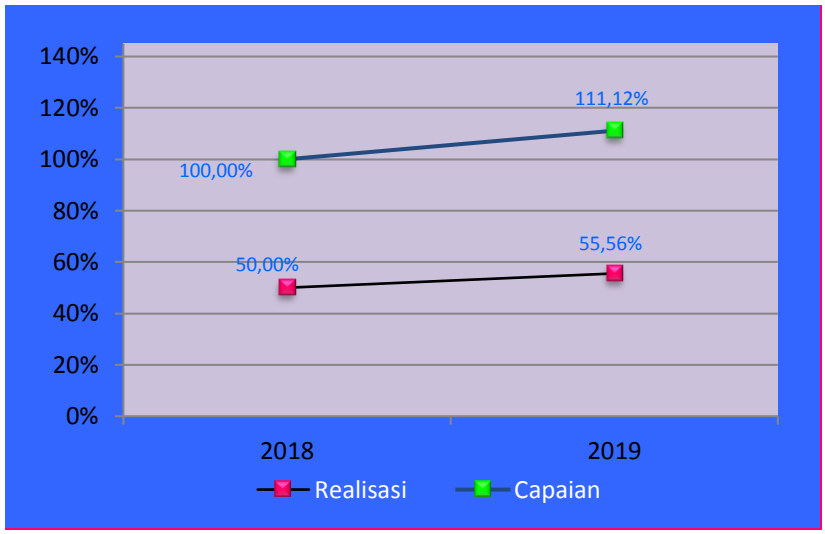
## Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Perkara yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2019 menjadi prioritas dalam penyelesaian berkas sampai tahap II di tahun 2020;
2. Dilakukan pemisahan dan spesialisasi personel dalam pelaksanaan kegiatan investigasi oleh petugas Seksi Penindakan dan penyidikan oleh PPNS sehingga lebih fokus dalam penyelesaian tugas;
3. Melakukan identifikasi dan *update* pemetaan terhadap potensi tindak pidana di bidang Obat dan Makanan di daerah Sulawesi Tengah. Diharapkan pada tahun 2020 Balai POM di Palu dapat mengungkap kasus pidana di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
4. Meningkatkan kemampuan petugas di Seksi Penindakan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen dan/atau investigasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan telah dibenarkan tentang target kegiatan operasi penindakan;
5. Meningkatkan kompetensi penyidik secara berkelanjutan dalam melakukan pemberkasan untuk mencegah risiko pengembalian berkas perkara dari pihak kejaksaan dan mencegah atau memperkecil risiko praperadilan;
6. Meningkatkan motivasi PPNS untuk segera menyelesaian proses pemberkasan yang dilakukan untuk pencapaian target perkara dan mencegah terjadinya kemungkinan praperadilan terhadap penanganan perkara yang terlalu lama.

*Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' tahun 2018- 2019.*

**Tabel 60. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2018-2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | 2018 | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 55,56 | 111,12 |




Gbr 59. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' tahun 2018-2019

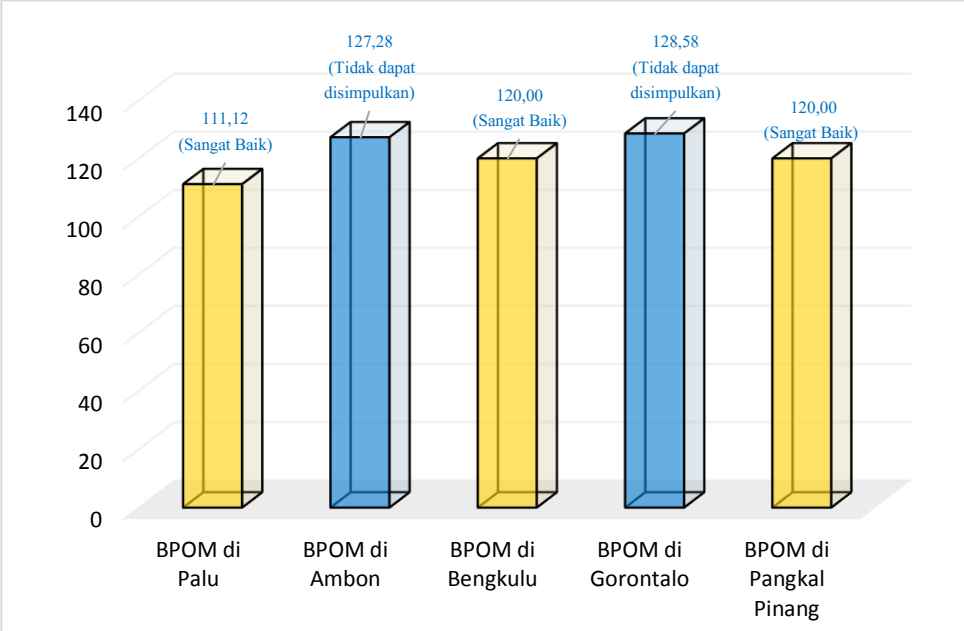
Pada tahun 2019 terjadi peningkatan realisasi capaian penyelesaian perkara sampai tahap II dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh upaya-upaya yang dilakukan Balai POM di Palu untuk mencapai peningkatan yaitu dengan :

1. Peningkatan kemampuan PPNS di bidang penyidikan untuk memperkecil risiko praperadilan dan penyelesaian berkas perkara. Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan forum pertemuan PPNS;
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terutama *Criminal Justice System* dalam upaya kegiatan penyidikan dan pemberkasan;
3. Penyediaan alat khusus untuk menunjang pelaksanaan kegiatan intelijen dan/atau investigasi awal.

*Perbandingan realisasi dan capaian 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019*

**Tabel 61. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019**

| INDIKATOR KINERJA | NILAI | BALAI POM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PALU | AMBON | BENGKULU | GORONTALO | PANGKAL PINANG |
| Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | Realisasi | 55,56 | 63,64 | 60,00 | 64,29 | 60,00 |
| | Capaian (%) | 111,12 | 127,27 | 120,00 | 128,57 | 120,00 |




Gbr 60. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis tahun 2019

Realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II Balai POM di Palu jika dibandingkan dengan Balai POM di Ambon, Bengkulu, Gorontalo dan Pangkal Pinang masih lebih rendah walaupun masih dalam kategori Sangat Baik. Capaian perkara yang diselesaikan hingga tahap II oleh Balai POM di Palu rendah karena pada tahun 2019 Balai POM di Palu baru pertama kali menangani perkara dibidang Narkotika sehingga masih terdapat banyak kekurangan dan kendala dalam penyelesaian berkas perkara. Selain itu terdapat perkara yang pelaksanaan penyidikan dimulai pada November 2019 sehingga pelaksanaan tahap II yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka akan dilakukan pada tahun 2020

Realisasi dan capaian ini memacu PPNS untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja sehingga mendapatkan capaian yang lebih baik. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh Balai POM di Palu antara lain :

1. Untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian berkas perkara yang sedang ditangani, sebaiknya PPNS fokus dalam kegiatan penyidkan dan penyelesaian berkas perkara;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi dalam penyelesaian berkas perkara;
3. Kegiatan Investigasi Awal dapat dilakukan oleh tenaga atau petugas selain PPNS yang sedang menangani penyelesaian perkara yaitu dengan dibantu tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan informan.

## A.6 Sasaran Kegiatan 6

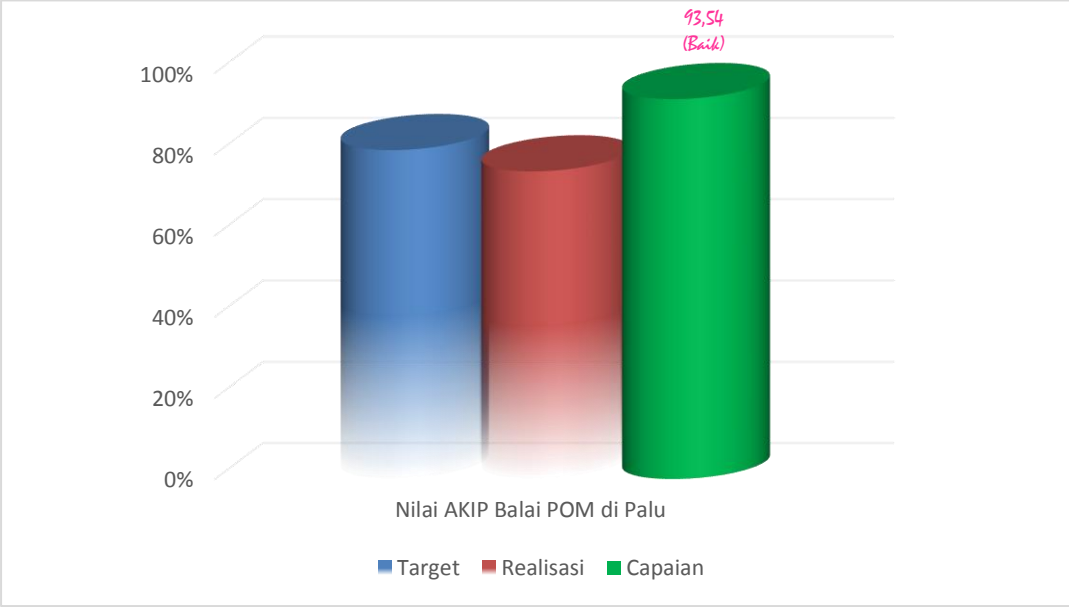
Sasaran Kegiatan 6
Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019

### Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan keenam adalah Nilai AKIP Balai POM di Palu yang ditetapkan oleh APIP Badan POM. Tujuan penilaian indikator ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwuujdnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian SAKIP mencakup beberapa komponen, yaitu : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%) dan pencapaian sasaran / kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap kinerja tahun n-1.

**Tabel 62. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu tahun 2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | 1 Nilai AKIP Balai POM di Palu | 81,00 | 75,77 | 93,54 | Baik |



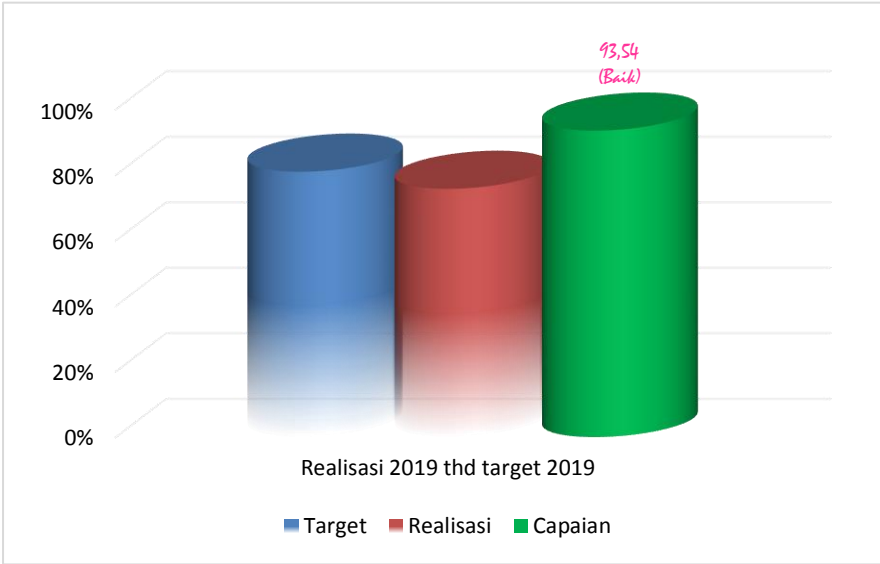

Gambar 61. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu tahun 2019

## 1. Nilai AKIP Balai POM di Palu

Penilaian SAKIP mencakup beberapa komponen, yaitu : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%) dan pencapaian sasaran / kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap kinerja tahun n-1. Pada tahun 2019, capaian kinerja indikator Nilai AKIP Balai POM di Palu sebesar 93,54%. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 63. Capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2019 terhadap target 2019**

| INDIKATOR KINERJA | PEMBILANG | | PENYEBUT | | TARGET 2019 | CAPAIAN 2019 | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEFINISI | REALISASI | DEFINISI | REALISASI | | | |
| Nilai AKIP Balai POM di Palu | Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM yang ditetapkan oleh Inspektorat Utama | 75,77 | - | - | 81,00 | 75,77 | 93,54 |




Gbr 62. Grafik capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2019 terhadap target 2019

**Tabel 64. Kategori penilaian SAKIP**

| Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja | Kategori | Keterangan |
|---|---|---|
| **>90** | AA | Sangat Memuaskan |
| **>80 - 90** | A | Memuaskan |
| **>70 - 80** | BB | Sangat Baik |
| **>60 - 70** | B | Baik |
| **>50 - 60** | CC | Cukup Baik |
| **>30 - 50** | C | Agak Kurang |
| **<30** | D | Kurang |

Hasil evaluasi SAKIP menunjukkan bahwa Balai POM di Palu memperoleh nilai 75,77 atau predikat 'BB' (Sangat Baik). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Balai POM di Palu telah cukup akuntabel dan berkinerja baik, serta telah memiliki kinerja yang andal. Walaupun demikian target nilai AKIP untuk tahun 2019 (81,00) masih belum tercapai dengan persentase capaian 93,54 persen (kategori 'Baik'). Rincian penilaian Nilai AKIP Balai POM di Palu adalah sebagai berikut :

**Tabel 65. Hasil Evaluasi Komponen SAKIP Balai POM di Palu tahun 2019**

| Komponen yang Dinilai | Bobot (%) | Nilai | % |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Kinerja | 30 | 24.90 | 83,00 |
| Pengukuran Kinerja | 25 | 16.56 | 66,24 |
| Pelaporan Kinerja | 15 | 13.34 | 88,93 |
| Evaluasi Internal | 10 | 7.08 | 70,80 |
| Capaian Kinerja | 20 | 13.90 | 69,50 |
| **Nilai Hasil Evaluasi** | **100** | **75.77** | |
| **Tingkat Akuntabilitas Kinerja** | | **Sangat Baik (BB)** | |

Dari hasil evaluasi diketahui beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja

   Revisi Renstra Balai POM di Palu tanggal 07 September 2018 belum memuat tujuan yang dilengkapi indikator keberhasilannya.
2. Pengukuran Kinerja

   Belum adanya prosedur formal terkait pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur meskipun secara aktual telah terdapat mekanisme internal untuk pengumpulan dan pengukuran data kinerja dari masing-masing seksi
3. Capaian Kinerja

   Perbandingan capaian kinerja pada prinsipnya sama dengan tahun sebelumnya, belum memanfaatkan hasil evaluasi internal baik periode tahun berjalan maupun tahun sebelumnya
4. Pelaporan Kinerja

   Laporan kinerja telah menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan Balai POM yang setara / sejenis mulai dari Balai POM di Kendari, Balai POM di Jambi, dan Balai POM di Kupang. Namun belum sepenuhnya menyajikan perbandingan capaian kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
5. Evaluasi Kinerja

   Informasi kinerja telah digunakan sebagai bahan evaluasi internal secara bulanan dan sebagian telah dituangkan dalam Laporan Kinerja, namun belum terdapat kesinambungan evaluasi, rencana aksi, dan evaluasi terhadap rencana aksi.

Keberhasilan pencapaian kinerja inidikator kinerja 'Nilai SAKIP Balai POM di Palu disebabkan oleh:

✓ Perencanaan Kinerja

Perencanaan periode lima tahunan maupun tahunan telah dilakukan dan diwujudkan dalam dokumen Revisi Renstra 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Perjanjian Kinerja, *Plan of action*. Dokumen ini yang menjadi dasar dalam melaksanakan program atau kegiatan Balai POM di Palu.

✓ Komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Palu

Pimpinan beserta staf tetap berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Komitmen menjalankan ISO 17025 dan 9001 sebagai acuan dalam menata sistem manajemen. Selain itu juga telah disusun Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2019 dan telah diturunkan ke tingkat Eselon IV dan selanjutnya ke tingkat staf dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Contoh Perjanjian tingkat Eselon IV dapat dilihat pada Lampiran 17.

✓ Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Palu

Setiap seksi memiliki perencanaan, pengelolaan kegiatan, evaluasi serta pelaporan yang merupakan rangkaian proses yang tidak terputus dalam membangun akuntabilitas kinerja Balai POM di Palu. Meskipun di setiap proses ada kekurangan, pimpinan beserta staf tetap berusaha untuk meningkatkan kinerja.

✓ Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Balai POM di Palu

Enam area perubahan telah dilaksanakan oleh Balai POM di Palu meskipun belum optimal namun telah mengarah kepada peningkatan. Enam area perubahan tersebut terdiri dari Manajemen perubahan, Penguatan sistem pengawasan, Penguatan akuntabilitas kinerja, Penguatan tata laksana, Penguatan sistem manajemen SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik.

✓ Kualitas dan kuantitas SDM terkait Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Unsur dasar dalam membangun institusi yang memiliki tata kelola yang baik adalah kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki. Balai POM di Palu berupaya melakukan analisis beban kerja setiap tahun dalam rangka melihat kesesuaian antara beban kerja Balai dengan kualitas SDM yang tersedia, kemudian diikuti dengan membuat peta peningkatan kompetensi untuk memenuhi keinginan Balai.

✓ Pemanfaatan aplikasi *e-performance* dalam menginput data kinerja balai setiap triwulan sehingga dapat terlihat capaian indikator kinerja sasaran kegiatan balai POM di Palu serta dapat dilakukan langkah perbaikan terhadap capaian yang tidak memenuhi target kinerja triwulanan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja di atas adalah :

1. Perencanaan Kinerja

   a. Dokumen Revisi Renstra 2015-2019 yang disusun pada triwulan I 2019 telah dilengkapi dengan tujuan dan indikator keberhasilannya. Untuk penyusunan Renstra 2020-2024, tidak hanya sekedar pemenuhan saja tetapi juga dengan peningkatan kualitas Renstra yang disusun, dimana tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra berorientasi pada hasil. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan dan sasaran harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Demikian juga program / kegiatan untuk mencapai tujuan / sasaran serta target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra maupun dokumen perencanaan lainnya harus ditetapkan dengan baik. Dokumen Renstra Balai POM mengacu pada dokumen Renstra Badan POM dan selaras dengan dokumen RPJMN;
   b. Target kinerja yang ditetapkan baik dalam dokumen Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Perjanjian Kinerja harus berdasarkan basis data (*baseline*) yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis serta didukung dengan dokumentasi yang jelas dan mampu telusur. Sehingga capaian kinerja tidak menghasilkan data anomali.

2. Pelaporan Kinerja

   c. Laporan kinerja tahun anggaran 2019 telah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun 2019 dengan realisasi tahun sebelumnya secara lengkap untuk setiap indikator kinerja serta perbandingan lain yang diperlukan;
   d. Mulai tahun 2020 juga akan disusun laporan kinerja interim yang akan dilaporkan setiap triwulan ke Biro Perencanaan dan Keuangan serta Inspektorat Utama. Dengan adanya laporan tersebut dapat dilihat kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal per triwulan, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja pada triwulan berikutnya.

3. Pengukuran Kinerja

   e. Menyempurnakan pengukuran kinerja terkait mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur atau mudah diakses bagi pihak yang berkepentingan. Diantaranya dengan cara membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang *up to date*, serta menunjuk petugas/penanggung jawab data yang kompeten di setiap seksi / subbagian untuk melakukan pengukuran dan pengumpulan data

kinerja. Selain itu meningkatkan kualitas *cascade* indikator kinerja tingkat Balai POM dan individu pegawai (SKP), sehingga dapat dipastikan Balai POM dan individu pegawai dalam organisasi Balai POM di Palu memiliki uraian kinerja yang jelas dan terukur.

4. Evaluasi Kinerja

   f. Meningkatkan evaluasi program yang fokus pada analisis hasil capaian kinerja dan keterkaitan kausalitas antara kegiatan dengan sasaran kegiatan yang akan dicapai;
   g. Mengoptimalkan implementasi *e-performance* khususnya terkait dengan cakupan implementasi, tingkat keandalan data kinerja serta pemanfaatan *e-performance* oleh setiap jenjang pimpinan untuk memantau perkembangan capaian kinerja secara berkala;
   h. Memperkuat monitoring periodik terhadap capaian output, anggaran maupun capaian sasaran kegiatan serta rencana aksi nyata perbaikan atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja.

5. Capaian Kinerja

   i. Meningkatkan penerapan budaya kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal baik periode berjalan maupun tahun sebelumnya. Sebagai contoh capaian kinerja indikator 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu' untuk tahun 2019 masih berada pada kategori 'cukup'. Hasil capaian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja indikator tersebut pada tahun 2020 dan tahun-tahun yang akan datang. Misalnya dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau lintas sektor terkait lainnya dalam upaya tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) maupun senantiasa mendorong pelaku usaha produksi obat dan makanan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan dengan melaksanakan cara produksi Obat dan Makanan yang baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

6. Reformasi Birokrasi

   Mengoptimalkan kerja tim Pokja Reformasi Birokrasi pada enam area perubahan (Manajemen perubahan, Penguatan sistem pengawasan, Penguatan akuntabilitas kinerja, Penguatan tata laksana, Penguatan sistem manajemen SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik) sehingga dapat mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dengan demikian dapat tercipta pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik semakin baik dan berkualitas.

Salah satu kegiatan yang menunjang Sasaran Kegiatan 6 adalah Pengadaan sarana prasarana terkait pengawasan obat dan makanan. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar yang diukur berdasarkan persentase standar sarana prasarana kerja, standar meubelair dan standar alat laboratorium (sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 tentang standar minimum peralatan laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Pada tahun 2019, persentase realisasi pemenuhan prasarana kerja adalah 92%, dan pemenuhan standar minimum peralatan laboratorium 55,00%. Dari realisasi tersebut pemenuhan standar alat laboratorium masih kurang karena jenis dan jumlah alat yang ada belum sesuai dengan standar minimal laboratorium. Hal ini dapat ditingkatkan dengan penambahan anggaran untuk pembelian alat laboratorium dengan memperhatikan pemenuhan standar minimal alat laboratorium.

Kegiatan lain yang menunjang Sasaran Kegiatan 6 adalah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu. Terdapat 10 dokumen dari target 10 dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2019 yaitu,

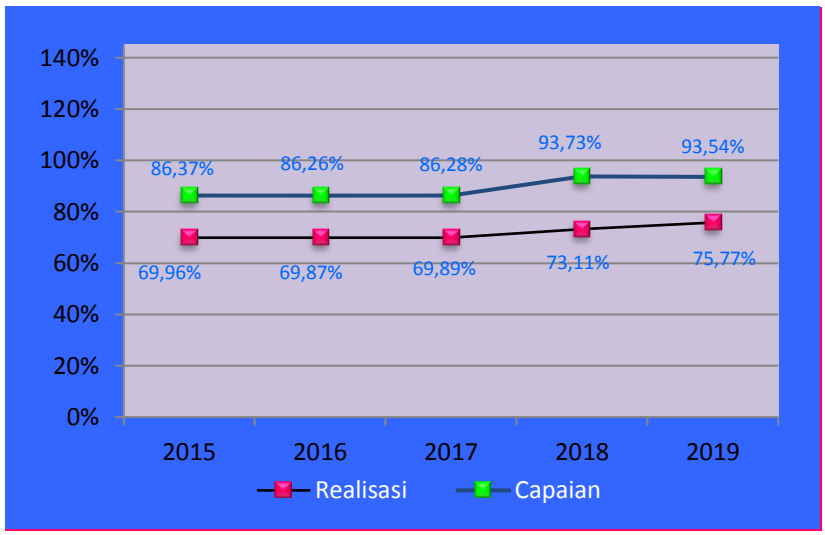
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019;
2. RKAKL/DIPA tahun 2020;
3. Laporan Kinerja Tahun 2018;
4. Laporan Triwulan I Tahun 2019;
5. Laporan Triwulan II Tahun 2019;
6. Laporan Triwulan III Tahun 2019;
7. Laporan Tahunan Tahun 2018;,
8. Laporan Keuangan Tahun 2018;
9. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019;
10. Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2020-2024.

Dokumen-dokumen tersebut dapat direalisasikan sesuai target karena data yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen tersebut ada dan lengkap serta adanya kerja sama yang baik antaranggota tim dalam menyusun dokumen tersebut.

*Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2015- 2019.*

**Tabel 66. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2015-2019**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | Nilai AKIP Balai POM di Palu | Realisasi | 69,96 | 69,87 | 69,89 | 73,11 | 75,77 |
| | | Capaian | 86,37 | 86,26 | 86,28 | 93,73 | 93,54 |




Gbr 63. Grafik Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2015-2019

Dari data capaian kinerja terhadap Nilai AKIP Balai POM di Palu selama tiga tahun berturut-turut 2015-2017 berkategori 'B' (Baik) dan meningkat menjadi 73,11 pada tahun 2018 dengan kategori 'BB' (Sangat Baik). Untuk tahun 2019 mengalami peningkatan lagi menjadi 75,77 tetap dengan kategori 'BB' (Sangat Baik). Walaupun demikian target nilai AKIP untuk tahun 2019 (81,00) masih belum tercapai dengan persentase capaian 93,54 persen.

**Tabel 67. Hasil Evaluasi Komponen SAKIP per komponen Balai POM di Palu tahun 2018-2019**

| Komponen yang Dinilai | Bobot (%) | Nilai 2018 | Nilai 2019 |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Kinerja | 30 | 24.78 | 24.90 |
| Pengukuran Kinerja | 25 | 15.63 | 16.56 |
| Capaian Kinerja | 20 | 13.33 | 13.90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pelaporan Kinerja | 15 | 12.68 | 13.34 |
| Evaluasi Internal | 10 | 6.70 | 7.08 |
| **Nilai Hasil Evaluasi** | **100** | **73.11** | **75.77** |
| **Tingkat Akuntabilitas Kinerja** | | **Sangat Baik (BB)** | **Sangat Baik (BB)** |

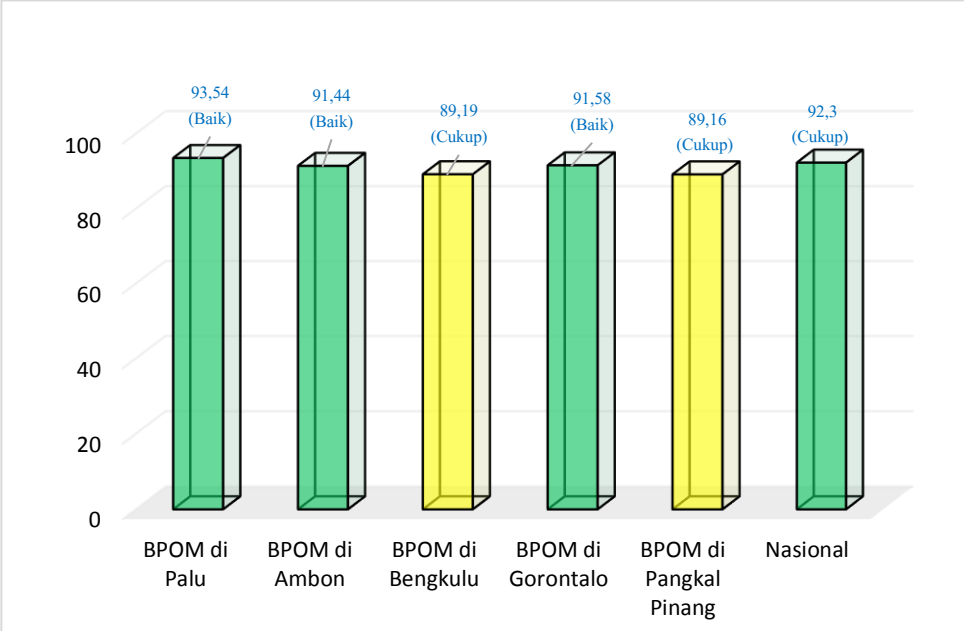
Hasil capaian Nilai AKIP Balai POM di Palu meningkat pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 untuk semua komponen yang dinilai. Berbagai upaya akan dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP terutama pada komponen yang nilainya masih rendah yaitu pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran / kinerja.

Peningkatan nilai pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menyempurnakan pengukuran kinerja terkait mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur atau mudah diakses bagi pihak yang berkepentingan. Diantaranya dengan cara membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang *up to date*, serta menunjuk petugas/penanggung jawab data yang kompeten di setiap seksi / subbagian untuk melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja. Selain itu meningkatkan kualitas *cascade* indikator kinerja tingkat Balai POM dan individu pegawai (SKP), sehingga dapat dipastikan Balai POM dan individu pegawai dalam organisasi Balai POM di Palu memiliki uraian kinerja yang jelas dan terukur. Peningkatan pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan meningkatkan penerapan budaya kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal baik periode berjalan maupun tahun sebelumnya serta mengkomunikasi hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan Evaluasi atas rencana aksi harus dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja.

## *Perbandingan realisasi dan capaian Nilai AKIP Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dan nasional tahun 2019*

**Tabel 68. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang setara / sejenis dan nasional tahun 2019**

| INDIKATOR KINERJA | NILAI | BALAI POM | | | | | NASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PALU | AMBON | BENGKULU | GORONTALO | PANGKAL PINANG | |
| Nilai AKIP Balai POM | Realisasi | 75,77 | 74,07 | 72,24 | 74,18 | 72,22 | 74,76 |
| | Persentase Capaian | 93,54 | 91,44 | 89,19 | 91,58 | 89,16 | 92,30 |




Gbr 64. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' Balai POM di Palu terhadap Balai POM yang setara / sejenis dan nasional tahun 2019

Balai POM di Palu memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan empat balai pembanding, yaitu 75,77 (BB / Sangat Baik). Keempat balai lain memiliki nilai AKIP yang masih berada dalam kategori 'Sangat Baik' (*Range* >70 - 80). Capaian Nilai AKIP Balai POM di Palu juga paling tinggi dibandingkan dengan 4 balai pembanding. Balai POM di Palu dan empat balai POM lainnya memiliki target Nilai AKIP yang sama yaitu 81 (A / Sangat Memuaskan). Namun belum ada yang mencapai target.

Nilai komponen perencanaan kinerja Balai POM di Palu paling rendah diantara Balai pembanding lain. Hal ini disebabkan dokumen Revisi Renstra Balai POM di Palu tanggal 07 September 2018 belum memuat tujuan yang dilengkapi indikator keberhasilannya. Upaya yang dilakukan yaitu penyusunan Dokumen Revisi Renstra 2015-2019 pada triwulan I 2019 telah dilengkapi dengan tujuan dan indikator keberhasilannya. Untuk penyusunan Renstra 2020-2024, tidak hanya sekedar pemenuhan saja tetapi juga dengan peningkatan kualitas Renstra yang disusun, dimana tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra berorientasi pada hasil. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan dan sasaran harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Demikian juga program / kegiatan untuk mencapai tujuan / sasaran serta target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra maupun dokumen perencanaan lainnya harus ditetapkan dengan baik. Dokumen Renstra Balai POM mengacu pada dokumen Renstra Badan POM dan selaras dengan dokumen RPJMN.

Nilai komponen pengukuran kinerja tertinggi dicapai oleh Balai POM di Bengkulu diikuti oleh Balai POM di Gorontalo, Balai POM di Pangkal Pinang, Balai POM di Palu, dan terakhir Balai POM di Ambon. Balai POM di Palu belum memiliki prosedur formal terkait pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur meskipun secara aktual telah terdapat mekanisme internal untuk pengumpulan dan pengukuran data kinerja dari masing-masing seksi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai komponen pengukuran kinerja yaitu dengan menyempurnakan pengukuran kinerja terkait mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur atau mudah diakses bagi pihak yang berkepentingan. Diantaranya dengan cara membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang *up to date*, serta menunjuk petugas/penanggung jawab data yang kompeten di setiap seksi / subbagian untuk melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja. Selain itu meningkatkan kualitas *cascade* indikator kinerja tingkat Balai POM dan individu pegawai (SKP), sehingga dapat dipastikan Balai POM dan individu pegawai dalam organisasi Balai POM di Palu memiliki uraian kinerja yang jelas dan terukur.

Nilai komponen pelaporan kinerja tertinggi dicapai oleh Balai POM di Gorontalo diikuti oleh Balai POM di Palu. Laporan kinerja Balai POM di Palu telah menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan Balai POM yang setara / sejenis, namun belum sepenuhnya menyajikan perbandingan capaian kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya. Mulai tahun 2020 juga akan disusun laporan kinerja interim yang akan dilaporkan setiap triwulan ke Biro Perencanaan dan Keuangan serta Inspektorat Utama. Dengan adanya laporan tersebut dapat dilihat kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal per triwulan, beserta kendala / hambatan dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja pada triwulan berikutnya.

Balai POM di Palu meraih nilai komponen evaluasi internal dan pencapaian sasaran / kinerja tertinggi diantara Balai pembanding lainnya, disusul oleh Balai POM di Ambon. Informasi kinerja Balai POM di Palu telah digunakan sebagai bahan evaluasi internal secara bulanan dan sebagian telah dituangkan dalam Laporan Kinerja, namun belum terdapat kesinambungan evaluasi, rencana aksi, dan evaluasi terhadap rencana aksi.

Walaupun Balai POM di Palu tertinggi untuk nilai komponen pencapaian sasaran / kinerja diantara Balai pembanding lainnya. Namun nilai komponen pencapaian sasaran / kinerja Balai POM di Palu termasuk dua komponen terendah diantara komponen lainnya dalam penilaian SAKIP. Perbandingan capaian kinerja Balai POM di Palu pada prinsipnya sama dengan tahun sebelumnya, belum memanfaatkan hasil evaluasi internal baik periode tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai komponen pencapaian sasaran yaitu dengan meningkatkan

penerapan budaya kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal baik periode berjalan maupun tahun sebelumnya serta mengkomunikasi hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Nilai AKIP Balai POM di Palu (75,77) lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata Balai/Balai Besar POM (74,76). Capaian Nilai AKIP Balai POM di Palu juga lebih tinggi karena Balai POM di Palu dan nasional (Balai/Balai Besar POM lainnya) memiliki target Nilai AKIP yang sama yaitu 81 (A / Sangat Memuaskan). Namun belum ada satu pun Balai / Balai Besar POM yang mencapai target. Rata-rata hasil evaluasi SAKIP Balai / Balai Besar telah bernilai Sangat Baik / BB (31 dari 33 Balai Besar / Balai POM). Demikian halnya dengan Nilai evaluasi SAKIP 28 Unit Eselon II / Unit Mandiri di lingkungan Badan POM semuanya bernilai Sangat Baik / BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan. Berbagai hal yang direkomendasikan oleh Inspektorat selaku tim penilai AKIP di Lingkungan Badan POM untuk peningkatan implementasi SAKIP, perbaikan dan peningkatan kinerja serta penguatan akuntabilitas, diantaranya :

1. Menyempurnakan kualitas dan kuantitas rumusan indikator kinerja di tingkat unit sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
2. Membangun sistem pengukuran kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi baik di tingkat unit maupun di tingkat individu pegawai untuk memudahkan penerapan manajemen kinerja, pengukuran kinerja dan menjamin validitas data capaian kinerja;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala / keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan, rencana aksi, dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi
4. Memanfaatkan data capaian dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya untuk melakukan perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya;

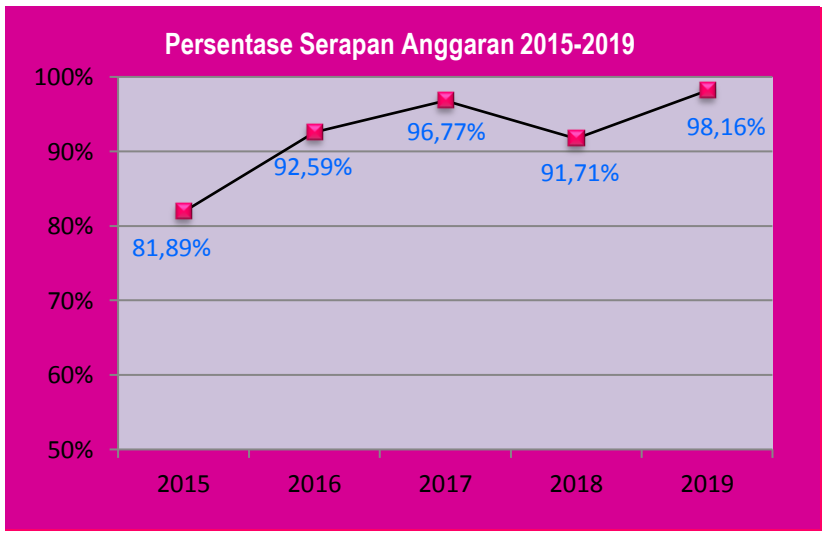
## 3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Akuntabilitas Keuangan Balai POM di Palu tahun 2019 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada tahun 2019 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja awal Balai POM di Palu tahun 2019 adalah sebesar Rp28.845.331.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Kemudian mengalami revisi anggaran sebanyak tujuh kali sehingga anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp31.790.591.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Dari total anggaran, terealisasikan sebesar Rp31.204.680.418,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah) atau 98,16%.

**Tabel 69. Rincian anggaran dan realisasi belanja Balai POM di Palu tahun anggaran 2019**

| Uraian | Anggaran | Realiasasi | Pengembalian | Realisasi Neto | % Realisasi Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Pegawai | 9.882.858.000 | 9.744.752.458 | 3.287.854 | 9.741.464.604 | 98,57 |
| Belanja Barang | 12.880.813.000 | 12.502.635.314 | 12.721.900 | 12.489.913.414 | 96,97 |
| Belanja Modal | 9.026.920.000 | 8.974.862.400 | 1.560.000 | 8.973.302.400 | 99,41 |
| Total Belanja | 31.790.591.000 | 31.222.250.172 | 17.569.754 | 31.204.680.418 | 98,16 |




Gbr 65. Grafik persentase serapan anggaran Balai POM di Palu tahun 2015-2019

Realisasi anggaran menunjukkan tren yang meningkat antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Realisasi anggaran tahun 2018 hanya mencapai 91,71%. Salah satu penyebabnya adalah tidak beroperasi kantor selama 1 bulan karena adanya bencana alam yang terjadi pada akhir bulan September 2018 yaitu terjadinya gempa, tsunami, dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan sekitarnya, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, Selain itu faktor penyebab rendahnya serapan anggaran di tahun 2018 yaitu UPT baru yang terbentuk (Loka POM di Kabupaten Banggai) mulai beroperasi pada bulan September sampai dengan Desember 2018 (4 bulan), sedangkan pagu yang dianggarkan di output 'Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota' untuk operasional Loka POM selama 6 bulan. Untuk tahun 2019, realisasi anggaran mencapai 98,16%, tertinggi selama periode Renstra 2015-2019.

Pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2019 tertinggi selama periode Renstra 2015-2019. disebabkan oleh :

1. Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa dilakukan secara rutin sehingga hambatan dan kendala selama proses pengadaan dapat diantisipasi sedini mungkin;
2. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan;
3. Komitmen antara pimpinan dan staf Balai POM di Palu untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sebaik mungkin sesuai anggaran yang tercantum dalam DIPA Balai POM di Palu;
4. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin;
5. Pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-catalogue*;
6. Proses pengadaan barang/jasa termasuk belanja modal dilaksanakan seawal mungkin;
7. Monitoring yang lebih intensif di triwulan IV dibandingkan triwulan lain atas realisasi anggaran.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Palu untuk meningkatkan realisasi anggaran, antara lain :

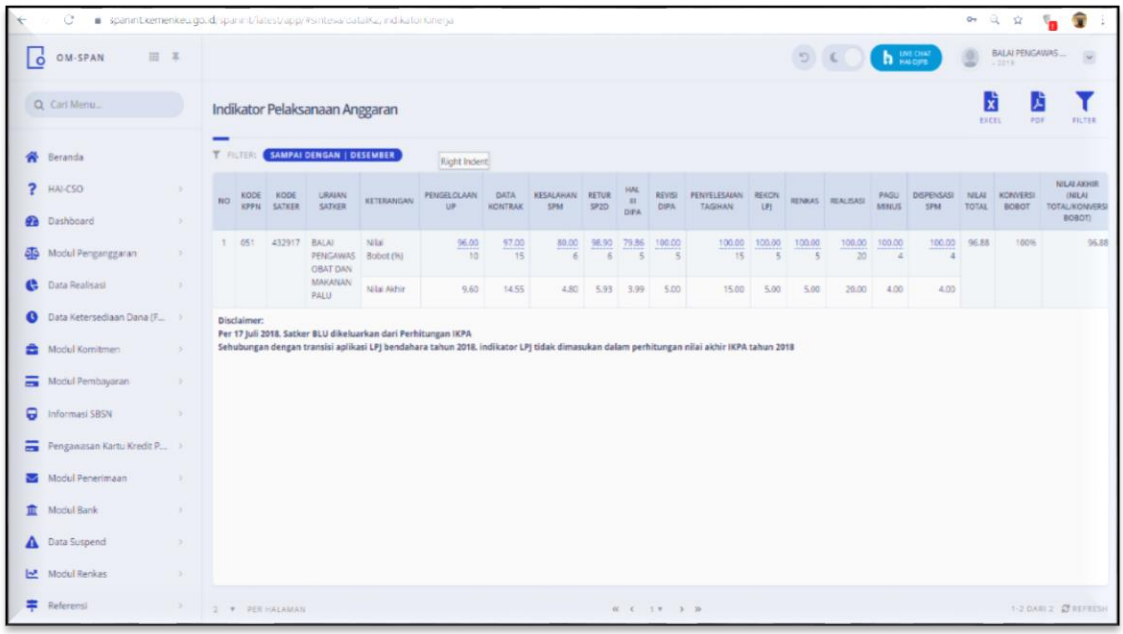
1. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi;
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA;
3. Memanfaatkan optimalisasi sisa anggaran untuk melaksanakan kegiatan baru yang dapat meningkatkan / mempercepat pencapaian *output / outcome*;

4. Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian / kesalahan SPM atau retur SP2D;

## NILAI KINERJA ANGGARAN

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

### a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



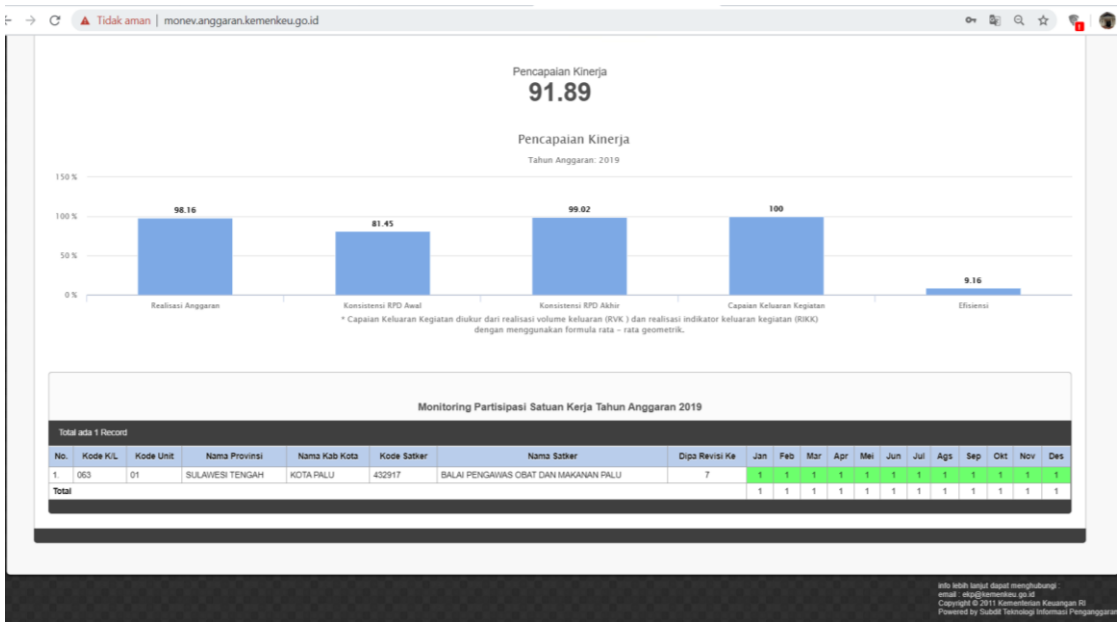

Gbr 66. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai POM di Palu tahun 2019

Dari gambar 66, dapat dilihat Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai POM di Palu sebesar 96,88. Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 12 indikator pembentuk IKPA, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus. Dua indikator dengan nilai terendah yaitu Halaman III DIPA (79,86) dan kesalahan SPM (80,00), sementara indikator lainnya memiliki nilai di atas 96% (7 diantaranya mencapai nilai 100).

Upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Palu untuk meningkatkan Nilai IKPA, antara lain dengan menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga

meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA; Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian / kesalahan SPM atau retur SP2D;

### b. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)



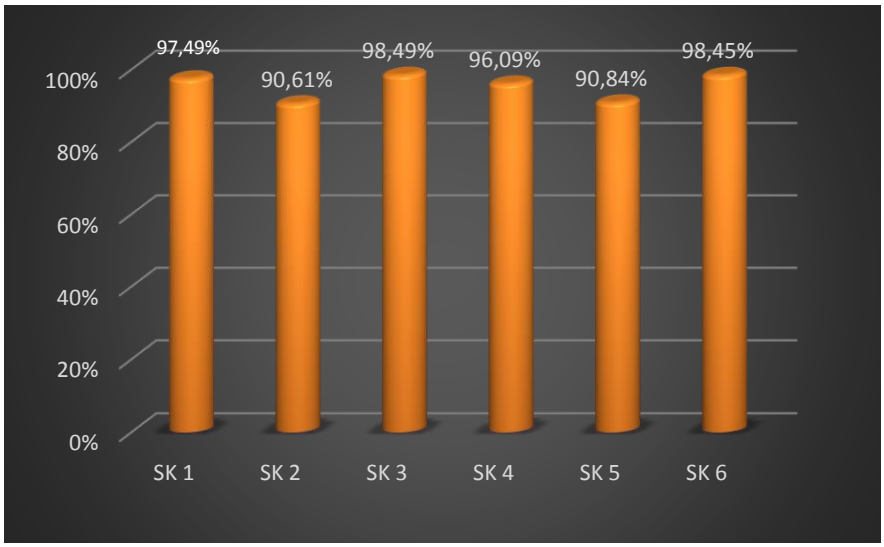

Gbr 67. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Balai POM di Palu tahun 2019

Dari gambar 67, dapat dilihat Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Balai POM di Palu sebesar 91,89. Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai konsistensi RPD awal paling rendah dibandingkan indikator yang lain (Realisasi anggaran, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan). Nilai efisiensi juga hanya 11,68 dari nilai maksimal 20. Upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Palu untuk meningkatkan Nilai EKA, antara lain dengan menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA serta meningkatkan capaian output kegiatan Balai POM di Palu.

Pagu dan realisasi anggaran dari setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 70. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2019**

| NO | SASARAN KEGIATAN | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % SERAPAN ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Rp2.544.694.000 | Rp2.480.803.296 | 97,49 |
| 2. | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Rp104.506.000 | Rp94.690.500 | 90,61 |
| 3. | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Bala POM di Palu | Rp2.748.324.000 | Rp2.706.885.206 | 98,49 |
| 4. | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Rp1.033.889.000 | Rp993.507.740 | 96,09 |
| 5. | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Rp489.849.000 | Rp444.962.585 | 90,84 |
| 6. | Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | Rp24.869.329.000 | Rp24.483.831.091 | 98,45 |
| **TOTAL** | | Rp31.790.591.000 | Rp31.204.680.418 | 98,16 |




Gbr 68. Grafik realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2019

Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi (98,49%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 3 yaitu 'Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu'. Kegiatan tersebut berupa KIE Obat dan Makanan, Desa Pangan Aman, serta Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan aman. Dari data realisasi kinerja, Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman tahun 2019 sebesar 71,27 yang mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan sudah cukup baik karena berada pada rentang 50,01 – 75,00. Capaian kinerja menunjukkan bahwa target kinerja 2019 telah tercapai dengan persentase capaian 116,84% (Sangat Baik).

Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi kedua (98,45%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 6 yaitu 'Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019'. Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran kegiatan keenam yaitu "Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019". Sasaran kegiatan ini mendapat proporsi yang paling besar karena adanya pengadaan alat-alat laboratorium untuk menunjang kegiatan di laboratorium pengujian sebagai tulang punggung pengawasan obat dan makanan, pengadaan sarana dan prasarana internal, kegiatan dukungan manajemen satker, dukungan manajemen laboratorium serta alokasi untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan).

Capaian realisasi anggaran terendah (90,61%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 2 yaitu ' Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu'.

## 3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator *input* dan *output* kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama / lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian } Output}{\%\ \text{Capaian } Input}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ \text{Rencana Capaian } Output}{\%\ \text{Rencana Capaian } Input} = \frac{100\ \%}{100\ \%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengam membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE $\geq$ SE, maka kegiatan dianggap efisien
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

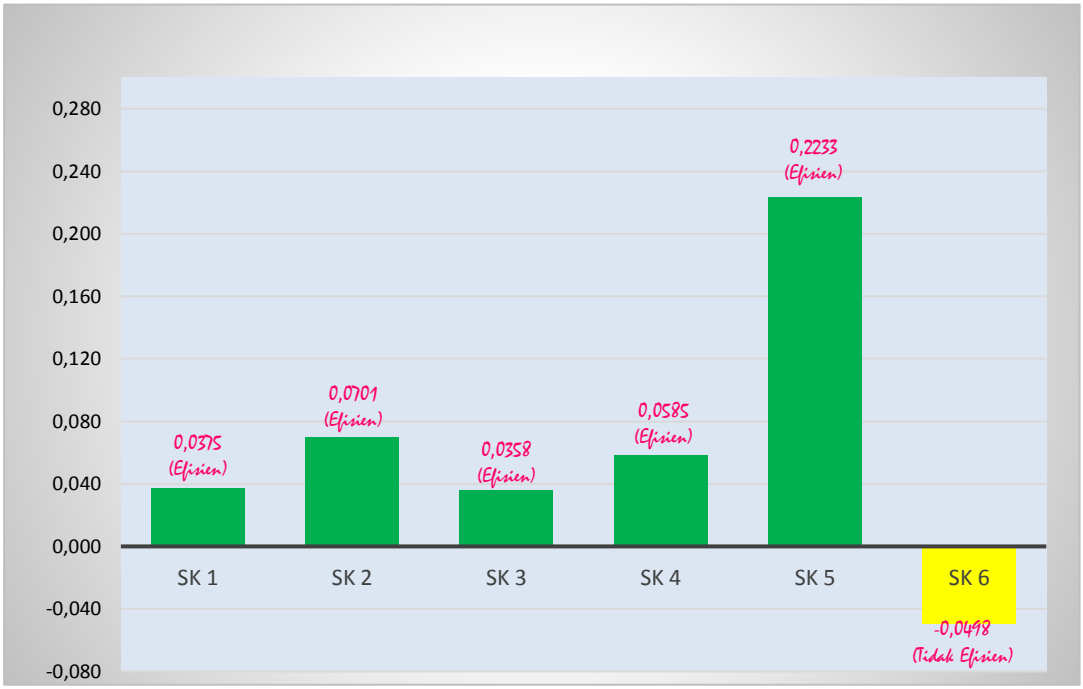
Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Berikut merupakan hasil dari pengukuran efisiensi kegiatan dari 6 sasaran kegiatan Balai POM di Palu tahun 2019.

**Tabel 71. Efisiensi kegiatan per sasaran kegiatan Balai POM di Palu tahun 2019**

| | SASARAN KEGIATAN | TE | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | 0,0375 | Efisien |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 0,0701 | Efisien |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | 0,0358 | Efisien |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | 0,0585 | Efisien |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 0,2233 | Efisien |
| 6 | Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | -0,0498 | Tidak Efisien |




Gbr 69. Grafik efisiensi kegiatan per sasaran kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2019

Nilai tingkat efisiensi sasaran kegiatan pada tahun 2019 bervariasi antara -0.0498 sampai 0,2233. Tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh Sasaran Kegiatan 5 yaitu 'Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu'. Capaian realisai output Jumlah perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan adalah sebesar 120% (6 dari 5 jumlah perkara yang ditargetkan), sudah termasuk 1 perkara di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai. Sedangkan capaian indikator sasaran kegiatan 'jumlah perkara yang diselesaikan hingga tahap II' adalah sebesar 111,11% (55,56% dari target 50,00%). Sebanyak 5 perkara yang diselesaikan hingga tahap II dari 9 perkara yang ada termasuk perkara yang carry over (1 perkara tahun 2017, 2 perkara tahun 2018 dan 2 perkara tahun 2019).

Keberhasilan ini tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan penindakan yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan yang dimulai dari investigasi, Operasi Penindakan sampai dengan proses penyidikan; Telah dipetakan unsur pidana dan kelengkapan alat bukti pada target perkara sebelum kegiatan Operasi Penindakan sehingga memudahkan dalam proses pemberkasaan; dan terjalinnya koordinasi yang baik dengan *Criminal Justice System* (Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri) di daerah serta faktor-faktor lain yang mendukung keberhasilan tersebut.

Sasaran Kegiatan 1 s.d 5 yang dilaksanakan oleh Balai POM di Palu telah dilaksanakan secara efisien. Ini berarti persentase capaian output yang dihasilkan dari setiap sasaran kegiatan lebih besar dibandingkan persentase capaian input yang digunakan, dalam hal ini dana. Ini juga menunjukkan dengan input dana yang lebih sedikit, Balai POM di Palu mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan dengan efisien dan efektif.

Khusus untuk sasaran kegiatan 6 (Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019), dinyatakan tidak efisien. Indikator sasaran kegiatan 6 hanya berdasarkan pada Nilai AKIP Balai POM. Sementara kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada sasaran kegiatan ini sangat banyak diantaranya pengadaan alat-alat laboratorium, pengadaan sarana dan prasarana internal, kegiatan dukungan manajemen satker, kegiatan dukungan manajemen laboratorium, belanja pegawai (gaji dan tunjangan) serta belanja operasional perkantoran sehari-hari.

Sasaran kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran terbesar dan penyerapan anggarannya mencapai 98,45%, sedangkan capaian realisasi nilai AKIP Balai POM di Palu hanya 93,54% (nilai 75,77). Dengan demikian persentase capaian output dalam hal ini Nilai AKIP Balai POM di Palu lebih rendah dibandingkan persentase capaian input yang digunakan, dalam hal ini berupa anggaran sehingga kegiatan ini dinyatakan tidak efisien.

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana). Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Sasaran kegiatan 6 beserta 1 indikator kinerjanya merupakan satu-satunya sasaran kegiatan dan indikator kinerja di level '*Learning and Growth Perspective'* pada Peta Strategi BSC level II Balai POM di Palu Tahun 2015-2019. Pada penyusunan Peta Strategi BSC level II Balai POM di Palu Tahun 2020-2024 terdapat 4 sasaran kegiatan dengan 7 indikator kinerja kegiatan pada level '*Learning and Growth Perspective'*. Sehingga pengukuran kinerja dapat lebih komprehensif tidak hanya berdasarkan nilai AKIP, tetapi juga indikator kinerja lainnya seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks profesionalitas ASN, Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, Nilai Kinerja Anggaran UPT, Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran UPT.

Formulir pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 9 dalam Laporan Kinerja ini.

# BAB IV
# PENUTUP

## 4.1 SIMPULAN

Pada triwulan I tahun 2019 telah dilakukan revisi dokumen Rencana Strategis Balai POM di Palu. Penyusunan Dokumen Revisi Renstra Balai POM di Palu mengacu pada Rencana Strategis BPOM Tahun 2015-2019 dan pedoman penyusunan dan *review* rencana strategis tahun 2015-2019 di lingkungan BPOM serta dengan memperhatikan adanya perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2019 dan Perjanjian Kinerja 2019 memuat 6 sasaran kegiatan dengan 16 indikator kinerja kegiatan yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu, seperti yang tercantum pada Peta Strategi BSC Level II Balai POM di Palu. Pada Laporan Kinerja Balai POM di Palu tahun 2019 terdapat perubahan kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran, yang semula 5 kategori menjadi 6 kategori yaitu tidak dapat disimpulkan, sangat baik, baik, kurang, dan sangat kurang.

Capaian kinerja pada laporan ini merupakan gabungan dari capaian kinerja Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai. Terdapat 3 sasaran kegiatan yang mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Sangat Baik' yaitu sasaran kegiatan 2 (Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM), sasaran kegiatan 3 (Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM) dan sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM). Selebihnya 3 sasaran kegiatan yang lain mencapai NPS 'Baik' yaitu sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM), sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM) dan sasaran kegiatan 6 (Terwujudnya RB Balai POM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019).

Pada sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM), terdapat 2 dari 6 indikator kinerja kegiatan (IKK) yang memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik', yaitu Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat dan Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat. Selebihnya mencapai nilai capaian kinerja 'Baik'. Hal ini menunjukkan

bahwa Balai POM di Palu telah berhasil dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu. Berbagai faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, ISO 17025: 2017 sudah diterapkan secara konsisten; Peningkatan Standar Ruang Lingkup Pengujian; Pembinaan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan produksi dan distribusi produk Obat dan Makanan; Peningkatan kompetensi petugas pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan pelayanan melalui pelatihan internal, pelatihan eksternal, bimbingan teknis, dan magang; Pengawasan label dilakukan 100% terhadap komoditi yang di*sampling* dan pengawasan iklan pada media cetak dan elektronik telah dilaporkan ke pusat untuk ditindaklanjuti; Adanya berbagai jenis kegiatan Balai POM di Palu dalam usaha peningkatan pengetahuan masyarakat seperti tersedianya mobil KIE keliling, promosi melalui media, pameran dan penyebaran informasi ke seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah selama ini telah terjalin dengan baik dengan adanya MoU antara Balai POM di Palu dengan beberapa Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Tengah serta telah dilakukan pengawasan terpadu dengan dinas terkait di kabupaten/kota pada sarana produksi, distribusi maupun pelayanan.

Pada sasaran kegiatan 2 (Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM), 1 indikator kinerja kegiatan bernilai 'Sangat Baik' dan 1 IKK lagi bernilai 'Baik'. Secara keseluruhan Nilai NPS sasaran kegiatan 2 bernilai 'Sangat Baik'. Hal ini didukung oleh Pelaksanaaan bimbingan teknis yang terus menerus untuk pelaku usaha tentang cara produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang Baik; Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang produksi obat dan makanan kepada pelaku usaha; Dukungan lintas sektor dari pemerintah daerah dan organisasi profesi; Tersedianya akses informasi kepada masyarakat di era revolusi industri 4.0 yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang Obat dan Makanan aman baik dari media social, media cetak, elektronik, maupun perangkat digital; Adanya pemberdayaan komunitas dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keamanan obat dan makanan di kota Palu dan beberapa kabupaten diantaranya komunitas desa, pasar, sekolah, pramuka, UMKM, PKK, dan ritel; Adanya berbagai jenis kegiatan Balai POM di Palu dalam usaha peningkatan pengetahuan masyarakat seperti tersedianya mobil KIE keliling, promosi melalui media, iklan layanan masyarakat, pameran dan penyebaran informasi ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Indikator satu-satunya pada sasaran kegiatan 3 (Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu) yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman memperoleh capaian kinerja pada kategori 'Sangat Baik'. Faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah : Adanya program pengembangan kompetensi petugas

dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat; Tersedianya layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp, sms, maupun telepon 24 jam setiap hari. Adanya kegiatan terpadu KIE dan pengujian setempat dengan mobil laboratorium keliling; Kegiatan promosi Balai POM di Palu yang menyentuh semua lapisan masyarakat yaitu KIE keliling, pameran, *Car Free Day*, *talkshow* serta pemasangan iklan di ruang publik; Tersedianya akses informasi kepada masyarakat di era revolusi industri 4.0 yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang Obat dan Makanan aman baik dari media cetak, elektronik, media sosial maupun perangkat digital.

Sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu) terdiri dari 5 IKK dimana nilai capaian kinerjanya bervariasi yaitu 2 IKK bernilai sangat baik (Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dan Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu); 2 IKK bernilai 'Baik'(Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dan Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu); dan 1 IKK bernilai 'Çukup' (Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu). Tetapi secara keseluruhan Nilai Pencapaian Sasaran kegiatan 4 berada dalam kategori 'Baik'.

Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan 4 adalah Konsisten mengimplementasikan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015; Koordinasi Balai POM di Palu dengan Pemerintah Daerah cukup baik dengan berjalannya kegiatan terpadu dalam bidang pengawasan dan kesediaan untuk saling bertukar informasi untuk mempermudah pencapaian target pengawasan; Penggunaan aplikasi sertifikasi secara elektronik seperti e-reg.pom.go.id dan sertifikasicdob.pom.go.id memudahkan proses penilaian sertifikasi karena tindak lanjut CAPA dapat segera dikirimkan oleh pemilik sarana ke akun petugas dalam aplikasi; Penerapan sistem aplikasi pelayanan sertifikasi dalam pelayanan SKE memudahkan pelaku usaha dalam proses penerbitan SKE; Balai POM di Palu senantiasa mendorong pelaku usaha untuk melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian hasil inspeksi pada sarana distribusi dan sarana produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai 'IKK Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' pada sasaran kegiatan 5 bernilai 'Sangat Baik', sehingga NPS sasaran kegiatan 5 juga bernilai 'Sangat Baik'. Hal ini didukung oleh Kegiatan penindakan terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dilaksanakan sesuai dengan tahapan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan yang dimulai dari investigasi, Operasi Penindakan sampai dengan proses penyidikan; Telah dipetakan unsur pidana dan kelengkapan alat bukti

pada target perkara sebelum kegiatan Operasi Penindakan sehingga memudahkan dalam proses pemberkasaan; Terjalinnya koordinasi yang baik dengan *Criminal Justice System* (Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri) di daerah, sehingga pelaksanaan Operasi Penindakan secara teknis dan taktis dapat berjalan dengan efektif dan memperkecil peluang pengembalian berkas oleh Jaksa Penuntut Umum kepada PPNS Balai POM di Palu untuk memenuhi petunjuk; Berkas perkara yang belum selesai pada tahun 2018 dan 2017 menjadi prioritas dalam penyelesaian berkas yang dilakukan oleh PPNS Balai POM di Palu pada tahun 2019; Telah dilakukan pemisahan dan spesialisasi personel dalam pelaksanaan kegiatan investigasi oleh petugas Seksi Penindakan dan penyidikan oleh PPNS sehingga lebih fokus dalam penyelesaian tugas.

Sasaran kegiatan 6 (Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019) mencapai NPS 'Baik'. Indikator satu-satunya pada sasaran kegiatan 6 yaitu Nilai AKIP Balai POM di Palu juga bernilai 'Baik'. Faktor-faktor pendukung diantaranya Perencanaan periode lima tahunan maupun tahunan telah dilakukan dan diwujudkan dalam dokumen Revisi Renstra 2015-2019, RKT, dan PK. Dokumen ini yang menjadi dasar dalam melaksanakan program atau kegiatan Balai POM di Palu; Komitmen menjalankan ISO 17025 dan 9001 sebagai acuan dalam menata sistem manajemen. Setiap seksi memiliki perencanaan, pengelolaan kegiatan, evaluasi serta pelaporan yang merupakan rangkaian proses yang tidak terputus dalam membangun akuntabilitas kinerja Balai POM di Palu. Enam area perubahan telah dilaksanakan oleh Balai POM di Palu meskipun belum optimal namun telah mengarah kepada peningkatan; Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM terkait Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Jika dibandingkan dengan Balai pembanding lainnya, NPS kegiatan Balai POM di Palu tahun 2019 paling baik diantara balai pembanding lainnya. NPS kegiatan Balai POM di Palu mencapai 'sangat baik' untuk 3 sasaran kegiatan (SK) dan 3 sasaran kegiatan lainnya berada pada kategori 'Baik'. Walaupun Balai POM di Bengkulu memiliki NPS kegiatan 'sangat baik' untuk 4 SK, tapi 2 SK lainnya hanya berada pada kategori masing-masing 'çukup' dan 'kurang'. NPS kegiatan Balai POM di Ambon terdiri dari 3 SK berada pada kategori 'Sangat Baik', 2 SK 'Baik', dan 1 SK 'Tidak dapat disimpulkan'. Sedangkan Balai POM di Gorontalo hanya memiliki NPS 'sangat baik'untuk 1 SK, selebihnya '3 SK 'Baik', dan 2 SK 'Tidak dapat disimpulkan'. Nilai NPS kegiatan Balai POM di Pangkal Pinang sangat bervariasi yaitu 1 SK 'sangat baik', 1 SK 'Baik', 2 SK çukup', 1 SK 'kurang', dan 1 SK 'tidak dapat disimpulkan'.

Realisasi anggaran menunjukkan tren yang meningkat antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Realisasi anggaran tahun 2018 hanya mencapai 91,71%. Salah satu penyebabnya adalah tidak beroperasi kantor selama 1 bulan karena adanya bencana alam yang terjadi pada akhir bulan

September 2018 yaitu terjadinya gempa, tsunami, dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan sekitarnya, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, Selain itu faktor penyebab rendahnya serapan anggaran di tahun 2018 yaitu UPT baru yang terbentuk (Loka POM di Kabupaten Banggai) mulai beroperasi pada bulan September sampai dengan Desember 2018 (4 bulan), sedangkan pagu yang dianggarkan di output 'Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota' untuk operasional Loka POM selama 6 bulan. Untuk tahun 2019, realisasi anggaran mencapai 98,16%, tertinggi selama periode Renstra 2015-2019.

Pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2019 tertinggi selama periode Renstra 2015-2019. Didukung oleh faktor sebagai berikut : Monitoring dan evaluasi PBJ dilakukan secara rutin sehingga hambatan dan kendala selama proses pengadaan dapat diantisipasi sedini mungkin; Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan; Komitmen antara pimpinan dan staf Balai POM di Palu untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sebaik mungkin sesuai anggaran yang tercantum dalam DIPA Balai POM di Palu; Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin; Proses pengadaan barang / jasa terutama belanja modal dilaksanakan seawal mungkin; Monitoring yang lebih intensif di triwulan IV dibandingkan triwulan lain terhadap realisasi anggaran.

Nilai tingkat efisiensi sasaran kegiatan pada tahun 2019 bervariasi antara -0.0498 sampai 0,2233. Tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh Sasaran Kegiatan 5 yaitu 'Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu'. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan penindakan yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan yang dimulai dari investigasi, Operasi Penindakan sampai dengan proses penyidikan; Telah dipetakan unsur pidana dan kelengkapan alat bukti pada target perkara sebelum kegiatan Operasi Penindakan sehingga memudahkan dalam proses pemberkasaan; dan terjalinnya koordinasi yang baik dengan *Criminal Justice System* (Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri) di daerah serta faktor-faktor lain yang mendukung keberhasilan tersebut.

Khusus untuk sasaran kegiatan 6 (Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019), dinyatakan tidak efisien. Indikator sasaran kegiatan 6 hanya berdasarkan pada Nilai AKIP Balai POM. Sementara kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada sasaran kegiatan ini sangat banyak diantaranya pengadaan alat-alat laboratorium, pengadaan sarana dan prasarana internal, kegiatan dukungan manajemen satker, kegiatan dukungan manajemen laboratorium, belanja pegawai (gaji dan tunjangan) serta belanja operasional perkantoran sehari-hari.

## 4.2 SARAN

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Balai POM di Palu adalah :

1. Melakukan advokasi secara periodik ke kabupaten / kota untuk mereplikasi program-program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Badan POM seperti GKPD dan Pasar Aman;
2. Meningkatkan dan menindaklanjuti perkuatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Tetap berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;
4. Senantiasa mendorong pelaku usaha produksi Obat dan Makanan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan dengan melaksanakan cara produksi Obat dan Makanan yang baik;
5. Meningkatkan kompetensi pegawai khususnya dalam pelayanan prima dan *public speaking;*
6. Memperkuat koordinasi dengan media/pers untuk meningkatkan publikasi kinerja ke masyarakat;
7. Meningkatkan sosialisasi *website* BPOM, HALOBPOM dan media sosial lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
8. Mengoptimalkan perencanaan dan proses pengadaan alat, reagen dan baku pembanding yang belum tersedia di Laboratorium Baku Pembanding PPPOMN;
9. Pengadaan alat utama dan sarana prasarana laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium;
10. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau lintas sektor terkait lainnya dalam upaya tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
11. Penguatan pembinaan UMKM dalam pemenuhan persyaratan dalam rangka penilaian sertifikasi;
12. Mendorong pelaku usaha secara terus menerus untuk segera melakukan perbaikan terhadap hasil audit oleh Balai POM di Palu sehingga keputusan penilaian sertifikasi dapat segera diterbitkan tepat waktu;
13. Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Palu;
14. Mendorong lintas sektor untuk mengimplementasikan Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah;
15. Perkara yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2019 menjadi prioritas dalam penyelesaian berkas sampai tahap II di tahun 2020;

16. Melakukan identifikasi dan *update* pemetaan terhadap potensi tindak pidana di bidang Obat dan Makanan di daerah Sulawesi Tengah;
17. Meningkatkan kemampuan petugas di Seksi Penindakan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen dan/atau investigasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan telah dibenarkan tentang target kegiatan operasi penindakan;
18. Target kinerja yang ditetapkan baik dalam dokumen Renstra, RKT, RKA, PK harus berdasarkan basis data (*baseline*) yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis serta didukung dengan dokumentasi yang jelas dan mampu telusur;
19. Mulai tahun 2020 akan disusun laporan kinerja interim yang akan dilaporkan setiap triwulan ke Biro Perencanaan dan Keuangan serta Inspektorat Utama. Dengan adanya laporan tersebut dapat dilihat kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal per triwulan, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja pada triwulan berikutnya;
20. Menyempurnakan pengukuran kinerja terkait mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur atau mudah diakses bagi pihak yang berkepentingan serta meningkatkan kualitas *cascade* indikator kinerja tingkat Balai POM dan individu pegawai (SKP), sehingga dapat dipastikan Balai POM dan individu pegawai dalam organisasi Balai POM di Palu memiliki uraian kinerja yang jelas dan terukur;
21. Meningkatkan evaluasi program yang fokus pada analisis hasil capaian kinerja dan keterkaitan kausalitas antara kegiatan dengan sasaran kegiatan yang akan dicapai;
22. Memperkuat monitoring periodik terhadap capaian output, anggaran maupun capaian sasaran kegiatan serta rencana aksi nyata perbaikan atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja;
23. Meningkatkan penerapan budaya kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal baik periode berjalan maupun tahun sebelumnya;
24. Mengoptimalkan kerja tim Pokja Reformasi Birokrasi pada enam area perubahan (Manajemen perubahan, Penguatan sistem pengawasan, Penguatan akuntabilitas kinerja, Penguatan tata laksana, Penguatan sistem manajemen SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik) sehingga dapat mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan demikian dapat tercipta pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik semakin baik dan berkualitas;
25. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi;

26. Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian / kesalahan SPM atau retur SP2D;
27. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA;
28. Memanfaatkan optimalisasi sisa anggaran untuk melaksanakan kegiatan baru yang dapat meningkatkan / mempercepat pencapaian *output / outcome*.

BADAN POM RI

# Lampiran

Lampiran 1

# IKHTISAR RENCANA STRATEGIS (REVISI)
# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
# TAHUN 2015 - 2019

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator | | Lokasi | *Baseline* | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **OTK Lama** | | | | | | | | | |
| | **SS 1** | **Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan** | | | | | | | |
| | 1.1. | Persentase Obat yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 92,00 | 92,00 | 92,50 | 93,00 | | |
| | 1.2. | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 70,00 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | | |
| | 1.3. | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | | |
| | 1.4. | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 81,00 | | |
| | 1.5. | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 87,60 | 88,10 | 88,60 | 89,10 | | |
| | **SS 2** | **Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat** | | | | | | | |
| | 2,1 | Tingkat Kepuasan Masyarakat | Provinsi Sulawesi Tengah | 75,00 | 77,00 | 80,00 | 82,00 | | |
| | 2,2 | Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan | Provinsi Sulawesi Tengah | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | **SS 3** | **Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM** | | | | | | | |
| | 3,1 | Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM | Provinsi Sulawesi Tengah | A | A | A | A | | |
| **Program Pengawasan Obat dan Makanan** | | | | | | | | | |
| | **SP 1** | **Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan** | | | | | | | |
| | 1.1. | Persentase Obat yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 92,00 | 92,00 | 92,50 | 93,00 | | |
| | 1.2. | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 70,00 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | | |
| | 1.3. | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | | |
| | 1.4. | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 81,00 | | |
| | 1.5. | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 87,60 | 88,10 | 88,60 | 89,10 | | |
| | **SP 2** | **Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat** | | | | | | | |
| | 2,1 | Tingkat Kepuasan Masyarakat | Provinsi Sulawesi Tengah | 75,00 | 77,00 | 80,00 | 82,00 | | |
| | 2,2 | Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan | Provinsi Sulawesi Tengah | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | **SP 3** | **Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM** | | | | | | | |
| | 3,1 | Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM | Provinsi Sulawesi Tengah | A | A | A | A | | |
| **Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Palu** | | | | | | | | | |
| | **SK 1** | **Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar** | | | | | | | |
| | 1 | Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis | Provinsi Sulawesi Tengah | 2.500 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | | |
| | 2 | Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) | Provinsi Sulawesi Tengah | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | **SK 2** | **Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi syarat** | | | | | | | |
| | 3 | Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan | Provinsi Sulawesi Tengah | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,49 | | |
| | **SK 3** | **Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi syarat** | | | | | | | |
| | 4 | Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan | Provinsi Sulawesi Tengah | 26,20 | 26,20 | 26,57 | 26,95 | | |
| | **SK 4** | **Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan** | | | | | | | |
| | 5 | Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan | Provinsi Sulawesi Tengah | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | **SK 5** | **Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi** | | | | | | | |
| | 6 | Jumlah layanan publik Balai POM | Provinsi Sulawesi Tengah | 357 | 419 | 457 | 495 | | |
| | 7 | Jumlah komunitas yang diberdayakan | Provinsi Sulawesi Tengah | 11 | 15 | 19 | 23 | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator | | | Baseline | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | **SK 5** | **Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi** | | | | | | | |
| | 6 | Jumlah layanan publik Balai POM | Provinsi Sulawesi Tengah | 357 | 419 | 457 | 495 | | |
| | 7 | Jumlah komunitas yang diberdayakan | Provinsi Sulawesi Tengah | 11 | 15 | 19 | 23 | | |
| | **SK 6** | **Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan** | | | | | | | |
| | 8 | Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar | Provinsi Sulawesi Tengah | 71 | 73 | 73 | 75 | | |
| | **SK 7** | **Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu** | | | | | | | |
| | 9 | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu | Provinsi Sulawesi Tengah | 8 | 10 | 9 | 10 | | |
| **OTK Baru** | | | | | | | | | |
| **Program/ Kegiatan** | **Sasaran Kegiatan / Indikator** | | | **Baseline** | **Target** | | | | |
| | | | | | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Program Pengawasan Obat dan Makanan | **SK 1** | **Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu** | | | | | | | |
| | 1 | Indeks POM | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | 70,00 | 71,00 |
| | 2 | Persentase Obat yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | 93,50 | 94,00 |
| | 3 | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | 83,00 | 80,00 |
| | 4 | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | 82,00 | 87,00 |
| | 5 | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | 92,00 | 80,00 |
| | 6 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | 89,60 | 71,00 |
| | **SK 2** | **Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu** | | | | | | | |
| | 1 | Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | 60,00 | 61,00 |
| | 2 | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | - | 66,00 |
| | **SK 3** | **Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu** | | | | | | | |
| | 1 | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | 60,00 | 61,00 |
| | **SK 4** | **Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu** | | | | | | | |
| | 1 | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | 25,00 | 40,00 |
| | 3 | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | 75,00 | 78,00 |
| | 4 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | 85,00 | 90,00 |
| | 5 | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | 40,00 | 53,75 |
| | **SK 5** | **Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu** | | | | | | | |
| | 1 | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | 50,00 | 50,00 |
| | **SK 6** | **Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019** | | | | | | | |
| | 1 | Nilai AKIP Balai POM di Palu | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | 78,00 | 81,00 |

# INDIKATOR KINERJA UTAMA
# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
# TAHUN 2015 - 2019

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA |
|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks POM |
| | | Persentase Obat yang memenuhi syarat |
| | | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan (*compliance index* ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan |
| | | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu |
| | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II |
| 6 | Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai *roadmap* RB BPOM 2015 - 2019 | Nilai AKIP Balai POM di Palu |

# RENCANA KINERJA
# BALAI POM DI PALU
# TAHUN 2019

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks POM | 71,00 |
| | | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 94,00 |
| | | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | 80,00 |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 87,00 |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 80,00 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 71,00 |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan (*compliance index* ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 61,00 |
| | | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | 66,00 |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 61,00 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 100,00 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 42,00 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 78,00 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 90,00 |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 53,75 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | 50,00 |
| 6 | Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | Nilai AKIP Balai POM di Palu | 81,00 |

Lampiran 4

# PERJANJIAN KINERJA
# BALAI POM DI PALU
# TAHUN 2019

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks POM | 71,00 |
| | | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 94,00 |
| | | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | 80,00 |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 87,00 |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 80,00 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 71,00 |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan (*compliance index* ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 61,00 |
| | | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | 66,00 |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 61,00 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 100,00 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 42,00 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 78,00 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 90,00 |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 53,75 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | 50,00 |
| 6 | Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | Nilai AKIP Balai POM di Palu | 81,00 |

**Kegiatan :**

Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia Rp31.790.591.000,-

## PENGUKURAN KINERJA
## BALAI POM DI PALU
## TAHUN 2019

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | REALISASI | | PENCAPAIAN | | BOBOT | KRITERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks POM | 71,00 | | 72,69 | | 102,38 | % | 2 | Baik |
| | | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 94,00 | % | 85,27 | % | 90,71 | % | 2 | Baik |
| | | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | 80,00 | % | 88,69 | % | 110,86 | % | 2 | Sangat Baik |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 87,00 | % | 97,35 | % | 111,90 | % | 2 | Sangat Baik |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 80,00 | % | 78,24 | % | 97,80 | % | 2 | Baik |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 71,00 | % | 72,96 | % | 102,76 | % | 2 | Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)** | | | | | 102,74 | | | Baik |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 61,00 | | 73,01 | | 119,69 | % | 2 | Sangat Baik |
| | | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | 66,00 | | 67,70 | | 102,58 | % | 2 | Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)** | | | | | 111,13 | | | Sangat Baik |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 61,00 | | 71,27 | | 116,84 | % | 2 | Sangat Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)** | | | | | 116,84 | | | Sangat Baik |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 100,00 | % | 98,79 | % | 98,79 | % | 2 | Baik |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai | 42,00 | % | 33,90 | % | 80,71 | % | 2 | Cukup |
| | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 78,00 | % | 81,79 | % | 104,86 | % | 2 | Baik |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 90,00 | % | 100,00 | % | 111,11 | % | 2 | Sangat Baik |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja | 53,75 | % | 60,79 | % | 113,10 | % | 2 | Sangat Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)** | | | | | 101,71 | | | Baik |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | 50,00 | % | 55,56 | % | 111,11 | % | 2 | Sangat Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)** | | | | | 111,11 | | | Sangat Baik |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | REALISASI | | PENCAPAIAN | | BOBOT | KRITERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | Nilai AKIP Balai POM di Palu | 81,00 | | 75,77 | | 93,54 | % | 2 | Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)** | | | | | 93,54 | | | Baik |

Palu, 23 Januari 2020
Kepala Balai POM di Palu,

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.
NIP 19800114 200501 1 001

## PENGUKURAN KINERJA
## BALAI POM DI PALU
## TAHUN 2018 - 2019

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | 2018 | | | | | | | | 2019 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | | REALISASI | | PENCAPAIAN | | BOBOT | KRITERIA | TARGET | | REALISASI | | PENCAPAIAN | | BOBOT | KRITERIA |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks POM | 70 | | 65,90 | | 94,14 | | 2 | Cukup | 71,00 | | 72,69 | | 102,38 | % | 2 | Baik |
| | | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 93,50 | % | 96,44 | % | 103,14 | % | 2 | Memuaskan | 94,00 | % | 85,27 | % | 90,71 | % | 2 | Baik |
| | | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | 83,00 | % | 95,08 | % | 114,55 | % | 2 | Memuaskan | 80,00 | % | 88,69 | % | 110,86 | % | 2 | Sangat Baik |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 82,00 | % | 99,09 | % | 120,84 | % | 2 | Memuaskan | 87,00 | % | 97,35 | % | 111,90 | % | 2 | Sangat Baik |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 92,00 | % | 99,39 | % | 108,03 | % | 2 | Memuaskan | 80,00 | % | 78,24 | % | 97,80 | % | 2 | Baik |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 89,60 | % | 85,48 | % | 95,40 | % | 2 | Cukup | 71,00 | % | 72,96 | % | 102,76 | % | 2 | Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)** | **106,02** | | | | | | | **Memuaskan** | | | | | 102,74 | | | **Baik** |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 60 | | 58,21 | | 97,02 | | 2 | Cukup | 61,00 | | 73,01 | | 119,69 | % | 2 | Sangat Baik |
| | | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | | | | | | | 66,00 | | 67,70 | | 102,58 | % | 2 | Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)** | **97,02** | | | | | | | **Cukup** | | | | | 111,13 | | | **Sangat Baik** |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 60 | | 62,23 | | 103,72 | | 2 | Memuaskan | 61,00 | | 71,27 | | 116,84 | % | 2 | Sangat Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)** | **103,72** | | | | | | | **Memuaskan** | | | | | 116,84 | | | **Sangat Baik** |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | 2018 | | | | | | | | 2019 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | | REALISASI | | PENCAPAIAN | | BOBOT | KRITERIA | TARGET | | REALISASI | | PENCAPAIAN | | BOBOT | KRITERIA |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 100,00 | % | 97,23 | % | 97,23 | % | 2 | Cukup | 100,00 | % | 98,79 | % | 98,79 | % | 2 | Baik |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 25,00 | % | 34,62 | % | 138,48 | % | 2 | Tidak dapat disimpulkan | 42,00 | % | 33,90 | % | 80,71 | % | 2 | Cukup |
| | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 75,00 | % | 91,82 | % | 122,43 | % | 2 | Memuaskan | 78,00 | % | 81,79 | % | 104,86 | % | 2 | Baik |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 85,00 | % | 80,00 | % | 94,12 | % | 2 | Cukup | 90,00 | % | 100,00 | % | 111,11 | % | 2 | Sangat Baik |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 40,00 | % | 3,62 | % | 9,05 | % | 2 | Kurang | 53,75 | % | 60,79 | % | 113,10 | % | 2 | Sangat Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)** | | | | | **92,26** | | | **Cukup** | | | | | 101,71 | | | **Baik** |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | 50,00 | % | 50 | % | 100,00 | % | 2 | Baik | 50,00 | % | 55,56 | % | 111,11 | % | 2 | Sangat Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)** | | | | | | | | **Baik** | | | | | 111,11 | | | **Sangat Baik** |
| 6 | Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | Nilai AKIP Balai POM di Palu | 78 | | 73,11 | | 93,73 | | 2 | Cukup | 81,00 | | 75,77 | | 93,54 | % | 2 | Baik |
| | | **NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)** | | | | | | | | **Cukup** | | | | | 93,54 | | | **Baik** |

Palu, 2 Januari 2020
Kepala Balai POM di Palu,

Fauzi Fachmansyah, S.Si., Apt.
NIP 19800114 200501 1 001

Lampiran 7

## PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
## BALAI POM DI PALU
## TAHUN 2019

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN THD TARGET |
|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | 1 | Indeks POM | Rp 2.544.694.000 | Rp 2.480.803.296 | 97,49 |
| | 2 | Persentase Obat yang memenuhi syarat | | | |
| | 3 | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | | | |
| | 4 | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | | | |
| | 5 | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | | | |
| | 6 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | | | |
| Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 7 | Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | Rp 104.506.000 | Rp 94.690.500 | 90,61 |
| | 8 | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | |
| Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | 9 | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | Rp 2.748.324.000 | Rp 2.706.885.206 | 98,49 |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | 10 | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | Rp 1.033.889.000 | Rp 993.507.740 | 96,09 |
| | 11 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | |
| | 12 | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | |
| | 13 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | | | |
| | 14 | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | |
| Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja | 15 | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | Rp 489.849.000 | Rp 444.962.585 | 90,84 |
| Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | 16 | Nilai AKIP Balai POM di Palu | Rp 24.869.329.000 | Rp 24.483.831.091 | 98,45 |
| | | TOTAL | Rp 31.790.591.000 | Rp 31.204.680.418 | 98,16 |

Palu, 25 Januari 2020
Kepala Balai POM di Palu,

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Fadri Ferdiansyah, S.Si., Apt.
NIP 198001142005011001

Lampiran 8

## PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PER INDIKATOR KINERJA
## BALAI POM DI PALU
## TAHUN 2019

| PERSPEKTIF | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN TARGET |
|---|---|---|---|---|---|
| *Stakeholder* | 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Input: dana | Rp 2.544.694.000 | Rp 2.480.803.296 | 97,49 |
| | | Output : Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | 102,74 |
| | | Output : Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | |
| | | Output : Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | |
| | | Output : Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | |
| | | Output : Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | |
| | | Output : Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | |
| *Customer* | 2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Input: dana | Rp 104.506.000 | Rp 94.690.500 | 90,61 |
| | | Output : Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | 111,13 |
| | | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | |
| *Internal Process* | 3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Input: dana | Rp 2.748.324.000 | Rp 2.706.885.206 | 98,49 |
| | | Output : Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | 116,84 |
| | 4 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Input: dana | Rp 1.033.889.000 | Rp 993.507.740 | 96,09 |
| | | Output : Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | | | 98,79 |
| | | Output : Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | |
| | | Output : Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | |
| | | Output : Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | |
| | | Output : Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | |
| | 5 Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Input: dana | Rp 489.849.000 | Rp 444.962.585 | 90,84 |
| | | Output : Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Palu | | | 111,11 |
| *Learning and Growth* | 6 Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | Input: dana | Rp 24.869.329.000 | Rp 24.483.831.091 | 98,45 |
| | | Output : Nilai AKIP Balai POM di Palu | | | 93,54 |
| | TOTAL | | Rp 31.790.591.000 | Rp 31.204.680.418 | 98,16 |

Palu, 15 Januari 2020
Kepala Balai POM di Palu,

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Fauzi Perdiansyah, S.Si., Apt.
NIP. 19800114 200501 1 001

Lampiran 9

## PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
## BALAI POM DI PALU
## TAHUN 2019

| | SASARAN KEGIATAN | RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR | | IE | SE | KATEGORI | TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INPUT | OUTPUT | | | | |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | 97,49 | 102,74 | 1,05 | 1,00 | efisien | 0,0538 |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 90,61 | 111,13 | 1,23 | 1,00 | efisien | 0,2265 |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | 98,49 | 116,84 | 1,19 | 1,00 | efisien | 0,1862 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | 96,09 | 98,79 | 1,03 | 1,00 | efisien | 0,0281 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 90,84 | 111,11 | 1,22 | 1,00 | efisien | 0,2232 |
| 6 | Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | 98,45 | 93,54 | 0,95 | 1,00 | tidak efisien | -0,0498 |

Palu, 25 Januari 2020
Kepala Balai POM di Palu,

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN POM DI PALU

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.
NIP 19800114 200501 1 001

## PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
## BALAI POM DI PALU TERHADAP BALAI POM YANG SETARA / SEJENIS
## TAHUN 2019

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | BALAI POM DI PALU | | | | BALAI POM DI AMBON | | | | BALAI POM DI BENGKULU | | | | BALAI POM DI GORONTALO | | | | BALAI POM DI PANGKAL PINANG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % TARGET | % REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | % TARGET | % REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | % TARGET | % REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | % TARGET | % REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | % TARGET | % REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM | Indeks POM | 71,00 | 72,69 | 102,38 | Baik | 61,00 | 76,64 | 125,64 | Tidak dapat disimpulkan | 71,00 | 72,55 | 102,18 | Baik | 71,00 | 63,45 | 89,37 | Cukup | 71,00 | 58,49 | 82,38 | Cukup |
| | | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 94,00 | 85,27 | 90,71 | Baik | 94,00 | 95,00 | 101,06 | Baik | 94,00 | 91,24 | 97,06 | Baik | 94,00 | 76,37 | 81,24 | Cukup | 94,00 | 91,59 | 97,43 | Baik |
| | | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | 80,00 | 88,69 | 110,86 | Sangat Baik | 85,00 | 92,94 | 109,35 | Baik | 60,00 | 95,29 | 158,82 | Tidak dapat disimpulkan | 80,00 | 78,36 | 97,95 | Baik | 60,00 | 39,86 | 66,43 | Kurang |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 87,00 | 97,35 | 111,90 | Sangat Baik | 89,00 | 92,59 | 104,04 | Baik | 87,00 | 100,00 | 114,94 | Sangat Baik | 87,00 | 97,73 | 112,33 | Sangat Baik | 87,00 | 45,65 | 52,47 | Kurang |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 80,00 | 78,24 | 97,80 | Baik | 90,00 | 94,93 | 105,48 | Baik | 80,00 | 90,92 | 113,65 | Sangat Baik | 80,00 | 83,96 | 104,94 | Baik | 80,00 | 87,36 | 109,21 | Baik |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 71,00 | 72,96 | 102,76 | Baik | 75,00 | 80,15 | 106,86 | Baik | 71,00 | 76,17 | 107,28 | Baik | 71,00 | 71,80 | 101,13 | Baik | 71,00 | 58,90 | 82,96 | Cukup |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM | Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 61,00 | 73,01 | 119,69 | Sangat Baik | 61,00 | 73,61 | 120,67 | Tidak dapat disimpulkan | 61,00 | 78,43 | 128,57 | Tidak dapat disimpulkan | 61,00 | 72,53 | 118,90 | Sangat Baik | 61,00 | 43,46 | 71,25 | Cukup |
| | | Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | 66,00 | 67,70 | 102,58 | Baik | 66,00 | 67,06 | 101,61 | Baik | 66,00 | 67,95 | 102,95 | Baik | 66,00 | 66,59 | 100,89 | Baik | 66,00 | 72,70 | 110,15 | Sangat Baik |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 61,00 | 71,27 | 116,84 | Sangat Baik | 61,00 | 69,34 | 113,67 | Sangat Baik | 61,00 | 72,03 | 118,08 | Sangat Baik | 61,00 | 70,83 | 116,11 | Sangat Baik | 61,00 | 77,98 | 127,84 | Tidak dapat disimpulkan |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | BALAI POM DI PALU | | | | BALAI POM DI AMBON | | | | BALAI POM DI BENGKULU | | | | BALAI POM DI GORONTALO | | | | BALAI POM DI PANGKAL PINANG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % TARGET | % REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | % TARGET | % REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | % TARGET | % REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | % TARGET | % REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | % TARGET | % REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 100,00 | 98,79 | 98,79 | Baik | 100,00 | 97,79 | 97,79 | Baik | 100,00 | 99,95 | 99,95 | Baik | 100,00 | 98,44 | 98,44 | Baik | 95,00 | 100,59 | 105,89 | Baik |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM | 42,00 | 33,90 | 80,71 | Cukup | 42,00 | 49,64 | 118,18 | Sangat Baik | 40,00 | 12,98 | 32,44 | Sangat Kurang | 42,00 | 65,85 | 156,79 | Tidak dapat disimpulkan | 41,80 | 12,73 | 30,45 | Sangat Kurang |
| | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM | 78,00 | 81,79 | 104,86 | Baik | 50,00 | 58,22 | 116,45 | Sangat Baik | 50,00 | 29,05 | 58,11 | Kurang | 56,67 | 66,32 | 117,03 | Sangat Baik | 49,80 | 25,47 | 51,14 | Kurang |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 90,00 | 100,00 | 111,11 | Sangat Baik | 85,00 | 100,00 | 117,65 | Sangat Baik | 81,00 | 55,32 | 68,30 | Kurang | 100,00 | 157,14 | 157,14 | Tidak dapat disimpulkan | 90,00 | 68,75 | 76,39 | Cukup |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM | 53,75 | 60,79 | 113,10 | Sangat Baik | 60,00 | 63,83 | 106,39 | Baik | 45,00 | 20,09 | 44,65 | Sangat Kurang | 63,33 | 83,29 | 131,52 | Tidak dapat disimpulkan | 46,95 | 40,05 | 85,30 | Cukup |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | 50,00 | 55,56 | 111,11 | Sangat Baik | 50,00 | 63,64 | 127,27 | Tidak dapat disimpulkan | 50,00 | 60,00 | 120,00 | Sangat Baik | 50,00 | 64,29 | 128,57 | Tidak dapat disimpulkan | 50,00 | 60,00 | 120,00 | Sangat Baik |
| 6 | Terwujudnya RB Balai POM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | Nilai AKIP Balai POM | 81,00 | 75,77 | 93,54 | Baik | 81,00 | 74,07 | 91,44 | Baik | 81,00 | 72,24 | 89,19 | Cukup | 81,00 | 74,18 | 91,58 | Baik | 81,00 | 72,22 | 89,16 | Cukup |

## PERBANDINGAN PENGUKURAN KINERJA (NILAI PENCAPAIAN SASARAN)
## BALAI POM DI PALU TERHADAP BALAI POM YANG SETARA / SEJENIS
## TAHUN 2019

| NO | SASARAN KEGIATAN | NILAI PENCAPAIAN SASARAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BALAI POM DI PALU | BALAI POM DI AMBON | BALAI POM DI BENGKULU | BALAI POM DI GORONTALO | BALAI POM DI PANGKAL PINANG |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM | 102,74 | 108,74 | 115,66 | 97,83 | 81,81 |
| | | Baik | Baik | Sangat Baik | Baik | Cukup |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM | 111,13 | 111,14 | 115,76 | 109,90 | 90,70 |
| | | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Baik | Baik |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM | 116,84 | 113,67 | 118,08 | 116,11 | 127,84 |
| | | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Tidak dapat disimpulkan |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM | 101,71 | 111,29 | 60,69 | 132,19 | 69,83 |
| | | Baik | Sangat Baik | Kurang | Tidak dapat disimpulkan | Kurang |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM | 111,11 | 127,27 | 120,00 | 128,57 | 120,00 |
| | | Sangat Baik | Tidak dapat disimpulkan | Sangat Baik | Tidak dapat disimpulkan | Sangat Baik |
| 6 | Terwujudnya RB Balai POM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015 - 2019 | 93,54 | 91,44 | 89,19 | 91,58 | 89,16 |
| | | Baik | Baik | Cukup | Baik | Cukup |

## PERBANDINGAN NILAI AKIP
## BALAI POM DI PALU TERHADAP BALAI POM YANG SETARA / SEJENIS
## TAHUN 2019

| NO | NAMA UNIT KERJA | KOMPONEN EVALUASI | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PERENCANAAN KINERJA (30%) | | PENGUKURAN KINERJA (25%) | | PELAPORAN KINERJA (15%) | | EVALUASI INTERNAL (10%) | | PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA (20%) | | TOTAL NILAI | |
| | | % | ANGKA | % | ANGKA | % | ANGKA | % | ANGKA | % | ANGKA | % | ANGKA |
| 1 | Balai POM di Palu | 83,00 | 24,90 | 66,24 | 16,56 | 88,93 | 13,34 | 70,80 | 7,08 | 69,50 | 13,90 | 75,77 | 75,77 |
| 2 | Balai POM di Ambon | 88,70 | 26,61 | 63,76 | 15,94 | 76,73 | 11,51 | 70,40 | 7,04 | 64,90 | 12,98 | 74,07 | 74,07 |
| 3 | Balai POM di Bengkulu | 84,00 | 25,20 | 73,76 | 18,44 | 74,93 | 11,24 | 57,00 | 5,7 | 58,25 | 11,65 | 72,24 | 72,24 |
| 4 | Balai POM di Gorontalo | 84,67 | 25,40 | 70,00 | 17,50 | 89,20 | 13,38 | 64,80 | 6,48 | 57,15 | 11,43 | 74,18 | 74,18 |
| 4 | Balai POM di Pangkal Pinang | 85,10 | 25,53 | 68,76 | 17,19 | 73,13 | 10,97 | 57,90 | 5,79 | 63,75 | 12,75 | 72,22 | 72,22 |

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU**
**NOMOR PR.01.02.113.03.19.0410 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR : HK 04.103.10.17.1297 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU,**

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) 2015-2019, adanya perubahan Renstra K/L 2015-2019 dapat dilakukan sepanjang adanya perubahan struktur organisasi;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi dan tata kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu terjadi perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Revisi Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2015-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Palu mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 dan pedoman penyusunan dan *review* rencana strategis tahun 2015-2019 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

(1) Renstra Balai POM di Palu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk mencapai sasaran kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.

(2) Renstra Balai POM di Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.

Pasal 3

(1) Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Balai POM di Palu.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

(3) Evaluasi pelaksanaan Renstra Balai POM di Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir periode Rencana Strategis.

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088
Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

Pasal 4

Renstra Balai POM di Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor HK 04.103.10.17.1297 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 20 Maret 2019

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU,

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
BADAN POM

FAUZI FERDIANSYAH

## Lampiran 1a. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Palu 2015-2017

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator | Lokasi | Target | | | Alokasi (dalam Miliar rupiah) | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L-N-B-NS-BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| **Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu** | | | | | | | | | | |
| | **SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan** | | | | | 2,006 | 1,914 | 2,711 | | |
| | 1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 92,00 | 92,50 | 93,00 | | | | | Badan POM |
| | 1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 80,00 | 81,00 | 82,00 | | | | | Badan POM |
| | 1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 89,00 | 90,00 | 91,00 | | | | | Badan POM |
| | 1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 79,00 | 80,00 | 81,00 | | | | | Badan POM |
| | 1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 88,10 | 88,60 | 89,10 | | | | | Badan POM |
| | **SS 2 Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat** | | | | | 1,130 | 1,734 | 2,555 | | |
| | 2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat | Provinsi Sulawesi Tengah | 77,00 | 80,00 | 82,00 | | | | | Badan POM |
| | 2,2 Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan | Provinsi Sulawesi Tengah | 9 | 10 | 11 | | | | | Badan POM |
| | **SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM** | | | | | 12,500 | 14,886 | 16,270 | | |
| | 3,1 Nilai SAKIP BBPOM/ BPOM dari Badan POM | Provinsi Sulawesi Tengah | A | A | A | | | | | Badan POM |
| **Program Pengawasan Obat dan Makanan** | | | | | | | | | | |
| | **SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan** | | | | | 2,006 | 1,914 | 2,711 | | |
| | 1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 92,00 | 92,50 | 93,00 | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 80,00 | 81,00 | 82,00 | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 89,00 | 90,00 | 91,00 | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |

## Lampiran 1a. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Palu 2015-2017 (Lanjutan)

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator | Lokasi | Target | | | Alokasi (dalam Miliar rupiah) | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L-N-B-NS-BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | 1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 79,00 | 80,00 | 81,00 | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 88,10 | 88,60 | 89,10 | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | **SP 2 Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat** | | | | | 1,130 | 1,734 | 2,555 | | |
| | 2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat | Provinsi Sulawesi Tengah | 77,00 | 80,00 | 82,00 | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 2,2 Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan | Provinsi Sulawesi Tengah | 9 | 10 | 11 | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | **SP 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM** | | | | | 12,500 | 14,886 | 16,270 | | |
| | 3,1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM | Provinsi Sulawesi Tengah | A | A | A | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| **Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Palu** | | | | | | | | | | |
| | **SK 1 Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar** | | | | | | | | | |
| | 1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis | Provinsi Sulawesi Tengah | 2.500 | 2.200 | 2.200 | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) | Provinsi Sulawesi Tengah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | **SK 2 Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi syarat** | | | | | | | | | |
| | 3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan | Provinsi Sulawesi Tengah | 5,38 | 5,38 | 5,49 | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | **SK 3 Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi syarat** | | | | | | | | | |
| | 4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan | Provinsi Sulawesi Tengah | 26,20 | 26,57 | 26,95 | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | **SK 4 Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan** | | | | | | | | | |
| | 5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan | Provinsi Sulawesi Tengah | 3 | 3 | 3 | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |

Lampiran 1a. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Palu 2015-2017 (Lanjutan)

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator | Lokasi | Target | | | Alokasi (dalam Miliar rupiah) | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L-N-B-NS-BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | **SK 5 Meningkatnya kerja sama, komunikasi, infirmasi dan edukasi** | | | | | | | | | |
| | 6 Jumlah layanan publik BB/ BPOM | Provinsi Sulawesi Tengah | 419 | 457 | 495 | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan | Provinsi Sulawesi Tengah | 15 | 19 | 23 | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | **SK 6 Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan** | | | | | | | | | |
| | 8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar | Provinsi Sulawesi Tengah | 73 | 73 | 75 | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | **SK 7 Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu** | | | | | | | | | |
| | 9 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu | Provinsi Sulawesi Tengah | 10 | 9 | 10 | | | | Balai POM di Palu | Badan POM |

## Lampiran 1b. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Palu Tahun 2018-2019

| Program/ Kegiatan | | Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja | Lokasi | Target | | Alokasi (dalam Miliar rupiah) | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L-N-B- NS-BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | | |
| **Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu** | | | | | | | | | |
| Program Pengawasan Obat dan Makanan | **SK 1** | **Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu** | | | | 1,609 | 1,770 | | |
| | 1 | Indeks POM | Provinsi Sulawesi Tengah | 70 | 71 | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 2 | Persentase Obat yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 93,50 | 94,00 | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 3 | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 83,00 | 80,00 | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 4 | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 82,00 | 87,00 | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 5 | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 92,00 | 80,00 | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 6 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | Provinsi Sulawesi Tengah | 89,60 | 71,00 | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | **SK 2** | **Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu** | | | | 1,855 | 2,040 | | |
| | 1 | Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | Provinsi Sulawesi Tengah | 60 | 61 | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 2 | Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman | Provinsi Sulawesi Tengah | - | 66 | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | **SK 3** | **Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu** | | | | 1,322 | 1,455 | | |
| | 1 | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | Provinsi Sulawesi Tengah | 60 | 61 | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | **SK 4** | **Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu** | | | | 0,926 | 1,019 | | |
| | 1 | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | Provinsi Sulawesi Tengah | 100,00 | 100,00 | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 2 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Provinsi Sulawesi Tengah | 25,00 | 40,00 | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 3 | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Provinsi Sulawesi Tengah | 75,00 | 78,00 | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 4 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | Provinsi Sulawesi Tengah | 85,00 | 90,00 | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 5 | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Provinsi Sulawesi Tengah | 40,00 | 53,75 | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | **SK 5** | **Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu** | | | | 0,348 | 0,383 | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | 1 | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | Provinsi Sulawesi Tengah | 50,00 | 50,00 | | | Balai POM di Palu | Badan POM |
| | **SK 6** | **Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019** | | | | 22,615 | 24,876 | | |
| | 1 | Nilai AKIP BB/ BPOM | Provinsi Sulawesi Tengah | 78,00 | 81,00 | | | Balai POM di Palu | Badan POM |

## Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Balai POM di Palu 2015 -2019

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | | Unit Terkait/Institusi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No 530/46/DISPERINDAG-GST/2015 tentang Pengawasan Pendistribusian Barang Beredar, Bahan Berbahaya, Bahan Beracun dan Barang Beredar Lainnya Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015 | Terciptanya sinergisme antara Balai POM di Palu dengan SKPD terkait dalam mengawasi pendistribusian barang yang beredar di Provinsi Sulawesi Tengah | 1.<br>2.<br>3. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br>Biro Administrasi Perekonomian SETDA Provinsi Sulteng<br>Bidang Perdagangan Dalam Negeri | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah<br>Dinas ESDM Provinsi Sulteng<br>Balai Karantina Pertanian<br>YLKI<br>Balai POM di Palu |
| 2. | Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No 521/148/BKPD-GST/2015 tentang Tim Koordinasi Jejaring Kemanan Pangan terpadu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 | Mengoptimalkan kerjasama antara Balai POM di Palu dengan SKPD terkait dalam mengawasi keamanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6. | Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah<br>BAPPEDA Provinsi Sulteng<br>Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng<br>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng<br>Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulteng<br>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1. | Balai POM di Palu |
| 3 | Keputusan Walikota Palu Nomor 533/217/BP2KP/2015 tentang Pengawasan, Pemantauan Kimia Berbahaya pada Produk Pangan Segar dan Olahan Kota Palu Tahun 2015 | Mengoptimalkan kerjasama antara Balai POM di Palu dengan SKPD terkait dalam mengawasi dan memantau produk pangan segar dan olahan di Provinsi Sulawesi Tengah | 1. | Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan | 1<br>2<br>3 | Balai POM di Palu<br>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota<br>Dinas Pertanian |

## Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Balai POM di Palu 2015 -2019 (Lanjutan)

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | | Unit Terkait/Institusi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 440/275/DIS.KES-G.ST/2018 tentang Satuan Tugas Pengawasan Obat, Makanan, dan Perbekalan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022 | Mengoptimalkan peran serta pemerintah daerah dalam peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 | 1 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 1 | Balai POM di Palu |
| | | | | | 2 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah |
| | | | | | 3 | Polda Sulawesi Tengah |
| | | | | | 4 | Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah |
| | | | | | 5 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kota Palu |
| | | | | | 6 | Polda Sulawesi Tengah |
| 5 | Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Poso dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: HM.03.01.104.02.15.0247 dan Nomor 180/1096/2015 Tentang Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi Produk Pangan Industri Rumah Tangga Pangan dan Sarana Distribusi serta Sarana Pelayanan Sediaan Farmasi | Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Poso terkait pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Poso | 1 | Balai POM di Palu | 1 | Pemerintah Daerah Kabupaten Poso |
| 6 | Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: HM.03.01.104.02.15.0248 dan Nomor 400/12.77/DINKES Tentang Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi Produk Pangan IRTP dan Sarana Distribusi serta Sarana Pelayanan Sediaan Farmasi. | Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso terkait pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Poso | 1 | Balai POM di Palu | 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Poso |

## Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Balai POM di Palu 2015 -2019 (Lanjutan)

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | | Unit Terkait/Institusi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso dan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Poso tentang Pengawasan dan Pembinaan Pangan Jajanan Anak Sekolah Nomor HM.03.04.1045.03.14.0249; Nomor 400/12.29/Dinkes dan 703/326.1/Dikbud/2015. | Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso terkait pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Poso | 1 | Balai POM di Palu | 1<br>2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Poso<br>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso |
| 8 | Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Banggai dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: HM.03.01.104.10.16.1255a dan Nomor 1923/Bag.Hum/2016 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu | Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banggai terkait pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Banggai | 1 | Balai POM di Palu | 1 | Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai |
| 9 | Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Tolitoli dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: HM.03.01.1035.11.16.1368 dan Nomor 181.1/045/Bag.Kumdang/2016 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu | Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tolitoli terkait pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Tolitoli | 1 | Balai POM di Palu | 1 | Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli |

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU**
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**NOMOR PR.01.02.113.03.19.0415 TAHUN 2019**

**TENTANG**
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU NOMOR HK.04.104.04.15.469 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU**

**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU**
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

---

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : HK.04103.10.17.1297 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2015-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : PR.01.02.113.03.19.0410 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : HK.04103.10.17.1297 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2015-2019, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu;

b. bahwa dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.04.1.21.02.16.1539 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.04.01.1.22.01.19.0458 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.04.1.21.02.16.1539 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor HK.04.104.04.15.469 Tahun 2015 tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);

6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.1.22.01.19.0458 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.21.02.16.1539 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU NOMOR HK.04.104.04.15.469 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU.

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor HK.04.104.04.15.469 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Maret 2019

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU,

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN POM DI PALU

FAUZI FERDIANSYAH

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

Lampiran
Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : PR.01.02.113.03.19.0415 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu

1. Nama Organisasi : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu

2. Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

3. Fungsi :

   a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
   c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
   d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
   e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
   f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
   g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
   l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

4. Indikator Kinerja Utama :

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA |
|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks POM |
| | | Persentase Obat yang memenuhi syarat |
| | | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan |
| | | Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu |
| | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II |
| 6 | Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019 | Nilai AKIP Balai POM di Palu |

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU,

FAUZI FERDIANSYAH

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU**
**NOMOR : HK.04.03.113.09.18.1521**

**TENTANG**
**RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU**
**TAHUN 2019**

**KEPALA BALAI POM DI PALU**

---

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor HK.04.03.113.09.18.1454 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2019.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

**MEMUTUSKAN**

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2019 |
| Pertama | : | Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2019; |
| Kedua | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2018

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU,




SAFRIANSYAH

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : HK.04.03.113.09.18.1521
Tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2019

## RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2019

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Tengah | Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 71 |
| | | Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah | 94,00 |
| | | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah | 80,00 |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah | 80,00 |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah | 87,00 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah | 71,00 |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 61 |
| | | Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | 66 |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | 61 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Tengah | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Tengah | 100,00 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 42,00 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 78,00 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Tengah | 90,00 |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 53,75 |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Palu | 50,00 |
| 6 | Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Palu | Nilai AKIP Balai POM di Palu | 81,00 |

BADAN POM

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Rr Maya Gustina Andarini Apt, M.Sc
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik selaku Pejabat Pembina Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan POM
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2019

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Pihak Pertama,

Dra. Rr Maya Gustina Andarini Apt, M.Sc

BADAN POM

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Tengah | Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 71 |
| | | Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah | 94,00 |
| | | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah | 80,00 |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah | 80,00 |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah | 87,00 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah | 71,00 |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 61 |
| | | Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | 66 |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | 61 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Tengah | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Tengah | 100,00 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 42,00 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 78,00 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Tengah | 90,00 |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 53,75 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Palu | 50,00 |

BADAN POM

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 6 | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Palu sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 | Nilai AKIP Balai POM di Palu | 81,00 |

**Kegiatan**

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp28.845.331.000

Jakarta, 02 Januari 2019

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Pihak Pertama,

Dra. Rr Maya Gustina Andarini Apt, M.Sc

## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
## BALAI POM DI PALU TAHUN 2019

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | REALISASI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B3 | B6 | B9 | B12 | B3 | B6 | B9 | B12 |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Tengah | Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | - | - | - | 71 | | | | |
| | | Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | | | | |
| | | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | | |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | | |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | | | | |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tengah | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | | | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | REALISASI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B3 | B6 | B9 | B12 | B3 | B6 | B9 | B12 |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | - | - | - | 61 | | | | |
| | | Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | - | - | - | 66 | | | | |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | - | - | - | 61 | | | | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Tengah | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Tengah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 27,78 | 33,33 | 38,89 | 42,00 | | | | |
| | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 25,00 | 40,00 | 65,00 | 78,00 | | | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | REALISASI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B3 | B6 | B9 | B12 | B3 | B6 | B9 | B12 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Tengah | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 90,00 | | | | |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 10,00 | 25,00 | 40,00 | 53,75 | | | | |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Palu | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | | | | |
| 6 | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Palu sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 | Nilai AKIP Balai POM di Palu | - | - | - | 81,00 | | | | |

Jakarta, 02 Januari 2019

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Pihak Kedua,

Dra. Rr Maya Gustina Andarini Apt,M.Sc

BADAN POM RI

# Perjanjian Kinerja

# 2019

## Balai POM di Palu

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.
Jabatan : Kepala Balai POM di Palu
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan POM
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 Maret 2019

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Pihak Pertama,

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
BADAN POM

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks POM | 71 |
| | | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 94,00 |
| | | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | 80,00 |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 80,00 |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 87,00 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 71,00 |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 61 |
| | | Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman | 66 |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 61 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 100,00 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 42,00 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 78,00 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 90,00 |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 53,75 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | 50,00 |

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 6 | Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019 | Nilai AKIP Balai POM di Palu | 81,00 |

**Kegiatan**

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp28.845.331.000

Jakarta, 08 Maret 2019

Kepala Badan POM,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Kepala Balai POM di Palu,

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.

# RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
# BALAI POM DI PALU TAHUN 2019

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | REALISASI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B3 | B6 | B9 | B12 | B3 | B6 | B9 | B12 |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks POM | - | - | - | 71 | | | | |
| | | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | | | | |
| | | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | | |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | | |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | | | | |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | | | | |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | - | - | - | 61 | | | | |
| | | Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman | - | - | - | 66 | | | | |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | - | - | - | 61 | | | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | REALISASI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B3 | B6 | B9 | B12 | B3 | B6 | B9 | B12 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 27,78 | 33,33 | 38,89 | 42,00 | | | | |
| | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 25,00 | 40,00 | 65,00 | 78,00 | | | | |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 90,00 | | | | |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | 10,00 | 25,00 | 40,00 | 53,75 | | | | |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | | | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | REALISASI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B3 | B6 | B9 | B12 | B3 | B6 | B9 | B12 |
| 6 | Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019 | Nilai AKIP Balai POM di Palu | - | - | - | 81,00 | | | | |

Kepala Badan POM,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Jakarta, 08 Maret 2019

Kepala Balai POM di Palu,

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN POM DI PALU

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
## SEKSI PEMERIKSAAN BALAI POM DI PALU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Nuraeni, Apt.M.M
Jabatan : Kepala Seksi Pemeriksaan Balai POM di Palu
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fauzi Ferdiansyah S.Si., Apt
Jabatan : Kepala Balai POM di Palu
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 08 Maret 2019

Pihak Kedua,
Kepala Balai POM di Palu,

Fauzi Ferdiansyah,S.Si, Apt

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pemeriksaan,

Dra. Nuraeni, Apt.M.M.

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
## SEKSI PEMERIKSAAN BALAI POM DI PALU

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase pemenuhan target sampel obat sesuai dengan perencanaan | 100 |
| | | Persentase pemenuhan target sampel obat tradisional sesuai dengan perencanaan | 100 |
| | | Persentase pemenuhan target sampel suplemen kesehatan sesuai dengan perencanaan | 100 |
| | | Persentasi pemenuhan target sampel kosmetik sesuai dengan perencanaan | 100 |
| | | Persentase pemenuhan target sampel makanan sesuai dengan perencanaan | 100 |
| | | Persentase pelaporan hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dilaporkan melalui SIPT tepat waktu | 100 |
| | | Persentase pelaporan hasil sampling obat dan makanan melalui SIPT ke Tim Penerima Sampel (TPS) yang tepat waktu | 100 |
| | | Persentase pemenuhan target pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan sesuai dengan perencanaan | 100 |
| | | Persentase pemenuhan target pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) sesuai dengan perencanaan | 100 |
| | | Persentase pemenuhan target pemeriksaan sarana distribusi obat tradisonal, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan sesuai dengan perencanaan | 100 |
| | | Persentase Bimtek yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan | 100 |
| | | Persentase pemenuhan target pengawasan label obat dan makanan | 100 |
| | | Persentase pemenuhan target pengawasan iklan obat dan makanan | 100 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 90.00 |
| | | Persentase rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha | 53.75 |
| | | Persentase rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait | 53.75 |

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2019 |
|---|---|---|---|
| 2 | Terwujudnya RB Seksi Pemeriksaan BPOM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019 | Persentase pegawai yang mengimplementasikan manajemen kinerja di Seksi Pemeriksaan | 100 |

Palu, 08 Maret 2019

Pihak Kedua,
Kepala Balai POM di Palu,

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pemeriksaan,

Dra. Nuraeni, Apt.M.M

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
## SEKSI PEMERIKSAAN BALAI POM DI PALU

| NO | SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | REALISASI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B3 | B6 | B9 | B12 | B3 | B6 | B9 | B12 |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase pemenuhan target sampel obat sesuai dengan perencanaan | 25 | 50 | 75 | 100 | | | | |
| | | Persentase pemenuhan target sampel obat tradisional sesuai dengan perencanaan | 30 | 60 | 85 | 100 | | | | |
| | | Persentase pemenuhan target sampel suplemen kesehatan sesuai dengan perencanaan | 30 | 60 | 85 | 100 | | | | |
| | | Persentasi pemenuhan target sampel kosmetik sesuai dengan perencanaan | 30 | 60 | 85 | 100 | | | | |
| | | Persentase pemenuhan target sampel makanan sesuai dengan perencanaan | 25 | 50 | 75 | 100 | | | | |
| | | Persentase pelaporan hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dilaporkan melalui SIPT tepat waktu | 20 | 50 | 75 | 100 | | | | |
| | | Persentase pelaporan hasil sampling obat dan makanan melalui SIPT ke Tim Penerima Sampel (TPS) yang tepat waktu | 25 | 50 | 75 | 100 | | | | |
| | | Persentase pemenuhan target pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan sesuai dengan perencanaan | 25 | 50 | 75 | 100 | | | | |
| | | Persentase pemenuhan target pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) sesuai dengan perencanaan | 25 | 50 | 75 | 100 | | | | |

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase pemenuhan target pemeriksaan sarana distribusi obat tradisonal, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan sesuai dengan perencanaan | 25 | 50 | 75 | 100 | | | | |
| | | Persentase Bimtek yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan | 0 | 0 | 100 | 100 | | | | |
| | | Persentase pemenuhan target pengawasan label obat dan makanan | 25 | 50 | 75 | 100 | | | | |
| | | Persentase pemenuhan target pengawasan iklan obat dan makanan | 25 | 50 | 75 | 100 | | | | |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 25 | 50 | 75 | 90.00 | | | | |
| | | Persentase rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha | 10 | 25 | 40 | 53.75 | | | | |
| | | Persentase rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait | 10 | 25 | 40 | 53.75 | | | | |
| 2 | Terwujudnya RB Seksi Pemeriksaan BPOM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019 | Persentase pegawai yang mengimplementasikan manajemen kinerja di Seksi Pemeriksaan | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |

Palu, 08 Maret 2019

Pihak Kedua,
Kepala Balai POM di Palu,

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pemeriksaan,

Dra. Nuraeni, Apt.M.M

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novi Yanti Rahmi, S.Farm., Apt.
Jabatan : Kepala Seksi Infokom Balai POM di Palu
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt
Jabatan : Kepala Balai POM di Palu
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 08 Maret 2019

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
| --- | --- |
| Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt | Novi Yanti Rahmi, S.Farm., Apt. |

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
## SEKSI INFOKOM BALAI POM DI PALU

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Palu | Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti | 100 |
| | | Persentase KIE yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan | 100 |
| | | Jumlah Komunitas yang diberdayakan | 7 |
| | | Jumlah desa pangan aman | 6 |
| | | Jumlah Kader yang dilatih | 45 |
| | | Jumlah Pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari Bahan Berbahaya | 1 |
| 2 | Terwujudnya RB Seksi Infokom BPOM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | Persentase pegawai yang mengimplementasikan manajemen kinerja di Bidang Infokom | 100 |

Palu, 08 Maret 2019

Pihak Kedua,

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

Pihak Pertama,

Novi Yanti Rahmi, S.Farm., Apt.

BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

## SEKSI INFOKOM BALAI POM DI PALU

| NO | SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | REALISASI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B3 | B6 | B9 | B12 | B3 | B6 | B9 | B12 |
| 1 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Palu | Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti | 25 | 50 | 75 | 100 | | | | |
| | | Persentase KIE yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan | 19 | 38 | 88 | 100 | | | | |
| | | Jumlah Komunitas yang diberdayakan | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| | | Jumlah desa pangan aman | 0 | 0 | 0 | 6 | | | | |
| | | Jumlah Kader yang dilatih | 0 | 45 | 45 | 45 | | | | |
| | | Jumlah Pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari Bahan Berbahaya | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 2 | Terwujudnya RB Seksi Infokom BPOM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | Persentase pegawai yang mengimplementasikan manajemen kinerja di Seksi Infokom | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |

Palu, 08 Maret 2019

Pihak Kedua,

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

Pihak Pertama,

Novi Yanti Rahmi, S.Farm., Apt.

**FORMAT CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA**

**BALAI POM DI PALU (OTK BARU)**

**S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019**

| NO | PERSPEKTIF | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | DEFINISI OPERASIONAL | PEMBILANG | | PENYEBUT | | TARGET s.d TW IV | TARGET 2019 | CAPAIAN s.d TW IV | % CAPAIAN THD TARGET TW IV | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DEFINISI | REALISASI | DEFINISI | REALISASI | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = (7/9*100) | 13 = (12/10*100) | 14 = (12/11*100) |
| 1 | *Stakeholder* | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks POM | a. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha<br>b. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Anailtycal Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. | Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1 | 72,69 | | | - | 71 | 72,69 | - | 102,38 |
| | | | Persentase Obat yang memenuhi syarat | a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT)<br>b. *Sampling* (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan<br>c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:<br>1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu<br>2) Produk kedaluwarsa/produk rusak<br>3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau<br>4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan<br>d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian<br>e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS | Sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan | 66 | Total *sampling* | 448 | 94,00 | 94,00 | 85,27 | 90,71 | 90,71 |
| | | | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat | a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.<br>b. *Sampling* (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.<br>c. Kriteria Obat Tradisioanal Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:<br>1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu<br>2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak<br>3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau<br>4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan<br>d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian<br>e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS | Sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan | 38 | Total *sampling* | 336 | 80,00 | 80,00 | 88,69 | 110,86 | 110,86 |
| | | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | a. *Sampling* (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan<br>b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:<br>1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu<br>2) Produk kedaluwarsa/produk rusak<br>3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau<br>4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan<br>c. Jika termasuk poin b.1) atau b.2), maka tidak dilakukan pengujian.<br>d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS | Sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan | 3 | Total *sampling* | 113 | 87,00 | 87,00 | 97,35 | 111,89 | 111,89 |
| | | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Kosmetik beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.<br>b. Kriteria Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:<br>1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu<br>2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak<br>3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau<br>4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan<br>c. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.<br>d. Jika ditemukan sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS | Sampel kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan | 146 | Total *sampling* | 671 | 80,00 | 80,00 | 78,24 | 97,80 | 97,80 |

| NO | PERSPEKTIF | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | DEFINISI OPERASIONAL | PEMBILANG | | PENYEBUT | | TARGET s.d TW IV | TARGET 2019 | CAPAIAN s.d TW IV | % CAPAIAN THD TARGET TW IV | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DEFINISI | REALISASI | DEFINISI | REALISASI | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = (7/9*100) | 13 = (12/10*100) | 14 = (12/11*100) |
| | | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | a. *Sampling* (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan<br>b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:<br>1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu<br>2) Produk kedaluwarsa<br>3) Produk rusak<br>4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian<br>c. Jika termasuk poin b.1) atau b.2), maka tidak dilakukan pengujian<br>d. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS | Makanan yang MS pada tahun berjalan | 483 | Total *sampling* | 662 | 71,00 | 71,00 | 72,96 | 102,76 | 102,76 |
| 2 | *Customer* | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan<br>b. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan<br>c. Variabel penyusun indeks antara lain:<br>1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)<br>2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)<br>3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekusor yang memenuhi ketentuan<br>d. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. | Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1 | 73,01 | | | - | 61 | 73,01 | - | 119,69 |
| | | | Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:<br>1) Pengetahuan (*knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.<br>2) Sikap (*attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap BPOM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.<br>3) Perilaku (*practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM. | Untuk menghitung indeks kesadaran masyarakat dilakukan metodologi survei pada tahun 2019 | 67,70 | | | - | 66,00 | 67,70 | - | 102,58 |
| 3 | *Internal Process* | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | a. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadadp pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM<br>b. Pengetahuan (*knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.<br>c. Untuk menghitung Indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei. | Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n | 71,27 | | | - | 61,00 | 71,27 | - | 116,84 |
| | | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | a. Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan<br>b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji | Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar | 2202 | Sampel yang harus diuji | 2229 | 100,00 | 100,00 | 98,79 | 98,79 | 98,79 |

| NO | PERSPEKTIF | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | DEFINISI OPERASIONAL | PEMBILANG | | PENYEBUT | | TARGET s.d TW IV | TARGET 2019 | CAPAIAN s.d TW IV | % CAPAIAN THD TARGET TW IV | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DEFINISI | REALISASI | DEFINISI | REALISASI | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = (7/9*100) | 13 = (12/10*100) | 14 = (12/11*100) |
| | | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | a. Sarana Produksi Obat<br>Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit).<br>1) Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan<br>2) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal<br><br>b. Sarana Produksi Obat Tradsional<br>Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT<br>1) Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.<br>2) Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major<br><br>c. Sarana Produksi Kosmetik<br>Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B<br>1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major<br><br>d. Sarana Produksi Suplemen Kesehatan<br>Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan 1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.<br><br>e. Sarana Produksi Pangan<br>Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM<br>1) Tidak Memenuhi Ketentuan untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D<br>2) Tidak Memenuhi Ketentuan untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4 | Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 20 | Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa<br><br>**Catatan:**<br>*Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan* | 59 | 42,00 | 42,00 | 33,90 | 80,71 | 80,71 |
| | | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu | a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin)<br>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat<br>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus<br>d. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.<br>e. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku. | Jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan | 292 | Jumlah sarana distribusi yang diperiksa | 357 | 78,00 | 78,00 | 81,79 | 104,86 | 104,86 |
| | | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:<br>- Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar<br>- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB<br>- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik<br>- Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk Impor OT, Kos, SK<br>- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran poduk OT<br>b. yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. | Keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu | 26 | Jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan | 26 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 111,11 | 111,11 |

| NO | PERSPEKTIF | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | DEFINISI OPERASIONAL | PEMBILANG | | PENYEBUT | | TARGET s.d TW IV | TARGET 2019 | CAPAIAN s.d TW IV | % CAPAIAN THD TARGET TW IV | % CAPAIAN THD TARGET 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DEFINISI | REALISASI | DEFINISI | REALISASI | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = (7/9*100) | 13 = (12/10*100) | 14 = (12/11*100) |
| | | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu | a. Tindak lanjut adalah *feedback* /respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat.<br>b. Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan ( kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.<br>c. Tindak lanjut terdiri dari:<br>1) Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/BPOM<br>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/*feedback* dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai<br>- Penyebut: Jumah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha<br>2) Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/BPOM<br>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/*feedback* dari instansi terkait terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai<br>- Penyebut: Jumah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada instansi terkait<br>Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan Ilegal secara *online* oleh Dit. Pengamanan | Jumlah tindak lanjut/*feedback* dari pelaku usaha dan instansi terkait | 355 | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait | 584 | 53,75 | 53,75 | 60,79 | 113,09 | 113,09 |
| | | Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus<br>b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti | Jumlah perkara tahap II tahun n dan carry over tahun sebelumnya | 5 | Total perkara di tahun n dan carry over tahun sebelumnya | 9 | 50,00 | 50,00 | 55,56 | 111,11 | 111,11 |
| 4 | *Learning and Growth* | Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai *roadmap* RB BPOM 2015 - 2019 | Nilai AKIP Balai POM di Palu | Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM. | Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM yang ditetapkan oleh Inspektorat Utama | 75,77 | | | - | 81 | 75,77 | - | 93,54 |

Palu, 25 Januari 2020
Kepala Balai POM di Palu,

Fauzi Pratisiana, S.Si., Apt.
NIP 19800114 200501 1 001

**Sampling dan Pengujian**
**Balai POM di Palu**
**Tahun Anggaran 2020**

| No | Jenis Produk | Satuan | UPT | Target 1 tahun sesuai pedoman sampling | Metode Sampling | Total | | | | | | | | | | | | | | | RAPK 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah sampling | TMK | | | TMK Label / Penandaan | Jumlah sampel masuk Lab | Jumlah Sampel yang diuji | Hasil uji | | | | | Total TMS yang diperiksa | Belum selesai uji | Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yg selesai diperiksa) | |
| | | | | | | | TIE/ Ilegal/ Palsu | kedaluarsa | rusak | | | | MS (MK penandaan dan MS uji lab) * | TMS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MK Penandaan dan TMS uji lab ** | TMK Penandaan dan MS Uji Lab *** | TMK Penandaan dan TMS uji lab **** | TMS Uji (Khusus Pangan Purposive) | | | | |
| **Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Obat | sampel | Palu | 268 | | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 266 | 226 | 5 | 35 | 0 | 0 | 40 | 1 | 266 | |
| | | | Kabupaten Banggai | 23 | Targeted | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| | | | - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Palu | 146 | | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 145 | 126 | 2 | 17 | 0 | 0 | 19 | 2 | 145 | |
| | | | Kabupaten Banggai | 14 | Random | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | |
| | | | - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | **TOTAL** | **451** | | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 448 | 382 | 8 | 58 | 0 | 0 | 66 | 3 | 448 | 85,27 |
| 2 | Obat Tradisional/ Obat Bahan | sampel | Palu | 188 | | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 169 | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 188 | |
| | | | Kabupaten Banggai | 0 | Targeted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Palu | 125 | | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 124 | 108 | 11 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 125 | |
| | | | Kabupaten Banggai | 23 | Random | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| | | | - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | **TOTAL** | **336** | | 336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 335 | 335 | 298 | 23 | 13 | 1 | 0 | 38 | 0 | 336 | 88,69 |
| 3 | Suplemen Kesehatan | sampel | Palu | 63 | | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 64 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 64 | |
| | | | Kabupaten Banggai | 0 | Targeted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Palu | 42 | | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | |
| | | | Kabupaten Banggai | 7 | Random | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| | | | - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | **TOTAL** | **112** | | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 113 | 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 113 | 97,35 |
| 4 | Kosmetik | sampel | Palu | 313 | | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 223 | 0 | 88 | 1 | 0 | 89 | 0 | 312 | |
| | | | Kabupaten Banggai | 0 | Targeted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Palu | 313 | | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 259 | 2 | 53 | 0 | 0 | 55 | 0 | 314 | |
| | | | Kabupaten Banggai | 45 | Random | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | |
| | | | - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | **TOTAL** | **671** | | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 671 | 525 | 3 | 142 | 1 | 0 | 146 | 0 | 671 | 78,24 |
| | **Total Obat** | | | 291 | | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 289 | 247 | 5 | 37 | 0 | 0 | 42 | 1 | 289 | 85,47 |
| | **Total Obat Tradisional** | | | 188 | Targeted | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 169 | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 188 | 89,89 |
| | **Total Suplemen Kesehatan** | | | 63 | | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 64 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 64 | 96,88 |
| | **Total Kosmetik** | | | 313 | | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 223 | 0 | 88 | 1 | 0 | 89 | 0 | 312 | 71,47 |
| | **Total Obat** | | | 160 | | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 159 | 135 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 2 | 159 | 84,91 |
| | **Total Obat Tradisional** | | | 148 | Random | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | 147 | 129 | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0 | 148 | 87,16 |
| | **Total Suplemen Kesehatan** | | | 49 | | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 97,96 |
| | **Total Kosmetik** | | | 358 | | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 | 302 | 3 | 54 | 0 | 0 | 57 | 0 | 359 | 84,12 |
| | **TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos** | | | 1570 | | 1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1571 | 1567 | 1315 | 34 | 216 | 2 | 0 | 253 | 4 | 1568 | 83,86 |

| No | Jenis Produk | Satuan | UPT | Target 1 tahun sesuai pedoman sampling | Metode Sampling | Total | | | | | | | | | | | | | | | RAPK 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah sampling | TMK | | | TMK Label / Penandaan | Jumlah sampel masuk Lab | Jumlah Sampel yang diuji | Hasil uji | | | | | Total TMS yang diperiksa | Belum selesai uji | Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yg selesai diperiksa) | |
| | | | | | | | TIE/ Ilegal/ Palsu | kedaluarsa | rusak | | | | MS (MK penandaan dan MS uji lab) * | TMS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MK Penandaan dan TMS uji lab ** | TMK Penandaan dan MS Uji Lab *** | TMK Penandaan dan TMS uji lab **** | TMS Uji (Khusus Pangan Purposive) | | | | |
| **Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pangan | sampel | Palu | 137 | Targeted | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 137 | 88 | 13 | 25 | 11 | 0 | 49 | 5 | 137 | |
| | | | Kabupaten Banggai | 0 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | | | - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Palu | 475 | Random | 478 | 8 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 360 | 29 | 64 | 17 | 0 | 118 | 0 | 478 | |
| | | | Kabupaten Banggai | 48 | | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 32 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 44 | |
| | | | - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Total Pangan** | | | 137 | Targeted | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 140 | 91 | 13 | 25 | 11 | 0 | 49 | 5 | 140 | 65,00 |
| | **Total Pangan** | | | 523 | Random | 522 | 8 | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 | 392 | 34 | 71 | 17 | 0 | 130 | 0 | 522 | 75,10 |
| | **TOTAL PANGAN** | | | 660 | | 667 | 8 | 0 | 0 | 0 | 659 | 654 | 483 | 47 | 96 | 28 | 0 | 179 | 5 | 662 | 72,96 |

Catatan :

**1. jumlah sampling = TMK (TIE/ Ilegal/ Palsu/ kedaluarsa/ rusak) + jumlah sampel yang diuji + belum selesai uji**

**2. jumlah masuk lab = (jumlah sampling - TMK (TIE/ Ilegal/ Palsu/ kedaluarsa/ rusak)) + sampel belum selesai uji bulan sebelumnya**

**atau Jumlah masuk lab = jumlah sampel selesai uji + belum selesai uji**

**3. jumlah sampel uji = MS + TMS**

**TMS adalah kesimpulan produk TMS setelah menyandingkan hasil evaluasi penandaan dan hasil pengujian**

4. kesimpulan produk : menyandingkan hasil evaluasi penandaan dan hasil pengujian

| produk | hasil evaluasi penandaan | hasil pengujian | kesimpulan | |
|---|---|---|---|---|
| obat, OT, kosmetik, SK, pangan | MK | MS | MS | * |
| | MK | TMS | TMS | ** |
| | TMK | MS | TMS | *** |
| | TMK | TMS | TMS | **** |

5. produk yang disampling oleh loka dan diuji oleh Balai, maka hasil uji diklaim oleh loka.

6. perhitungan :

a. **output** sampel obat dan makanan yang diperiksa sesuai standar **pada monev DJA** = jumlah TMK (TIE/ Ilegal/ Palsu/ kedaluarsa/ rusak) + jumlah sampel yang diuji

b. indikator Persentase Obat dan makanan yang memenuhi syarat pada **RAPK** = jumlah MS dibagi jumlah sampel yang diperiksa sesuai standar (jumlah TMK TIE/ Ilegal/ Palsu/ kedaluarsa/ rusak + jumlah sampel yang diuji)

untuk sampel belum selesai uji, akan masuk pada bulan berikutnya

**Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan**
**Balai POM di Palu**
**Tahun Anggaran 2020**

| No | Sarana Produksi | UPT | Jumlah Sarana yang ada | Target sarana yang diperiksa 1 tahun * | Januari | | | Februari | | | Maret | | | April | | | Mei | | | Juni | | | Juli | | | Agustus | | | September | | | Oktober | | | November | | | Desember | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK |
| 1 | Industri Farmasi (IF) | Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca) | Palu | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 3 | 3 | 0 |
| | | Kabupaten Banggai | 1 | 1 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Industri Obat Tradisional (IOT) | Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) | Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) | Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Industri Kosmetik | Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Industri Pangan | Palu | 23 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 23 | 7 | 16 |
| | | Kabupaten Banggai | 4 | 4 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 4 | 1 | 3 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 27 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | 8 | 19 |
| 8 | Pangan (IRTP) | Palu | 743 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 10 | 3 | 7 |
| | | Kabupaten Banggai | 73 | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 18 | 6 | 12 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 816 | 25 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 |
| | Total BB/BPOM | | 769 | 36 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 |
| | Total Loka 1 | | 78 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 7 | 16 |
| | Total loka 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | | 847 | 56 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 59 | 20 | 39 |

Keterangan :

1. Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa
2. Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan
3. Jumlah sarana yang diperiksa = MK + TMK
4. TMa. Obat : Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal.
   b. Obat Tradisional : Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major (IOT), Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau sanitasi higiene major (UKOT, UMOT)
   c. Kosmetik (Industri Kosmetik Gol A dan B) : Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major
   d. Suplemen Kesehatan (IOT, UKOT (GMP), Industri Fasber, Industri Pangan: Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major
   e. Pangan (MD, IRTP/UMKM) : TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D, TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4
5. perhitungan :
   a. output sarana produksi obat dan makanan pada monev DJA = jumlah sarana yang diperiksa
   b. indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang MK pada RAPK = MK dibagi jumlah sarana yang diperiksa

**Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan**
**Balai POM di Palu**
**Tahun Anggaran 2020**

| No | Sarana Distribusi | UPT | Jumlah Sarana yang ada | Target sarana yang diperiksa 1 tahun | Januari | | | Februari | | | Maret | | | April | | | Mei | | | Juni | | | Juli | | | Agustus | | | September | | | Oktober | | | November | | | Desember | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK |
| 1 | Pedagang Besar Farmasi (PBF) | Palu | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | 8 | 6 | 2 |
| | | Kabupaten Banggai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | | | 1 | 0 | 1 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | Apotek | Palu | 471 | 139 | 9 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 17 | 12 | 5 | 20 | 17 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | 13 | 12 | 1 | 16 | 16 | 0 | 20 | 1 | 19 | 22 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | | 158 | 124 | 34 |
| | | Kabupaten Banggai | 81 | 34 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | | | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | | | 36 | 25 | 11 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 552 | 173 | 11 | 8 | 3 | 13 | 10 | 3 | 22 | 16 | 6 | 20 | 17 | 3 | 13 | 12 | 1 | 19 | 16 | 3 | 13 | 12 | 1 | 20 | 19 | 1 | 24 | 4 | 20 | 30 | 27 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 194 | 149 | 45 |
| 3 | Toko Obat | Palu | 122 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | | | 21 | 11 | 10 |
| | | Kabupaten Banggai | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | | 7 | 6 | 1 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 177 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 |
| 4 | Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan/ atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) | Palu | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | 10 | 10 | 0 |
| | | Kabupaten Banggai | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 4 | 4 | 0 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 5 | Rumah Sakit (RS) | Palu | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | 21 | 20 | 1 |
| | | Kabupaten Banggai | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 6 | 5 | 1 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 35 | 23 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 |
| 6 | Puskemas | Palu | 137 | 55 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | 60 | 60 | 0 |
| | | Kabupaten Banggai | 58 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 19 | 18 | 1 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 195 | 72 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 78 | 1 |
| 7 | Klinik | Palu | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | | 4 | 2 | 2 |
| | | Kabupaten Banggai | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | | | 2 | 1 | 1 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Fasilitas Distribusi Obat Tradisional dan/ atau Suplemen Kesehatan | Palu | 211 | 92 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 15 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | | | 101 | 89 | 12 |
| | | Kabupaten Banggai | 60 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 17 | 11 | 6 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 271 | 109 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | 10 | 2 | 8 | 7 | 1 | 17 | 16 | 1 | 4 | 4 | 0 | 14 | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 100 | 18 |
| 9 | Fasilitas Distribusi Kosmetik | Palu | 286 | 186 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 | 13 | 6 | 11 | 8 | 3 | 15 | 10 | 5 | 17 | 9 | 8 | 22 | 15 | 7 | 52 | 9 | 43 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 0 | | | 190 | 96 | 94 |
| | | Kabupaten Banggai | 75 | 50 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 22 | 3 | 19 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 70 | 20 | 50 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 361 | 236 | 12 | 8 | 4 | 17 | 8 | 9 | 25 | 13 | 12 | 14 | 10 | 4 | 24 | 14 | 10 | 20 | 12 | 8 | 28 | 18 | 10 | 74 | 12 | 62 | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 260 | 116 | 144 |
| 10 | Fasilitas Distribusi Pangan Olahan | Palu | 735 | 186 | 5 | 5 | 0 | 15 | 14 | 1 | 13 | 13 | 0 | 11 | 9 | 2 | 93 | 63 | 30 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 16 | 15 | 1 | 25 | 14 | 11 | 213 | 161 | 52 |
| | | Kabupaten Banggai | 159 | 50 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 23 | 15 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | | 77 | 46 | 31 |
| | | - | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 894 | 236 | 14 | 12 | 2 | 18 | 17 | 1 | 21 | 16 | 5 | 20 | 12 | 8 | 116 | 78 | 38 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 10 | 6 | 4 | 12 | 7 | 5 | 19 | 17 | 2 | 25 | 14 | 11 | 290 | 207 | 83 |
| | Total BB/BPOM | | 2094 | 744 | 25 | 19 | 6 | 65 | 51 | 14 | 71 | 58 | 13 | 58 | 50 | 8 | 138 | 101 | 37 | 52 | 42 | 10 | 66 | 56 | 10 | 93 | 46 | 47 | 73 | 39 | 34 | 47 | 44 | 3 | 69 | 56 | 13 | 29 | 17 | 12 | 786 | 579 | 207 |

| No | Sarana Distribusi | UPT | Jumlah Sarana yang ada | Target sarana yang diperiksa 1 tahun | Januari | | | Februari | | | Maret | | | April | | | Mei | | | Juni | | | Juli | | | Agustus | | | September | | | Oktober | | | November | | | Desember | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK |
| | Total Loka 1 | | 514 | 187 | 24 | 19 | 5 | 14 | 9 | 5 | 30 | 16 | 14 | 14 | 6 | 8 | 34 | 21 | 13 | 26 | 20 | 6 | 10 | 6 | 4 | 33 | 13 | 20 | 14 | 7 | 7 | 28 | 13 | 15 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 239 | 136 | 103 |
| | Total loka 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total sarana distribusi Obat | | 1082 | 350 | 17 | 14 | 3 | 33 | 27 | 6 | 43 | 35 | 8 | 30 | 27 | 3 | 15 | 14 | 1 | 38 | 34 | 4 | 30 | 29 | 1 | 32 | 30 | 2 | 49 | 24 | 25 | 49 | 42 | 7 | 17 | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 357 | 292 | 65 |
| | TOTAL | | 2608 | 931 | 49 | 38 | 11 | 79 | 60 | 19 | 101 | 74 | 27 | 72 | 56 | 16 | 172 | 122 | 50 | 78 | 62 | 16 | 76 | 62 | 14 | 126 | 59 | 67 | 87 | 46 | 41 | 75 | 57 | 18 | 81 | 62 | 19 | 29 | 17 | 12 | 1025 | 715 | 310 |

Keterangan :

1. Jumlah sarana yang diperiksa = MK + TMK
2. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.
3. perhitungan :
   a. output sarana distribusi obat dan makanan pada monev DJA = jumlah sarana yang diperiksa
   b. indikator Persentase sarana distribusi Obat yang MK pada RAPK = MK dibagi jumlah sarana yang diperiksa

**Sertifikasi Obat dan Makanan**

**Balai POM di Palu**

**Tahun Anggaran 2020**

| No | Rekomendasi/ sertifikasi | Satuan | UPT | Januari | | | Februari | | | Maret | | | April | | | Mei | | | Juni | | | Juli | | | Agustus | | | September | | | Oktober | | | November | | | Desember | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah Permohonan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu | Jumlah Permohonan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu | Jumlah Permohonan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu | Jumlah Permohonan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu | Jumlah Permohonan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu | Jumlah Permohonan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu | Jumlah Permohonan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu | Jumlah Permohonan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu | Jumlah Permohonan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu | Jumlah Permohonan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu | Jumlah Permohonan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu | Jumlah Permohonan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu |
| 1 | Surat Keterangan Impor (SKI) | rekomendasi/ sertifikat | Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Surat Keterangan Ekspor (SKE) | rekomendasi/ sertifikat | Palu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | **4** | **4** | **4** | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Rekomendasi / Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB | rekomendasi/ sertifikat | Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 19 | 19 | 19 |
| | | | Kabupaten Banggai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Total | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 26 | 26 | 26 |

Keterangan :

1. perhitungan :
   a. output keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan pada monev DJA = Jumlah rekomendasi atau sertifikat yang diterbitkan
   b. indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada RAPK = Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu dibagi jumlah permohonan

**Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**
**Balai POM di Palu**
**Tahun Anggaran 2020**

**A. Matriks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM**

| No | Komoditi | UPT | Januari | | Februari | | Maret | | April | | Mei | | Juni | | Juli | | Agustus | | September | | Oktober | | November | | Desember | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** |
| 1 | Obat | Palu | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 24 | 6 | 24 | 13 | 6 | 17 | 4 | 8 | 93 | 66 |
| | | Kabupaten Penggai | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | | | 7 | | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 61 | 28 |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | **TOTAL** | 8 | 0 | 11 | 2 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 22 | 12 | 31 | 6 | 30 | 13 | 11 | 17 | 4 | 36 | 154 | 94 |
| 2 | Obat Tradisional / Obat Bahan Alam | Palu | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 15 | 15 |
| | | Kabupaten Penggai | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 0 | | | | | | | 4 | 0 |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | **TOTAL** | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 |
| 3 | Suplemen Kesehatan | Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Penggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | 1 | 3 | 1 |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | **TOTAL** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Kosmetik | Palu | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | | | 43 | 40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | | | 87 | 84 |
| | | Kabupaten Penggai | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | | 3 | 0 | 5 | | 3 | | | 11 | 50 | 11 |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | **TOTAL** | 4 | 2 | 9 | 6 | 12 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 62 | 40 | 6 | 3 | 6 | 1 | 13 | 10 | 0 | 11 | 137 | 95 |
| 5 | Pangan | Palu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 11 | 11 | 63 | 39 |
| | | Kabupaten Penggai | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | | | 12 | 32 | 12 |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | **TOTAL** | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | 6 | 8 | 11 | 23 | 95 | 51 |
| | **TOTAL BALAI** | | **6** | **4** | **14** | **11** | **14** | **9** | **6** | **3** | **7** | **8** | **45** | **10** | **3** | **2** | **66** | **60** | **34** | **16** | **27** | **27** | **21** | **35** | **15** | **19** | **258** | **204** |
| | **TOTAL LOKA** | | **11** | **0** | **10** | **0** | **23** | **0** | **8** | **0** | **13** | **0** | **17** | **0** | **5** | **0** | **26** | **0** | **13** | **0** | **15** | **0** | **9** | **0** | **0** | **52** | **150** | **52** |
| | **TOTAL** | | **17** | **4** | **24** | **11** | **37** | **9** | **14** | **3** | **20** | **8** | **62** | **10** | **8** | **2** | **92** | **60** | **47** | **16** | **42** | **27** | **30** | **35** | **15** | **71** | **408** | **256** |

**Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**
**Balai POM di Palu**
**Tahun Anggaran 2020**

**B. Matriks Rekomendasi yang Dilakukan oleh BPOM yang Diberikan Kepada Instansi Terkait**

| No | Komoditi | UPT | Januari | | Februari | | Maret | | April | | Mei | | Juni | | Juli | | Agustus | | September | | Oktober | | November | | Desember | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM* | Jumlah Feedback** |
| 1 | Obat | Palu | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 | 13 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 85 | 34 |
| | | Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 13 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | 5 | | 0 | 10 | 40 | 26 |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | **TOTAL** | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 0 | 20 | 20 | 4 | 6 | 15 | 2 | 14 | 5 | 11 | 7 | 0 | 11 | 125 | 60 |
| 2 | Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam | Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | **TOTAL** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Suplemen Kesehatan | Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | **TOTAL** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Kosmetik | Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 5 | | 3 | | 0 | 10 | 12 | 10 |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | **TOTAL** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 10 |
| 5 | Pangan | Palu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| | | Kabupaten Banggai | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | | | | 4 | | 1 | | 0 | 9 | 31 | 23 |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | **TOTAL** | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 37 | 29 |
| | **TOTAL BALAI** | | **1** | **0** | **13** | **1** | **8** | **0** | **7** | **0** | **1** | **0** | **13** | **0** | **13** | **16** | **4** | **6** | **16** | **2** | **8** | **5** | **7** | **7** | **0** | **3** | **91** | **40** |
| | **TOTAL LOKA** | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** | **0** | **11** | **9** | **15** | **11** | **16** | **3** | **8** | **7** | **2** | **0** | **0** | **0** | **15** | **0** | **9** | **0** | **0** | **29** | **85** | **59** |
| | **TOTAL** | | **4** | **0** | **16** | **1** | **11** | **0** | **18** | **9** | **16** | **11** | **29** | **3** | **21** | **23** | **6** | **6** | **16** | **2** | **23** | **5** | **16** | **7** | **0** | **32** | **176** | **99** |

Keterangan :

* : Rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPOM yang diberikan kepada instansi terkait misalnya tindak lanjut pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online Direktorat Pengamanan.

** : Feedback berupa respon instansi terkait terhadap rekomendasi

**Intelijen dan Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan**
**Balai POM di Palu**
**Tahun Anggaran 2020**

| No | UPT | Target | | Januari | | | | | | | | Februari | | | | | | | | Maret | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah kasus | Jumlah Perkara | Tahap penanganan perkara | | | | | Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp) | Jumlah kasus | Jumlah Perkara | Tahap penanganan perkara | | | | | Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp) | Jumlah kasus | Jumlah Perkara | Tahap penanganan perkara | | | | | Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp) |
| | | | | | | SPDP | Tahap I | P21 | Tahap II | putusan pengadilan | | | | SPDP | Tahap I | P21 | Tahap II | putusan pengadilan | | | | SPDP | Tahap I | P21 | Tahap II | putusan pengadilan | |
| 1 | Palu | Tahun n | 4 | 5 | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 13.352.500 | 5 | 1 | 1 | | | | | 300.000.000 |
| | | Carry over * | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | Kabupaten Banggai | Tahun n | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Carry over * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total Balai** | | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.352.500 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 |
| | **Total Loka** | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTAL** | | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.352.500 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 |

Keterangan :

1. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus
2. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti
3. * carry over jumlah perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus pada tahun sebelumnya
4. * carry over jumlah perkara s.d tahap II adalah perkara tahun sebelumnya yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti pada tahun 2019
5. perhitungan :

a. output jumlah perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan pada monev DJA = capaian penanganan perkara s.d tahap SPDP pada tahun n

b. Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II = (capaian penanganan perkara s.d tahap II tahun n dan tahun sebelumnya) dibagi (jumlah perkara tahun n dan tahun sebelumnya)

**Intelijen dan Penyidikan di Bidang Pengaw**
**Balai POM di Palu**
**Tahun Anggaran 2020**

| No | UPT | Target | | April | | | | | | | | Mei | | | | | | | | Juni | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah kasus | Jumlah Perkara | Tahap penanganan perkara | | | | | Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp) | Jumlah kasus | Jumlah Perkara | Tahap penanganan perkara | | | | | Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp) | Jumlah kasus | Jumlah Perkara | Tahap penanganan perkara | | | | | Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp) |
| | | | | | | SPDP | Tahap I | P21 | Tahap II | putusan pengadilan | | | | SPDP | Tahap I | P21 | Tahap II | putusan pengadilan | | | | SPDP | Tahap I | P21 | Tahap II | putusan pengadilan | |
| 1 | Palu | Tahun n | 4 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | Carry over * | 3 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kabupaten Banggai | Tahun n | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Carry over * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total Balai | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Total Loka | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Keterangan :

1. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus
2. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti
3. * carry over jumlah perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus pada tahun sebelumnya
4. * carry over jumlah perkara s.d tahap II adalah perkara tahun sebelumnya yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti pada tahun 2019
5. perhitungan :

a. output jumlah perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan pada monev DJA = capaian penanganan perkara s.d tahap SPDP pada tahun n

b. Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II = (capaian penanganan perkara s.d tahap II tahun n dan tahun sebelumnya) dibagi (jumlah perkara tahun n dan tahun sebelumnya)

**Intelijen dan Penyidikan di Bidang Pengav**
**Balai POM di Palu**
**Tahun Anggaran 2020**

| No | UPT | Target | | Juli | | | | | | | | Agustus | | | | | | | | September | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah kasus | Jumlah Perkara | Tahap penanganan perkara | | | | | Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp) | Jumlah kasus | Jumlah Perkara | Tahap penanganan perkara | | | | | Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp) | Jumlah kasus | Jumlah Perkara | Tahap penanganan perkara | | | | | Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp) |
| | | | | | | SPDP | Tahap I | P21 | Tahap II | putusan pengadilan | | | | SPDP | Tahap I | P21 | Tahap II | putusan pengadilan | | | | SPDP | Tahap I | P21 | Tahap II | putusan pengadilan | |
| 1 | Palu | Tahun n | 4 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 21.170.000 | 1 | 1 | 1 | | | | | 400.000 |
| | | Carry over * | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kabupaten Banggai | Tahun n | 1 | | 1 | 1 | | | | | 27.665.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Carry over * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total Balai | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.170.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | Total Loka | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.665.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.665.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.170.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |

Keterangan :

1. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus
2. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti
3. * carry over jumlah perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus pada tahun sebelumnya
4. * carry over jumlah perkara s.d tahap II adalah perkara tahun sebelumnya yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti pada tahun 2019
5. perhitungan :

a. output jumlah perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan pada monev DJA = capaian penanganan perkara s.d tahap SPDP pada tahun n

b. Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II = (capaian penanganan perkara s.d tahap II tahun n dan tahun sebelumnya) dibagi (jumlah perkara tahun n dan tahun sebelumnya)

**Intelijen dan Penyidikan di Bidang Pengaw**
**Balai POM di Palu**
**Tahun Anggaran 2020**

| No | UPT | Target | | Oktober | | | | | | | | November | | | | | | | | Desember | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah kasus | Jumlah Perkara | Tahap penanganan perkara | | | | | Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp) | Jumlah kasus | Jumlah Perkara | Tahap penanganan perkara | | | | | Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp) | Jumlah kasus | Jumlah Perkara | Tahap penanganan perkara | | | | | Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp) |
| | | | | | | SPDP | Tahap I | P21 | Tahap II | putusan pengadilan | | | | SPDP | Tahap I | P21 | Tahap II | putusan pengadilan | | | | SPDP | Tahap I | P21 | Tahap II | putusan pengadilan | | |
| 1 | Palu | Tahun n | 4 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 34.776.000 | | | | | | | | | |
| | | Carry over * | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kabupaten Banggai | Tahun n | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | Carry over * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total Balai | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.776.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Loka | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.776.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

1. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus
2. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti
3. * carry over jumlah perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus pada tahun sebelumnya
4. * carry over jumlah perkara s.d tahap II adalah perkara tahun sebelumnya yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti pada tahun 2019
5. perhitungan :

a. output jumlah perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan pada monev DJA = capaian penanganan perkara s.d tahap SPDP pada tahun n

b. Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II = (capaian penanganan perkara s.d tahap II tahun n dan tahun sebelumnya) dibagi (jumlah perkara tahun n dan tahun sebelumnya)

**Intelijen dan Penyidikan di Bidang Pengaw**
**Balai POM di Palu**
**Tahun Anggaran 2020**

| No | UPT | Target | | Total | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah kasus | Jumlah Perkara | Tahap penanganan perkara | | | | | Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp) |
| | | | | | | SPDP | Tahap I | P21 | Tahap II | putusan pengadilan | |
| 1 | Palu | Tahun n | 4 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 369.698.500 |
| | | Carry over * | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Kabupaten Banggai | Tahun n | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.665.000 |
| | | Carry over * | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Balai | | 7 | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 369.698.500 |
| | Total Loka | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | TOTAL | | 8 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 27.665.000 |

Keterangan :

1. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus
2. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti
3. * carry over jumlah perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus pada tahun sebelumnya
4. * carry over jumlah perkara s.d tahap II adalah perkara tahun sebelumnya yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti pada tahun 2019
5. perhitungan :

a. output jumlah perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan pada monev DJA = capaian penanganan perkara s.d tahap SPDP pada tahun n

b. Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II = (capaian penanganan perkara s.d tahap II tahun n dan tahun sebelumnya) dibagi (jumlah perkara tahun n dan tahun sebelumnya)

**Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Pengaduan Masyarakat**
**Balai POM di Palu**
**Tahun Anggaran 2020**

## A. ANGGARAN DIPA BADAN POM

| No | Kegiatan | UPT | BPOM PALU | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Frekuensi/Jumlah | | | | | | | | | | | | Total |
| | | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
| 1 | Layanan informasi a) | Balai POM di Palu | 9 | 47 | 29 | 33 | 9 | 20 | 25 | 46 | 38 | 57 | 50 | 51 | 414 |
| | | Loka POM di Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | | | 23 | 32 |
| 2 | Layanan pengaduan b) | Balai POM di Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | | Loka POM di Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | | 1 | 4 |
| 3 | Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti c) | Balai POM di Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | | Loka POM di Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | | 1 | 4 |
| 4 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat d) | Balai POM di Palu | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| | | Loka POM di Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 5 | KIE di Area *Car Free Day* (CFD), Pameran, Sosialisasi e) | Balai POM di Palu | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 5 | 46 |
| | | Loka POM di Kabupaten Banggai | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| 6 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media sosial f) | Balai POM di Palu | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 4 | 16 | 12 | 9 | 11 | 26 | 21 | 130 |
| | | Loka POM di Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 32 | 32 |
| 7 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak g) | Balai POM di Palu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 2 | 5 |
| | | Loka POM di Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 8 | Sebagai Narasumber h) | Balai POM di Palu | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 46 |
| | | Loka POM di Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 |
| | Total | Balai POM di Palu | 17 | 60 | 39 | 56 | 26 | 31 | 45 | 67 | 48 | 83 | 94 | 85 | 651 |
| | | Loka POM di Kabupaten Banggai | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 11 | 5 | 2 | 2 | 59 | 102 |
| | | TOTAL | 18 | 64 | 42 | 59 | 30 | 31 | 53 | 78 | 53 | 85 | 96 | 144 | 753 |

## B. ANGGARAN NON DIPA BADAN POM

| No | Kegiatan | UPT | BPOM PALU | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Frekuensi/Jumlah | | | | | | | | | | | | Total |
| | | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
| 1 | CFD, Pameran, Sosialisasi, Penyuluhan i) | Balai POM di Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | Loka POM di Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak j) | Balai POM di Palu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| | | Loka POM di Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Sebagai Narasumber k) | Balai POM di Palu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| | | Loka POM di Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Sebagai Narasumber | Balai POM di Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Loka POM di Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Total | Balai POM di Palu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| | | Loka POM di Kabupaten Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 |

**Keterangan:**

1. Penjelasan tabel :
   a) Jumlah layanan informasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM. Diisi jumlah layanan per bulan sesuai data pada Aplikasi Simpel LPK
   b) Jumlah layanan pengaduan yang diterima oleh Balai Besar/Balai/Loka POM. Diisi jumlah layanan per bulan sesuai data pada Aplikasi Simpel LPK
   c) Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti oleh Balai Besar/Balai/Loka POM (status tindak lanjut pada Aplikasi Simpel LPK berubah menjadi "SUDAH")
   d) Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan termasuk KIE bersama Tokoh Masyarakat (DPR)
   e) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan dalam bentuk kegiatan KIE di Area Car Free Day(CFD)/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/lainnya
   f) KIE yang dilakukan melalui jumlah postingan di media sosial (Instagram/Twitter/Facebook) per bulan
   g) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan melalui penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blastyang ditayangkan/disiarkan/disebarkan melalui media elektronik televisi/radio/videotron/media telekomunikasi
   h) Jumlah kegiatan yang melibatkan unit sebagai narasumber pada acara tertentu yang menggunakan anggaran DIPA Badan POM
   i) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan dalam bentuk kegiatan KIE di Area Car Free Day(CFD)/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/lainnya yangtidakmenggunakan anggaran Badan POM contohnya kegiatan bersama instansi lain/CSR
   j) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan melalui penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blastyang ditayangkan/disiarkan/disebarkan melalui media elektronik televisi/radio/videotron/media telekomunikasi yangtidakmenggunakan anggaran Badan POM contohnya kegiatan bersama instansi lain/CSR/permintaan dari media
   k) Jumlah kegiatan yang melibatkan unit sebagai narasumber pada acara tertentu yang tidakmenggunakan anggaran Badan POM contohnya kegiatan bersama instansi lain/undangan dari stakeholder
2. cara perhitungan :
   **output KIE obat dan makanan aman pada monev DJA = Jumlah seluruh kegiatan KIE dan pengaduan masyarakat dengan anggaran DIPA BPOM (A)**

**Jenis Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)**
**Balai POM di Palu**
**Tahun Anggaran 2020**

## A. ANGGARAN DIPA BADAN POM

| Bulan | Unit Kerja | NAMA KEGIATAN[a)] | FREKUENSI (KALI) | | JUMLAH PESERTA (ORANG) | | LEVEL PESERTA[b)] | STAKEHOLDER[c)] | NARASUMBER[d)] | MATERI[e)] | LOKASI[f)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Balai POM di Palu | KIE Obat dan Makanan keliling di Kota Palu (Komunitas UMKM) | 1 | Kali | 20 | Orang | Komunitas UMKM | - | Petugas Balai POM | Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan dan UMKM | Kota Palu |
| | | Penyebaran Informasi IRTP dan UKM di Kab. Donggala | 1 | Kali | 30 | Orang | Komunitas UMKM | Dinas kumperindag | Petugas Balai POM dan Kadis Kumperindag | Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan dan UMKM | Kab. Donggala |
| | | Penyebaran Informasi tentang minuman alkohol di Kota Palu (Komunitas karangtaruna) | 1 | Kali | 30 | Orang | Komunitas Karang Taruna | Dinas kumperindag kota Palu, Kelurahan Lolu Utara | PLH. Kepala Balai POM | Standar keamananan minuman beralkohol | Kota Palu |
| | | Penyebaran Informasi melalui cerdas cermat | 1 | Kali | 120 | Orang | Siswa SMP | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dan PLH Ka. Balai POM | Keamanan Pangan, pengenalan tugas dan fungsi Badan POM | Kota Palu |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | KIE Sekolah | 1 | Kali | 935 | Orang | Siswa SLTP | - | Ka. Loka | Keamanan Pangan | Kota Luwuk |
| Februari | Balai POM di Palu | Pemberdayaan masyarakat dengan tokoh masyarakat di Poso | 1 | Kali | 476 | Orang | Masyarakat Umum | - | Plt. Ka. Balai dan Ketua DPRD | Keamanan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik | Kab. Poso |
| | | Pemberdayaan masyarakat dengan tokoh masyarakat di Morowali | 1 | Kali | 455 | Orang | Masyarakat Umum | - | Kasi Infokom dan Ketua DPRD | KIE Makanan dan Kosmetik | Kab. Morowali |
| | | KIE Obat dan Makanan keliling di Kota Palu (Komunitas Ormas) | 1 | Kali | 55 | Orang | Komunitas Ormas | - | Petugas Balai POM | Kemananan Kosmetik dan penggunaan aplikasi BPOM Mobile | Kota Palu |
| | | KIE Obat dan Makanan keliling di Kota Palu (Komunitas Kelurahan) | 1 | Kali | 60 | Orang | Komunitas Kelurahan | - | Petugas Balai POM | Keamanan Pangan dan penggunaan aplikasi BPOM Mobile | Kota Palu |
| | | KIE Obat dan Makanan keliling di Kota Palu (Komunitas Sekolah) | 1 | Kali | 20 | Orang | Komunitas Sekolah | - | Petugas Balai POM | Keamanan Pangan | Kota Palu |
| | | KIE Obat dan Makanan keliling di Kota Palu (Komunitas Pramuka) | 1 | Kali | 20 | Orang | Komunitas | - | Petugas Balai POM | Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan dan UMKM | Kota Palu |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | KIE Sekolah (SMP Negeri 3 Luwuk) | 1 | Kali | 60 | Orang | Siswa SMA | - | Ka.Loka | KIE Obat dan Makanan | Luwuk |
| | | CFD dalam Rangka HUT BPOM | 1 | Kali | 300 | Orang | Masyarakat Umum | Pemda Banggai, Universitas,UM | Ka.Loka | KIE Obat dan Makanan | Luwuk |
| | | KIE Sekolah (SD Negeri 1 Bunta) | 1 | Kali | 150 | Orang | Siswa SD | - | Ka.Loka | KIE Obat dan Makanan | Bunta |
| | | KIE Sekolah (SMP Negeri 1 Bunta) | 1 | Kali | 400 | Orang | Siswa SLTP | - | Ka.Loka | KIE Obat dan Makanan | Bunta |
| Maret | Balai POM di Palu | Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar Dalam Rangka Pengawasan BB | 1 | Kali | 25 | Orang | Petugas Pasar | - | Petugas Balai POM | Keamanan Pangan | Kab. Poso |
| | | Penyuluhan kepada Komunitas Pasar | 1 | Kali | 50 | Orang | Penjual di Pasar | - | Petugas Balai POM | Keamanan Pangan | Kab. Poso |
| | | KIE Obat dan Makanan Keliling di Kota Palu (Komunitas Sekolah ) | 2 | Kali | 60 | Orang | Orang | - | Petugas Balai POM | Keamanan Pangan | Kota Palu |
| | | KIE Obat dan Makanan Keliling di Kota Palu (Komunitas Pramuka ) | 2 | Kali | 60 | Orang | Pramuka Penggalang | - | Petugas Balai POM | Keamanan Pangan | Kota Palu |
| | | Operasional Mobil Keliling komunitas pasar | 1 | Kali | 30 | Orang | Pedagang | - | Petugas Balai POM | Keamanan Pangan | Kota Palu |
| | | KIE Obat dan Makanan Keliling di Kota Palu (Komunitas UMKM ) | 4 | Kali | 30 | Orang | Komunitas UMKM | - | Petugas Balai POM | Keamanan Pangan | Kota Palu |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | Milenial Road Safety Festival | 1 | Kali | 500 | Orang | Masyarakat Umum | Polres Banggai | Staf Pengujian Loka | Pengujian Makanan | Luwuk |
| | | KIE Sekolah | 2 | Kali | 161 | Orang | Siswa SLTP & SD | - | Ka.Loka | Keamanan Pangan & Kosmetik | Balut |
| April | Balai POM di Palu | Pemberdayaan masyarakat dengan tokoh masyarakat di Poso | 3 | Kali | 1500 | Orang | Masyarakat Umum | - | Ka. Balai POM dan ketua DPRD | KIE Obat dan Makanan | Kab. Poso |
| | | Pameran Sulteng Expo | 1 | Kali | 598 | Orang | Masyarakat Umum | - | - | KIE Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Makanan | Kota Palu |
| | | Penyebaran Informasi (Komunitas Pasar) | 1 | Kali | 60 | Orang | Komunitas Pasar | Dinas Kesehatan, Polres Parigi | Ka. Balai POM, Kadis Kesehatan Kab. Parigi | Inpres no 3 thn 2017 | Kab. Parigi |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | Pengujian Bakso Tahu | 1 | Kali | 9 | Orang | Pedagang Bakso | - | Staf Pengujian Loka | Pengujian Takjil dari Bahan Berbahaya | Luwuk |
| | | KIE Sekolah | 1 | Kali | 100 | Orang | Siswa SMP | - | Staf Loka | Keamanan Pangan | Kab.Bangkep |

| Bulan | Unit Kerja | NAMA KEGIATAN[a)] | FREKUENSI (KALI) | | JUMLAH PESERTA (ORANG) | | LEVEL PESERTA[b)] | STAKEHOLDER[c)] | NARASUMBER[d)] | MATERI[e)] | LOKASI[f)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mei | Balai POM di Palu | KIE dan pengujian sampel takjil ramadhan | 16 | Kali | 160 | Orang | Pedagang Takjil | - | Petugas Balai POM | Keamanan Pangan | Kota Palu |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | Pengujian Takjil Ramadhan | 4 | Kali | 45 | Orang | Pedagang Pasar | - | Staf Penguji Loka | Pengujian Takjil dari Bahan Berbahaya | Luwuk |
| Juni | Balai POM di Palu | Pameran UMKM dan KIE keamanan Pangan | 1 | Kali | 100 | Orang | Masyarakat Umum | - | Ka. Balai POM | KIE Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Makanan | Kota Palu |
| | | KIE Obat dan Makanan Keliling di Kota Palu (Komunitas Pasar ) | 2 | Kali | 6 | Orang | Pedagang | - | Petugas Balai POM | Penggunaan Kosmetik yang aman | Kota Palu |
| | | KIE Obat dan Makanan Keliling di Kota Palu (Komunitas PKK ) | 2 | Kali | 10 | Orang | Komunitas PKK | - | Petugas Balai POM | Keamanan Pangan | Kota Palu |
| | | Penyebaran Informasi (Komunitas Karang Taruna) | 1 | Kali | 30 | Orang | Komunitas Karang Taruna | - | Kepala BNNP dan Ka. Balai POM | Keamanan Obat dan penyalahgunaan obat psikotropik dan narkotika | Kota Palu |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | - | - | Kali | - | Orang | - | - | - | - | - |
| Juli | Balai POM di Palu | KIE Obat dan Makanan Keliling di Kota Palu (Komunitas PKK ) | 1 | Kali | 30 | Orang | Komunitas PKK | - | Petugas Balai POM | Keamanan Pangan | Kota Palu |
| | | Penyebaran Informasi (Komunitas Ormas) di Kab. Morowali Utara | 1 | Kali | 30 | Orang | Komunitas Ormas | - | Petugas Balai POM | Keamanan Pangan | Kab. Morowali Utara |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | KIE di Festival Pulo Dua | 1 | Kali | 200 | Orang | Pramuka Penegak, Pembina, Masyarakat Umum | PEMDA Banggai (Dinas Pariwisata), KEMENDAGRI | Petugas Loka POM Banggai | Keamanan Pangan, Obat dan Kosmetik | Pulo Dua, Kab. Banggai |
| Agustus | Balai POM di Palu | Penyebaran Informasi (Komunitas PKK) di Morowali | 1 | Kali | 30 | Orang | Komunitas PKK | - | Ka. Balai POM di Palu | Keamanan Pangan | Kab. Morowali |
| | | KIE Obat dan Makanan keliling di Kab. Sigi (Komunitas Pramuka) | 1 | Kali | 144 | Orang | Komunitas Pramuka | - | Petugas Balai POM di Palu | Keamanan Pangan | Kab. Sigi |
| | | KIE Obat dan Makanan keliling di Kota Palu (Komunitas PKK) | 1 | Kali | 50 | Orang | Komunitas PKK | - | Petugas Balai POM di Palu | Keamanan Pangan | Kota Palu |
| | | Sosialisasi pemilihan kosmetik yang cerdas | 1 | Kali | 250 | Orang | Komunitas sekolah | - | Ka. Deputi 3 BPOM, Direktur Kosmetik BPOM, Ka. Balai POM di Palu, Pakar kulit | Kosmetik | Kota Palu |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | Penyebaran Informasi (PKK, sekolah dan Masyarakat) di Kab. Touna | 1 | Kali | 46 | Orang | Penggerak PKK,Pedagang, Guru, Produsen PIRT | Dinas Kesehatan, Dinas PERINDAGKOP | Kepala Loka POM Banggai, Kabid. SDMK Dinkes Touna, Kepala Dinas Perindagkop | KIE Pangan Aman dan pengawasan produk beredar | Kota Ampana |
| | | Penyebaran Informasi (PKK, sekolah dan Masyarakat) di Kab. Balut | 1 | Kali | 60 | Orang | Penggerak PKK,Pedagang, Guru dan siswa SMA, pengolah pangan | Sekretariat Daerah (SEKDA); Dinas Kesehatan, PP dan KB; Danramil; Polres; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas DIKPORA; Dinas KOPERINDAG | Kepala Loka POM Banggai; Sekdis Dinkes Touna, Kabid. Konsumsi dam keamanan pangan | KIE Kosmetika dan Pangan aman | Kota Banggai Laut |
| | | KIE Pasar (Pasar Batui, Pasar Simpong) | 2 | Kali | | | | - | Staf Pengujian Loka | Pengujian Pangan dan BB | Kab. Banggai |
| | | KIE Sekolah (SMAN 1 Ampana, SMKN 1 Ampana) | 2 | Kali | 968 | Orang | Siswa SMA dan SMK | - | Ka Loka dan Staf Loka POM Banggai | - | Kab. Touna |
| September | Balai POM di Palu | KIE Obat dan Makanan keliling di Kota Palu | 1 | Kali | 10 | Orang | Komunitas Karang Taruna | Kelurahan Lolu Utara | Petugas Balai POM | Kosmetik | Kota Palu |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | **KIE Sekolah** | 1 | Kali | 900 | Orang | Siswa-siswi SMA Negeri 1 Toili | - | Ka. Loka POM Banggai | KIE Keamanan Pangan | Kec. Toili Kab. Banggai |
| Oktober | Balai POM di Palu | PI komunitas PKK Poso, | 1 | Kali | 30 | Orang | Komunitas PKK | Diskes Poso | Ka. Balai | Kosmetik | Kab Poso |
| | | PI komunitas sekolah Buol | 1 | Kali | 30 | Orang | Komunitas Sekolah | Diskes Buol | Ka. Balai | Pangan | Kab Buol |
| | | PI komunitas UMKM Tolitoli | 1 | Kali | 30 | Orang | Komunitas UMKM | Diskes Toli-toli | Petugas Balai POM | Pangan | Kab Toli-toli |
| | | KIE keliling komunitas PKK | 1 | Kali | 18 | Orang | Komunitas PKK | Ritel Transmart | Petugas Balai POM | Aplikasi cek BPOM | Kota Palu |
| | | Kie Keliling komunitas sekolah | 1 | Kali | 100 | Orang | Komunitas sekolah | Sekolah Balaroa | Petugas Balai POM | Pangan | Kota Palu |
| | | Kie Keliling komunitas sekolah | 1 | Kali | 100 | Orang | Komunitas sekolah | Sekolah Petobo | Petugas Balai POM | Pangan | Kota Palu |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | KIE Pramuka | 1 | Kali | 200 | Orang | siswa pramuka, pembina saka, panitia pramuka. | - | Kepala Loka POM Kab. Banggai | KIE Keamanan Pangan dan CEKKLIK | Kec. Bunta, Kab. Banggai |
| | | PI Balantak | 1 | Kali | 60 | Orang | Siswa SMA, IRT, Pelaku Usaha, PKK | Dinas Kesehatan (Puskesmas Balantak) | Camat Balantak, Pegawai Puskesmas & Kepala Loka POM Banggai | Gotong Royong Meningkatkan Keamanan Pangan sebagai salah satu usaha memerangi Stunting Serta Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetik | Kec. Balantak, Kab. Banggai |

| Bulan | Unit Kerja | NAMA KEGIATAN[a)] | FREKUENSI (KALI) | | JUMLAH PESERTA (ORANG) | | LEVEL PESERTA[b)] | STAKEHOLDER[c)] | NARASUMBER[d)] | MATERI[e)] | LOKASI[f)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | Balai POM di Palu | Kie keliling komunitas sekolah | 1 | Kali | 180 | Orang | Komunitas sekolah | Sekolah SDN 1, 2 dan inpres Petobo | Petugas Balai POM | Keamanan Pangan di Sekolah | Kota Palu |
| | | Kie Ritel | 1 | Kali | 100 | Orang | Komunitas ritel dan masyarakat | Aprindo dan YLKI | Ka. Balai POM, Ketua Aprindo, Ketua YLKI | Cek klik sebelum belanja (Pangan) | Kota Palu |
| | | PI Komunitas Pramuka | 1 | Kali | 50 | Orang | Komunitas Pramuka | Kwarda Prop, Kwarcab Palu, Sigi dan donggala | Ka. Balai POM, Ketua Kwarda | Keamanan pangan dan obat | Kota Palu |
| | | Pameran HKN | 1 | Kali | 140 | Orang | Masyarakat Umum | Dinas Kesehatan kab. Morowali | Petugas Balai POM | Keamanan pangan dan obat | Kab. Morowali |
| | Balai POM di Palu | Kie Bangkep | 1 | Kali | 360 | Orang | siswa SMA I Tinangkung | siswa dan guru | Ka Loka Banggai | Keamanan pangan | Desa Tinangkung Kab.Bangkep |
| | | PI Bangkep | 1 | Kali | 48 | Orang | siswa,pemilik usaha | Dinas kes,Pemda Bangkep,Ketapang,Koramil,BPS,DPMPTSP,Polres | Ka.LOKA BPOM Banggai ,dinas kesehatan | 5 kunci ketahanan pangan,kosmetika | Bangkep |
| Desember | Balai POM di Palu | KIE komunitas Pramuka | 1 | Kali | 20 | Orang | Komunitas Pramuka | Kwarcab Sigi | Petugas Balai POM | Keamanan Pangan, Kosmetik dan obat | Kab. Sigi |
| | | Talkshow | 1 | Kali | 0 | Orang | Masyarakat Umum | TVRI | Ka. Balai | Intensifikasi pengawasan pangan menjelang natal dan tahun baru, unjuk kinerja Balai | Kota Palu |
| | | KIE Buang sampah obat | 1 | Kali | 150 | Orang | Komunitas GP Farmasi, IAI, masyarakat umum | GP Farmasi, IAI, Anggota Komisi IX DPR RI | Ka. Balai, Ketua PD IAI | | Kota Palu |
| | | KIE tokoh Masyarakat | 1 | Kali | 200 | Orang | Masyarakat Umum | Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Sulteng | Ka. Balai, Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Sulteng | Keamanan Pangan, Kosmetik dan obat | Kab. Parigi |
| | | **KIE keliling** | 2 | Kali | 10 | Orang | Pedagang ritel | | Petugas Balai POM | Cek klik sebelum belanja (Pangan) | Palu |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | **Kie Tojo Una-Una** | 1 | Kali | 100 | Orang | siswa SMP N 1 dan SMK N 4 Tojo Una-una | Guru | Staf Loka Banggai | Keamanan Pangan dan Kosmetik | Kota Ampana |
| | | **PI Luwuk** | 1 | Kali | 63 | Orang | Siswa, Mahasiswa, Guru dan Dosen | Dinkes,Dinas Ketahanan pangan, Karantina Ikan | Ka. Loka Banggai | Keamanan Pangan dan Kosmetik | Kota Luwuk |
| Total | Balai POM di Palu | | | Kali | | Orang | | | | | |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | | | Kali | | Orang | | | | | |

**B. ANGGARAN NON DIPA BADAN POM**

| BULAN | UNIT KERJA | NAMA KEGIATAN[a)] | FREKUENSI (KALI) | | JUMLAH PESERTA (ORANG) | | JENIS PESERTA[b)] | STAKEHOLDER[c)] | NARASUMBER[d)] | MATERI[e)] | LOKASI[f)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Balai POM di Palu | | | | | | | | | | |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | | | | | | | | | | |
| Februari | Balai POM di Palu | | | | | | | | | | |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | | | | | | | | | | |
| Maret | Balai POM di Palu | | | | | | | | | | |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | | | | | | | | | | |
| April | Balai POM di Palu | | | | | | | | | | |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | | | | | | | | | | |
| Mei | Balai POM di Palu | | | | | | | | | | |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | | | | | | | | | | |
| Juni | Balai POM di Palu | | | | | | | | | | |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | Car Free day (Safety Food) | 1 | Kali | 500 | Orang | Masyarakat Umum | Pemda Banggai | Ka Loka | Kosmetik dan pangan aman | Luwuk |
| Juli | Balai POM di Palu | Penyuluhan Keamanan Pangan Produksi Industri Rumah Tangga di Dinas Kesehatan Kota Palu | | Kali | | Orang | Pelaku Usaha | Dinas Kesehatan Kota Palu | Petugas Balai POM | Materi PKP dan SPPIRT | Kota Palu |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | | | | | | | | | | |
| Agustus | Balai POM di Palu | | | | | | | | | | |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | KIE HUT RI 17 Agustus 2019 | 3 | Kali | | Orang | - | - | Staf Pengujian Loka | Pengujian Pangan & BB | Luwuk |
| September | Balai POM di Palu | | | | | | | | | | |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | | | | | | | | | | |
| Oktober | Balai POM di Palu | | | | | | | | | | |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | | | | | | | | | | |
| November | Balai POM di Palu | Dialog interaktif | 1 | Kali | 20 | Orang | Instansi pelayanan publik | Indonesia (YLKI), PLN, BPOM | Ketua YLKI, Petugas BPOM, Petugas PLN | layanan dan konsumen | Kota Palu |
| | | Penyuluhan Keamanan Pangan Produksi Industri Rumah Tangga di Dinas Kesehatan Kab. Buol | 1 | Kali | 30 | Orang | Pelaku Usaha | Dinas Kesehatan Kab. Buol | Petugas Balai POM | Materi PKP dan SPPIRT | Kab. Buol |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | | | | | | | | | | |
| Desember | Balai POM di Palu | | | | | | | | | | |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | | | | | | | | | | |
| Total | Balai POM di Palu | | | | | | | | | | |
| | Loka POM di Kabupaten Banggai | | | Kali | | Orang | | | | | |

**Pengawasan Iklan dan Label Obat dan Makanan**

**Balai POM di Palu**

**Tahun Anggaran 2020**

| Komoditi | Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi | | Bulan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
| OBAT | Iklan | **MK** | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | **51** |
| | | BPOM di Palu | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | **46** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | **5** |
| | | **TMK** | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | **39** |
| | | BPOM di Palu | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | **34** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0 | 1 | | **5** |
| | Label | **MK** | 30 | 41 | 29 | 17 | 45 | 40 | 45 | 42 | 51 | 24 | 18 | 2 | **384** |
| | | BPOM di Palu | 30 | 41 | 29 | 17 | 32 | 40 | 41 | 38 | 50 | 20 | 17 | 2 | **357** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | | **27** |
| | | **TMK** | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | **61** |
| | | BPOM di Palu | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | **55** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | | **6** |
| OBAT TRADISIONAL | Iklan | **MK** | 2 | 6 | 6 | 6 | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 4 | 15 | 1 | **107** |
| | | BPOM di Palu | 2 | 5 | 4 | 6 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 4 | 14 | 1 | **99** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | | **8** |
| | | **TMK** | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | **29** |
| | | BPOM di Palu | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | **24** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 0 | | **5** |
| | Label | **MK** | 49 | 34 | 32 | 21 | 25 | 26 | 33 | 43 | 25 | 20 | 6 | 5 | **319** |
| | | BPOM di Palu | 47 | 32 | 30 | 19 | 23 | 24 | 31 | 41 | 23 | 18 | 4 | 5 | **297** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | **22** |
| | | **TMK** | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | **17** |
| | | BPOM di Palu | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | **16** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | **1** |

| Komoditi | Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi | | Bulan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
| SUPLEMEN KESEHATAN | Iklan | **MK** | 1 | 7 | 7 | 6 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 8 | 15 | 5 | **121** |
| | | BPOM di Palu | 1 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 7 | 15 | 4 | **114** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | **7** |
| | | **TMK** | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | **11** |
| | | BPOM di Palu | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **7** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | | 2 | **4** |
| | Label | **MK** | 20 | 13 | 5 | 11 | 7 | 10 | 18 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | **111** |
| | | BPOM di Palu | 20 | 12 | 4 | 10 | 6 | 9 | 17 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | **104** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | **7** |
| | | **TMK** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | **3** |
| | | BPOM di Palu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | **3** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | **0** |
| KOSMETIK | Iklan | **MK** | 5 | 17 | 5 | 13 | 31 | 33 | 38 | 40 | 43 | 27 | 17 | 5 | **274** |
| | | BPOM di Palu | 5 | 12 | 0 | 9 | 27 | 28 | 37 | 37 | 40 | 25 | 17 | 2 | **239** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | **35** |
| | | **TMK** | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | **41** |
| | | BPOM di Palu | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | **18** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | **23** |
| | Label | **MK** | 68 | 64 | 59 | 59 | 48 | 51 | 28 | 48 | 53 | 23 | 24 | 3 | **528** |
| | | BPOM di Palu | 61 | 60 | 55 | 55 | 45 | 47 | 24 | 45 | 49 | 19 | 21 | 3 | **484** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | | **44** |
| | | **TMK** | 1 | 8 | 11 | 7 | 11 | 15 | 42 | 14 | 13 | 11 | 9 | 1 | **143** |
| | | BPOM di Palu | 1 | 8 | 11 | 7 | 11 | 15 | 42 | 13 | 13 | 11 | 9 | 1 | **142** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | **1** |

| Komoditi | Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi | | Bulan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
| PANGAN | Iklan | **MK** | 45 | 25 | 22 | 41 | 12 | 20 | 19 | 7 | 18 | 7 | 8 | 2 | **226** |
| | | BPOM di Palu | 45 | 21 | 18 | 37 | 7 | 13 | 10 | 4 | 16 | 5 | 5 | 2 | **183** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | | **43** |
| | | **TMK** | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | **28** |
| | | BPOM di Palu | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | **22** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | **6** |
| | Label | **MK** | 5 | 53 | 33 | 32 | 56 | 46 | 45 | 50 | 44 | 35 | 19 | 19 | **437** |
| | | BPOM di Palu | 0 | 53 | 29 | 31 | 51 | 43 | 41 | 47 | 38 | 32 | 15 | 19 | **399** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | | **38** |
| | | **TMK** | 10 | 5 | 13 | 11 | 7 | 6 | 14 | 10 | 20 | 14 | 8 | 17 | **135** |
| | | BPOM di Palu | 10 | 5 | 12 | 10 | 5 | 5 | 13 | 10 | 19 | 14 | 8 | 17 | **128** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | **7** |
| ROKOK | Iklan | **MK** | 20 | 21 | 15 | 5 | 8 | 25 | 18 | 21 | 20 | 3 | 41 | 30 | **227** |
| | | BPOM di Palu | 20 | 21 | 15 | 5 | 8 | 25 | 18 | 21 | 20 | 3 | 41 | 30 | **227** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | **0** |
| | | **TMK** | 17 | 9 | 15 | 25 | 22 | 5 | 12 | 9 | 10 | 3 | 5 | 3 | **135** |
| | | BPOM di Palu | 17 | 9 | 15 | 25 | 22 | 5 | 12 | 9 | 10 | 3 | 5 | 3 | **135** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | **0** |
| | Label | **MK** | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 9 | **83** |
| | | BPOM di Palu | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 9 | **83** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | **0** |
| | | **TMK** | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | **37** |
| | | BPOM di Palu | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | **37** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | **0** |

| Komoditi | Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi | | Bulan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
| TOTAL | Iklan | **MK** | 79 | 79 | 57 | 76 | 82 | 109 | 102 | 102 | 118 | 52 | 101 | 49 | **1.006** |
| | | BPOM di Palu | 79 | 68 | 45 | 68 | 70 | 97 | 92 | 94 | 111 | 45 | 96 | 43 | **908** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 11 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | **98** |
| | | **TMK** | 34 | 34 | 35 | 29 | 31 | 13 | 20 | 22 | 19 | 9 | 14 | 23 | **283** |
| | | BPOM di Palu | 34 | 30 | 35 | 28 | 30 | 12 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 16 | **240** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | **43** |
| | | **Total iklan** | 113 | 113 | 92 | 105 | 113 | 122 | 122 | 124 | 137 | 61 | 115 | 72 | **1.289** |
| | Label | **MK** | 179 | 210 | 166 | 146 | 188 | 181 | 178 | 207 | 186 | 111 | 71 | 39 | **1.862** |
| | | BPOM di Palu | 165 | 203 | 155 | 138 | 164 | 171 | 163 | 194 | 173 | 98 | 61 | 39 | **1.724** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 14 | 7 | 11 | 8 | 24 | 10 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0 | **138** |
| | | **TMK** | 18 | 23 | 31 | 29 | 27 | 31 | 67 | 33 | 48 | 37 | 30 | 22 | **396** |
| | | BPOM di Palu | 17 | 23 | 30 | 28 | 24 | 30 | 66 | 32 | 44 | 37 | 28 | 22 | **381** |
| | | Loka POM di Kab Banggai | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | **15** |
| | | **Total label** | 197 | 233 | 197 | 175 | 215 | 212 | 245 | 240 | 234 | 148 | 101 | 61 | **2.258** |

**Catatan:**

(1) tiap kolom MK/TMK adalah total dari realisasi dari Balai koordinator dan Loka Kab/Kota-nya {(dengan rumus excel **=SUM(BB/BPOM di A:Loka A:Loka B)}**

(2) Angka total akhir tahun diperoleh dari rumus penjumlahan sejumlah 12 bulan dari MK/TMK. {dengan rumus excel **=SUM(januari:Februari: dst)**}

(3) Total Iklan dan Label paling bawah bisa dijumlahkan manual dengan excel {(=SUM(iklan obat+iklan obat tradisional+iklan suplemen kesehatan+iklan kosmetik+iklan pangan+iklan rokok)}

# INDEKS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (IPOM) 2018

Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. Indeks POM dapat diilustrasikan melalui peta/spasial untuk menggambarkan secara sederhana IPOM di setiap provinsi/wilayah. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Indeks POM sementara ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, serta laporan kinerja hasil pengawasan lain yang relevan. Penghitungan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan UPT 2018 didasarkan oleh beberapa variabel indikator berikut:

1. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Provinsi)
3. Indikator Kinerja Masing-Masing Komoditi

Berikut adalah Capaian IPOM 33 BB/BPOM 2018 :

| Kode Prov | Provinsi | BB/BPOM | IPOM |
|---|---|---|---|
| 13 | Sumatera Barat | BBPOM di Padang | 78,83 |
| 15 | Jambi | BPOM di Jambi | 78,33 |
| 34 | DI Yogyakarta | BBPOM di Yogyakarta | 78,33 |
| 61 | Kalimantan Barat | BBPOM di Pontianak | 78,28 |
| 81 | Maluku | BPOM di Ambon | 76,64 |
| 35 | Jawa Timur | BBPOM di Surabaya | 76,58 |
| 12 | Sumatera Utara | BBPOM di Medan | 75,58 |
| 33 | Jawa Tengah | BBPOM di Semarang | 75,06 |
| 53 | Nusa Tenggara Timur | BPOM di Kupang | 74,09 |
| 16 | Sumatera Selatan | BBPOM di Palembang | 73,59 |
| 32 | Jawa Barat | BBPOM di Bandung | 73,47 |
| 52 | Nusa Tenggara Barat | BBPOM di Mataram | 73,20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | BPOM di Palu | 72,69 |
| 17 | Bengkulu | BPOM di Bengkulu | 72,55 |
| 71 | Sulawesi Utara | BBPOM di Manado | 72,31 |
| 14 | Riau | BBPOM di Pekanbaru | 72,12 |
| 94 | Papua | BBPOM di Jayapura | 72,06 |
| 51 | Bali | BBPOM di Denpasar | 71,67 |
| 62 | Kalimantan Tengah | BPOM di Palangkaraya | 71,53 |
| 31 | DKI Jakarta | BBPOM di Jakarta | 71,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 82 | Maluku Utara | BPOM di Sofifi | 71,17 |
| 63 | Kalimantan Selatan | BBPOM di Banjarmasin | 70,64 |
| 11 | Aceh | BBPOM di Banda Aceh | 69,98 |
| 73 | Sulawesi Selatan | BBPOM di Makasar | 69,62 |
| 64 | Kalimantan Timur | BBPOM di Samarinda | 68,80 |
| 18 | Lampung | BBPOM di Bandar Lampung | 68,46 |
| 91 | Papua Barat | BPOM di Manokwari | 67,51 |
| 74 | Sulawesi Tenggara | BPOM di Kendari | 66,65 |
| 19 | Kepulauan Riau | BPOM di Batam | 63,90 |
| 75 | Gorontalo | BPOM di Gorontalo | 63,45 |
| 36 | Banten | BPOM di Serang | 62,26 |
| 21 | Kepulauan Bangka Belitung | BPOM di Pangkal Pinang | 58,49 |
| 76 | Sulawesi Barat | BPOM di Mamuju | 51,85 |
| **Average** | | | **70,95** |

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018 menggunakan Indeks Unit Pusat dan Indeks UPT berdasarkan pembobotan sebagai berikut :

| | Obat | Obat Tradisional | Suplemen Kesehatan | Kosmetik | Pangan Olahan | Indeks Total | Bobot | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Pusat | 76,53 | 66,62 | 67,10 | 71,83 | 75,98 | 73,18 | 0,4 | 29,27 |
| Indeks Balai | | | | | | 70,95 | 0,6 | 42,57 |
| NILAI IPOM 2018 | | | | | | | | 71,84 |



**IPOM 2018 71,84**

*Ringkasan Eksekutif*

# KAJIAN PENGUKURAN INDEKS KEPATUHAN (*COMPLIANCE INDEX*) PELAKU USAHA OBAT DAN MAKANAN DALAM MEMENUHI KETENTUAN BPOM TAHUN 2019

Pada Tahun 2019 Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan telah melakukan Pengukuran Indeks *(Compliance Index)* Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan BPOM. Data yang diukur adalah data hasil pemeriksaan/pengawasan sarana produksi, distribusi, pelayanan, penandaan dan periklanan Obat dan Makanan Tahun 2018 di seluruh provinsi (34 provinsi). Kajian ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM pada level Sasaran Strategis (SS2) yaitu meningkatnya kepatuhan dan kepuasan Pelaku Usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Kajian ini bertujuan untuk mengukur Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) Tahun 2019 di tingkat Provinsi dan Nasional yang akan dijadikan sebagai *baseline* data BPOM dan Pusat dan Balai Besar/Balai/ Loka POM dalam penentuan target indikator pada rencana strategis tahun 2020-2024.

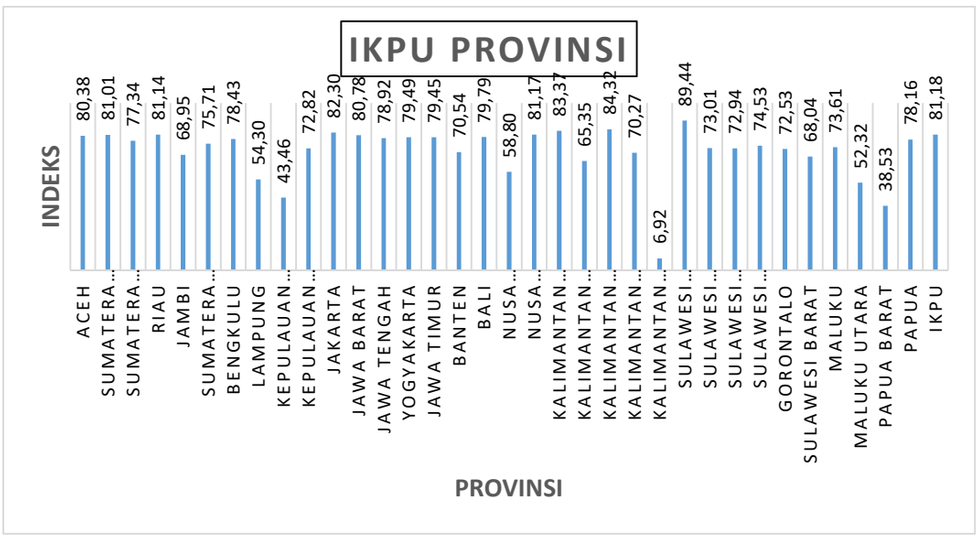
Indikator pembentuk indeks kepatuhan pelaku usaha terdiri dari data hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP); sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP); sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekusor yang memenuhi ketentuan; hasil pengawasan iklan dan penandaan Obat dan Makanan; dan indikator industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR). Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan skala pembobotan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang terdiri dari Obat 0.233; Obat Tradisional 0.187; Kosmetik 0.173; Suplemen Kesehatan 0.178; dan Pangan Olahan 0.230.

Indeks Kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) kedalam pengklasifikasian/*grading* menjadi A (Baik), B (Cukup) dan C (Kurang). Selanjutnya dihitung persentase masing-masing *grading* untuk dianalisis secara statistik *(Top one box atau Top two boxes)*. *Top one box* adalah (A/total x 100) dan *Top two boxes* adalah (A+B/total x 100). Hasil perhitungan indikator masing-masing komoditi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan selanjutnya dikalikan bobot AHP.

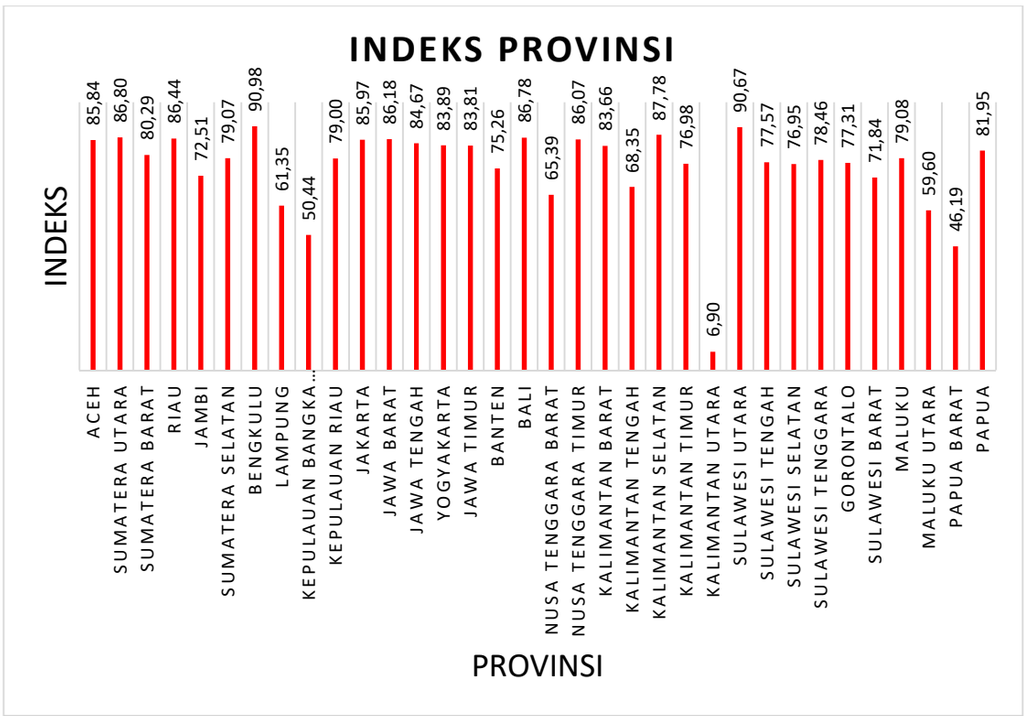
Hasil perhitungan indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan per Provinsi dan skala Nasional dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 1 dan 2 dibawah ini :

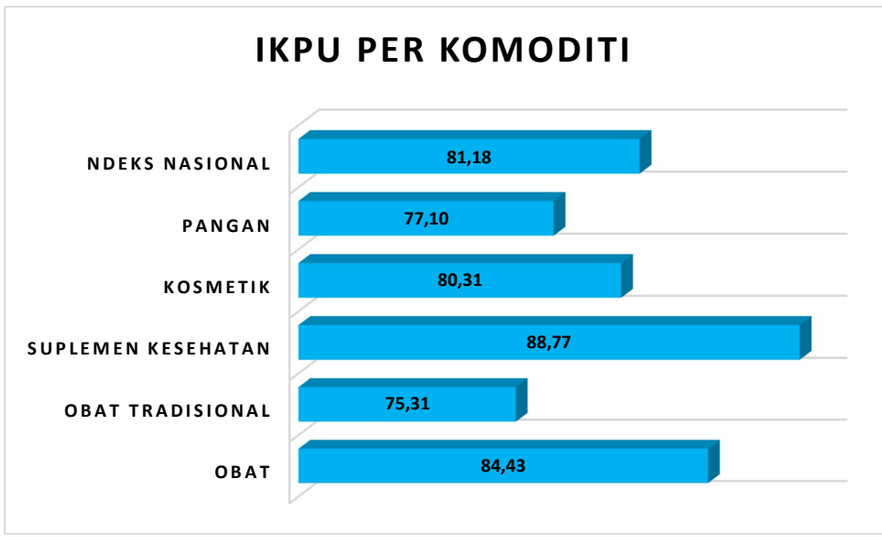
**Tabel 1. Data Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) Obat dan Makanan Skala Nasional dan Provinsi Tahun 2019 berdasarkan Komoditi :**

| NO | PROVINSI | IKPU |
|---|---|---|
| 1 | Aceh | 80.38 |
| 2 | Sumatera Utara | 81.01 |
| 3 | Sumatera Barat | 77.34 |
| 4 | Riau | 81.14 |
| 5 | Jambi | 68.95 |
| 6 | Sumatera Selatan | 75.71 |
| 7 | Bengkulu | 78.43 |
| 8 | Lampung | 54.30 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 43.46 |
| 10 | Kepulauan Riau | 72.82 |
| 11 | Jakarta | 82.30 |
| 12 | Jawa Barat | 80.78 |
| 13 | Jawa Tengah | 78.92 |
| 14 | Yogyakarta | 79.49 |
| 15 | Jawa Timur | 79.45 |
| 16 | Banten | 70.54 |
| 17 | Bali | 79.79 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 58.80 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 81.17 |
| 20 | Kalimantan Barat | 83.37 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 65.35 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 84.32 |
| 23 | Kalimantan Timur | 70.27 |
| 24 | Kalimantan Utara | 6.92 |
| 25 | Sulawesi Utara | 89.44 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 73.01 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 72.94 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 74.53 |
| 29 | Gorontalo | 72.53 |
| 30 | Sulawesi Barat | 68.04 |
| 31 | Maluku | 73.61 |
| 32 | Maluku Utara | 52.32 |
| 33 | Papua Barat | 38.53 |
| 34 | Papua | 78.16 |
|  | IKPU | 81.18 |




Gambar 1. Profil Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan per Provinsi






Gambar 2. Profil Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan Skala Nasional

| NO | KOMODITI | INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA (IKPU) |
|---|---|---|
| **1** | OBAT | **84.43** |
| **2** | OBAT TRADISIONAL | **75.31** |
| **3** | SUPLEMEN KESEHATAN | **88.77** |
| **4** | KOSMETIK | **80.31** |
| **5** | PANGAN OLAHAN | **77.10** |
| **IKPU SKALA NASIONAL TAHUN 2019** | | **81.18** |

**Keterangan:**

Sangat Baik: > 90 -100
Baik : > 66,67- 90
Cukup : >33,33-66,67
Kurang : 0 – 33,33

**Kesimpulan :**

- ✓ Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan skala Nasional yang merupakan IKU BPOM Tahun 2019 adalah 81.18 (Baik).
- ✓ Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan di 34 Provinsi menjadi Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar/Balai/Loka POM dengan indeks tertinggi dari provinsi Sulawesi Utara 89.44 ( Baik) dan terendah dari Papua Barat 38.53 (Cukup).
- ✓ Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan dengan 5 (lima) Provinsi tertinggi yaitu:
  1. Sulawesi Utara : 89.44 (Baik)
  2. Kalimantan Selatan : 84.32 (Baik)
  3. Kalimantan Barat : 83.37 (Baik)
  4. Jakarta : 82.30 (Baik)
  5. Nusa Tenggara Timur : 81.17 (Baik)

**Lampiran 2.**

*Ringkasan Eksekutif*

## KAJIAN PENGUKURAN TINGKAT KESADARAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019

Pada Tahun 2019 telah dilakukan Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan. Kajian ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM pada level Sasaran Stategis (SS1) yaitu terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Data yang diukur untuk mencapai Sasaran Strategis (SS1) tersebut, ditetapkan dua Indikator yaitu sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu yang akan dikonsumsi, dan yang kedua sejauh mana kinerja BPOM dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan jaminan terhadap Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu yang beredar di masyarakat.

Kajian ini bertujuan untuk mengukur nilai indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat pada skala Nasional, Regional, Provinsi dan Loka POM. Obat dan Makanan yang dimaksud dalam riset ini adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Makanan dalam kemasan. Design metodologi yang dipergunakan pada riset ini adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan Margin of Error 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak *(random*). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 34.870 DSRT yang tersebar di 34 propinsi dan kabupaten/kota serta 40 Loka POM diseluruh wilayah Indonesia. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing ) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan melakukan wawancara menggunakan *tools* kuesioner yang telah di-*install* di *smartphone* masing -masing enumerator.

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memimilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Sedangkan indikator pembentuk indeks kepuasan masyarakat terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles, realibility, responsiveness, assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu yang pertama indeks

kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*). Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*) , memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap **K**emasan baik, baca **L**abel, produk yang memiliki **I**zin edar dan produk yang tidak **K**adaluarsa. Sedangkan indeks kepuasan yang langsung dihitung berdasarkan konversi nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi BPOM dan kepuasan tidak langsung dihitung berdasarkan konversi nilai kepuasan masyarakat terhadap tugas dan kinerjanya BPOM dalam melakukan pengawasan, tindakan, memberikan perlindungan dan kepedulian terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Dari hasil Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan diperoleh Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Tahun 2019 skala Nasional adalah : **68.78**. Sedangkan nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

| No. | Produk | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | Obat | 73.84 |
| 2 | Obat Tradisional | 67.82 |
| 3 | Suplemen Kesehatan | 69.87 |
| 4 | Kosmetik | 63.52 |
| 5 | Pangan Olahan | 70.00 |

Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Tahun 2019 skala Propinsi diperoleh :

| No. | PROVINSI | INDEKS |
|---|---|---|
| 1 | Aceh | 69.04 |
| 2 | Sumatera Utara | 68.10 |
| 3 | Sumatera Barat | 67.18 |
| 4 | Riau | 70.59 |
| 5 | Jambi | 66.53 |
| 6 | Sumatera Selatan | 66.75 |
| 7 | Bengkulu | 67.95 |
| 8 | Lampung | 67.60 |

| No. | PROVINSI | INDEKS |
|---|---|---|
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 72.70 |
| 10 | Kep. Riau | 73.79 |
| 11 | DKI Jakarta | 72.38 |
| 12 | Jawa Barat | 67.52 |
| 13 | Jawa Tengah | 69.54 |
| 14 | Yogyakarta | 68.66 |
| 15 | Jawa Timur | 69.74 |
| 16 | Banten | 68.06 |
| 17 | Bali | 72.77 |
| 18 | NTB | 67.17 |
| 19 | NTT | 68.12 |
| 20 | Kalimantan Barat | 67.08 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 68.57 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 64.77 |
| 23 | Kalimantan Timur | 70.46 |
| 24 | Kalimantan Utara | 69.69 |
| 25 | Sulawesi Utara | 69.35 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 67.70 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 71.35 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 64.58 |
| 29 | Gorontalo | 66.59 |
| 30 | Sulawesi Barat | 66.00 |
| 31 | Maluku | 67.06 |
| 32 | Maluku Utara | 67.95 |
| 33 | Papua Barat | 70.34 |
| 34 | Papua | 69.02 |

Dari hasil Kajian Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan diperolah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Tahun 2019 terbagi 2 (dua) yaitu :

**a.** Nilai Indeks Kepuasan Langsung yaitu : sejauh mana masyarakat puas terhadap layanan Pengawasan Obat dan Makanan dengan menggunakan fasilitas Website dan media sosial BPOM skala Nasional yaitu : **66.73**

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Website dan media sosial BPOM Tahun 2019 skala Propinsi diperoleh hasil :

| No. | PROVINSI | INDEKS |
|---|---|---|
| 1 | Aceh | 66.89 |
| 2 | Sumatera Utara | 66.83 |
| 3 | Sumatera Barat | 66.86 |

**Hasil Analisis Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Tahun 2019**

## A. LATAR BELAKANG

Pada Tahun 2019 telah dilakukan Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan. Kajian ini untuk mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM pada level Sasaran Stategis (SS1) yaitu terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu**.** Pengukuran dilakukan terhadap dua Indikator yaitu tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu untuk dikonsumsi, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam memberikan jaminan terhadap Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu yang beredar di masyarakat.

Sasaran Stategis (SS1) yaitu terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu yang diaplikasikan pada Sasaran Strategi 4 (SS4) yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman. Dengan demikian dilakukan pengukuran terhadap Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan di 34 Provinsi di Indonesia.

Kajian ini bertujuan untuk mengukur nilai indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat pada skala Nasional, Regional, Provinsi dan Loka POM. Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (*random*). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan *tools* kuesioner yang telah di-*install* di *smartphone* enumerator.

## B. Kajian Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap **KLIK** yaitu **K**emasan yang baik, pembacaan **L**abel, pemilihan produk yang memiliki **I**zin edar dan produk yang tidak **K**adaluarsa.

Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat secara nasional berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, Sikap dan Perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat **68,78 (Cukup Baik)**. Hasil pengukuran nilai indeks masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan

Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat secara Nasional terhadap KLIK untuk seluruh komoditas secara umum berada dalam kategori **baik** dengan nilai indeks **75,06**. Dari hasil analisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap **KLIK** diketahui bahwa pengetahuan tentang kadaluwarsa menunjukkan prosentase tertinggi, diikuti oleh pengetahuan tentang label dan kemasan, yang terendah adalah pengetahuan nomor ijin edar.

Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat berdasarkan provinsi (Balai/Balai Besar) sebagai berikut.

Tabel 1. Indeks Pengetahuan Masyarakat di setiap Provinsi

| No. | PROVINSI | INDEKS | St. Dev: | n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 73.76 | 15.52 | 1350 |
| 2 | Sumatera Utara | 73.21 | 14.59 | 1630 |
| 3 | Sumatera Barat | 70.48 | 16.80 | 1720 |
| 4 | Riau | 76.21 | 15.95 | 1150 |
| 5 | Jambi | 71.72 | 17.79 | 1080 |
| 6 | Sumatera Selatan | 76.06 | 13.78 | 670 |
| 7 | Bengkulu | 72.03 | 18.82 | 970 |
| 8 | Lampung | 76.44 | 19.65 | 780 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 77.98 | 11.92 | 890 |
| 10 | Kep. Riau | 79.06 | 13.19 | 1460 |
| 11 | DKI Jakarta | 75.74 | 14.35 | 480 |
| 12 | Jawa Barat | 73.66 | 14.74 | 1210 |
| 13 | Jawa Tengah | 76.98 | 15.26 | 1300 |
| 14 | Yogyakarta | 75.98 | 11.79 | 460 |
| 15 | Jawa Timur | 77.93 | 14.54 | 1040 |
| 16 | Banten | 71.50 | 18.95 | 680 |
| 17 | Bali | 74.63 | 16.25 | 1340 |
| 18 | NTB | 73.76 | 13.96 | 590 |
| 19 | NTT | 76.68 | 14.74 | 1100 |
| 20 | Kalimantan Barat | 73.00 | 16.89 | 740 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 72.75 | 15.27 | 920 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 69.67 | 17.61 | 920 |
| 23 | Kalimantan Timur | 73.15 | 15.03 | 980 |
| 24 | Kalimantan Utara | 77.02 | 13.09 | 490 |
| 25 | Sulawesi Utara | 78.27 | 15.39 | 960 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 71.27 | 17.74 | 770 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 78.92 | 13.03 | 910 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 67.01 | 15.90 | 830 |
| 29 | Gorontalo | 70.83 | 11.49 | 290 |
| 30 | Sulawesi Barat | 65.53 | 15.14 | 490 |
| 31 | Maluku | 69.34 | 15.51 | 1110 |
| 32 | Maluku Utara | 71.71 | 16.49 | 1000 |
| 33 | Papua Barat | 75.58 | 14.86 | 1340 |
| 34 | Papua | 76.73 | 15.23 | 3220 |
| | **Nasional** | **75.06** | **15.54** | **34870** |

Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat berdasarkan Loka POM sebagai berikut.

Tabel 2. Indeks Pengetahuan Masyarakat di Setiap Loka BPOM

| No. | LOKA | INDEKS | St. Dev: | n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Baubau | 72.07 | 17.37 | 390 |
| 2 | Kab. Aceh Selatan | 74.67 | 14.92 | 529 |
| 3 | Kab. Aceh Tengah | 74.72 | 15.92 | 271 |
| 4 | Kab. Banggai | 72.84 | 13.05 | 340 |
| 5 | Kab. Banyumas | 78.08 | 13.43 | 383 |
| 6 | Kab. Belitung | 78.91 | 12.82 | 500 |
| 7 | Kab. Bima | 72.76 | 16.54 | 284 |
| 8 | Kab. Bogor | 70.59 | 14.49 | 500 |
| 9 | Kab. Buleleng | 74.07 | 15.02 | 642 |
| 10 | Kab. Dharmasraya | 69.42 | 14.12 | 541 |
| 11 | Kab. Ende | 72.12 | 16.96 | 299 |
| 12 | Kab. Hulu Sungai Utara | 72.33 | 22.14 | 330 |
| 13 | Kab. Indragiri Hilir | 66.52 | 11.57 | 270 |
| 14 | Kab. Jember | 80.04 | 14.56 | 341 |
| 15 | Kab. Kediri | 76.43 | 15.06 | 305 |
| 16 | Kab. Kepulauan Sangihe | 76.27 | 13.54 | 494 |
| 17 | Kab. Kotawaringin Barat | 73.51 | 15.35 | 507 |
| 18 | Kab. Maluku Tenggara Barat | 72.51 | 15.57 | 551 |
| 19 | Kab. Manggarai Barat | 77.70 | 14.72 | 381 |
| 20 | Kab. Merauke | 77.53 | 16.41 | 661 |
| 21 | Kab. Mimika | 75.45 | 13.50 | 1327 |
| 22 | Kab. Pulau Morotai | 73.35 | 14.73 | 540 |
| 23 | Kab. Rejang Lebong | 75.71 | 18.00 | 552 |
| 24 | Kab. Sanggau | 73.84 | 14.99 | 340 |
| 25 | Kab. Sorong | 75.57 | 16.28 | 682 |
| 26 | Kab. Tanah Bumbu | 71.20 | 13.68 | 270 |
| 27 | Kab. Tanggerang | 72.96 | 18.12 | 430 |
| 28 | Kab. Toba Samosir | 80.36 | 15.73 | 210 |
| 29 | Kab. Tulang Bawang | 80.69 | 14.52 | 360 |
| 30 | Kota Balikpapan | 73.34 | 15.68 | 390 |
| 31 | Kota Dumai | 79.99 | 16.61 | 470 |
| 32 | Kota Lubuklinggau | 73.57 | 11.95 | 332 |
| 33 | Kota Palopo | 71.64 | 11.59 | 510 |
| 34 | Kota Payakumbuh | 67.10 | 12.89 | 630 |
| 35 | Kota Sungai Penuh | 72.81 | 17.42 | 531 |
| 36 | Kota Surakarta | 80.74 | 13.68 | 544 |
| 37 | Kota Tanjungbalai | 77.10 | 15.84 | 27 |
| 38 | Kota Tanjungpinang | 76.17 | 14.21 | 711 |
| 39 | Kota Tarakan | 77.02 | 13.09 | 490 |
| 40 | Kota Tasikmalaya | 75.24 | 17.13 | 320 |

b. Sikap

Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Sikap Masyarakat secara Nasional terhadap KLIK untuk seluruh komoditas secara umum berada dalam kategori **baik** dengan nilai indeks **75,08**. Dari hasil analisis sikap masyarakat/responden terhadap **KLIK** menunjukkan bahwa sebagian besar sikap masyarakat menganggap penting semua komponen **KLIK** pada saat akan membeli/mengkonsumsi suatu produk.

Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Sikap Masyarakat berdasarkan provinsi (Balai/Balai Besar) sebagai berikut.

Tabel 3. Indeks Sikap Masyarakat di Setiap Provinsi

| No. | PROVINSI | INDEKS | St. Dev: | n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 76.76 | 13.65 | 1350 |
| 2 | Sumatera Utara | 73.85 | 13.11 | 1630 |
| 3 | Sumatera Barat | 74.75 | 12.21 | 1720 |
| 4 | Riau | 78.09 | 13.05 | 1150 |
| 5 | Jambi | 72.46 | 12.39 | 1080 |
| 6 | Sumatera Selatan | 68.92 | 8.22 | 670 |
| 7 | Bengkulu | 75.31 | 11.97 | 970 |
| 8 | Lampung | 73.60 | 13.38 | 780 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 84.05 | 14.57 | 890 |
| 10 | Kep. Riau | 81.56 | 15.56 | 1460 |
| 11 | DKI Jakarta | 83.05 | 10.82 | 480 |
| 12 | Jawa Barat | 74.09 | 13.44 | 1210 |
| 13 | Jawa Tengah | 74.50 | 12.25 | 1300 |
| 14 | Yogyakarta | 74.41 | 9.19 | 460 |
| 15 | Jawa Timur | 74.28 | 14.01 | 1040 |
| 16 | Banten | 77.02 | 14.04 | 680 |
| 17 | Bali | 81.41 | 17.17 | 1340 |
| 18 | NTB | 74.01 | 12.35 | 590 |
| 19 | NTT | 72.04 | 15.54 | 1100 |
| 20 | Kalimantan Barat | 73.88 | 12.58 | 740 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 76.62 | 13.88 | 920 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 71.01 | 11.45 | 920 |
| 23 | Kalimantan Timur | 80.80 | 13.76 | 980 |
| 24 | Kalimantan Utara | 76.25 | 14.53 | 490 |
| 25 | Sulawesi Utara | 74.86 | 12.00 | 960 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 76.14 | 13.36 | 770 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 77.77 | 13.25 | 910 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 71.85 | 12.74 | 830 |
| 29 | Gorontalo | 75.46 | 12.01 | 290 |
| 30 | Sulawesi Barat | 74.85 | 9.87 | 490 |
| 31 | Maluku | 73.96 | 11.64 | 1110 |
| 32 | Maluku Utara | 76.73 | 13.51 | 1000 |
| 33 | Papua Barat | 77.12 | 14.16 | 1340 |
| 34 | Papua | 76.64 | 15.28 | 3220 |
| | **Nasional** | **75.08** | **13.39** | **34870** |

Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Sikap Masyarakat berdasarkan Loka POM sebagai berikut.

Tabel 4. Indeks Sikap Masyarakat di Setiap Loka BPOM

| No. | LOKA | INDEKS | St. Dev: | n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baubau | 71.07 | 12.13 | 390 |
| 2 | Kab. Aceh Selatan | 66.47 | 6.69 | 529 |
| 3 | Kab. Aceh Tengah | 74.76 | 11.23 | 271 |
| 4 | Kab. Banggai | 75.73 | 12.22 | 340 |
| 5 | Kab. Banyumas | 74.70 | 12.51 | 383 |
| 6 | Kab. Belitung | 75.46 | 13.35 | 500 |
| 7 | Kab. Bima | 77.56 | 15.37 | 284 |
| 8 | Kab. Bogor | 74.74 | 11.84 | 500 |
| 9 | Kab. Buleleng | 78.93 | 14.92 | 642 |
| 10 | Kab. Dharmasraya | 71.81 | 11.63 | 541 |
| 11 | Kab. Ende | 76.53 | 15.18 | 299 |
| 12 | Kab. Hulu Sungai Utara | 70.36 | 8.78 | 330 |
| 13 | Kab. Indragiri Hilir | 70.22 | 7.96 | 270 |
| 14 | Kab. Jember | 71.85 | 15.06 | 341 |

| No. | LOKA | INDEKS | St. Dev: | n |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Kab. Kediri | 70.52 | 12.83 | 305 |
| 16 | Kab. Kepulauan Sangihe | 82.25 | 14.98 | 494 |
| 17 | Kab. Kotawaringin Barat | 75.85 | 16.07 | 507 |
| 18 | Kab. Maluku Tenggara Barat | 79.15 | 14.52 | 551 |
| 19 | Kab. Manggarai Barat | 74.55 | 16.98 | 381 |
| 20 | Kab. Merauke | 71.96 | 10.53 | 661 |
| 21 | Kab. Mimika | 72.48 | 13.17 | 1327 |
| 22 | Kab. Pulau Morotai | 75.03 | 13.50 | 540 |
| 23 | Kab. Rejang Lebong | 79.71 | 13.01 | 552 |
| 24 | Kab. Sanggau | 76.50 | 12.62 | 340 |
| 25 | Kab. Sorong | 77.04 | 13.76 | 682 |
| 26 | Kab. Tanah Bumbu | 70.62 | 9.68 | 270 |
| 27 | Kab. Tanggerang | 80.00 | 14.18 | 430 |
| 28 | Kab. Toba Samosir | 82.91 | 15.99 | 210 |
| 29 | Kab. Tulang Bawang | 68.15 | 16.11 | 360 |
| 30 | Kota Balikpapan | 82.32 | 13.70 | 390 |
| 31 | Kota Dumai | 80.54 | 14.94 | 470 |
| 32 | Kota Lubuklinggau | 69.15 | 8.95 | 332 |
| 33 | Kota Palopo | 71.66 | 12.69 | 510 |
| 34 | Kota Payakumbuh | 72.46 | 10.84 | 630 |
| 35 | Kota Sungai Penuh | 75.40 | 13.54 | 531 |
| 36 | Kota Surakarta | 75.12 | 11.89 | 544 |
| 37 | Kota Tanjungbalai | 73.38 | 10.62 | 27 |
| 38 | Kota Tanjungpinang | 78.38 | 14.45 | 711 |
| 39 | Kota Tarakan | 76.25 | 14.53 | 490 |
| 40 | Kota Tasikmalaya | 75.39 | 13.30 | 320 |

c. Perilaku

Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Perilaku Masyarakat secara Nasional terhadap KLIK untuk seluruh komoditas secara umum berada dalam kategori **kurang baik** dengan nilai indeks **56,20**. Dari hasil analisis perilaku masyarakat/responden tentang **KLIK** menunjukkan bahwa dalam membeli/mengkonsumsi Obat dan Makanan kurang baik dalam mencermati **KLIK.** Meskipun sudah **baik** dalam mencermati kondisi **K**adaluwarsa, **cukup baik** mencermati tanggal **L**abel namun **kurang baik** dalam mencermati informasi yang ada pada **K**emasan serta **tidak baik** dalam mencermati Nomor **I**jin Edar.

Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Perilaku Masyarakat berdasarkan provinsi (Balai/Balai Besar) sebagai berikut.

Tabel 5. Indeks Perilaku Masyarakat di Setiap Provinsi

| No. | PROVINSI | INDEKS | St. Dev: | n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 56.61 | 6.12 | 1350 |
| 2 | Sumatera Utara | 57.26 | 8.85 | 1630 |
| 3 | Sumatera Barat | 56.32 | 5.71 | 1720 |
| 4 | Riau | 57.47 | 9.34 | 1150 |
| 5 | Jambi | 55.42 | 10.06 | 1080 |
| 6 | Sumatera Selatan | 55.28 | 6.17 | 670 |
| 7 | Bengkulu | 56.49 | 9.01 | 970 |
| 8 | Lampung | 52.76 | 7.11 | 780 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 56.08 | 4.57 | 890 |
| 10 | Kep. Riau | 60.73 | 10.77 | 1460 |
| 11 | DKI Jakarta | 58.36 | 8.79 | 480 |
| 12 | Jawa Barat | 54.82 | 8.79 | 1210 |

| No. | PROVINSI | INDEKS | St. Dev: | n |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Jawa Tengah | 57.15 | 6.55 | 1300 |
| 14 | Yogyakarta | 55.59 | 7.86 | 460 |
| 15 | Jawa Timur | 57.01 | 7.34 | 1040 |
| 16 | Banten | 55.65 | 6.93 | 680 |
| 17 | Bali | 62.27 | 12.02 | 1340 |
| 18 | NTB | 53.74 | 5.94 | 590 |
| 19 | NTT | 55.65 | 8.96 | 1100 |
| 20 | Kalimantan Barat | 54.36 | 6.91 | 740 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 56.35 | 9.86 | 920 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 53.63 | 7.71 | 920 |
| 23 | Kalimantan Timur | 57.42 | 9.21 | 980 |
| 24 | Kalimantan Utara | 55.79 | 10.35 | 490 |
| 25 | Sulawesi Utara | 54.91 | 7.74 | 960 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 55.69 | 6.26 | 770 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 57.36 | 7.50 | 910 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 54.90 | 6.65 | 830 |
| 29 | Gorontalo | 53.48 | 7.98 | 290 |
| 30 | Sulawesi Barat | 57.63 | 7.52 | 490 |
| 31 | Maluku | 57.88 | 7.19 | 1110 |
| 32 | Maluku Utara | 55.41 | 9.29 | 1000 |
| 33 | Papua Barat | 58.33 | 10.76 | 1340 |
| 34 | Papua | 53.71 | 9.81 | 3220 |
| | **Nasional** | **56.20** | **8.09** | **34870** |

Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Perilaku Masyarakat berdasarkan provinsi Loka POM sebagai berikut.

Tabel 6. Indeks Perilaku Masyarakat di Setiap Loka BPOM

| No. | LOKA | INDEKS | St. Dev. | n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baubau | 53.82 | 7.18 | 390 |
| 2 | Kab. Aceh Selatan | 54.48 | 3.98 | 529 |
| 3 | Kab. Aceh Tengah | 54.97 | 6.22 | 271 |
| 4 | Kab. Banggai | 55.07 | 6.91 | 340 |
| 5 | Kab. Banyumas | 57.53 | 6.34 | 383 |
| 6 | Kab. Belitung | 56.30 | 4.98 | 500 |
| 7 | Kab. Bima | 55.70 | 5.69 | 284 |
| 8 | Kab. Bogor | 57.23 | 8.45 | 500 |
| 9 | Kab. Buleleng | 58.01 | 9.21 | 642 |
| 10 | Kab. Dharmasraya | 55.64 | 6.10 | 541 |
| 11 | Kab. Ende | 57.57 | 9.09 | 299 |
| 12 | Kab. Hulu Sungai Utara | 50.37 | 8.57 | 330 |
| 13 | Kab. Indragiri Hilir | 48.09 | 7.99 | 270 |
| 14 | Kab. Jember | 56.32 | 6.88 | 341 |
| 15 | Kab. Kediri | 54.67 | 6.61 | 305 |
| 16 | Kab. Kepulauan Sangihe | 57.33 | 9.66 | 494 |
| 17 | Kab. Kotawaringin Barat | 58.55 | 12.14 | 507 |
| 18 | Kab. Maluku Tenggara Barat | 57.63 | 4.91 | 551 |
| 19 | Kab. Manggarai Barat | 53.92 | 13.49 | 381 |
| 20 | Kab. Merauke | 56.39 | 9.08 | 661 |
| 21 | Kab. Mimika | 52.80 | 9.55 | 1327 |
| 22 | Kab. Pulau Morotai | 56.16 | 6.10 | 540 |
| 23 | Kab. Rejang Lebong | 56.08 | 8.10 | 552 |
| 24 | Kab. Sanggau | 55.45 | 7.85 | 340 |
| 25 | Kab. Sorong | 58.82 | 9.75 | 682 |
| 26 | Kab. Tanah Bumbu | 49.22 | 9.49 | 270 |
| 27 | Kab. Tanggerang | 55.03 | 7.28 | 430 |

| No. | LOKA | INDEKS | St. Dev. | n |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Kab. Toba Samosir | 58.35 | 10.54 | 210 |
| 29 | Kab. Tulang Bawang | 52.39 | 7.57 | 360 |
| 30 | Kota Balikpapan | 60.21 | 9.66 | 390 |
| 31 | Kota Dumai | 57.31 | 6.31 | 470 |
| 32 | Kota Lubuklinggau | 53.86 | 6.89 | 332 |
| 33 | Kota Palopo | 55.87 | 8.45 | 510 |
| 34 | Kota Payakumbuh | 55.74 | 6.82 | 630 |
| 35 | Kota Sungai Penuh | 57.42 | 6.07 | 531 |
| 36 | Kota Surakarta | 58.67 | 8.37 | 544 |
| 37 | Kota Tanjungbalai | 55.79 | 7.56 | 27 |
| 38 | Kota Tanjungpinang | 59.03 | 7.15 | 711 |
| 39 | Kota Tarakan | 55.79 | 10.35 | 490 |
| 40 | Kota Tasikmalaya | 56.24 | 8.64 | 320 |

## C. Kajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kepuasan masyarakat secara nasional berdasarkan 5 (lima) indikator pembentuk indeks yaitu *tangibles, reliability, responsiveness, assurance* dan *emphaty*, maka diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional **68,26** yang merupakan gabungan dari nilai indeks kepuasan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Indeks Kepuasan Langsung diukur menggunakan indikator *tangibles*, sedangkan Indeks Kepuasan Tidak Langsung menggunakan indikator *reliability, responsiveness, assurance* dan *emphaty.*

a. Indeks Kepuasan Langsung diukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Pengawasan Obat dan Makanan yang menggunakan fasilitas publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Pengukuran dilakukan terhadap kepuasan masyarakat dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi dan edukasi tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat oleh BPOM melalui fasilitas website BPOM, HALOBPOM-1500533, media massa dan penyuluhan.

   Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan BPOM (kepuasan masyarakat langsung) pada tahun 2019 sebesar **66,73** masuk dalam kategori “Cukup Puas”.

   Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan BPOM (kepuasan masyarakat langsung) pada tahun 2019 berdasarkan Provinsi (Balai/Balai POM) sebagai berikut.

Tabel 7. Indeks Kepuasan Masyarakat Langsung di setiap Provinsi

| No. | PROVINSI | INDEKS |
|---|---|---|
| 1 | Aceh | 66.89 |
| 2 | Sumatera Utara | 66.83 |
| 3 | Sumatera Barat | 66.86 |
| 4 | Riau | 66.17 |
| 5 | Jambi | 66.29 |
| 6 | Sumatera Selatan | 66.59 |
| 7 | Bengkulu | 66.71 |
| 8 | Lampung | 66.43 |

| No. | PROVINSI | INDEKS |
|---|---|---|
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 67.05 |
| 10 | Kep. Riau | 66.77 |
| 11 | DKI Jakarta | 66.88 |
| 12 | Jawa Barat | 66.70 |
| 13 | Jawa Tengah | 66.78 |
| 14 | Yogyakarta | 66.80 |
| 15 | Jawa Timur | 66.80 |
| 16 | Banten | 66.70 |
| 17 | Bali | 66.98 |
| 18 | NTB | 66.77 |
| 19 | NTT | 66.89 |
| 20 | Kalimantan Barat | 66.47 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 67.15 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 66.93 |
| 23 | Kalimantan Timur | 66.62 |
| 24 | Kalimantan Utara | 66.94 |
| 25 | Sulawesi Utara | 66.90 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 66.76 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 66.62 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 66.59 |
| 29 | Gorontalo | 66.96 |
| 30 | Sulawesi Barat | 65.83 |
| 31 | Maluku | 66.69 |
| 32 | Maluku Utara | 64.52 |
| 33 | Papua Barat | 67.14 |
| 34 | Papua | 66.95 |

Dari hasil survei Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan BPOM (kepuasan masyarakat langsung) pada tahun 2019 berdasarkan Loka POM sebagai berikut.

Tabel 8. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan BPOM di Setiap Loka BPOM

| No. | LOKA | INDEKS | St. Dev | n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baubau | 66.46 | 3.49 | 211 |
| 2 | Kab. Aceh Selatan | 66.53 | 1.12 | 509 |
| 3 | Kab. Aceh Tengah | 66.78 | 0.84 | 117 |
| 4 | Kab. Banggai | 66.89 | 1.90 | 301 |
| 5 | Kab. Banyumas | 66.68 | 3.08 | 215 |
| 6 | Kab. Belitung | 66.52 | 1.24 | 333 |
| 7 | Kab. Bima | 66.84 | 2.60 | 154 |
| 8 | Kab. Bogor | 66.86 | 2.34 | 278 |
| 9 | Kab. Buleleng | 66.62 | 3.19 | 262 |
| 10 | Kab. Dharmasraya | 66.93 | 2.70 | 347 |
| 11 | Kab. Ende | 67.17 | 3.51 | 209 |
| 12 | Kab. Hulu Sungai Utara | 66.82 | 1.19 | 120 |
| 13 | Kab. Indragiri Hilir | 66.42 | 0.32 | 217 |

| No. | LOKA | INDEKS | St. Dev | n |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Kab. Jember | 66.80 | 3.80 | 194 |
| 15 | Kab. Kediri | 66.78 | 2.05 | 168 |
| 16 | Kab. Kepulauan Sangihe | 66.95 | 3.01 | 337 |
| 17 | Kab. Kotawaringin Barat | 67.95 | 6.86 | 395 |
| 18 | Kab. Maluku Tenggara Barat | 68.54 | 3.16 | 68 |
| 19 | Kab. Manggarai Barat | 66.80 | 10.36 | 260 |
| 20 | Kab. Merauke | 66.80 | 4.31 | 333 |
| 21 | Kab. Mimika | 66.80 | 1.15 | 719 |
| 22 | Kab. Pulau Morotai | 67.94 | 6.53 | 301 |
| 23 | Kab. Rejang Lebong | 66.55 | 3.89 | 275 |
| 24 | Kab. Sanggau | 66.47 | 2.72 | 264 |
| 25 | Kab. Sorong | 66.82 | 0.96 | 343 |
| 26 | Kab. Tanah Bumbu | 67.07 | 0.85 | 212 |
| 27 | Kab. Tanggerang | 66.69 | 2.05 | 231 |
| 28 | Kab. Toba Samosir | 67.17 | 2.62 | 480 |
| 29 | Kab. Tulang Bawang | 66.81 | 0.41 | 296 |
| 30 | Kota Balikpapan | 66.93 | 2.86 | 294 |
| 31 | Kota Dumai | 66.73 | 0.58 | 326 |
| 32 | Kota Lubuklinggau | 66.64 | 0.67 | 281 |
| 33 | Kota Palopo | 66.47 | 1.61 | 220 |
| 34 | Kota Payakumbuh | 66.83 | 1.74 | 601 |
| 35 | Kota Sungai Penuh | 66.66 | 3.25 | 248 |
| 36 | Kota Surakarta | 66.43 | 3.49 | 409 |
| 37 | Kota Tanjungbalai | 66.63 | 1.71 | 297 |
| 38 | Kota Tanjungpinang | 66.75 | 3.13 | 631 |
| 39 | Kota Tarakan | 66.94 | 2.03 | 339 |
| 40 | Kota Tasikmalaya | 66.67 | 1.25 | 249 |

b. Indeks Kepuasan Tidak Langsung diukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap Obat dan Makanan yang tergambar dari kondisi Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Dimana indikator tidak langsung diukur menggunakan indikator pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat. Nilai Indeks Nasional untuk seluruh komoditas yang diperoleh dari hasil survei yaitu **69.78**.

   Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masing-masing komoditas adalah sebagai berikut:

   - Obat: 69,60
   - Obat Tradisional: 69,33
   - Suplemen Kesehatan: 70,74
   - Kosmetik: 69,61
   - Pangan Olahan: 69,35

Dari hasil survei Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas atas Jaminan Pengawasan BPOM (kepuasan masyarakat tidak langsung) pada tahun 2019 berdasarkan Provinsi (Balai/Balai POM) sebagai berikut.

Tabel 9. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Pengawasan BPOM di Setiap Provinsi

| No. | PROVINSI | INDEKS | Std. Deviation | n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 72.36 | 7.81 | 1350 |
| 2 | Sumut | 69.76 | 11.75 | 1630 |
| 3 | Sumbar | 72.18 | 7.22 | 1720 |
| 4 | Riau | 68.79 | 11.91 | 1150 |
| 5 | Jambi | 70.40 | 8.82 | 1080 |
| 6 | Sumsel | 69.36 | 8.13 | 670 |
| 7 | Bengkulu | 69.62 | 12.44 | 970 |
| 8 | Lampung | 69.41 | 12.27 | 780 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 74.29 | 10.26 | 890 |
| 10 | Kep. Riau | 70.67 | 7.26 | 1460 |
| 11 | Dki Jakarta | 71.74 | 9.66 | 480 |
| 12 | Jabar | 70.40 | 11.08 | 1210 |
| 13 | Jateng | 68.16 | 10.01 | 1300 |
| 14 | Jogja | 69.77 | 12.73 | 460 |
| 15 | Jatim | 69.75 | 10.38 | 1040 |
| 16 | Banten | 71.77 | 7.88 | 680 |
| 17 | Bali | 72.75 | 10.71 | 1340 |
| 18 | Ntb | 69.48 | 6.59 | 590 |
| 19 | Ntt | 68.11 | 12.72 | 1100 |
| 20 | Kalbar | 65.67 | 14.37 | 740 |
| 21 | Kalteng | 72.75 | 12.05 | 920 |
| 22 | Kalsel | 70.88 | 7.17 | 920 |
| 23 | Kaltim | 70.94 | 11.36 | 980 |
| 24 | Kaltara | 73.87 | 11.71 | 490 |
| 25 | Sulut | 70.89 | 8.75 | 960 |
| 26 | Sulteng | 67.43 | 12.23 | 770 |
| 27 | Sulsel | 66.01 | 11.32 | 910 |
| 28 | Sultra | 66.63 | 11.72 | 830 |
| 29 | Gorontalo | 74.63 | 9.03 | 290 |
| 30 | Sulbar | 71.15 | 7.20 | 490 |
| 31 | Maluku | 63.20 | 17.28 | 1110 |
| 32 | Maluku Utara | 66.43 | 15.63 | 1000 |
| 33 | Papua Barat | 67.24 | 13.63 | 1340 |
| 34 | Papua | 71.00 | 12.34 | 3220 |
| | **Nasional** | **69.78** | **10.70** | **34870** |

Dari hasil survei Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas atas Jaminan Pengawasan BPOM (kepuasan masyarakat tidak langsung) pada tahun 2019 berdasarkan Loka POM sebagai berikut.

Tabel 10. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Pengawasan BPOM di Setiap Loka BPOM

| No. | LOKA | INDEKS | Std. Deviation | n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Baubau | 61.47 | 12.98 | 389 |
| 2 | Kab. Aceh Selatan | 68.76 | 4.23 | 529 |
| 3 | Kab. Aceh Tengah | 67.21 | 7.81 | 270 |
| 4 | Kab. Banggai | 65.86 | 14.90 | 338 |
| 5 | Kab. Banyumas | 68.04 | 10.90 | 383 |
| 6 | Kab. Belitung | 66.70 | 8.21 | 500 |
| 7 | Kab. Bima | 67.98 | 10.76 | 284 |
| 8 | Kab. Bogor | 69.04 | 11.22 | 500 |
| 9 | Kab. Buleleng | 69.98 | 9.35 | 642 |
| 10 | Kab. Dharmasraya | 71.26 | 5.38 | 541 |
| 11 | Kab. Ende | 70.55 | 5.69 | 299 |
| 12 | Kab. Hulu Sungai Utara | 70.76 | 7.74 | 330 |
| 13 | Kab. Indragiri Hilir | 62.91 | 6.82 | 270 |
| 14 | Kab. Jember | 69.47 | 8.43 | 341 |
| 15 | Kab. Kediri | 70.40 | 10.69 | 305 |
| 16 | Kab. Kepulauan Sangihe | 73.77 | 10.05 | 494 |
| 17 | Kab. Kotawaringin Barat | 69.89 | 13.45 | 506 |
| 18 | Kab. Maluku Tenggara Barat | 75.30 | 11.19 | 551 |
| 19 | Kab. Manggarai Barat | 68.08 | 17.50 | 381 |
| 20 | Kab. Merauke | 70.53 | 8.48 | 659 |
| 21 | Kab. Mimika | 68.73 | 10.82 | 1327 |
| 22 | Kab. Pulau Morotai | 69.57 | 10.40 | 538 |
| 23 | Kab. Rejang Lebong | 69.48 | 13.81 | 552 |
| 24 | Kab. Sanggau | 65.14 | 16.63 | 340 |
| 25 | Kab. Sorong | 66.94 | 12.01 | 680 |
| 26 | Kab. Tanah Bumbu | 72.89 | 6.05 | 270 |
| 27 | Kab. Tanggerang | 72.15 | 4.86 | 430 |
| 28 | Kab. Toba Samosir | 72.58 | 12.50 | 208 |
| 29 | Kab. Tulang Bawang | 70.26 | 9.80 | 360 |
| 30 | Kota Balikpapan | 74.09 | 8.29 | 390 |
| 31 | Kota Dumai | 68.24 | 10.53 | 470 |
| 32 | Kota Lubuklinggau | 68.83 | 8.79 | 332 |
| 33 | Kota Palopo | 64.43 | 14.24 | 510 |
| 34 | Kota Payakumbuh | 70.68 | 6.98 | 630 |
| 35 | Kota Sungai Penuh | 70.34 | 6.45 | 531 |
| 36 | Kota Surakarta | 67.57 | 11.01 | 544 |
| 37 | Kota Tanjungbalai | 68.88 | 12.85 | 27 |
| 38 | Kota Tanjungpinang | 71.92 | 8.79 | 711 |
| 39 | Kota Tarakan | 73.87 | 11.71 | 489 |
| 40 | Kota Tasikmalaya | 69.68 | 12.10 | 320 |

Pengkategorian Indeks Kesadaran Masyarakat (Pengetahuan, Sikap dan Perilaku) dan Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil sebaran data survei di masyarakat, yaitu:

| Kategori | Interval Indeks |
|---|---|
| Tidak Baik | < 45 |
| Kurang Baik | 45 - 60 |
| Cukup Baik | 60.01 - 75 |
| Baik | 75.01 - 90 |
| Sangat Baik | > 90 |

## D. Informasi Pendukung

Dari hasil survei ini diperoleh juga informasi mengenai:

a. Media informasi yang diakses oleh masyarakat untuk mengetahui informasi terkait keamanan dan mutu produk Obat dan Makanan (*Multiple Answer*):
   - Televisi 57,23%
   - Sosial Media 15,66%
   - Pasar 7,59%
   - Dokter/Klinik 13,04%
   - Lain-lain (Toko Online, Rekomendasi Teman, dll) 14.74%
   - Tidak Tahu 19,68%

b. Media informasi yang diakses oleh masyarakat untuk mengetahui informasi tentang BPOM:
   - Televisi 79,74%
   - Sosial Media 16,82%
   - Penyuluhan BPOM 1.96%
   - Website BPOM 0,75%
   - HALOBPOM 1500533 0,78% (13% dari 6,11% yang tahu HALOBPOM)

## E. Kesimpulan dan Pembahasan

Dari hasil pelaksanaan survei ini dapat disimpulkan:

a. Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat secara nasional berdasarkan 3 (tiga) Indikator (Pengetahuan, Sikap dan Perilaku) terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat **68,78**. Dengan rincian :
   Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat 75,06 (baik), Nilai Indeks Sikap Masyarakat 75,08 (baik) dan Nilai Indeks Perilaku Masyarakat 56,20 (kurang baik).
   Secara umum Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat dan Sikap Masyarakat sudah cukup baik namun tidak diikuti oleh Perilaku Masyarakat terutama dalam mencermati Nomor Ijin Edar (**tidak baik**).

b. Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kepuasan masyarakat secara nasional berdasarkan 5 (lima) indikator pembentuk indeks yaitu *tangibles, reliability, responsiveness, assurance* dan *emphaty*, maka diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat secara Nasional **68,26** (**Cukup Puas**) yang merupakan gabungan dari nilai indeks kepuasan masyarakat secara langsung (66,73) maupun tidak langsung (69.78).
   Nilai Indeks kepuasan masyarakat secara langsung menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap layanan langsung BPOM yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dan Nilai Indeks kepuasan masyarakat secara tidak langsung

menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kondisi Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat yang merupakan tolok ukur penilaian kinerja BPOM.

## F. Rekomendasi:

1. Dari hasil survei dapat diketahui bahwa pengetahuan dan perilaku masyarakat terhadap Nomor Ijin Edar masuk dalam kategori "**tidak baik**", sehingga dalam melakukan KIE perlu penekanan pada komponen perilaku dalam mencermati Nomor Ijin Edar yang merupakan bagian dari KLIK.
2. Perlu ditinjau ulang terhadap cara penulisan informasi dalam label terutama Nomor Ijin Edar agar terlihat lebih jelas pada kemasan sehingga mudah untuk dibaca masyarakat.
3. Televisi merupakan media yang paling efektif dalam melakukan KIE sekaligus memperkenalkan BPOM kepada masyarakat.
4. Perlu peningkatan sosialisasi website BPOM, HALOBPOM dan media sosial lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.



Balai POM di Palu

bpom_palu





@bpom_palu

Balai Pom Palu



**Balai POM di Palu**

Jl. Undata No. 03
Palu – Sulteng 94111
Telp (0451) 428738 – 423088.
Fax (0451) 423088,
ulpk_palu@yahoo.co.id